

## Bagian 7.8: Pelanggaran Hak Anak

|   |     |
|---|-----|
| <a href="#">Bagian 7.8: Pelanggaran Hak Anak</a> .....  | 1   |
| <a href="#">Bagian 7.8: Pelanggaran Hak Anak</a> .....  | 2   |
| <a href="#">7.8.1. Pendahuluan</a> .....  | 2   |
| <a href="#">7.8.2. Anak-anak dalam konflik politik bersenjata dan gerakan klandestin</a> .....              | 6   |
| <a href="#">7.8.2.1. Anak-anak sebagai TBO dan keikutsertaan dalam operasi</a> .....                        | 7   |
| <a href="#">7.8.2.2. Anak-anak yang direkrut milisi pro-otonomi</a> .....                                   | 22  |
| <a href="#">7.8.2.3. Anak-anak dalam jaringan klandestin</a> .....  | 28  |
| <a href="#">7.8.2.4. Anak-anak dalam Falintil</a> .....   | 37  |
| <a href="#">7.8.3. Penahanan sewenang-wenang, pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap anak-anak</a> ..... | 46  |
| <a href="#">7.8.3.1. Penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang</a> .....                                     | 46  |
| <a href="#">7.8.3.2. Pembunuhan dan penghilangan</a> .....  | 60  |
| <a href="#">7.8.3.3. Kekerasan seksual</a> .....  | 72  |
| <a href="#">7.8.4. Pemindahan anak-anak ke Indonesia</a> .....  | 83  |
| <a href="#">7.8.4.1. Jumlah anak-anak yang dipindahkan ke Indonesia</a> .....                               | 84  |
| <a href="#">7.8.4.2. Pola selama periode mandat</a> .....   | 86  |
| <a href="#">7.8.4.3. Kondisi anak-anak yang tinggal di Indonesia</a> .....                                  | 102 |
| <a href="#">7.8.5. Kesimpulan dan temuan</a> .....  | 107 |
| <a href="#">7.8.5.1. Anak-anak dalam konflik bersenjata dan gerakan klandestin</a> .....                    | 107 |

## Bagian 7.8: Pelanggaran Hak Anak

### 7.8.1. Pendahuluan

1. Anak-anak di Timor-Leste mengalami segala jenis pelanggaran hak asasi manusia selama periode mandat Komisi, 25 April 1974-25 Oktober 1999. Penelitian Komisi telah mengungkapkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik politik di Timor-Leste melakukan pelanggaran terhadap anak-anak. Sebagian sangat besar pelanggaran tersebut dilakukan oleh militer Indonesia dan pasukan pembantunya. Mereka melakukan pembunuhan, pelanggaran seksual, penahanan dan penyiksaan, pemindahan paksa dan perekrutan paksa terhadap anak-anak.

2. Dalam beberapa hal, apa yang dialami oleh anak-anak, sama dengan yang dialami orang Timor pada umumnya; mereka menderita karena semua pihak tidak membedakan penduduk sipil dengan penempur. Akibatnya anak-anak tidak dikecualikan ketika terjadi pembantaian massal atau terperangkap bersama keluarganya di garis tembak-menembak ketika terjadi operasi militer. Data yang dikumpulkan oleh Komisi melalui proses pengambilan pernyataan menunjukkan bahwa anak-anak mengalami pelanggaran paling banyak sepanjang tahun 1976-1981 dan 1999 yang kurang-lebih mencerminkan pola pelanggaran yang dialami penduduk seluruhnya.

3. Lebih jauh, cara-cara pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak seringkali sama dengan yang dilakukan terhadap orang dewasa. Kecuali dalam hal usia korban, isi berbagai laporan kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dikemukakan berikut ini hampir tidak berbeda dengan yang diuraikan dalam bab mengenai kekerasan seksual. Laporan-laporan ini menggambarkan tentang:

- pemerkosaan dan perbudakan seksual di kamp-kamp penampungan;
- kekerasan seksual pengganti yang ditujukan pada anggota keluarga yang masih di hutan;
- pelanggaran terhadap anak-anak yang terlibat dalam kegiatan klandestin yang dapat berubah menjadi eksploitasi seksual yang berkepanjangan; dan
- penggunaan strategis kekerasan seksual sebagai satu bentuk penyiksaan dan dilakukannya hal ini dengan memanfaatkan kesempatan.

4. Untuk anak-anak, sebagaimana yang terjadi pada orang dewasa, kekerasan seksual dilakukan dengan terbuka tanpa mengkhawatirkan adanya sanksi oleh semua tingkatan militer dan paramiliter di Timor-Leste serta oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai pihak berwenang sipil seperti para kepala desa.

5. Yang lebih mengaburkan perbedaan pengalaman antara orang dewasa dan anak-anak adalah kenyataan bahwa orang Timor-Leste mempunyai pemahaman yang lebih longgar mengenai masa kanak-kanak dibandingkan definisi internasional yang jelas. Mengikuti berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak, Komisi mengadopsi definisi bahwa anak-anak adalah orang yang berusia 17 tahun atau di bawahnya.

---

<sup>1</sup> Di Timor-Leste, anak-anak dimengerti sebagai orang yang belum menikah. Oleh karena itu orang yang berusia di bawah 18 tahun yang sudah menikah dianggap sebagai orang dewasa dan orang yang belum menikah dan berusia lebih dari 17 tahun dapat dianggap sebagai anak-anak. Konflik itu sendiri menciptakan kerumitan lebih jauh: misalnya, anak-anak seumur 15 tahun menduduki posisi yang berwenang dalam Falintil dan diperlakukan sebagai orang dewasa; karena kekacauan yang disebabkan oleh perang, banyak pelajar sekolah menengah yang berusia 18 tahun ke atas.

6. Kalau demikian, mengapa anak-anak dibahas secara khusus dalam Laporan ini?
7. Pertama, pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak dikecam secara universal. Jadi, harapan bahwa semua pihak akan memperlakukan mereka dengan lebih hormat dibandingkan dengan orang dewasa, menjadikan pelanggaran terhadap anak-anak dalam skala apapun menjadi sangat mengejutkan. Perasaan bahwa pelanggaran terhadap anak-anak sungguh mengejutkan bersumber dari pemahaman bahwa anak-anak sebagai suatu kelompok adalah murni dan bahwa kemurnian anak-anak harus dilindungi dari kejahatan dunia orang dewasa sebisa mungkin.
8. Kedua, jelas bahwa anak-anak adalah salah satu kelompok paling rentan dalam masyarakat, khususnya dalam situasi konflik dan kekacauan sebagaimana yang dialami Timor-Leste selama 25 tahun mandat Komisi. Seperti diuraikan dalam Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan, anak-anak termasuk dalam orang-orang yang dipindahkan dari rumah mereka setelah terjadinya invasi, seringkali selama bertahun-tahun lamanya dan merupakan korban utama kelaparan dan penyakit. Banyak lainnya tanpa ada anggota keluarga yang mendukung dan karenanya rentan terhadap penganiayaan, penculikan atau perekrutan paksa. Misalnya, penggunaan anak-anak sebagai TBO (Tenaga Bantuan Operasi) membahayakan nyawa, kesehatan dan masa depan mereka. Kelemahan relatif badan mereka berarti bahwa beban berat yang diharuskan mereka bawa semakin melemahkan kesehatan mereka. Masa tugas yang dapat berlangsung selama beberapa tahun menghapuskan kesempatan mereka memperoleh pendidikan.
9. Kedudukan khusus anak-anak di Timor-Leste tidak hanya berasal dari pengakuan universal atas keunikan status mereka. Hal ini juga bersumber pada kenyataan bahwa anak-anak adalah perwujudan masa depan. Kedua belah pihak dalam konflik berusaha menanamkan kesetiaan kepada perjuangan mereka di kalangan anak-anak pada usia dini. Militer Indonesia secara aktif melibatkan anak-anak ke dalam militer dan paramiliter melalui penggunaan mereka sebagai TBO dan milisi. Beberapa di antaranya menanjak melalui berbagai posisi menjadi pemimpin milisi utama. Sebagaimana dikemukakan dalam Bab 7.9: Hak Sosial dan Ekonomi, Indonesia dengan terbuka menggunakan sistem pendidikan untuk mempropagandakan mengenai integrasi dan negara Indonesia kepada anak-anak sejak masa awal pendudukan. Pihak Perlawanan melibatkan anak-anak utamanya dengan melibatkan mereka dalam peran-peran kecil seperti sebagai kurir dan penjaga. Bagaimanapun, sebagaimana ditunjukkan kisah-kisah berikut ini, hal itu memungkinkan mereka naik tingkat dalam gerakan bawah tanah. Ada alasan praktis untuk melibatkan anak-anak juga: bagi tentara Indonesia anak-anak lebih mudah ditundukkan atau dipengaruhi daripada orang dewasa. Bagi pihak Perlawanan, anak-anak mempunyai keuntungan jarang dicurigai pihak yang berwenang dan ada jaringan gereja serta masyarakat yang dapat digunakan untuk perjuangan.
10. Karena kerentanan khusus anak-anak, Komisi percaya bahwa trauma meluas di kalangan orang Timor-Leste yang dibesarkan di masa pendudukan Indonesia. Ada bukti-bukti bahwa trauma kemungkinan sangat banyak terjadi pada mereka yang direkrut sebagai milisi anak-anak pada 1998-1999. Dalam kasus mereka, trauma bukan hanya terkait dengan kekerasan luar biasa yang dialami, tetapi juga karena dampak kejiwaan perekrutan paksa, loyalitas yang terpecah dan rasa malu karena berada di pihak yang salah. Yang disampaikan berikut ini merupakan kasus anak-anak lain yang menjadi sasaran tekanan-tekanan yang serupa. Misalnya, anak-anak dijadikan TBO sering kali karena mereka atau keluarga mereka dicurigai mempunyai hubungan dengan gerakan kemerdekaan. Terdapat ketimpangan yang luar biasa dalam hal kekuatan dan sumber daya antara yang melakukan pendudukan dan yang diduduki. Sama halnya dengan seluruh penduduk, batas antara pemaksaan dan kepatuhan tidak pernah jelas. Perlunya menyeimbangkan tekanan yang datang dari berbagai arah ini menempatkan anak-anak dalam risiko dinamakan "kepala dua" (bahasa Indonesia) atau *ulun rua* (bahasa Tetun) oleh kedua belah pihak. Tanggapan anak-anak terhadap berbagai tekanan ini dapat berubah sejalan dengan perubahan waktu sebagai akibat siksaan, ajakan atau pengalaman pertempuran.

11. Ketiga, anak-anak Timor-Leste mengalami penganiayaan khusus yang berbeda dengan penganiayaan yang dilakukan terhadap penduduk umumnya. Khususnya, hanya anak-anak, dalam jumlah ribuan, yang dipindahkan secara paksa ke Indonesia, yang berlawanan dengan keinginan orang tua dan karenanya tindakan ini adalah penculikan. Tidak jelas apakah tindakan ini sudah diresmikan dalam suatu kebijakan. Namun, ada banyak bukti bahwa para pejabat tinggi, baik militer maupun sipil, tidak mengatur hal ini dan kadang-kadang mereka sendiri terlibat di dalamnya. Walaupun ketika pemindahan tersebut sebagian didorong oleh rasa kemanusiaan atau dilakukan dengan izin orang tua anak-anak tersebut, sedikit sekali upaya dilakukan untuk memastikan agar anak-anak ini tetap dapat berhubungan dengan keluarga mereka. Mereka tidak dapat bebas memilih untuk kembali atau tidak kembali ke Timor Leste dan tidak diperbolehkan untuk mempertahankan identitas budaya mereka. Dalam beberapa kasus semua hal semacam ini memang dihambat.

12. Seperti kaum perempuan, anak-anak sering diperlakukan bagaikan barang milik. Misalnya, sebagai TBO, mereka tidak secara teratur dibayar atas jasa yang mereka berikan. Mereka diwajibkan mengangkut barang berat. Mereka dapat dibawa pulang ke Indonesia oleh prajurit tentara yang telah merekrut mereka atau menyerahkan mereka kepada prajurit lain. Dengan begitu ikatan mereka dengan keluarga dan status khususnya sebagai anak-anak sangat diabaikan.

13. Keempat, status khusus anak-anak diakui hukum internasional dan sebagian besar sistem hukum setempat, termasuk hukum Indonesia. Sebagian besar sistem hukum memberikan pertimbangan khusus pada kebutuhan anak-anak. Sementara dalam situasi konflik bersenjata dan pendudukan, hukum internasional memberikan perlindungan kepada anak-anak yang tidak sama dengan penduduk pada umumnya.

14. Beberapa ketentuan hukum internasional yang relevan berlaku sama untuk semua golongan penduduk. Sebagai contoh, memaksa penduduk sipil untuk turut serta dalam operasi militer, melawan negeri mereka sendiri dilarang oleh hukum humaniter<sup>1</sup> dan juga merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa IV.<sup>2</sup> Hukum hak asasi manusia menjamin hak orang dewasa maupun anak-anak, termasuk hak hidup, hak memperoleh makanan serta hak bebas dari penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang. Juga terdapat banyak sekali standar internasional yang mengatur bagaimana anak-anak harus diperlakukan oleh negara, baik dalam situasi konflik bersenjata maupun dalam masa damai.

15. Berdasarkan Konvensi Jenewa IV, Indonesia mempunyai kewajiban terhadap anak-anak Timor Leste selama konflik. Indonesia diwajibkan untuk:

1. mengupayakan pemindahan anak-anak dari wilayah konflik;<sup>3</sup>
2. memastikan bahwa jika perlu diadakan evakuasi atau pemindahan penduduk di dalam wilayah pendudukan, anggota dari keluarga yang sama tidak boleh dipisahkan;<sup>4</sup>
3. melakukan tindakan perawatan anak-anak di bawah usia 15 tahun yang menjadi yatim piatu atau terpisah dari orang tua mereka;<sup>5</sup>
4. melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengidentifikasi anak-anak dan mendaftarkan orang tua mereka.<sup>6</sup>
5. memfasilitasi bekerjanya lembaga-lembaga secara layak untuk kesejahteraan dan pendidikan anak-anak;<sup>7</sup> dan
6. tidak mengubah status pribadi anak-anak atau mendaftarkan mereka dalam organisasi-organisasi Indonesia.<sup>8</sup>

16. Dengan meratifikasikan Konvensi Hak Anak pada bulan September 1990, Indonesia menerima kewajiban-kewajiban yang ditetapkan hukum hak asasi manusia internasional mengenai anak-anak di Timor-Leste termasuk untuk:

7. memberikan prioritas pada kebutuhan anak-anak ketika mengambil keputusan yang berhubungan dengan anak-anak;<sup>9</sup>
8. melindungi anak-anak dari kerusakan fisik dan mental, eksploitasi dan penganiayaan seksual dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya;<sup>10</sup>
9. menjamin anak-anak dengan standar kehidupan yang layak sesuai dengan perkembangan fisik, mental, spiritual dan social;<sup>11</sup>
10. mengatur proses adopsi dan menjamin bahwa adopsi ditangani oleh otoritas yang berkemampuan sesuai dengan hukum yang berlaku;<sup>12</sup>
11. memerangi pemindahan secara tidak sah anak-anak ke luar negeri dan penculikan, penjualan atau perdagangan anak-anak;<sup>13</sup>
12. menyediakan pelayanan khusus bagi anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka, dengan mempertimbangan latar belakang budaya mereka;<sup>14</sup>
13. melakukan tindakan-tindakan untuk mempromosikan pemulihan kejiwaan dan jasmani serta reintegrasi sosial anak-anak yang menjadi korban konflik dan penganiayaan.<sup>15</sup>

17. Hukum dalam negeri Indonesia juga berisi ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan untuk melindungi anak-anak. Jadi, selain larangan umum untuk penculikan (Pasal 328) dan perampasan kebebasan pribadi (Pasal 333), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara khusus juga mempidanakan tindakan mengambil anak yang belum cukup umur dari orang yang mempunyai wewenang yang sah atas anak tersebut, hukuman penjara untuk tindakan ini lebih berat apabila digunakan tipu-muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 330).

### **Metode Penelitian**

18. Komisi telah mengumpulkan bahan dari berbagai sumber untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak.

19. Melalui proses pencarian kebenaran yang mengambil pernyataan dari masyarakat dan dimasukkan ke dalam basis data, diidentifikasi seluruhnya 2.991 korban yang berusia di bawah 18 tahun. Jumlah ini adalah 3,4% dari seluruh jumlah korban yang dilaporkan kepada Komisi melalui proses pengambilan pernyataan. Akan tetapi angka ini tidak mencerminkan proporsi korban anak-anak di Timor-Leste karena pada 73,3% kasus, usia korban tidak disebutkan. Hal ini karena banyak pemberi pernyataan tidak mengetahui usia korban, terutama jika korbannya bukan anggota keluarga dekat. Dalam kasus-kasus yang lain, pemberi pernyataan tidak dapat mengingat usia korban ketika pelanggaran terjadi jauh sebelumnya. Lagi pula, proses pengambilan pernyataan itu sendiri berfokus pada segi naratif dari pada rincian biografis.

20. Komisi juga melakukan lebih dari 100 wawancara dengan orang-orang yang mengalami pelanggaran sebagai anak-anak atau yang mengetahui tentang perlakuan terhadap anak-anak pada masa pendudukan. Ini menjadi khususnya penting dalam penyelidikan Komisi mengenai anak-anak yang dibawa ke Indonesia, yang merupakan jenis pelanggaran yang tidak dimasukkan dalam proses pencarian kebenaran statistik yang dilakukan oleh Komisi. Komisi juga menyelenggarakan 257 lokakarya Profil Komunitas di seluruh negeri, yang menyediakan informasi tambahan tentang anak-anak. Rincian pelanggaran hak asasi manusia di setiap komunitas termasuk yang dialami oleh anak-anak disampaikan dalam lokakarya-lokakarya ini.

21. Pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada unit rekonsiliasi komunitas Komisi oleh para pelaku pelanggaran ringan memberi konteks pada penelitian mengenai anak-anak yang terlibat dalam milisi pro-otonomi. Akan tetapi, tujuan dari pernyataan-pernyataan ini adalah memfasilitasi kembalinya pelaku ke komunitas dan bukan pencarian kebenaran, sehingga tidak memberikan informasi yang rinci tentang topik-topik yang dibahas dalam bab ini.

## 7.8.2. Anak-anak dalam konflik politik bersenjata dan gerakan klandestin

22. Salah satu cara yang paling langsung melibatkan anak-anak di dalam konflik bersenjata adalah dengan memaksa mereka bergabung dalam angkatan bersenjata atau terlibat dalam berbagai kegiatan militer yang terkait. Karena secara fisik rentan, lebih mudah dipengaruhi dan lebih mudah dikendalikan dibandingkan orang dewasa, anak-anak bisa menjadi sumber dukungan yang berharga dalam operasi militer. Tetapi, kerugiannya baik bagi anak-anak maupun masyarakat pada umumnya, sangat tinggi. Anak-anak kehilangan statusnya sebagai orang sipil dalam konflik bersenjata dan dengan demikian kehilangan hak atas perlindungan dari kekerasan dalam perang yang diberikan hukum humaniter internasional. Selanjutnya, mereka dihadapkan pada bahaya yang luar biasa dan pada kekerasan sebagai sesuatu yang rutin selama masa perkembangan terpenting dalam hidup mereka. Ini tak jarang mencakup pelanggaran berat hak asasi manusia, baik sebagai korban, pelaku atau saksi. Penggunaan anak-anak dengan cara ini juga berpengaruh pada militerisasi dan polarisasi masyarakat luas. Hal ini menempatkan anak-anak tidak hanya di garis depan konflik militer, tapi juga di garis depan konflik sosial.

23. Karena alasan-alasan ini, memaksa anak-anak di wilayah pendudukan untuk bekerja dalam atau dengan pasukan bersenjata secara khusus dilarang oleh hukum internasional. Telah dan terus ada pertentangan mengenai usia yang layak bagi anak-anak untuk bergabung dalam militer.

24. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, yang diratifikasikan Indonesia pada tahun 1990, berlaku ketentuan-ketentuan berikut ini:

- Negara-negara tidak boleh merekrut anak-anak di bawah usia 15 ke dalam angkatan bersenjata mereka dan harus melakukan langkah-langkah mencegah anak-anak di bawah usia 15 tahun terlibat langsung dalam permusuhan.<sup>16</sup>
- Jika merekrut anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun ke dalam angkatan bersenjata, negara harus memberi prioritas kepada anak-anak yang lebih tua.<sup>17</sup>
- Anak-anak mempunyai hak dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan hak untuk dilindungi dari melakukan pekerjaan yang cenderung merusak atau berbahaya bagi anak-anak.<sup>18</sup>

25. Selain itu, Pasal 51 Konvensi Jenewa IV melarang suatu Kekuatan Pendudukan untuk memaksa orang sipil berdinis dalam angkatan bersenjatanya dan menggunakan propaganda untuk pendaftaran sukarela. Anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh dipaksakan melakukan pekerjaan apapun.

26. Dalam proses pengambilan pernyataan, Komisi mendokumentasikan 146 kasus perekrutan anak-anak. Ini merupakan 6,8% (146/2.157) dari semua perekrutan paksa yang didokumentasikan oleh Komisi. Namun, dalam 45,5% (981/2.157) kasus perekrutan, umur korban tidak diketahui. Karena itu, kemungkinannya sekitar 981 kasus perekrutan, yang umur korban tidak diketahui, dilakukan terhadap anak-anak.

27. Mayoritas yang sangat besar, 83,6% (122/146), dari kasus perekrutan anak yang terdokumentasikan terjadi antara 1975 dan 1983. Karena itu, perekrutan anak-anak tampaknya sebagian besar dilakukan pada masa awal pendudukan Indonesia. Dari kasus-kasus perekrutan anak-anak yang didokumentasikan oleh Komisi, 84,3% (123/146) pelakunya adalah militer Indonesia dan 17,8% (26/256) pelakunya orang Timor-Leste yang bekerja dengan militer

Indonesia, termasuk milisi pada tahun 1999.<sup>\*</sup> Hanya 3,4% (5/146) dari perekrutan anak-anak yang didokumentasikan Komisi dilakukan oleh gerakan klandestin atau Falintil.

28. Semua pihak yang terlibat dalam konflik di Timor-Leste menggunakan anak-anak selama periode yang menjadi mandat Komisi. Sebagai TBO, anak-anak menjalankan berbagai tugas. Meskipun tidak selalu terlibat langsung dalam pertempuran, anak-anak TBO sering dibawa ke medan pertempuran dan karenanya berhadapan dengan bahaya fisik. Setidak-tidaknya, mereka hidup dalam kondisi yang sangat sulit dan menjadi mangsa perlakuan sewenang-wenang para prajurit. Anak-anak juga berperan penting dalam Perlawanan, baik berperang bagi Angkatan Bersenjata pembebasan Nasional Timor-Leste (Forças Armadas da Libertação Nacional de Timor-Leste, Falintil) atau sebagai bagian dari gerakan klandestin. Terakhir, anak-anak juga direkrut ke dalam milisi yang menteror Timor-Leste pada 1999. Sering kali mereka bergabung ke dalam milisi sebagai akibat dari intimidasi yang sungguh-sungguh telah melanggar hak asasi manusia mereka dan kemudian berlanjut dengan mereka sendiri melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

29. Bagian berikut tidak hanya mengkaji kasus-kasus perekrutan paksa, tetapi juga pengalaman yang lebih luas anak-anak yang terlibat dalam konflik, baik sebagai TBO untuk militer Indonesia, sebagai milisi pada 1999 atau ke dalam gerakan Perlawanan melalui gerakan klandestin atau Falintil.

#### 7.8.2.1. Anak-anak sebagai TBO dan keikutsertaan dalam operasi

30. Bentuk utama keterlibatan anak-anak Timor dengan militer Indonesia adalah sebagai TBO. Militer Indonesia menggunakan orang dewasa dan anak-anak, terutama laki-laki, sebagai TBO segera sesudah invasi sebagai tenaga pengangkut, pelayan dan pembantu umum dalam berbagai operasi militer. TBO ditempatkan di dalam kamp-kamp militer tetapi mereka sering menemani tentara ke medan operasi. Tujuan langsung perekrutan TBO adalah menyediakan bantuan logistik operasional. Oleh karena itu, perekrutan dilakukan ketika ada kebutuhan untuk memindahkan perbekalan melalui wilayah yang belum dikenal. Tujuan kedua, menurut berbagai dokumen militer yang diperoleh Komisi, adalah untuk mendorong anak-anak menjadi pendukung integrasi.

31. Bagi anak-anak, sebab untuk menjadi seorang TBO rumit. Banyak yang secara terbuka dipaksa dengan ancaman kekerasan terhadap diri mereka sendiri maupun keluarga mereka. Yang lain menjadi TBO supaya mendapat makanan untuk mempertahankan hidup atau untuk mengamankan keluarga mereka. Hal ini jelas nyata pada akhir dasawarsa 1970-an, ketika makanan sangat langka dan keluarga-keluarga berada dalam keadaan yang rentan. Sebagian anak-anak bergabung justru karena mereka atau keluarga mereka dicurigai sebagai pendukung Front Revolusioner Kemerdekaan Timor-Leste (Frente Revolucionária de Timor Leste Independente, Fretilin). Ada juga yang bergabung secara sukarela

32. Menurut penelitian Komisi dan sumber kedua, termasuk berbagai dokumen militer, sebagian besar anak-anak direkrut pada tahun-tahun awal konflik, 1976-1981. Walaupun ada kasus-kasus TBO yang berusia enam tahun,<sup>†</sup> remaja lelaki kelihatannya merupakan kelompok anak-anak yang paling banyak.<sup>19</sup> Temuan ini sesuai dengan pola-pola statistik yang diperoleh dari proses pengambilan pernyataan Komisi, yang menunjukkan bahwa perekrutan paksa kebanyakan dialami oleh lelaki muda yang berusia antara 19 dan 34 tahun. Di antara anak-anak yang direkrut paksa, hampir semuanya adalah remaja. Masa tugas berkisar antara beberapa minggu hingga lebih dari satu tahun. Pada sebagian besar kasus, para TBO diberi sertifikat di

<sup>\*</sup> Ketika menghitung tanggung jawab proporsional pelanggaran itu, sebagian pelanggaran mungkin dihitung lebih dari satu kali karena tanggung jawabnya ada pada beberapa orang pelaku.

<sup>†</sup> Dalam basis data ada satu kesaksian tangan pertama tentang seorang anak lelaki yang direkrut Batalyon Lintas Udara (Linud) 700 ABRI di Ainaro pada tahun 1978 ketika "berusia kurang-lebih 6 tahun" (Pernyataan HRVD 3242). Eurico Guterres juga mengaku mulai bekerja sebagai TBO pada usia enam tahun.

akhir masa tugas mereka dan dikembalikan ke rumah masing-masing, kadang-kadang dalam kelompok-kelompok besar setelah batalyon mereka menyelesaikan tugasnya. Juga terdapat kasus-kasus TBO yang dibawa ke Indonesia bersama anggota tentara yang mereka layani, bergabung dengan batalyon lain atau tetap tinggal di Dili.

33. Dari kesaksian para mantan TBO, jelas bahwa mereka ditempatkan dalam bahaya ketika dipaksa membawa amunisi, memandu prajurit-prajurit untuk mencari para pendukung Fretilin di hutan dan mengambil air serta kayu bakar di wilayah-wilayah pertempuran.

### **Pola-pola perekrutan TBO**

34. Komisi tidak bisa membuat penghitungan statistik secara langsung mengenai TBO karena kasus-kasus TBO didokumentasikan sebagai perekrutan anak-anak dalam proses pengambilan pernyataan. Bagian terbesar kasus-kasus perekrutan anak-anak yang didokumentasikan Komisi terjadi antara 1975 dan 1983, jadi mungkin sekali penggunaan TBO paling sering terjadi di antara tahun-tahun tersebut. Dokumen-dokumen militer dan kasus-kasus individual menunjukkan bahwa TBO terus direkrut pada pertengahan dasawarsa 1980-an, walaupun pada tingkat yang lebih rendah dan ada kasus-kasus terisolir sampai dasawarsa 1990-an.<sup>20</sup> Penurunan perekrutan anak-anak dapat dijelaskan dengan terjadinya pengurangan operasi militer dan pengetatan peraturan perekrutan.

35. Segera sesudah periode invasi, batalyon-batalyon tentara Indonesia merekrut paksa banyak sekali orang dari semua umur untuk membantu mengangkut amunisi dan perbekalan untuk jangka waktu yang singkat. Profil Komunitas mengisyaratkan bahwa perekrutan besar-besaran untuk jangka pendek, termasuk perekrutan anak-anak, terus berlanjut selama Operasi Seroja (1975-1979), untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak antara tahun 1975 sampai 1979.

36. Albino Fernandes, misalnya, melaporkan bahwa ia direkrut paksa di Lebos (Alas, Manufahi) pada bulan September 1978 ketika berumur 15 tahun, bersama dengan semua anak-anak di desa tersebut yang berusia di atas 12 tahun. Ia bertugas selama lebih dari satu bulan dan melarikan diri sebelum satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam mana ia bertugas melaksanakan rencana untuk mengirimkannya ke wilayah timur untuk bertugas sebagai TBO. Bonifacio dos Reis menyampaikan bahwa ketika berusia 17 tahun, ia dan banyak orang lain ditangkap dan dipaksa membawa perbekalan militer dari Letefoho (Ermera), ke Hatulia (Ermera) selama tiga hari tiga malam tanpa diberi makanan.<sup>21</sup> Seorang anak berusia 14 tahun berada di antara sekelompok besar penduduk sipil yang tertangkap dan ditahan di markas Komando Rayon Militer (Koramil) di Maubara (Liquiça) pada bulan Februari 1977.<sup>22</sup> Ia adalah satu dari lima pemuda yang dipaksa menjadi TBO selama satu bulan oleh Batalyon 310.

37. TBO lainnya direkrut secara sendiri-sendiri untuk memberikan bantuan kepada anggota tentara tertentu dan ini merupakan pola yang semakin meningkat setelah berakhirnya Operasi Seroja. Para TBO ini tidak hanya membantu mengangkut barang-barang, tetapi juga melakukan pekerjaan rumah tangga atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh anggota tentara yang mereka layani dan tinggal dengan anggota-anggota tentara di kamp serta menyertai mereka ke medan pertempuran. Hubungan antara prajurit dan TBOnya cukup dekat secara pribadi sehingga dalam beberapa kasus Komisi mendapat keterangan bahwa seorang TBO menyertai tentara yang didampinginya ke rumah sakit di Dili dengan helikopter setelah anggota tentara itu terluka.<sup>23</sup> Pada mulanya, perekrutan seperti itu dilakukan oleh anggota tentara secara sendiri-sendiri dan sewaktu-waktu. Pada tahun 1982, mungkin bahkan lebih awal, bentuk perekrutan ini diakui dan

---

<sup>20</sup> Wawancara CAVR dengan Albino Fernandes, Alas, Manufahi, 6 Maret 2003 (wawancara 2.1a). Lihat juga pernyataan HRVD 06117, di mana Augusto Guterres mengungkapkan kepada Komisi bahwa pada tahun 1978 di Baguia, Baucau, ia melihat banyak pemuda direkrut menjadi TBO pada waktu ia menyerah.



diatur, para anggota tentara yang mencari TBO diharuskan untuk berbicara dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) setempat.<sup>24</sup>

### **Status TBO dalam militer**

TBO bukanlah bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dalam artian mereka tidak diberi pangkat, seragam atau gaji. Akan tetapi, TBO diakui sebagai suatu kategori pembantu tersendiri dan dibedakan dari penduduk sipil lainnya yang direkrut untuk operasi-operasi, seperti Operasi Keamanan (yang juga dikenal sebagai Operasi Pagar Betis) yang dilancarkan pada tahun 1981. Faktor-faktor berikut ini menunjukkan bahwa perekrutan TBO merupakan kebijakan resmi militer:

- Berbagai peran dan tugas yang dilakukan TBO sama antara satu batalyon dengan yang lainnya dan dalam kurun waktu yang berbeda.
- Walaupun tidak digaji, para TBO umumnya mendapatkan makanan dan tempat tinggal untuk jasa yang mereka berikan.
- Menurut Instruksi Operasi nomor 15, pada 1982 TBO adalah bagian resmi dan tetap dalam struktur militer.<sup>25</sup> Setiap Kodim diinstruksikan untuk "menyediakan TBO untuk satuan tempur, pasukan teritorial dan pasukan kepolisian serta melaksanakan pengawasan dan pengelolaan TBO yang direkrut."
- Dokumen ini juga memerintahkan kepada kesatuan-kesatuan yang memerlukan TBO untuk mengajukan permintaan kepada Babinsa – anggota militer yang bertugas di tingkat desa – di masing-masing tempat. Walaupun mungkin tidak selalu diikuti, ini menyiratkan bahwa militer memiliki sistem untuk perekrutan TBO dari desa-desa asal mereka.
- Instruksi Operasi nomor 15 juga memberi arahan kepada Kodim untuk menyaring TBO, untuk memberikan pengakuan resmi kepada mereka yang terbunuh, ganti rugi bagi mereka yang terluka dan penghargaan kepada mereka yang layak menerimanya. Dokumen-dokumen militer lainnya menyebutkan penghargaan untuk keberanian, bahkan kenaikan pangkat anumerta sampai ke pangkat prajurit untuk TBO yang terbunuh dalam pertempuran.
- TBO juga diberi sertifikat yang ditandatangani oleh komandan batalyon pada akhir masa tugasnya, terkadang disertai dengan pemberian uang sekedarnya.

38. Cara-cara seleksi TBO sangat berbeda-beda. Wawancara-wawancara penelitian dan pernyataan-pernyataan yang diambil oleh Komisi menunjukkan bahwa pada dasawarsa 1970-an banyak anak direkrut setelah mereka menyerah atau ditangkap oleh pasukan-pasukan yang melakukan serbuan. Yang lainnya dipilih karena mereka dianggap bersimpati pada tujuan Indonesia. Komisi menerima pernyataan seorang pendukung Persatuan Demokratis Timor (União Democrática Timorese, UDT) yang ditahan oleh Fretilin. Tentara Indonesia yang menyerang membebaskannya dan ia menjadi seorang TBO.<sup>26</sup> Dalam kasus yang lain, António da Costa mengisahkan bahwa ia berada di antara sejumlah besar TBO yang direkrut oleh pasukan yang mendarat di wilayah Manatuto yang dikenal hanya sedikit dari penduduknya yang mendukung Fretilin, meskipun beberapa di antara mereka adalah anak-anak.<sup>27</sup>

39. Dalam sedikit kasus, TBO direkrut setelah para anggota lain dari suatu kelompok yang tertangkap dibunuh. Cipriano de Jesus Martins melaporkan bahwa setelah kakak perempuan dan anaknya dibunuh oleh ABRI di Riheu (Ermera, Ermera) pada bulan Januari 1976, ia dipaksa menjadi seorang TBO selama satu tahun.<sup>28</sup> Komisi menerima dua pernyataan mengenai satu kejadian dari Eurico de Almeida dan Marcos Gusmão. Mereka menyampaikan bagaimana sekelompok anggota keluarga mereka sedang mencari makan di luar kamp-kamp di Venilale (Baucau) pada tanggal 12 Oktober 1979 ketika mereka bertemu dengan tiga peleton dari Batalyon 745. Tiga laki-laki dewasa disebutkan ditembak dan terbunuh, tiga anak kecil disuruh pulang dan satu anak berusia 10 tahun, Manuel de Almeida, direkrut sebagai seorang TBO.<sup>29</sup>

Dalam kasus ketiga semacam itu, Marcos Loina da Costa mengungkapkan kepada Komisi bahwa ketika berusia 12 tahun di Laleia (Manatuto) ia pergi untuk mencari makanan dan bertemu dengan dua laki-laki yang ternyata adalah mantan anggota Falintil. Mereka ditangkap militer Indonesia dan dibawa ke pos di Larimasa (Laleia, Manatuto). Dua orang itu dibunuh, sedangkan Marcos dipaksa untuk menjadi seorang TBO.<sup>30\*</sup>

### **Jumlah TBO Anak-anak**

40. Sebagaimana dikemukakan di atas, TBO tidak secara khusus didokumentasikan melalui proses pengambilan pernyataan sehingga Komisi tidak dapat membuat penghitungan statistik langsung tentang TBO. Namun, berbagai sumber lain, termasuk wawancara-wawancara yang dilakukan oleh Komisi, dokumen-dokumen militer dan Profil Komunitas, menunjukkan bahwa TBO yang direkrut jumlahnya banyak.

41. Perkiraan konservatif mengenai keseluruhan jumlah TBO dapat diambil dari dokumen-dokumen militer. Pada tahun 1982, panduan untuk mobilisasi penduduk sipil membatasi jumlah TBO maksimum 5-7% dari seluruh kekuatan suatu kesatuan, sambil mengakui bahwa pada kenyataannya jumlah mereka umumnya mencapai 10%, yang menunjukkan bahwa sekitar 80 orang TBO bertugas pada setiap batalyon. Satu dokumen militer tahun 1984 membatasi jumlah TBO, dengan hanya mengizinkan kesatuan seukuran batalyon untuk merekrut 15 TBO saja, atau lima orang per kompi.<sup>†</sup> Jumlah ini jauh lebih sedikit daripada yang diperkirakan oleh para mantan TBO yang berbicara kepada Komisi.<sup>‡</sup> Jumlah batalyon berubah-ubah dari waktu ke waktu. Jumlah terbanyak adalah pada tahun 1976 dan 1978, sebanyak 30 batalyon bertugas di Timor-Leste. Namun tidak jelas apakah semua batalyon mempunyai TBO, atau berapa banyak TBO yang bertugas dalam kesempatan yang berbeda, atau apakah TBO “dirotasikan” keluar dari tugas lebih sering daripada batalyon tentara, yang tampaknya memang demikian bila dilihat dari lamanya masa tugas seperti yang dijelaskan oleh para mantan TBO. Akan tetapi, kalau diasumsikan bahwa panduan militer Indonesia mengenai perekrutan TBO banyak diikuti dan tidak dilampaui, jelas bahwa penggunaan TBO merupakan praktek yang umum dan luas oleh kesatuan-kesatuan militer Indonesia. Komisi merekomendasikan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk menentukan tingkatan praktek ini.

42. Juga sulit untuk menghitung proporsi TBO yang anak-anak. Bukti yang belum diteliti menunjukkan bahwa sementara anak-anak merupakan minoritas dalam TBO, jumlah keseluruhannya masih sangat besar. Komisi telah menerima laporan mengenai adanya TBO anak-anak di setiap distrik kecuali Oecusse. Akan tetapi, beberapa kesatuan mungkin merekrut sedikit saja atau tidak sama sekali, sementara kesatuan lainnya merekrut banyak pemuda sebagai pembawa barang selama sehari-hari, berminggu-minggu atau bertahun-tahun. Seorang narasumber mengingat bahwa, dalam suatu kelompok yang terdiri dari 200-300 TBO yang bertugas pada Batalyon 121, terdapat kira-kira tujuh anak yang usianya kurang dari 10 tahun dalam kelompok itu termasuk dirinya sendiri. Ia memperkirakan terdapat kurang dari 30 orang anak berusia 12-13 tahun dan sampai sebanyak 60 anak yang berusia 14-17 tahun, yang ia anggap bukan anak-anak lagi. Jika dijumlahkan, sekitar setengah hingga sepertiga dari TBO

---

\* Agostinho Soares mengisahkan bahwa setelah penangkapan massal di Letefoho (Ermera) banyak yang dicurigai sebagai anggota Fretilin atau Falintil dilatih sebagai Ratih atau Hansip, termasuk beberapa orang yang berusia 14 dan 15 tahun. Wawancara CAVR dengan Agostinho Soares, Ermera, 13 Agustus 2003 (wawancara 1.13c).

† Satu batalyon terdiri dari sekitar 800 prajurit yang biasanya dibagi dalam lima kompi, yang masing-masing kompi terdiri dari lima peleton, selanjutnya masing-masing peleton yang terdiri dari 30 prajurit itu dibagi menjadi tiga regu.

‡ João Rui menyampaikan bahwa setelah Batalyon 121 meninggalkan Timor-Leste pada tahun 1980, 200-300 TBO yang telah bertugas pada batalyon tersebut dipulangkan dengan kapal laut dari Dili ke kampung halaman masing-masing di distrik-distrik bagian timur, yang menunjukkan bahwa sampai dengan 40% dari batalyon tersebut adalah TBO. Wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, Mei 2004. Sumber yang lain mengungkapkan bahwa menurut pengalamannya satu peleton yang terdiri dari sekitar 30 prajurit mempunyai 10-15 TBO, atau satu untuk setiap dua prajurit. Wawancara CAVR dengan Alfredo Alves, Dili, 5 Maret 2004. Namun, Albino Fernandes mengisahkan bahwa pada tahun 1978 di dalam batalyonnya setiap kompi (terdiri dari sekitar 150 orang) seluruhnya mempunyai sekitar 10 TBO. Dengan demikian ada perbedaan yang besar mengenai jumlah TBO dalam satu batalyon. Wawancara CAVR dengan Albino Fernandes, Alas, Manufahi, 6 Maret 2003.

dalam batalyon ini berusia di bawah 18 tahun.<sup>31</sup> Sejalan dengan angka-angka ini, seorang mantan TBO lain melaporkan bahwa berdasarkan pengalamannya satu peleton yang terdiri dari sekitar 30 prajurit mempunyai 10-15 TBO dan dalam peletonnya ada tujuh orang anak-anak. Jumlah itu termasuk dua anak kecil, yang diambil pada saat operasi dan tidak mempunyai tugas pekerjaan.<sup>32</sup> Namun, seorang lain yang pernah menjadi TBO pada tahun 1976 mengingat bahwa dalam batalyon hanya ada 18 TBO anak-anak.<sup>33</sup>

### **Mengapa ABRI merekrut anak-anak sebagai TBO?**

43. Tujuan utama perekrutan TBO tampaknya bersifat operasional: mengangkut perbekalan dan menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota tentara. Dalam beberapa kasus TBO digunakan untuk memandu tentara, membantu menemukan penduduk sipil maupun gerilyawan di hutan-hutan atau untuk membawa amunisi, perlengkapan dan perbekalan selama pertempuran. Juga ada laporan-laporan tentang TBO yang ditugaskan mendahului kesatuan di medan pertempuran.

44. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa anak-anak dan pemuda yang dipilih untuk ini. Ada beberapa kemungkinan: adanya kebutuhan umum tenaga kerja tanpa bayaran, taktik mengambil hati penduduk atau suatu anggapan bahwa TBO yang masih muda lebih kecil kemungkinannya untuk berkhianat atau melarikan diri.

45. Ada bukti bahwa perekrutan pemuda didorong oleh keperluan memenuhi kebutuhan besar militer akan tenaga kerja tanpa bayaran yang bekerja sebagai pembantu. Hal ini paling besar kemungkinannya pada tahun-tahun awal sesudah invasi, ketika TBO dalam jumlah yang besar direkrut untuk tugas jangka pendek dan sementara. Seorang narasumber mengungkapkan adanya anak-anak penduduk setempat seumur 11 tahun dipaksa bertugas menggantikan sejumlah TBO dewasa yang melarikan diri, karena anak-anak lebih mudah didapat atau mungkin mereka lebih disukai karena lebih mudah dikontrol dibandingkan orang dewasa.<sup>34</sup>

46. Ada bukti bahwa begitu seorang tentara bertugas merekrut TBO, maka anak-anak secara khusus dijadikan sasaran. Satu dokumen militer tahun 1982 merinci peran berbagai kelompok paramiliter sipil khususnya yang berhubungan dengan Operasi Kikis (lihat bagian di bawah berjudul Anak-anak dalam operasi: Operasi Keamanan). Dalam kalimat yang memberi penjelasan, dokumen tersebut menyebutkan kekuatan dan kelemahan TBO. Kekuatannya, yang berasal dari menjalani banyak waktu bersama anggota tentara Indonesia, mencakup kemampuan berbahasa Indonesia, kesehatan yang baik dan setia kepada prajurit yang mereka layani. Yang paling penting dalam kaitannya dengan bab ini adalah kekuatan terakhir yang disebutkan, yaitu "usia yang relatif muda, antara 12-35 tahun", walaupun kalimat tersebut tidak menjelaskan mengapa usia muda dianggap sebagai kekuatan.<sup>35</sup>

47. Dapat dianggap bahwa anak-anak lebih mudah dipengaruhi secara ideologis daripada orang dewasa dan karena itu akan terus mendukung Indonesia. Ada beberapa kasus di mana anak-anak yang bertugas sebagai TBO kemudian bergabung dengan paramiliter atau bahkan dengan militer Indonesia setelah dewasa.\* Petunjuk tahun 1982 untuk Babinsa menyebutkan tentang para mantan TBO:

Mereka yang masih dalam usia sekolah harus didorong kembali ke sekolah, sementara mereka yang memenuhi kriteria dan berusia antara 18 dan 25 tahun dapat menjadi anggota kesatuan Ratih<sup>†</sup> dan kemudian anggota ABRI.\*

---

\* Lihat CAVR, *Children and Conflict*, Submisi kepada CAVR oleh Helene van Klinken. *Case Summary Collection*, 2003. Lihat juga CAVR, Profil Komunitas mengenai aldeia Vaviquinia, subdistrik Maubara, Liquiça, 3 Juli 2003, yang mencatat bahwa 12 orang penduduk desa yang tidak diketahui usianya ditangkap Yonif 403 dan 401 dan Kopassandha pada tahun 1976. Mereka dipaksa menjadi TBO dan kemudian direkrut menjadi Hansip pada akhir tugas mereka.

† Penduduk sipil Indonesia secara berkala dipilih untuk menjalani latihan dasar militer yang setelah itu mereka disebut sebagai Rakyat Terlatih (Ratih). Seleksi selanjutnya bisa dilakukan terhadap anggota Ratih untuk membentuk (a) Hansip

48. Para pemimpin milisi tahun 1999 yang pernah menjadi TBO antara lain adalah Joanico Cesario Belo dari milisi Tim Saka, Cancio Lopes de Carvalho dari milisi Mahidi (Mati Hidup Integrasi dengan Indonesia) dan Eurico Guterres dari milisi Aitarak (kata bahasa Tetun untuk “duri”).<sup>36</sup>

49. Sebagian anak direkrut paksa sebagai TBO karena dicurigai atau memang berhubungan dengan Fretilin dan karena itu perekrutan ini merupakan usaha mengontrol mereka. Menurut Pastor Locatelli, perekrutan TBO juga merupakan satu strategi militer untuk mencegah pemuda terlibat dalam Fretilin.<sup>37</sup> Orang dewasa, termasuk anggota Falintil, sering juga dipaksa menjadi anggota Hansip, Ratih, Wanra atau anggota paramiliter yang lain.

50. Yang terakhir, anak-anak mungkin lebih disukai dibandingkan orang dewasa karena lebih kecil kemungkinan mereka akan lari atau mengkhianati kesatuannya. Seorang mantan TBO mengatakan kepada Komisi bahwa dari tiga orang TBO di kesatuannya, seorang dewasa melarikan diri pada suatu malam bersama dengan para TBO dari kesatuan lain, sedangkan ia dan seorang TBO yang juga di bawah umur tidak tahu jalan pulang dan karena itu takut melarikan diri.<sup>38</sup> Namun, seperti yang tercantum dalam bagian 7.8.2.2. Anak-anak dalam jaringan klandestin, pada kenyataannya anak-anak memainkan peran penting dalam tugas intelijen dan dalam menyediakan perbekalan bagi Perlawanan dan ada beberapa kasus TBO anak-anak yang terbunuh atau hilang karena mereka dicurigai berkomunikasi dengan Falintil.<sup>†</sup>

51. Beberapa dokumen militer tahun 1982 memang memperingatkan bahwa pengetahuan yang didapat oleh TBO dapat dengan mudah jatuh ke tangan yang salah. Satu dokumen memperingatkan:

*Akibat mengikuti anggota ABRI, mereka akan banyak mengetahui kelebihan maupun kekurangan anggota ABRI. Bila tidak dibina, maka mereka dapat berbalik menyampaikan informasi kepada GPK untuk dimanfaatkan. Beberapa kasus membuktikan bahwa GPK mengirimkan rakyatnya untuk menjadi TBO, dan selanjutnya kembali ke hutan membawa perlengkapan, logistik dan yang terpenting adalah informasi.*<sup>39</sup>

52. Dokumen lain memperingatkan bahwa GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) “...dapat juga menyamar atau menyelundupkan diri ke dalam posisi sebagai tenaga bantuan operasi (TBO) yang ada pada kesatuan-kesatuan ABRI”.<sup>40</sup> Untuk mencegah risiko ini, dokumen lain dari tahun 1982 memberikan petunjuk kepada para Babinsa mengenai bagaimana menangani para mantan TBO: “Berikan mereka tuntunan yang terus-menerus agar mereka tidak terpengaruh GPK.”<sup>41</sup>

---

(Pertahanan Sipil) yang bertanggung jawab untuk melindungi penduduk kalau terjadi bencana alam atau perang, (b) Kamra (Keamanan Rakyat).

<sup>36</sup> ABRI, “Petunjuk Teknis tentang Kegiatan Babinsa,” Juknis 06/IV/1982 Korem 164 Wira Dharma, Seksi Intelijen, Willem da Costa (Kepala Seksi Intelijen), diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam Carmel Budiardjo dan Liem Sioe Liong, *The War Against East Timor*, Zed Books, 1984, halaman 201; lihat juga ABRI, Komando Pelaksana Operasi Timor Timur, *Rencana Operasi No. 01/Bayu*, Lampiran D (Rencana Teritorial), halaman 5, yang memerintahkan pasukan-pasukan untuk, “menempatkan TBO dari batalyon yang kembali untuk memperkuat Wanra di PPT [Pangkal Perlawanan Taktis].”

<sup>†</sup> Lihat Pernyataan HRVD 04435, di mana João Pinto menguraikan pembunuhan anaknya, Domingos Mário, seorang TBO berusia 17 tahun yang direkrut paksa pada tanggal 4 Desember 1979 oleh Koramil di Luro (Lautém). Setelah ABRI mengetahui bahwa ia telah menulis surat kepada seorang anggota Falintil di hutan selama empat bulan, Domingos dibawa oleh pasukan ABRI Batalyon 305 ke Nundelarin, Luro, di mana ia dipukuli, dadanya ditusuk dengan bayonet dan pipinya disundut rokok. Setelah ditahan selama sembilan hari ia kembali ke rumah selama tiga hari. Seorang Hansip yang bernama Pedro bersama dengan ABRI kemudian datang dan membawa Domingos ke Koramil Luro (Lautém) dan ia tidak pernah kembali.

## Alasan bergabung

53. Penelitian Komisi menunjukkan bahwa TBO direkrut dengan berbagai cara, yang berbeda-beda tergantung pada individu dan situasi sosial-ekonomi serta militer yang lebih luas.

54. Dalam banyak kasus perekrutan anak-anak dilakukan secara paksa, tetapi anak-anak lain memilih bergabung karena keuntungan material atau keamanan dan lainnya lagi karena mereka menyukai pekerjaannya. João Rui, yang empat kali bertugas sebagai TBO sewaktu masih kanak-kanak menjelaskan alasannya bergabung terus menerus: pertama kali bergabung karena ia dipaksa, bergabung yang kedua karena ia tertarik janji akan diberi makanan, permen dan memperoleh banyak teman, ketiga dan keempat ia sukarela bergabung karena telah terbiasa dengan pekerjaannya dan tidak menyukai pekerjaan berat di ladang yang ia lakukan bersama dengan pamannya di desa. Ia juga berharap bisa memperoleh pendidikan, meskipun hal itu tidak pernah terjadi.<sup>42</sup>

## Pemaksaan

55. José Pinto, yang pada tahun 1977 berusia 16 tahun, menjadi TBO untuk Yonif 724 mengatakan:

Ketika mereka memasuki rumah, [tentara Indonesia] selalu membawa senjatanya. Jadi, apapun kemauan mereka selalu dituruti orang tua saya. Kita tidak bisa mengatakan kita mau atau tidak.<sup>43</sup>

56. Seperti kesaksian di atas, dalam banyak kasus, anak-anak secara terang-terangan dipaksa menjadi TBO, misalnya setelah tertangkap atau menyerah. Domingos Maria Bada mengisahkan kepada Komisi bahwa setelah bertahun-tahun di gunung, ia dan keluarganya ditangkap anggota tentara dan Hansip di Faturasa (Remexio, Aileu). Sementara seluruh keluarganya dibawa ke kota Remexio (Aileu), ia dan seorang temannya ditahan sebagai TBO di pos militer terdekat di Faturasa. Domingos menjelaskan bahwa ia tidak mau menjadi TBO tetapi diancam dengan sepucuk senjata sehingga tidak punya pilihan lain. Ia bergabung dengan tentara dan diperintahkan untuk membawa ransel mereka ke medan tempur.<sup>44</sup>

57. Tindakan pemaksaan dilakukan terhadap orang yang dicurigai mendukung Fretilin. Misalnya, Luis Soares melaporkan kepada Komisi bahwa ketika ia berusia 16 tahun, ia ditangkap pada tahun 1976 oleh seorang Hansip di Ermera dan diserahkan kepada Yonif 412, karena ia telah membantu Falintil. Ia dipaksa bertugas sebagai TBO di Aileu dan Same selama satu tahun.<sup>45</sup> Profil Komunitas Aidabaleten (Atabae, Bobonaro) menyebutkan bahwa dalam waktu satu tahun sekitar 300 pemuda yang dianggap sebagai anggota pasukan tombak (*Armas Brancas*)<sup>\*</sup> atau milisi Fretilin ditangkap dan ditahan selama tiga bulan. Setelah dibebaskan, yang masih remaja dipaksa menjalani pelatihan militer dan kemudian dijadikan TBO.

58. Pemaksaan juga terjadi dalam konteks yang lebih luas, yaitu kontrol militer atas penduduk sipil. Seorang mantan TBO menjelaskan:

*Tidak ada orang sipil yang bisa melawan tentara. Orang-orang ketakutan. Bahkan seorang bupati tidak berani melawan tentara...Tidak bergabung itu berbahaya – kami akan mati, tidak masalah.*<sup>46</sup>

---

<sup>\*</sup> *Armas Brancas* adalah istilah tidak resmi untuk pasukan sipil yang bertugas membantu pasukan Falintil dengan menyediakan makanan dan perbekalan lain di medan perang. Pasukan *Armas Brancas* bersenjatakan pedang, tombak atau panah dan busur tetapi hanya untuk membela diri mereka. Mereka tidak terlibat dalam pertempuran langsung.

59. Pendekatan persuasif digunakan terhadap Oscar Ramos Ximenes, yang menjadi seorang TBO ketika berusia 12 tahun pada tahun 1980 di Cairui (Laleia, Manatuto):

*Saya tidak dapat bersekolah karena lapar, jadi saya menyerahkan diri saya untuk dijadikan TBO, semata-mata agar dapat bertahan hidup.<sup>47</sup>*

60. Militer Indonesia juga menggunakan berbagai metode yang lebih lunak dalam merekrut anak laki-laki dan orang muda untuk bekerja sebagai TBO.

61. Gil Parada Martins Belo menyampaikan kepada Komisi bahwa ketika ia menyerah pada tahun 1979 dan mulai tinggal di Lacluta (Viqueque), militer Indonesia mendekatinya secara teratur dan mengajaknya menjadi seorang TBO, meskipun usianya baru 10 tahun pada waktu itu:

*Mereka selalu membujuk saya, itulah sebabnya saya pergi [bersama mereka]. Mereka memberi saya kue, pakaian, celana. Mereka tidak mengancam. Tetapi saya merasa tidak enak karena tentara selalu datang dan memanggil saya. Mereka selalu menunggu ayah saya, sehingga saya akhirnya pergi...Waktu itu makanan sulit. Banyak orang yang meninggal. Ini membuat saya berpikir lebih baik saya mengikuti mereka.<sup>48</sup>*

62. Dalam otobiografinya, Eurico Guterres menulis bahwa ia menjadi TBO untuk bertahan hidup:

*Meski usiaku ketika itu baru 6 tahun, tapi aku juga ikut bekerja membantu-bantu pasukan TBO pada base camp Batalyon 502 di Burkaila [Uatu-Lari, Viqueque]. Meski pekerjaan sebagai TBO dipandang hina, tapi aku harus menekuninya demi meringankan beban ibu. Dengan menjadi TBO, paling tidak aku makan.<sup>49</sup>*

63. Ketika berada di kamp, janji akan diberi makanan tambahan memungkinkan para TBO membantu memberi makan keluarga. Agostinho Soares melaporkan bahwa meskipun TBO biasanya hanya menerima sisa makanan tentara, pada waktu itu ia dapat memberikan makanan kepada keluarganya: "Kalau saya tidak jadi TBO, keluarga kami bisa mati semua. Ya kami dapat sedikit rezeki karena saya TBO."<sup>50</sup>

64. Karena keuntungan material yang bisa didapatkan dari menjadi seorang TBO, juga ada kasus-kasus keluarga mendorong anak-anak mereka untuk bergabung. Setelah tiga tahun berada di gunung-gunung, José Viegas dan keluarganya menyerah pada tahun 1978. Meskipun memiliki latar belakang Fretilin yang kuat, keluarga memaksanya untuk menjadi seorang TBO:

*Kebanyakan orang mengetahui bahwa ayah saya dulunya bersenjata, ibu saya seorang delegada [pengurus lokal Fretilin] dan saya sebagai estafeta [penghubung]. Pada tahun 1978 dan selanjutnya, gerak-gerik kami sekeluarga selalu diawasi dan dipantau. Jadi sangat sulit bagi ayah untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berkebun pun tidak bisa! Sebagai jalan keluarnya, ibu meminta saya: "Kamu masuk TBO agar kita dapat makanan dari 'bapak' [ABRI]." Namun saya tidak mau walaupun ibu bersikeras sehingga memukul saya.*

*Saya menghindar dari rumah dan berkeliaran di hutan selama satu minggu.<sup>51</sup>*

## **Tugas**

65. Satu dokumen militer tahun 1984 menyebutkan bahwa TBO bisa ditugaskan sebagai penunjuk jalan hanya di sekitar daerah tempat tinggalnya dan hanya dengan sepengetahuan komando teritorial setempat.<sup>52</sup> Tetapi, tampaknya ini bukan praktek yang umum. Keterangan yang diperoleh Komisi dari para mantan TBO menunjukkan bahwa tugas TBO bermacam-macam dan tugas ini sering termasuk harus berpindah-pindah mengikuti tentara ke mana pun operasi dilaksanakan.

66. Banyak TBO digunakan untuk keperluan logistik dalam operasi seperti membawa perbekalan tentara atau ransel seorang tentara yang berisi perlengkapan yang dibutuhkan di medan tempur.<sup>53</sup> Di markas, TBO digunakan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mencari air serta kayu bakar. José Pinto melaporkan bahwa dirinya menjadi TBO selama empat bulan ketika masih berusia 16 tahun. Ia mengambil air dari sumur 10-20 kali sehari menggunakan timba yang menampung 15 liter air. Karena pada waktu itu masih bersekolah, ia mengambil air setiap pagi dan sore hari. Jika pos tentara berada di atas gunung, ia harus berjalan lebih dari 100 meter naik-turun membawa air.<sup>54</sup>

67. TBO juga digunakan sebagai penunjuk jalan atau pemandu, yang dapat melibatkan mereka dalam tugas-tugas berbahaya seperti membuka jalan bagi tentara untuk memastikan apakah jalannya aman.<sup>†</sup> Pernyataan-pernyataan yang diterima oleh Komisi mengindikasikan bahwa peranan penunjuk jalan sering kali dikaitkan dengan peran sebagai penghubung ABRI untuk berhubungan dengan anggota Perlawanan atau menyerukan kepada mereka yang tinggal di hutan untuk menyerah. Domingos Maria Bada, yang bertugas sebagai TBO selama delapan bulan untuk empat anggota Batalyon 410, menyampaikan berbagai pengalamannya selama operasi di Fahinehan dan Turiscai di distrik Manufahi:

*Tetapi ada satu hal yang penting, bahwa ketika mengadakan operasi di hutan, TBO harus di garis depan, sebagai pembuka jalan untuk tentara dan TBO harus pergi mencari dan memanggil penduduk yang masih berada di hutan untuk menyerahkan diri.<sup>55</sup>*

68. Belchior Francisco Bento Alves Pereira dalam kesaksiannya pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, mengungkapkan tugasnya sebagai seorang TBO pada tahun 1990 di Manutasi (Ainaro, Ainaro) sesudah ia ditahan karena terlibat kegiatan bawah tanah:

*Kalau kami melakukan operasi di hutan, saya disuruh membawa ransel dan perlengkapan perang seperti peluru. Tentara memberi saya pakaian tentara yang baru dan saya menjadi umpan mereka di hutan. Pertama kali saya tinggal bersama Yonif 613, Yonif 641 dan Yonif 642, terakhir dengan Yonif 643.<sup>56</sup>*

---

<sup>†</sup> Misalnya, Mário dos Santos mengisahkan tentang perjalanan dengan militer dari kampung halamannya di Bazartete (Liquiça) ke Fatulia (Ermera), kemudian ke Dili dan Ainaro, selanjutnya kembali ke Bazartete selama sembilan bulan (Tim Penelitian Anak dan Konflik CAVR, Makalah Penelitian, "Perekrutan Paksa," 31 Agustus 2003); Albino Fernandes mengungkapkan bahwa para TBO dari Lebos (Bobonaro) melakukan perjalanan pada tahun 1978 melalui gunung-gunung di kawasan Bobonaro, Ainaro dan Manufahi (wawancara CAVR dengan Albino Fernandes, Manufahi, 6 Maret 2003).

<sup>†</sup> Lihat pernyataan dari Leoneto Martins, yang diharuskan berjalan di depan pasukan waktu ia bekerja sebagai TBO untuk Yonif 410. Wawancara CAVR dengan Leoneto Martins, Saburia, Aileu, 15 Oktober 2003.

69. Komisi juga telah mendapatkan kesaksian-kesaksian bahwa TBO dipaksa untuk membantu ketika terjadi pertempuran. Alfredo Alves memberikan kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik bahwa pada usia 11 tahun ia menyertai Batalyon 725 ke pertempuran, terutama untuk mengisi ulang magasin.

### **Kondisi dan perlakuan**

70. Meskipun dalam banyak kasus TBO menerima lebih banyak makanan daripada rata-rata penduduk, kondisi mereka juga bisa sulit. Apabila beruntung mereka bisa hidup dalam kondisi keras yang dialami para prajurit yang mereka layani, meskipun para prajurit tersebut telah dilatih untuk menghadapi keadaan serba kekurangan. Para mantan TBO menyatakan bahwa mereka menderita kelelahan, kelaparan dan kehausan. Beberapa mantan TBO mengungkapkan bahwa mereka hanya makan apa yang tersisa dari makanan para prajurit atau dalam beberapa kejadian mereka makan nasi yang sudah basi.<sup>57</sup> Jika pengiriman perbekalan dengan helikopter tertunda, kekurangan makanan dialami semua orang. Tetapi, ketika perbekalan tiba, para TBO harus yang harus mengangkut beban yang berat, sering kali pada jarak yang jauh. Alfredo Alves mengatakan kepada Komisi bahwa semua TBO dalam batalyonnya pernah dua kali diberi suntikan di kaki sebelum membawa beban yang berat, agar mereka tidak merasakan beban berat ataupun merasa lelah.

71. Marcos Loina da Costa dari Cairui (Laleia, Manatuto), yang baru berusia 12 ketika dipaksa menjadi TBO, mengatakan bahwa ia merasa kesulitan membawa beban yang berat:

*Selama perjalanan terasa kita hampir mati saja, karena bawaan yang berat dan banyak. Barang siapa yang tidak kuat lagi membawa bawaannya, maka dia akan ditinggalkan begitu saja.<sup>58</sup>*

72. Domingas Freitas menceritakan mengenai adik laki-lakinya, Rai Ano yang direkrut bersama dengan seorang teman bernama Zeca oleh seorang anggota Yonif 744 pada tahun 1978 di Ossu (Viqueque). Zeca kemudian mengatakan kepada keluarga Rai Ano bahwa Rai Ano telah meninggal di Uatu-Lari (Viqueque) karena ia tidak cukup kuat membawa perlengkapan militer yang berat.<sup>59</sup>

73. Perlakuan terhadap TBO oleh militer, yang termasuk penganiayaan fisik, agaknya tergantung pada kepribadian prajurit pada siapa TBO yang bersangkutan ditugaskan.

### **Kehidupan sehari-hari seorang TBO**

#### **“Kalau kita mati, tidak masalah”**

Seorang anak laki-laki direkrut tentara dari Yonif 121, yang memberikannya gula-gula dan menyuruhnya untuk membawa sebuah ransel sejauh beberapa kilometer. Ketika mereka tiba di tempat tujuan hari sudah gelap dan ia takut pulang. Mereka membawanya ke hutan, di mana ia mengumpulkan kayu bakar dan air, mendirikan tenda dan memasak:

*Kami berjalan lebih dari 12 jam setiap hari. Berangkat pukul 05.00 pagi dan berjalan sampai pukul 12.00, kemudian istirahat dan makan siang, lalu kami berangkat lagi sampai malam hari. Besoknya berangkat lagi dan kami mondar-mandir di hutan begitu saja. Saya sudah mulai bawa barang berat pada waktu itu...Lalu kami naik ke [Gunung] Matebian, hujan terus dan saya tidak bisa tidur karena semuanya basah. Kadang-kadang kami kembali ke kota dan mengambil beras, kadang-kadang heli yang antar. Tentara tersebut kemudian mengirim tanda-tanda asap atau*

<sup>57</sup> Lihat juga Pernyataan HRVD 09081 oleh Cipriano de Jesus Martins: “Selama menjadi TBO saya dipaksa membawa perlengkapan perang seperti peluru dan makanan ke medan pertempuran antara TNI dan Falintil.”



*memakai radio. Mereka memberi kami makanan dan susu. Kami mondar-mandir di Matebian selama dua bulan. Saya kira kami mau ke kota lagi tetapi ternyata tidak – kami tidak pergi ke kota, kami hanya ada dalam hutan terus.*

*Ada suatu gunung yang sulit sekali kami lewati dan ada yang jatuh...di perbatasan Uatu-Lari, di kaki gunung tersebut, kami istirahat dua hari, tetapi hujan lebat dan helikopter tidak dapat mencapai daerah kami selama dua hari dua malam. Kami kehabisan beras, rokok, pokoknya semua habis. Mereka tertekan dan hanya meminum teh...Ketika matahari sudah turun, kami mencari buah-buahan, kelapa dan sebagainya dan tiba-tiba helikopter turun. Tentara sudah mengirimkan isyarat asap dan helikopter itu menjumpai kami dan memberikan beras. Tiba-tiba saja semua TBO yang lebih tua, melarikan diri. Mereka sudah tahu jalan dan kembali ke desa mereka. Sesuatu yang sulit kami [anak-anak kecil] lakukan – kami di tengah hutan dan dari mana kami mengetahui jalan? Malam itu ketika komandan kompi memerintahkan kami untuk mengambil beras, baru diketahui kalau ada dua TBO yang hilang. Satu TBO lainnya juga meninggalkan kesatuan kami, sehingga yang tinggal hanya dua. TBO yang lain itu berumur 16 atau 17, dan saya sendiri berumur delapan atau sembilan.*

*Esok harinya kami berjalan lagi. Ada banyak beras dan karung juga basah semua...Biasanya kalau kami tinggal di suatu tempat, kami menerima beras dua kali seminggu. Namun ketika kami berjalan itu, kami menerima perbekalan mungkin sekali seminggu...Untuk sembilan orang, itu semua merupakan jumlah beras yang sangat banyak. Ada kurang lebih 50 kilogram dalam beberapa karung...Jadi kami membawa semuanya dan karena tidak ada banyak TBO sehingga di Uatu-Lari (Viqueque) kami meminta banyak orang lain untuk bergabung. Ada beberapa yang lebih tua, saya melihat malah ada yang diminta membawa peluru. Wilayah itu masih rawan dan sebagian orang yang kami ajak, takut untuk bergabung dengan kami. Kami juga kurang berhati-hati, sehingga kalau saja kami mati, tidak masalah. Ada sekitar 10 orang yang bergabung, termasuk anak berusia 11 tahun. Kami berjalan langsung dari sana menuju hutan dan mendaki Matebian lagi. Beberapa TBO yang lebih besar kadang-kadang jengkel karena ransel yang mereka bawa sangat berat dan masih harus membawa peluru. Kami sampai di sungai yang disebut Uaibobo (Ossu, Viqueque) dan mereka menjadi demikian jengkel sehingga membuang semuanya ke dalam sungai...Kami diperintahkan mendaki dan memasuki hutan dan kami tinggal di wilayah perbatasan antara Venilale (Baucau) dan Ossu (Viqueque) dekat sungai. Kami di sana mungkin sekitar enam bulan atau lebih...Kami kemudian pindah lagi ke suatu kota, yang kelihatannya lebih enak, tetapi kami harus bekerja setiap hari: memasak, mengumpulkan air dan mencuci pakaian.<sup>60</sup>*

## **Jumlah korban**

74. Sumber-sumber kualitatif, seperti wawancara dan profil komunitas, menunjukkan bahwa banyak TBO, termasuk anak-anak, mungkin sudah terbunuh dalam pertempuran. Namun demikian, diperlukan pengumpulan dan penelitian data yang lebih terfokus agar bisa diperoleh temuan tentang hal ini.

75. Kesaksian-kesaksian yang diterima oleh Komisi juga mengisyaratkan tingginya jumlah korban meninggal dunia. Seorang TBO yang mulai bertugas pada tahun 1976 dan menghabiskan waktu dengan tiga batalyon yang berbeda dalam kurun waktu dua tahun, akhirnya melarikan diri dengan beberapa TBO yang lain karena tingginya jumlah korban meninggal dunia di berbagai distrik bagian timur:

*Ketika ada operasi di hutan, kami selalu berada di garis depan. Karenanya ada TBO yang ditembak Fretilin sebab mereka digunakan sebagai penunjuk jalan setiap kali ada operasi. Dari sembilan TBO, tiga orang tewas dan lainnya terluka. Teman TBO saya terluka atau tewas hanya karena*

*mereka selalu disuruh tentara untuk berjalan di garis depan.*<sup>61</sup>

76. Evaristo da Costa melaporkan kepada Komisi bahwa pada tahun 1983, sembilan anak lelaki, termasuk Aureliano da Silva (10 tahun), Bonifacio da Silva (10 tahun), Domingos Mendonça (11 tahun), Ernesto Amaral (14 tahun), Jacinto Amaral (14 tahun) dan Domingos Mesquita (14 tahun), dipaksa oleh Yonif 514 untuk mengangkut kantong-kantong penuh berisi beras dari Suco Liurai (Remexio, Aileu) ke Hera (Dili). Ketika mereka tiba di Ailibur/Pamketaudun, Ernesto Amaral disebutkan ditembak oleh seorang prajurit tentara Indonesia bernama C2 karena tidak bisa membawa kantongnya lebih jauh lagi. Anak-anak yang lain melarikan diri ke Dili atau ke desa asal mereka, tetapi para anggota ABRI pergi mencari mereka ke tempat-tempat itu yang baru berakhir ketika seorang anggota tentara dari Koramil Remexio menghentikan pengejaran tersebut.<sup>62</sup>

77. Komisi juga mendapatkan laporan tentang kasus TBO anak yang tidak pernah kelihatan lagi sesudah direkrut. Dalam suatu kasus, Apolinario Soares melaporkan bahwa adiknya, João Soares, berusia 10 tahun ketika ditangkap oleh Yonif 745 dan dipaksa menjadi TBO pada tahun 1980, karena keluarganya dicurigai sebagai pendukung Fretilin.<sup>63</sup> Dalam kasus lain, Costavo da Costa Ximenes menyampaikan kepada Komisi bahwa adiknya, Avelino Pinto yang juga berusia sepuluh tahun, dibawa ABRI pada tahun 1982, dari rumahnya di Alaua Atas (Baguia, Baucau). Seakan-akan ia hendak diadopsi namun sebenarnya Avelino Pinto dijadikan TBO dan tidak pernah kelihatan lagi sejak itu.<sup>64</sup> Seorang lelaki dari Atsabe (Ermera), Eduardo Casimiro, mengingat beberapa anak dari wilayah itu meninggal dunia sesudah direkrut sebagai TBO.<sup>65</sup>

78. Sejumlah anak mungkin tewas dalam pertempuran, tetapi Komisi juga menerima laporan mengenai beberapa kejadian TBO dibunuh atau diancam dibunuh oleh militer Indonesia. Alfredo Alves mengenang pembunuhan seorang TBO oleh Batalyon 725 di Fatubolu (Maubisse, Ainaro) pada tahun 1977:

*Suatu hari, salah satu TBO menolak menambah barang yang dibawanya, yang mengakibatkan kemarahan komandannya. Sesampainya di kamp, semua tentara dan TBO dikumpulkan dan komandan berkata: "TBO tidak boleh menolak membawa barang karena tentara datang membantu dan memberikan kemerdekaan." Kemudian, TBO itu dipanggil ke depan dan ditembak mati. Lalu kami diperingatkan dengan tegas bahwa jika ada yang menolak [menjalankan perintahnya], maka nasibnya akan sama.*<sup>66</sup>

79. Menurut Marcos Loina da Costa, seorang mantan TBO dari Cairui (Laleia, Manatuto), seorang TBO lain dalam kesatuannya hampir dibunuh oleh seorang tentara karena tidak sanggup membawa beban berat yang berisi beras, peluru dan peluru mortir, namun akhirnya ia diselamatkan oleh prajurit lain. Ia mengingat bahwa sesudah kejadian tersebut "semua barang yang saya bawa semuanya terasa ringan karena ketakutan saya".

80. Seperti telah disebutkan di atas, Komisi telah menerima informasi bahwa seorang TBO berusia 17 tahun, Domingos Mário, disiksa dan dihilangkan sesudah menulis surat kepada Falintil.<sup>67</sup> Pernyataan lain menyampaikan kasus seorang anak berusia 14 tahun, Teodoro de Oliveira, yang ditembak dan dibunuh pada Hari Natal 1984 oleh Yonif 131 di Serelau (Lospalos, Lautém) untuk alasan yang tidak diketahui.<sup>68</sup>

---

<sup>61</sup> Wawancara CAVR dengan Marcos Loina da Costa, Laleia, Manatuto, 24 Juni 2003. Marcos Loina da Costa menambahkan bahwa komandan batalyon memerintahkan pemulangan semua TBO akibat tindakan semena-mena dari anak buahnya.

## Pembayaran

81. Pada umumnya, TBO mendapatkan makanan untuk diri mereka sendiri atau dibawa pulang ke keluarganya sebagai upah atas pelayanan mereka. Tidak ada satu pun mantan TBO yang dilaporkan menerima pembayaran secara teratur dan dokumen-dokumen militer tidak menyebutkan adanya pembayaran. Ini berbeda dengan anggota Wanra atau Ratih, yang mendapatkan gaji bulanan atau untuk suatu periode operasi (lihat bagian mengenai militerisasi masyarakat Timor-Leste pada Bagian 4: Rezim Pendudukan).

82. Banyak mantan TBO melaporkan telah menerima sedikit uang pada akhir tugasnya. Domingos Maria Bada, seorang mantan TBO yang tugasnya sebagian besar mencari penduduk sipil di hutan, melaporkan bahwa setelah bertugas selama enam bulan bersama Yonif 410 pada tahun 1978 ia diberi Rp 6.000 (sekitar US\$ 14 dengan nilai tukar pada masa itu).<sup>69</sup> Seorang mantan TBO lainnya melaporkan telah menerima Rp 20.000 (sekitar US\$ 32 dengan nilai tukar pada masa itu) setelah sembilan bulan masa tugasnya bersama Yonif 133 berakhir pada tahun 1981, dan menerima Rp 25.000 (sekitar US\$ 23) pada bulan Februari 1985 setelah setahun bertugas bersama Yonif 507. Setiap selesai satu masa tugas, TBO ini menerima sertifikat resmi yang berjudul "Surat Tanda Penghargaan" (1981) dan "Ucapan Terima Kasih" (1985) yang ditandatangani oleh komandan batalyon. Gil Parada Belo Martins menerima Rp 25.000 dan selebar sertifikat dari Linud 401/Banteng Raiders, yang mengatakan padanya bahwa sertifikat itu kelak akan membantunya memperoleh pekerjaan.<sup>70</sup>

## Setelah Masa Tugas

83. Dalam banyak kasus seorang TBO dikembalikan ke desanya setelah tugas mereka berakhir. Buku pedoman Babinsa secara khusus mengharuskan TBO dikembalikan ke rumah masing-masing dan didorong untuk kembali ke sekolah. Seorang TBO mengingat ada ratusan TBO yang pulang menggunakan kapal laut ke distrik-distrik bagian timur sesudah batalyon mereka meninggalkan Timor Leste. Ia mengungkapkan:

*Sebagian tinggal di Dili, karena sulitnya ekonomi di desa. Saya diberi uang Rp 9.000 dan sertifikat. Kami tinggal di Kodim Dili dan kemudian dipindahkan ke Koramil Becora. Kami baru saja ditinggalkan tentara. Anak-anak kecil diancam oleh anak-anak yang lebih besar dan selalu ada risiko dirampok. Keadaan sangat kacau dan kadang-kadang saya dianiaya. Tapi kami merasa bebas: tidak ada lagi memasak, mengumpulkan kayu bakar atau mencuci. Saya dikasih seragam militer, yang terlalu besar sehingga sampai lutut seperti gaun.<sup>71</sup>*

84. Dalam beberapa kasus, para TBO dibawa ke Indonesia bersama para prajurit yang telah berakhir masa tugasnya. Kasus Alfredo Alves, yang diperdaya untuk naik ke atas kapal dengan dimasukkan ke sebuah peti, menggambarkan bahwa ikutnya para TBO tidak selalu bersifat sukarela (lihat 7.8.3 Pengiriman anak-anak ke Indonesia).

85. Seperti dicatat di atas, bagi sebagian TBO pengalaman tersebut menghasilkan hubungan jangka panjang dengan militer Indonesia dengan bergabung dalam tentara atau menjadi seorang anggota Wanra atau kelompok paramiliter lain. Namun, dalam banyak hal, tugas sebagai TBO tidak memiliki stigma yang sama dengan menjadi anggota milisi. Sudah dipahami bahwa banyak yang terpaksa menjadi TBO, bahwa mereka sering kali hanya melakukan pekerjaan kasar dan bahwa dalam banyak hal mereka menjadi korban.

---

<sup>69</sup> Wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 5 Mei 2004. João Rui mengatakan kepada Komisi bahwa ia juga bisa mendapatkan Rp 25.000 lagi dengan berbelanja atau melakukan tugas lain dari tentara.

86. Dokumen-dokumen militer tahun 1982 yang dirampas oleh Falintil secara khusus memerintahkan tentara untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah setelah tugas mereka selesai dan setidaknya sejumlah TBO dapat kembali ke sekolah dengan umur yang sedikit lebih tua daripada teman sekelasnya karena kelancaran mereka berbahasa Indonesia.<sup>72</sup> Namun demikian, kesempatan pendidikan terbatas pada tahun-tahun awal konflik ketika penggunaan TBO anak sedang pada puncaknya. Dengan bertugas selama setahun atau lebih di kamp-kamp militer atau di hutan-hutan berarti bahwa TBO anak kehilangan kesempatan apapun yang ada.

### **Anak-anak dalam operasi: Operasi Keamanan**

87. Pada pertengahan tahun 1981, militer Indonesia melancarkan operasi yang melibatkan puluhan ribu orang Timor-Leste di seluruh wilayah untuk dijadikan pagar manusia dalam upaya menangkap Fretilin dan anggotanya. Taktik ini digunakan pada berbagai kesempatan dalam operasi-operasi yang secara generis disebut Operasi Kikis. Operasi yang dilancarkan pada pertengahan 1981 disebut Operasi Keamanan dan ini adalah yang terbesar yang dilancarkan oleh Operasi Kikis di Timor Leste (lihat bagian mengenai Operasi Keamanan dalam Bagian 4: Rezim Pendudukan dan Bab 7.5: Pelanggaran Hukum Perang untuk pembahasan yang rinci mengenai operasi ini).

88. Meskipun TBO ditugaskan dalam Operasi Keamanan, beberapa ribu penduduk sipil, baik orang dewasa maupun anak-anak, direkrut secara khusus untuk operasi tersebut. Terdapat keragaman di masing-masing wilayah, tapi di sebagian besar tempat, semua lelaki di atas 12 tahun dikumpulkan pemerintah setempat atau personil militer dan ditugaskan pada kesatuan militer yang terlibat dalam operasi tersebut. Helio Freitas mengungkapkan bahwa di desanya perintah bagi semua lelaki untuk bergabung, tanpa menyebutkan umur, datang dari militer melalui kepala desa. Kepala rukun tetangga dan rukun warga memastikan bahwa semua laki-laki di desanya direkrut. Tidak ada pendaftaran resmi atau pemeriksaan usia:

*Liurai [kepala desa], Koramil dan Hansip mengumpulkan semua masyarakat, semua laki-laki dan memeriksa kondisi mereka. Anak kecil dipisah dan diperiksa kondisi mereka, bukan umur mereka.*

89. Yang paling muda dan terpilih bergabung dalam operasi itu berumur 10 tahun.<sup>†</sup>

90. Eduardo Casimiro dari Atsabe (Ermera) mengatakan kepada Komisi bahwa tentara mendatangi sekolahnya untuk mengambil para murid ke Kodim sebelum berangkat ke Ainaro. Namun, karena berusia 12 tahun, ia dianggap masih terlalu muda untuk direkrut.<sup>73</sup> Osório Florindo juga mengatakan kepada Komisi bahwa 1.000 orang penduduk dari subdistrik Luro (Lautém) bergabung ke dalam operasi, termasuk semua anak lelaki dari sekolah dasarnya, para guru mereka dan anak-anak sebayanya yang tidak bersekolah.<sup>74</sup>

91. Usia minimum untuk perekrutan sangat berbeda-beda. Profil Komunitas menunjukkan bahwa banyak anak-anak usia sekolah dipaksa ambil bagian dalam Operasi Keamanan. Di Pairara (Moro, Lautém) semua anak berusia 17 tahun ke atas direkrut dan di Vatuvou (Maubara, Liquiça) sekitar 600 orang direkrut, termasuk anak-anak. Di Vemasse Tasi (Vemasse, Baucau) penduduk ingat bahwa selama operasi tersebut, hanya perempuan, bayi dan orang lanjut usia yang tinggal di rumah. Di Aisirimou (Aileu, Aileu) dan di beberapa desa di Liquiça, semua anak usia sekolah diharuskan bergabung. Di Lospalos dan Tutuala (Lautém), semua penduduk lelaki

---

<sup>72</sup> Pada saat Osório Florindo kembali ke sekolah, setelah tidak masuk selama tiga bulan karena Operasi Kikis, ia melihat bahwa sekolahnya memberikan penghargaan kepada murid yang berpartisipasi dalam operasi tersebut berupa kenaikan kelas. Wawancara CAVR dengan Osório Florindo, Dili, 31 Mei 2003.

<sup>†</sup> Wawancara CAVR dengan Helio Freitas, Dili, 19 Mei 2003. Beberapa narasumber (termasuk seorang mantan camat) menyebutkan camat tersebut sebagai orang yang berperan memimpin pendaftaran, di bawah pengarahan dari pihak berwenang militer. Wawancara CAVR dengan Francisco da Conceição Guterres, Tocoluli, Railaco, Ermera, 17 Juni 2003.

di atas usia 15 tahun direkrut paksa dan di Quelicai (Baucau) dan Viqueque (Viqueque) lelaki yang berusia 13 tahun juga ambil bagian.<sup>75</sup>

92. Ada juga tempat yang hanya orang dewasa yang direkrut. Di desa Parlamento (Moro, Lautém), hanya orang yang berusia di atas 17 tahun yang disertakan dalam operasi dan di Selo Malere (Aileu, Aileu) pada tahun 1979, ibu dan anak-anak tinggal di rumah sementara semua lelaki dewasa bergabung dalam operasi.<sup>76</sup>

93. Pejabat pemerintah sipil setempat, seperti camat dan kepala desa, mengarahkan proses perekrutan dengan berkoordinasi dengan komandan militer setempat. Dalam beberapa kasus mereka bisa mempengaruhi usia minimum orang yang akan direkrut. Misalnya, seorang camat di Railaco (Ermera), Francisco da Conceição Guterres, diminta menyediakan 500-600 orang untuk bergabung dengan operasi tersebut. Ia ingat mengatakan kepada komandan Koramil bahwa orang dewasa di daerahnya cukup memenuhi jumlah tersebut dan menanyakan kepada komandan tersebut siapa yang akan bertanggungjawab mengenai anak-anak itu jika makanan habis. Pada akhirnya, hanya mereka orang yang berusia di atas 30 yang didaftarkan.<sup>77</sup>

94. Sementara ada beberapa laporan mengenai orang yang direkrut yang terperangkap dalam tembak-menembak, umumnya mereka yang dipaksa bergabung menderita penyakit dan kelaparan, yang dalam sebagian kasus mengakibatkan kematian. Sejumlah peserta melaporkan bahwa tentara memberi mereka sedikit jagung setiap minggu. Menurut Osório Florindo, yang ketika itu berusia 15 tahun, orang-orang dapat bertahan hidup dengan mencari makanan di hutan. Setiap pagi mereka menyiapkan bekal makanan untuk hari itu dan kemudian berjalan, tanpa berhenti untuk alasan apapun. Jika tidak ada jalan, mereka akan mengambil jalan pintas melalui hutan.<sup>78</sup>

95. Perekrutan massal anak-anak dan lelaki dewasa untuk keperluan operasi ini merupakan gejala yang berbeda dengan perekrutan TBO pada umumnya. Akan tetapi, banyak TBO juga mengambil bagian dalam operasi tersebut. Sementara TBO tidak menerima pelatihan khusus, mereka juga berbeda dengan orang lain yang direkrut untuk Operasi Kikis oleh kenyataan bahwa mereka melayani anggota tentara tertentu atau kadang-kadang melayani anggota Hansip tertentu. Pada tahun 1982, satu dokumen militer menyebutkan bahwa sejak awal operasi setiap kesatuan menggunakan TBO, yang jumlah keseluruhannya diperkirakan 1.200, atau 10% dari seluruh kekuatan pasukan (melebihi persentase yang diizinkan yaitu 5-7%).<sup>†</sup> Tidak diketahui berapa orang dari 1.200 TBO tersebut yang berusia di bawah umur, meskipun dokumen itu menyebut usia antara 12 dan 35 tahun dan pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang ikut operasi ini mengatakan bahwa anak-anak berumur 11 tahun juga ikut serta.

96. Seorang anak berusia 11 tahun, Helio Freitas, pada awalnya tidak terpilih untuk ikut operasi tersebut, tetapi ia sukarela bergabung sebagai TBO untuk seorang Hansip yang mengenal keluarganya. Helio menjelaskan kepada Komisi bahwa ia meminta bergabung karena takut akan dihukum para prajurit jika tetap tinggal di desanya. Kelompoknya mendaki Gunung Matebian, dengan barisan tempur di baris depan, terdiri dari Hansip, tentara dan TBO masing-masing. Terdapat sekitar 15-20 orang Hansip dan satu peleton yang terdiri dari 30 tentara. Kebanyakan anggota Hansip masing-masing memiliki satu orang TBO, sementara para prajurit tentara berbagi beberapa TBO di antara mereka. Satu atau dua kilometer di belakang mereka ada lebih banyak militer, Hansip, TBO dan penduduk sipil. Helio Freitas adalah satu-satunya TBO

---

<sup>\*</sup> Pernyataan HRVD 05785 mencatat bahwa lima orang teman deponen telah meninggal karena kekurangan makanan dan obat-obatan ketika terjadi operasi di Manatuto. Dalam Basis data pelanggaran hak asasi manusia juga ada kesaksian tangan kedua mengenai seorang laki-laki berumur 15 tahun bernama Januario Mendes yang ditembak mati di kamp pada waktu Operasi Kikis oleh seorang anggota Hansip di hadapan dua orang saksi. Pernyataan HRVD 03943.

<sup>†</sup> Instruksi Operasi No. INSOP 3/II/1982, halaman 7: "Sejak permulaan Operasi Pemulihan Keamanan, setiap satuan menggunakan TBO. Jumlah TBO yang diizinkan adalah antara 5%-7% dari jumlah pasukan. Tetapi kebanyakan satuan menambahkan jumlahnya dengan memberi dukungan bukan kepada satuannya, tapi kepada perorangan, sehingga menjadi 10% dari kekuatan. Pada Periode awal OPS KIKIS pertengahan 1981, ada 15 batalyon yang beroperasi dengan jumlah 1.200 orang TBO."

anak yang berada di garis depan, tetapi di belakang ada TBO lain seusianya dan banyak anak-anak di antara penduduk desa. Semua anak-anak berusia di atas 10 tahun. Tanggung jawabnya sama dengan para TBO yang digunakan dalam operasi biasa: memasak, mencuci dan menyiapkan kamp. Kelompoknya tidak bertemu Falintil dan hanya menangkap dua penduduk sipil, salah satunya adalah anak-anak.<sup>79</sup>

#### 7.8.2.2. Anak-anak yang direkrut milisi pro-otonomi

97. Walaupun paramiliter telah ada sejak hari-hari pertama pendudukan Indonesia, pada 1998-1999 muncul suatu jenis baru paramiliter. Ini merupakan tanggapan terhadap iklim politik di Timor-Leste yang tercipta oleh jatuhnya Soeharto dari kekuasaan dan indikasi-indikasi dari Presiden Habibie mengenai pergeseran politik terhadap wilayah ini, yang berpuncak pada pengumumannya mengenai referendum pada bulan Januari 1999. Beberapa bulan sebelum pengumuman itu sudah ada tanda-tanda mengenai mobilisasi kelompok-kelompok milisi, namun sejak awal tahun 1999 jumlah milisi meningkat dan mereka bergerak cepat untuk merekrut ribuan anggota. Milisi yang telah lama ada, seperti Tim Saka, Tim Alfa dan Halilintar, juga berusaha memperbesar keanggotaannya. Milisi tersebut merekrut anggota dari berbagai organisasi pertahanan sipil, seperti Ratih dan Hansip dan juga dari jaringan kelompok kriminal, pemuda, dan gerombolan lainnya, orang-orang Timor Barat dan anggota-anggota aktif tentara. Mereka juga merekrut banyak pemuda, termasuk anak-anak dalam jumlah yang tidak diketahui. (Daftar keanggotaan dan catatan lain diperkirakan telah diambil atau dihancurkan pada tahun 1999; lihat Bagian 4: Rezim Pendudukan untuk informasi lebih lengkap tentang milisi tahun 1999.)

98. Dalam kasus-kasus perekrutan anak-anak yang didokumentasikan Komisi, 6,2 % (9/146) dilakukan oleh milisi pro-integrasi. Semua kasus itu terjadi pada tahun 1999. Enam dari sembilan kasus melibatkan anak-anak usia 15 tahun dan lebih. Tiga kasus lainnya melibatkan anak-anak yang tidak diketahui umurnya. Angka-angka ini tidak menunjukkan bahwa anak-anak dijadikan sasaran perekrutan milisi. Meskipun demikian, angka-angka tersebut juga tidak menunjukkan bahwa anak-anak diberi perlindungan yang memadai terhadap perekrutan.

99. Analisis ini didukung oleh sumber-sumber lain yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggota milisi adalah orang muda dan remaja. Seorang reporter Timor-Leste mengatakan kepada seorang peneliti Dana Darurat Anak-Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) bahwa milisi Besi Merah Putih (BMP) memiliki sebanyak 100 anggota yang berusia di bawah 18 tahun ketika reporter perempuan ini berkunjung ke Liquiça pada bulan April 1999:

*Saya berbicara dengan beberapa anggota BMP. Mereka masih muda, sangat muda. Ada beberapa senjata yang besarnya hampir sama dengan mereka.<sup>80</sup>*

100. Pada bulan September 1999, seorang wartawan lain melaporkan bahwa sebagian besar milisi adalah remaja dan dalam beberapa kasus, anak-anak yang kelihatannya baru berusia 12 tahun.<sup>81</sup> Seorang anggota milisi anak dari Atabae (Bobonaro) memberitahukan bahwa sekitar 60 anak lainnya, termasuk 20 anak perempuan, telah direkrut ARMUI (Atabae Rela Mati Untuk Integrasi), suatu kelompok bentukan dari kelompok paramiliter lama Halilintar di Atabae.<sup>82</sup>

101. Kelompok-kelompok milisi dibagi ke dalam kelompok-kelompok lebih kecil menyerupai militer seperti peleton dan kompi. Misalnya, seorang anak anggota milisi ARMUI mengatakan kepada UNICEF bahwa milisi tersebut memiliki 20 peleton, yang masing-masing terdiri dari 40 orang.<sup>83</sup> Meskipun hanya sedikit anggota milisi anak yang sudah diwawancarai, namun mereka memberitahukan bahwa ada anak-anak lain di dalam kelompok mereka. Seorang anggota gerakan klandestin, yang dipaksa bergabung dengan Dadurus Merah Putih di Maliana (Bobonaro), menyampaikan kepada UNICEF bahwa ada lebih dari 10 anak laki-laki di dalam kelompoknya yang ambil bagian dalam tugas penjagaan dan pembakaran rumah, di antara mereka ada yang baru berusia 10 tahun.<sup>84</sup>

## Metode Perekrutan

102. Menurut satu laporan yang dikeluarkan Yayasan HAK beberapa bulan sebelum referendum, terjadi suatu “gelombang keanggotaan paksa” pada bulan Desember 1998 dan Januari 1999 ketika milisi mulai merekrut penduduk sipil.<sup>85</sup> Perekrutan disebutkan dilakukan dengan target yang ditentukan pejabat pemerintah dan militer – biasanya 10 orang untuk setiap desa.<sup>86</sup> Milisi BMP, yang dibentuk pada tanggal 27 Desember 1998 di Maubara, Liquiça:

*Anggotanya direkrut dari kalangan petani biasa, orang tua dan anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun. Menurut beberapa narasumber, proses perekrutan dilakukan dengan teror, intimidasi, ancaman kematian, dan stigmatisasi sebagai orang “pro-kemerdekaan.” Orang-orang yang akhirnya mau bergabung dengan kelompok tersebut dijanjikan upah sebesar Rp 25.000 per hari. Kelompok ini adalah salah satu yang paling aktif melakukan teror, intimidasi, melukai dan membunuh penduduk sipil.<sup>87</sup>*

103. Kesaksian, keterangan baru, pernyataan yang disampaikan para pelaku dalam Proses Rekonsiliasi Komunitas (PRK) dan Profil Komunitas<sup>88</sup> mengindikasikan bahwa banyak anak-anak yang bergabung dengan milisi karena paksaan dan intimidasi, termasuk ancaman mati terhadap mereka atau keluarga mereka. Semua anak yang diwawancarai untuk penelitian UNICEF dan banyak dari mereka yang memberikan pernyataan kepada PRK mengaku telah direkrut secara paksa. Sementara pengakuan tersebut agaknya dapat dipercaya dan didukung oleh perekrutan anggota-anggota kelompok klandestin,<sup>89</sup> kenyataan bahwa sampel ini hanya mencakup mereka yang memilih kembali ke Timor-Leste harus dipertimbangkan ketika menilai pernyataan-pernyataan tersebut. Ini khususnya berlaku karena pengucilan yang dialami oleh mantan anggota milisi.

104. Rofino Mesak mengikuti program rekonsiliasi komunitas Komisi di desa Abani (Passabe, Oecusse) karena keterlibatannya dalam milisi Sakunar (Kalajengking) ketika berusia 17 tahun. Ia mengatakan bahwa dirinya dipaksa bergabung dalam milisi tersebut oleh C3, pemimpin milisi tersebut, dengan ancaman akan dibunuh.<sup>90</sup>

105. Antero bergabung dengan milisi Sakunar hanya satu bulan sebelum Konsultasi Rakyat pada tahun 1999 ketika berusia 17 tahun. Diwawancara di Penjara Becora di Dili, ia mengatakan kepada seorang peneliti:

*Milisi mengancam akan membunuh saya kalau tidak bergabung dengan mereka – karena itulah saya ikut mereka...Pemimpin Sakunar mengatakan kepada kami kalau semua anak muda harus ikut milisi dan kalau menolak, mereka akan ditembak. Saya patuh pada perintah mereka karena saya takut mati. Perintah mereka adalah kami harus membakar rumah karena pemiliknya adalah dari kelompok pro-kemerdekaan...Di Kefa [Kefamenanu, Timor Barat] banyak sekali milisi Sakunar yang umurnya di bawah 18 tahun. Ada 50-60 pemuda, dari 14 tahun ke atas, yang sebagian besar asal dari Kefa. Hampir semua kelihatan takut. Komandan-komandan*

---

<sup>85</sup> Komisi telah membuat suatu basis data dari pernyataan yang diberikan oleh para pelaku yang berusaha kembali ke dalam kehidupan desanya, yang berjumlah 1.543 pernyataan, darinya 47 pernyataan berasal dari anak-anak. Lihat Bagian 9: Rekonsiliasi Komunitas.

*mereka bisa menyuruh mereka melakukan apa saja dan kalau mereka tidak mau, mereka dipukuli sampai luka parah...Sejak ikut milisi itu, saya tidak belajar hal-hal yang berguna. Saya hanya belajar mengenai kekejaman – cara membunuh, menghancurkan dan membakar semuanya di Timor Timur.*

106. Venancio, berasal dari desa Lauhata (Liquiça, Liquiça), bergabung dengan milisi BMP empat bulan sebelum Konsultasi Rakyat ketika ia berusia 16 tahun. Keluarganya adalah pro-otonomi, tetapi ia mengatakan kepada UNICEF bahwa ia bergabung dengan milisi karena ancaman dan intimidasi:

*Milisi datang bulan April 1999 setelah mereka menyerang gereja. Saya kaget dan takut karena mereka datang ke sini membawa parang penuh darah. Mereka bilang, "Kalau kalian tidak ikut dengan kami, nanti kami bunuh kalian." Ada yang tua dan ada yang muda. Mereka semua minum dan beberapa tutup mereka punya muka seperti ninja...Kadang-kadang waktu milisi datang mereka tawarkan uang dan kadang-kadang merekaancam kami. Mereka bilang kami harus gabung dengan milisi dan Indonesia akan kasih kami uang, tapi setelahnya kami tidak terima apa-apa...Banyak anak-anak lain yang menjadi milisi tidak punya orangtua, berasal dari keluarga berantakan, putus sekolah dan anak-anak yang terlibat dalam lingkaran perjudian.<sup>91</sup>*

107. Ia mengatakan bahwa setiap malam ia harus bertugas jaga dan ada tujuh anak lain yang bertugas di pos pemeriksaan tempatnya bertugas.

108. Dalam beberapa kasus, pemuda ditangkap dan dipukuli sebelum dipaksa ambil bagian dalam kegiatan milisi. Mundus de Jesus memberikan kesaksian pada sidang rekonsiliasi komunitas di aldeia Caicassa (Maubara, Liquiça) bahwa, meskipun ia melarikan diri dari milisi, BMP menangkapnya pada tanggal 23 April 1999. Ia kemudian bergabung karena takut akan dibunuh. Waktu itu ia berumur 15 tahun dan diberi sepucuk senjata.<sup>92</sup> Komisi juga mendengarkan kasus-kasus lain tentang perekrutan paksa orang muda, misalnya di Covalima untuk masuk kelompok milisi Laksaur.

109. Satu kasus lain, yang juga menunjukkan kerjasama erat antara TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan milisi, dilaporkan kepada Komisi oleh Santiago dos Santos Mendes. Santiago adalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun di Vaviquina (Maubara, Liquiça) ketika dipukuli dan dipaksa menjaga pos milisi sebelum dipulangkan karena luka-lukanya yang parah. Kepada Komisi ia mengatakan:

*Waktu kejadian saya berumur 17 tahun. Pada tanggal 8 April 1999, milisi BMP [Besi Merah Putih] C7 memukul, meninju, menampar, menendang saya di Lisalau, Maubara. Setelah saya disiksa saya dibawa ke Maubara kota tetapi berjalan kaki. Saya berjalan kaki, C7 [dari] BMP mengikuti dengan motor.*

*Ketika kami sampai di Maubara kota, saya disuruh oleh C7 untuk melaporkan diri di Koramil Maubara, pada saat itu saya turuti saja karena saya diancam akan dibunuh jika*

---

<sup>91</sup> Kemudian keluar keputusan bahwa tidak ada bukti yang memberatkannya, UNICEF, halaman 66.



*tidak lapor diri. Di Koramil Maubara saya diinterogasi oleh TNI bernama C8 [orang Indonésia]. Setelah saya diinterogasi, C8 menyuruh saya untuk jaga di pos BMP.*

*Namun tidak jadi karena ada BMP bernama Jorge yang menolak dan melarang saya tidak boleh jaga karena kondisi saya saat itu sudah babak belur. Akhirnya saya diantar oleh BMP Jorge ke kampung saya di Pukelete [Maubara, Liquiça]. Saya tinggal di kampung hanya dua minggu, karena C7 memaksa saya agar ke Atambua [Belu, Timor Barat]. Saat itu saya menolak tetapi C7 mau membunuh saya dan ancam pakai senjata rakitan. Akhirnya sayapun turuti saja. Kejadian ini terjadi karena saya anggota klandestin.\**

110. Vasco mengatakan kepada UNICEF bahwa usianya 14 tahun ketika direkrut oleh BMP di Maubara (Liquiça) pada tahun 1999 dan menjadi anggota milisi ini selama delapan bulan. Ia adalah salah satu dari 15 anak dalam kelompoknya:

*Milisi pertama datang ke desa saya awal Januari. Ketika datang banyak orang yang mereka pukul dan mereka bunuh beberapa orang di desa saya. Mereka katakan kepada kami kalau tidak mau gabung dengan mereka kami akan mati. Mereka bilang, “otonomi paling baik”, dan tetap dengan Indonesia adalah jalan yang benar dan kalau kami ikut CNRT [Conselho Nacional de Resistência Timorese, Dewan Nasional Perlawanan Timor] atau Falintil, mereka akan bunuh kami. Kami ketakutan dan harus bergabung dengan mereka kalau tidak mereka bilang akan bunuh kami. Mereka bilang kalau kami tidak lakukan apa kata mereka, mereka akan bunuh kami. Komandannya datang bersama satu kelompok milisi BMP. Waktu milisi datang orang tua saya sangat takut dan mereka bilang sama saya: “Kalau milisi minta kau lakukan apa saja, kerjakan saja, kalau tidak mereka akan bunuh kita.” Mereka takut. Tadinya orang tua saya suruh saya sembunyi, tapi kemudian milisi temukan saya. Pertama kali milisi tangkap saya bulan Januari, mereka bilang sama saya: “Sekarang kamu milisi!” Mereka janji akan kasih saya uang dan beras dan mereka berikan saya itu semua. Kadang mereka kasih Rp 250 [US\$ 2 sen] dan 10 kg beras.<sup>93</sup>*

111. Anak-anak perempuan juga direkrut paksa, kadang-kadang dipaksa memasak untuk para anggota milisi. Verónica do Rosário, mengungkapkan kepada Komisi bahwa ketika berusia 17 tahun ia ditahan bersama enam temannya di Umenoah (Cunha, Oecussi) pada bulan April 1999 oleh milisi Sakunar. Milisi tersebut menyiksanya dan memaksanya memasak untuk mereka selama beberapa hari.<sup>94</sup> Seorang anak-anak anggota milisi ARMUI di Atabae (Bobonaro) mengatakan kepada seorang peneliti bahwa sekitar 20 anak perempuan dipaksa memasak untuk para komandan milisi.<sup>95</sup>

112. Sudah tanggal 4 September 1999, hari diumumkankannya hasil pemungutan suara Konsultasi Rakyat, seorang anak berusia 16 tahun, Feliciano Machado, mengatakan bahwa

---

<sup>\*</sup> Pernyataan HRVD 05859. Lihat juga pernyataan 07239, di mana seorang anak laki-laki 15 tahun dianiaya dan dibenamkan ke air berulang-ulang oleh para anggota milisi Mahidi di Nunumogue (Hato Builico, Ainaro) dan kemudian dipaksa ikut tugas jaga malam di aldeia Lelo-moo selama semalam sebelum ia berhasil melarikan diri.

dirinya direkrut secara paksa oleh Mahidi setelah diancam bahwa siapapun orang muda yang tidak bergabung akan dibunuh. Ia dipaksa menjaga sebuah pos milisi dan membakar rumah-rumah di Beicala (Hatu Udo, Ainaro).<sup>96</sup>

113. Paksaan juga dilakukan melalui keluarga. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB menemukan bahwa:

*Orang-orang tua diancam dan disuap untuk memaksa orang-orang muda, sedangkan para pemuda dianiaya dan diintimidasi untuk menjadi anggota milisi.<sup>97</sup>*

114. Akan tetapi, tidak semua yang direkrut dipaksa bergabung. Berbagai motif lain mencakup janji imbalan material (walaupun janji tersebut jarang dipenuhi) dan dalam beberapa kasus keinginan untuk lepas dari kemiskinan atau penganiayaan di rumah. Beberapa orang yang direkrut juga berasal dari keluarga yang mendukung atau memperoleh keuntungan dari pendudukan Indonesia, termasuk sebagian yang anggota keluarganya dibunuh oleh kelompok-kelompok pro-kemerdekaan.<sup>98</sup>

### **Kegiatan**

115. Begitu bergabung dengan milisi, anak-anak dikatakan terlibat dalam tugas penjagaan di desa-desa dan pos pemeriksaan di jalan-jalan utama, serta pembakaran dan pembunuhan ternak yang luas. Vasco menguraikan tugas-tugasnya, seperti membawa pesan, memasak, mengumpulkan informasi mengenai CNRT setempat, mendirikan pos pemeriksaan dan membawa kayu bakar. Tetapi ia juga diperintahkan untuk ikut serta dalam berbagai kejahatan yang lebih berat:

*Pertama kali mereka ambil saya dari rumah, kami harus perkosa seorang perempuan dan kemudian bunuh apa saja yang bisa kami temui seperti binatang dan orang. Mereka perintahkan kami untuk perkosa. Kami melakukannya bersama-sama. Setiap hari kami dibawa mereka pakai mobil untuk bakar rumah, bunuh binatang dan aniaya orang...Mereka ancam saya dan bilang bahwa saya harus bunuh orang dan perkosa perempuan. Mereka latih kami cara pakai senjata dan pisau, juga cara serang dan bunuh. Kami dikasih latihan di sebuah rumah di Kaekasain [Maubara, Liquiça], markas besar milisi BMP. Seorang milisi Timor Timur guru kami. Kami juga dilatih dua kali seminggu selama dua jam...Kalau saya menangis di depan mereka, saya bisa mati. Saya cuma menangis kalau di rumah.\**

116. Sembilan bulan sebelum referendum, Francis [nama samaran], berusia 17 tahun, direkrut oleh ARMUI. UNICEF melaporkan bahwa ayahnya telah memintanya bergabung dengan ARMUI pada bulan Desember 1998, setelah milisi mulai secara sistematis memukuli orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan di desanya. Ia dipaksa ikut serta dalam penyerangan-penyerangan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai anggota klandestin:

*Saya dipaksa melakukan operasi dari rumah ke rumah untuk menemukan anggota kelompok klandestin. Kami menemukan anggota-anggota kelompok klandestin Jesus Homen Salvador (JHS). Kami tahu di mana mereka karena*

---

<sup>\*</sup> Ia kemudian menyangkal keterlibatan langsung dalam perkosaan tersebut. UNICEF, halaman 65.

*milisi telah bikin daftar semua anggota klandestin di desa kami...Waktu kami menemukan anggota klandestin JHS, mereka dipukuli dan dimintai luliknya (benda keramat, dalam kasus ini sebuah ikat pinggang kain berwarna merah). Mereka bawa ikat pinggang lulik itu ke pos dan tunggu para pemiliknya datang mengambil, kemudian hajar mereka lagi.<sup>99</sup>*

117. Ayah tiri Francis dipukuli dan seorang teman yang anggota kelompok JHS kemudian dibawa ke pantai dan dibunuh sesudah anak itu terlihat dengan selebar bendera Timor-Leste.

### **Milisi anak yang dibunuh atau dihilangkan**

118. Komisi tidak mendapatkan laporan mengenai anggota milisi anak yang terbunuh di Timor-Leste. Meskipun demikian, sejumlah anak mungkin meninggal dalam kamp-kamp pengungsi di Timor Barat, Indonesia. Sangat biasa bagi anggota milisi anak-anak dipaksa melintasi perbatasan oleh para komandan milisi mereka.<sup>100</sup> Komisi mendapatkan sedikitnya satu kasus anak yang hilang. Alda Martins mengatakan bahwa anak laki-lakinya yang berusia 17 tahun, Agostinho Martins Trindade, telah direkrut secara paksa dari Railaco (Ermera) oleh seorang komandan milisi Aitarak yang bernama C9 pada tahun 1999. C9 memaksa Agostinho lari ke Atambua bersamanya, tetapi kemudian C9 pulang sendirian. Belakangan Alda mendengar dari orang lain bahwa anaknya telah meninggal di Atambua tetapi ia tidak diberi tahu penyebab kematiannya.<sup>101</sup>

### **Dampak**

119. Dampak terbesar pada anggota milisi anak diduga berkaitan dengan kesehatan jiwa mereka. Mereka tidak hanya mengalami trauma yang biasanya terkiat dengan menyaksikan dan berpartisipasi dalam tindak kekerasan, tetapi mereka sekarang juga menanggung stigma berkepanjangan yang dilekatkan sebagian anggota masyarakat kepada orang-orang yang pernah terlihat berada di "pihak yang salah." Banyak mantan anggota milisi yang belum kembali dari Timor Barat (Indonesia) karena takut akan pembalasan atau pengucilan. Ketakutan ini ditambah dengan propaganda milisi dan pemaksaan yang berlanjut dari para pemimpin milisi terhadap para pengungsi di Timor Barat.

120. Mereka yang telah kembali pun menghadapi tantangan yang berat. Sementara hanya ada sedikit kasus kekerasan terhadap mantan milisi, khususnya anggota tingkat rendah, kekhawatiran akan pengucilan sosial memang berdasar. Menurut penelitian UNICEF:

*Radikalisasi pemuda pro-otonomi membawa sedikit dampak positif. Dalam beberapa kasus anak-anak mendapatkan rasa kebersamaan. Namun sebagian besar dampaknya negatif. Sebagian besar anak-anak yang bergabung dengan milisi mengatakan merasa bersalah dan malu dan tampak sangat trauma dengan berbagai pengalaman mereka. Banyak juga yang mati rasa untuk melakukan berbagai tindak kekerasan yang luar biasa. Sebagian besar, seperti para tentara anak pro-kemerdekaan, mengekspresikan ketidakpercayaan pada pihak yang berwenang, khususnya lembaga-lembaga pemerintah.*

---

<sup>99</sup>UNICEF, halaman 19. Seorang pejabat UNICEF mengatakan kepada seorang reporter: "Di antara para pemuda mantan milisi, dari sedikit yang kembali ke desa dan kota asal mereka, sebagian besar mengalami pengucilan dan dicap oleh

121. Venâncio, seorang mantan milisi yang direkrut ketika berusia 16 tahun dari Liquiça, mengatakan kepada UNICEF:

*Sering saya dapat mimpi buruk milisi mau bunuh saya. Waktu saya terbangun saya takut dan merasa tertekan. Anak-anak lain yang masih kecil juga terbangun setelah mimpi buruk di pos jaga. Saya sakit kepala setelah pulang ke Timor-Leste. Saya berusaha melupakan masa-masa itu tetapi kadang cerita buruk datang kembali, jadi saya lakukan apa saja supaya lupa. Kadang saya merasa sedih. Kadang anak-anak lain di sekolah mengata-ngatai saya milisi dan itu bikin saya sangat sedih – saya terpaksa bergabung dengan milisi. Kadang-kadang saya pikir orang-orang bicarakan saya dan saya merasa sangat sedih. Saya takut milisi akan kembali ke sini.<sup>102</sup>*

122. Demikian pula yang dikatakan Vasco kepada peneliti UNICEF:

*Saya dapat mimpi buruk dan saya terbangun karena bayangan ada orang mau bunuh saya. Sekarang saya masih suka terbangun karena mimpi buruk. Saya tidak ingat mimpi saya tapi saya merasa takut ketika bangun. Kadang-kadang rasa senang dan sedih berubah cepat sekali.<sup>103</sup>*

### 7.8.2.3. Anak-anak dalam jaringan klandestin

*“Anak-anak sekolah berumur lima sampai 10 tahun di Tanah Air kita tahu sebanyak yang diketahui orang dewasa tentang taktik penundukan oleh musuh, kontra-informasi, penyusunan dan tentang persekusi organisasi klandestin. Anak-anak ini lahir di masa perang, berperang; perang yang bukan hanya perang orang tua mereka, perang yang bukan hanya perang mereka – suatu perang, perlawanan seluruh rakyat menentang pendudukan asing.”*

*Xanana Gusmão, “A History that Beats in the Maubere Soul: Message to Catholic Youth in East Timor and Students in Indonésia,” Mei 1986.<sup>104</sup>*

123. Salah satu tonggak Perlawanan menentang pendudukan Indonesia adalah Front Klandestin (*Frente Clandestina*). Jaringan bawah tanah ini menjalin hubungan dengan Falintil, Front Bersenjata (*Frente Armada*), menyediakan dukungan dan bertindak mengikuti instruksi mereka. Jaringan ini juga bertindak sebagai saluran antara *Frente Armada* dan Front Diplomatik (*Frente Diplomática*) yang terdiri dari para aktivis yang bekerja di luar negeri untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pada awalnya, jaringan bawah tanah hanya bekerja melalui hubungan-hubungan langsung antara komandan-komandan Falintil dengan kelompok-kelompok kecil. Akan tetapi, pada awal dasawarsa 1990-an, gerakan klandestin berkembang menjadi suatu jaringan yang melingkupi seluruh wilayah negeri dan kegiatan-kegiatannya menjadi semakin terorganisasi secara terpusat.

---

komunitasnya.” Christine T. Tjandraningsih, “Child soldiers, the story behind East Timor’s freedom,” Kyodo (kantor berita), 13 September 2001, halaman 3.

<sup>103</sup> Wawancara CAVR dengan António Tomás Amaral da Costa, Díli, 8 Desember 2003; wawancara CAVR dengan Francisco Guterres “Lú-Olo,” Díli, 28 Maret 2003. Mantan komandan Falintil Eli Foho Rai Boot (Cornelio Gama, L-7) menjelaskan perkembangan gerakan klandestin sebagai berikut: “...demikianlah dari tahun ke tahun, sedikit demi sedikit,

124. Anak-anak sudah terlibat dalam kegiatan sosial dan politik pada tahun-tahun ketika Fretilin masih menguasai wilayah dan sebagian besar penduduk, walaupun awalnya kegiatan ini tidak selalu bersifat klandestin.<sup>\*</sup> Setelah “Wilayah Bebas” ( *Zonas Libertadas* ) yang terakhir hancur pada tahun 1979, jaringan klandestin mulai beroperasi dan melibatkan anak-anak dalam kegiatannya sejak semula. Peran utama anak-anak adalah sebagai penghubung (*estafeta*), mata-mata dan penyebaran informasi. Tidak ada perbedaan jelas di antara kegiatan-kegiatan ini, dan sering kali seorang anak mulai terlibat sebagai *estafeta* dan kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan klandestin lainnya.

### **Bagaimana anak-anak terlibat**

125. Komisi tidak mendapatkan bukti bahwa Perlawanan mempunyai kebijakan eksplisit mengenai pelibatan anak-anak dalam jaringan. Namun dalam praktek anak-anak dilibatkan karena mereka bisa berguna. Ada satu anggapan bahwa anak-anak kemungkinannya lebih rendah untuk dicurigai oleh militer Indonesia dibandingkan dengan orang dewasa. Keterlibatan anak-anak juga dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk menjamin kelanjutan Perlawanan melalui apa yang diperkirakan sebagai suatu perjuangan yang panjang dan berat (*luta dura e prolongada*).<sup>105</sup> Menurut mantan kepala staf Falintil, Taur Matan Ruak (José Maria de Vasconcelos):

*Kalau kita tidak menyiapkan orang-orang lain dan kita mati di tengah perjalanan kita, maka perjuangan kita akan berakhir. Jika ini yang akan terjadi, untuk apa kita menderita?...Bisa dikatakan, strategi ini membuat banyak pemimpin menyadari kenyataan bahwa generasi mendatang adalah faktor penentu dalam proses perjuangan. Kemenangan atau kekalahan tergantung pada mereka. Jika kita berhasil melibatkan anak muda, bisa kita katakan bahwa kemenangan sudah pasti. Kalau tidak, perjuangan akan melemah dan kita tidak bisa menjamin bahwa perjuangan akan berlanjut. Karena itu, anak muda bisa didefinisikan sebagai suatu faktor yang fundamental. Untuk tujuan itu, setiap keluarga Timor punya peran yang sangat penting, dari ayah sampai ibu dan anak, untuk membuat keluarga menjadi inti dari perlawanan.*<sup>106</sup>

126. Sejak awal, Perlawanan menggunakan hubungan keluarga untuk mendekati anak-anak. Misalnya, paman dan kakak di hutan menghubungi sanak-saudara yang muda untuk diminta membawa pesan atau memberikan makanan. Tidak lama kemudian, pencarian ini diperluas melalui Pandu Katolik (*Escuteiros*), kelompok-kelompok remaja Katolik di paroki-paroki dan kelompok-kelompok orang muda yang lain.<sup>†</sup> Dengan pembentukan Conselho Nacional da

---

perubahan terus berjalan. Kelompok ini semakin dikenal di setiap distrik. Dikenalnya kelompok di setiap distrik ini menunjukkan adanya kelompok-kelompok yang bekerja bagi kemerdekaan terus bertambah, sekalipun di setiap kelompok di setiap distrik tidak saling mengenal. Tetapi mereka punya visi dan misi yang sama, yaitu bagaimana antar front (front klandestin, diplomatik, dan front gerilya) bisa saling mendukung demi terjalannya hubungan erat demi satu tujuan yaitu kemerdekaan Timor-Leste.” Wawancara CAVR dengan Eli Foho Rai Boot (Cornelio Gama, L-7), mantan Komandan Kedua Region III, Laga, Baucau, 9 April 2003.

<sup>\*</sup> Wawancara CAVR dengan Virgílio da Silva Guterres, Dili, 25 Mei 2004: “Yang usianya di bawah 17 tahun lebih banyak mengikuti kegiatan di aldeia seperti kebudayaan. Yang sudah kelas 3 sekolah dasar direkrut untuk diberi pelatihan tentang program alfabetisasi, kesehatan dan pendidikan politik. Pegangannya adalah Manual e Programa Político Fretilin dan Cartilha Política.” Wawancara CAVR dengan Virgílio da Silva Guterres, Dili, 25 Mei 2004.

<sup>†</sup> Maria Teresa dos Santos adalah seorang mantan pemimpin pemuda di Baucau dan pemimpin Muda-Mudi Katolik, suatu kelompok resmi pemuda Gereja yang didirikan pada akhir dasawarsa 1980-an). Ia mengatakan bahwa tugas-tugas kelompok tersebut termasuk mengantarkan surat dan mengumpulkan dana untuk Falintil dengan meminta sumbangan untuk gereja. Lebih banyak perempuan yang dipilih untuk tugas ini karena prajurit tentara lebih sulit mengeledah mereka. Wawancara CAVR dengan Maria Teresa dos Anjos, Baucau, tidak bertanggal. Perlawanan juga

Resistência Maubere (CNRM) pada tahun 1987, peran pemuda klandestin lebih diakui secara resmi dan Komite Eksekutif menunjuk satu orang khusus untuk menangani urusan pemuda, termasuk anak-anak.<sup>\*</sup>

127. Sejak tahun 1988 semakin banyak pelajar sekolah menengah yang terlibat dalam jaringan bawah tanah. Para pelajar di sekolah Katolik berbahasa Portugis, Externato de São José, di Balide, Dili, mulai mengorganisasikan diri dan gerakan mereka menyebar melalui kegiatan-kegiatan olahraga atau melalui para mantan siswa yang telah menjadi guru di sekolah-sekolah lain. Para pemimpin Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sering kali bertemu dengan organisasi-organisasi pemuda lain dan membicarakan masalah-masalah politik di saat penyelenggaraan kegiatan olahraga antar sekolah. Eurico Guterres pernah menjadi ketua OSIS dan adalah seorang anggota klandestin pada waktu ia ditangkap pada tahun 1988; penggantinya sebagai ketua OSIS di sekolahnya, Ricardo da Costa Riberio, juga terlibat dalam kegiatan klandestin.<sup>107</sup>

128. Tidak ada petunjuk bahwa ada upaya eksplisit dari Falintil untuk merekrut pelajar ke dalam jaringan klandestin. Seorang pelajar merasakan dampak dari pendudukan ketika pamannya terbunuh saat ia duduk di sekolah dasar dan ingat perkelahian-perkelahian yang terjadi di sekolah menengah pertama antara pelajar Timor-Leste dengan pelajar Indonesia yang memicu perasaan nasionalis. Namun, baru di sekolah menengah atas ia menjadi resmi terlibat dalam gerakan klandestin setelah menerima satu pesan dari Falintil:

*Saya masuk ke sekolah menengah dan di sana saya bertemu dengan banyak teman saya yang terlibat dalam semacam gerakan klandestin, gerakan bawah tanah. Saya mulai merasa bahwa saya punya kewajiban untuk turut menyumbang, seperti menyumbang uang ke hutan. Salah seorang kerabat saya adalah anggota militer Indonesia, dan kami mencuri pakaian-pakaian seragamnya, lalu mengirimkan pakaian itu ke hutan untuk diberikan kepada Falintil. Waktu itu saya berumur sekitar 14 atau 15 tahun...Sebetulnya pada waktu itu saya tidak tahu banyak tentang gerakan klandestin, tapi teman saya mendapat surat dari Falintil dan dia tunjukkan kepada saya...Ada pesan dari Falintil yang mengatakan: "Kalian adalah masa depan negeri ini. Kalian harus giat belajar, tapi kalian juga harus cari cara untuk membantu kami di hutan." Jadi, itu mengilhami saya untuk melakukan sesuatu.<sup>108</sup>*

### **Alasan bergabung dengan Perlawanan**

129. Sebagaimana disebutkan di atas, anak-anak banyak yang mulai terlibat dalam kegiatan klandestin melalui kontak dengan anggota keluarga yang ada di hutan atau anggota Falintil. Ricardo da Costa Ribeiro mengatakan kepada Komisi bahwa ia mulai menghubungi pamannya di Falintil pada tahun 1984 saat berusia 13 tahun setelah mendengar tentang tokoh-tokoh Perlawanan dari teman-teman sekelasnya dan dari pastornya, Pastor Locatelli. Ia mengisahkan komunikasinya dengan pamannya:

---

bekerja melalui kelompok pemuda lainnya, Sagrada Familia. Kelompok ini adalah bagian dari jaringan klandestin dan tidak mempunyai status legal seperti yang dimiliki Mudika.

<sup>\*</sup> Di setiap sekolah menengah ada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan kelompok-kelompok klandestin berusaha menyusup ke setiap OSIS. Segini tahun 1979 di Baucau, para pemimpin klandestin yang membangun jaringan melihat adanya potensi dalam kelompok-kelompok pemuda gereja. Menurut Marito Reis, "Saat itu kami berencana membangun jaringan dengan gereja karena kami tahu bahwa gereja punya organisasi pemuda." Wawancara CAVR dengan Marito Reis, Baucau, 17 November 2002.

*Saya sering berhubungan dengan paman saya, Rodak, yang berada di hutan, bukan lewat surat, tapi lewat rekaman-rekaman kaset yang dia kirim kepada saya untuk saya dengarkan. Pada waktu itu saya berumur 15 tahun, kelas satu SMP, dan dia selalu memberi saya bimbingan tentang politik dan tujuan gerakan perlawanan. Saya sudah paham dan tahu pasti tentang hal ini, karena di Sekolah Menengah Pertama Fatumaca [Baucau] hampir setiap orang adalah anak dari seorang "GPK" [Gerakan Pengacau Keamanan]. Setiap hari kami biasanya bertanya satu sama lain: "Di mana ayahmu?" Dan setiap orang akan menjawab, "Ayah saya ada di hutan", "Ayah saya dibunuh oleh militer Indonesia."<sup>109</sup>*

130. Mengalami atau menyaksikan berbagai pelanggaran yang dilakukan militer Indonesia juga mendorong anak-anak untuk bergabung dengan jaringan klandestin. Sebagai contoh, Naldo Gil da Costa mengatakan kepada Komisi bahwa ia menjadi aktif sebagai seorang *estafeta* pada usia 11 tahun ketika ayahnya dieksekusi oleh tentara Indonesia setelah peristiwa serangan Falintil terhadap pos ABRI di Lospalos (Lautém) pada tanggal 11 Maret 1985.<sup>110</sup>

131. Aquilina Imaculada menjelaskan bahwa ia menjadi seorang *estafeta* melalui hubungan keluarganya dan setelah mengalami pengalaman-pengalaman buruk di tangan militer Indonesia. Ia dan keluarganya dipaksa oleh ABRI untuk membujuk anggota-anggota keluarga lainnya yang sedang berjuang bersama Falintil agar menyerahkan diri. Setelah hal ini mengakibatkan kematian beberapa anggota keluarganya, ia mengatakan bahwa ia disuruh untuk menjadi *estafeta* oleh pamannya, Komandan Falintil Region I, Paulino Gama (Mauk Moruk) guna membantu keluarganya.<sup>111</sup>

132. Dalam kasus-kasus yang dikaji oleh Komisi, anak-anak bergabung dengan jaringan klandestin secara sukarela. Tidak ada kasus mereka mengaku dipaksa bergabung, tetapi bagaimanapun juga, karena sering kali anak-anak bergabung untuk membantu anggota keluarga, mereka mungkin saja melakukannya karena merasa berkewajiban atau mereka merasa tidak dapat menolak. Juga ada sebagian anak yang direkrut secara kebetulan dan kesadaran politik mereka berkembang kemudian. Misalnya, Mateus da Costa disebutkan berusia 17 tahun ketika mendapat kesempatan bertemu dengan anggota Falintil pada tahun 1983, ketika ia sedang berburu di hutan dekat Ainaro. Mereka membujuknya untuk bekerja sebagai seorang *estafeta*, yang kemudian membawanya pada pengorganisasian kelompok-kelompok klandestin.<sup>112</sup> Kasus-kasus lain mengindikasikan bahwa anak-anak digunakan tanpa ada persetujuan yang jelas dari mereka ataupun pengetahuan mengenai risiko yang terkandung di dalamnya. Francisco Silva Guterres dari Becusi (Dili) mengungkapkan bagaimana suatu hari ia diberi sepucuk surat oleh seseorang yang tidak dikenal untuk disampaikan:

*Dia mengatakan kepada saya bahwa saya harus pergi ke Koramil dan menonton TV di sana, dan akan ada seseorang yang menemui saya untuk mengambil surat itu. Sebelum saya pergi, dia berkata, "Kamu harus berpakaian seperti yang telah mereka rencanakan" yang berarti bahwa saya harus memakai seragam putih. Orang itu memasukkan satu amplop ke saku belakang saya untuk disampaikan kepada seseorang yang juga saya tidak tahu, yang akan datang ke Koramil pada malam itu saat saya dan orang-orang lain sedang menonton televisi. Orang yang menyuruh saya melakukan ini memberi instruksi bahwa ketika orang itu datang: "Kamu jangan berbalik untuk melihat. Jangan lakukan itu." Maka saya pun mengikuti instruksi-instruksi ini. Dan orang itu pun datang dan mengambil surat tersebut dari saku belakang saya, lalu membawanya pergi, dan saya tidak pernah tahu siapa yang mengambil amplop itu.<sup>113</sup>*

## **Dampak**

133. Sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya mengenai pembunuhan, penahanan, penyiksaan dan kekerasan seksual, ada banyak risiko pribadi ketika terlibat dalam gerakan klandestin. Militer, polisi dan badan-badan lain mengarahkan sasaran pada anggota-anggota gerakan bawah tanah untuk memutuskan jalur dukungan pada gerakan perlawanan bersenjata. Mereka juga ingin memperoleh informasi mengenai jaringan, mengenai pejuang bersenjata dan mengenai tempat keberadaan pemimpin-pemimpin Falintil. Anak-anak tidak diperlakukan dengan perkecualian oleh pihak berwenang Indonesia. Banyak kasus penganiayaan terhadap anak-anak yang menjadi anggota klandestin diuraikan di bawah ini.

134. Seperti keterlibatan anak-anak sejak usia dini dalam militer Indonesia, mereka yang terlibat aktif dalam jaringan klandestin juga mengalami masalah dalam pendidikan mereka. Alexio Cobra menyatakan bahwa sesudah penutupan Sekolah Externato di Dilli, yang merupakan satu pusat gerakan klandestin, beberapa pelajar yang sudah sering ditahan memutuskan untuk menghentikan sekolahnya dan berkonsentrasi pada gerakan.<sup>114</sup> João Sarmento, yang bersekolah di Seminari Nossa Senhora de Fátima, yang letaknya bersebelahan dengan sekolah tersebut, mengatakan bahwa ia meninggalkan sekolah selama enam bulan karena ada desas-desus bahwa Externato dan sekolah-sekolah di sekitarnya akan diserang dan ditutup.<sup>115</sup>

## **Estafeta**

135. Istilah *estafeta* diberikan kepada para kurir yang membawa informasi dan surat-menyurat untuk Perlawanan. Mereka juga memasok makanan, obat-obatan dan barang-barang lain untuk orang-orang yang tinggal di dalam hutan. Sebagaimana ditunjukkan oleh contoh-contoh di atas, banyak anak masuk ke dalam gerakan klandestin dengan bekerja sebagai *estafeta*. Kegiatan *estafeta* banyak tergantung pada hubungan keluarga dan dimulai segera setelah invasi ketika para gerilyawan berusaha berkomunikasi dengan anggota-anggota keluarga mereka di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Indonesia. Untuk informasi lebih jauh tentang kemunculan front klandestin, lihat Bagian 5: Perlawanan: Struktur dan Strategi.

136. Gregório Saldanha mengatakan bahwa dirinya baru berumur 13 tahun ketika konflik pecah dan ia bersama keluarganya melarikan diri ke Karau Maten, suatu wilayah pegunungan di dekat Dili. Mereka kembali ke kota Dili tiga bulan kemudian setelah tentara Indonesia menjatuhkan selebaran dari udara yang menyerukan kepada orang-orang untuk menyerah. Francisco Lobo, kakak laki-laki tertua Gregório, meneruskan menjadi gerilyawan di hutan:



*Kami bersepakat bahwa saya akan kembali ke kota dan kakak saya, Francisco Lobo, akan terus tinggal sebagai gerilyawan. Paman saya, Mau Tersa, yang tinggal di pinggiran kota, bekerja sebagai estafeta, menyampaikan surat-surat ke dalam dan ke luar...Saya sendiri selalu bertemu dengan kakak saya [Francisco Lobo] pada tahun-tahun 1977-1978...dan itu berlanjut...Keberadaan mereka di hutan adalah motivasi besar bagi kami, karena mengetahui bahwa gerakan perlawanan masih hidup, jadi sepanjang 1980-an saya memainkan bagian aktif dalam jaringan klandestin yang luas dan sistematis.<sup>116</sup>*

137. Ketika gerakan klandestin menjadi semakin terorganisasi dan terstruktur, maka dibentuklah sistem-sistem penyampaian informasi resmi dan sangat rahasia yang dikelola oleh *estafeta*. Naldo Gil da Costa menggambarkan kerja seorang *estafeta* sebagai berikut:

*Ketika menjadi seorang estafeta, di hari-hari pertama saya diberi arahan-arahan mengenai bagaimana membawa surat ke dalam dan ke luar kota dan hutan. Bila bertemu dengan musuh atau tentara di tengah perjalanan, kami harus melenyapkan surat-surat yang kami bawa dengan cara menelannya. Kami dilatih oleh anggota-anggota Falintil yang diberi tugas ini oleh Komandan...Sebagai seorang estafeta saya ditugaskan untuk mengorganisasi caixa geral ["kotak umum," pusat jaringan klandestin di wilayah tertentu] untuk menyampaikan surat antara anggota Falintil dan mereka yang bekerja sebagai anggota klandestin di kota-kota. Saya tidak pernah memberikan informasi, baik lisan maupun tertulis, kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya.<sup>117</sup>*

138. Tidak semua *estafeta* itu anak-anak. Namun demikian, ada keuntungan taktis dari menggunakan anak-anak untuk melakukan kerja ini. Analisis mengenai pernyataan-pernyataan yang diambil oleh Komisi menunjukkan bahwa mayoritas pelanggaran oleh aparat keamanan Indonesia dilakukan terhadap orang-orang yang berusia antara 18 dan 40 tahun, yang menunjukkan bahwa kelompok usia ini yang menjadi fokus perhatian mereka.

139. Anak-anak cenderung kurang dicurigai. Aquilina Imaculada menceritakan pengalamannya sebagai seorang *estafeta* antara tahun 1990 dan 1993 ketika anak-anak digunakan untuk menghindari kecurigaan:

*Pada waktu itu, kebebasan bergerak bagi orang-orang dewasa terbatas, maka kami, anak-anak, diajari untuk menjadi penghubung, walaupun ini sangat berisiko karena jika diketahui orang lain, ini bisa fatal bagi keamanan seluruh keluarga kami. Karena itu, kami harus berpikir kreatif, beroperasi seperti tikus di rumput. Kalau kami datang dari satu arah, kami harus kembali dari arah yang lain. Kami sering mencuri waktu di saat mengambil air...atau mengumpulkan kayu bakar atau waktu kami memberi makan ternak. Kadang kami keluar di malam hari dan kadang saat fajar sebelum orang-orang bangun tidur.<sup>118</sup>*

140. Seperti yang digambarkan kasus-kasus di atas, bekerja sebagai *estafeta* sering kali merupakan pintu masuk pertama ke dalam gerakan klandestin dan dalam banyak kasus ini

membawa pada kegiatan-kegiatan klandestin yang lain. Ricardo Ribeiro, misalnya, berlanjut dengan mengorganisasikan orang muda, baik di Sagrada Familia maupun kelompok-kelompok pemuda. Justru karena dukungan yang diberikan orang-orang sipil kepada kerabat mereka yang anggota Falintil, maka militer Indonesia mulai memindahkan keluarga para anggota Falintil menjauh dari kampung halaman mereka dan akhirnya ke pulau Ataúro (Dili) pada awal dasawarsa 1980-an.<sup>119</sup>

### **Anak-anak sebagai mata-mata dan pengintai**

141. Dalam dasawarsa 1990-an, orang dewasa yang terlibat dalam front klandestin mulai melibatkan anak-anak sebagai pengintai dan sebagai penjaga keamanan bagi para pemimpin Falintil dan Fretilin ketika mereka memasuki kota.

142. Naldo Gil da Costa, seorang anak lelaki dari satu keluarga pro-kemerdekaan, berusaha melarikan diri ke hutan ketika ayahnya terbunuh:

*Saya ingin lari ke hutan, tetapi Adjunto Larimau tidak menyetujui permintaan saya dan dia menyarankan, karena saya masih kecil, lebih baik saya belajar dan mencari jalan untuk tetap bekerja bagi Perlawanan.*

143. Kemudian, ia mendapat kepercayaan dari para pemimpin Perlawanan, termasuk Xanana Gusmão, dan mengambil bagian dalam mengorganisasikan jaringan klandestin di Region Tengah (Região Centro). Pada waktu itu Naldo berusia 14 tahun:

*Pada tahun 1990, Sabalae memerintahkan saya untuk mengorganisasi sebuah caixa di Ponte Leste... Pada bulan Juni 1991, saya mengantarkan Komandan Xanana ke Lospalos untuk bertemu dengan Falintil di Ponta Leste, bersama-sama dengan Sabalae, Inácio Bernardino alias Adik, Acacio Bernardino alias Moris Nafatin, Americo dan kakak saya Doben Hadomi Timor.<sup>120</sup>*

144. Seorang guru dari Ermera mengungkapkan kepada Komisi bagaimana ia menyuruh anak-anaknya sendiri untuk menjaga keselamatan Konis Santana, ketika pemimpin Perlawanan ini tinggal di rumahnya pada tahun 1993:

*Pada awalnya, hal ini dirahasiakan dari anak-anak. Tetapi setelah Konis datang untuk tinggal di rumah kami, maka kami harus mengajarkan kepada anak-anak untuk merahasiakannya dan kami memberi mereka tanggung jawab untuk menjadi penjaga keamanan. Tugas mereka adalah menjaga tempat-tempat yang memiliki pemandangan jelas, sehingga mereka bisa mengawasi situasi dengan jelas. Mereka harus berkomunikasi dengan kami dengan menggunakan kode-kode yang telah kami setujui sebelumnya seperti batuk-batuk tiga kali atau berteriak sesuai kode.<sup>121</sup>*

145. Serupa dengan itu, anak-anak Gil Araújo dari Ainaro diberi tugas untuk menghibur Xanana dan bekerja sebagai pengintai. Di Soibada (Manatuto), Bibrani mengorganisasikan para keponakannya baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga tempat persembunyian

---

<sup>119</sup> Naldo Gil da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004. Larimau adalah nama klandestin dari seorang kader politik yang bekerja dengan Falintil di Region I – Lospalos, Lautém.

Francisco Guterres (Lú-Olo), Virgílio dos Anjos (Ular Rheik), Domingos Raul (Falur Rate Laek), dan Américo Ximenes (Sabica Besi Kulit).<sup>\*</sup>

## Kampanye

146. Jaringan klandestin juga terlibat dalam penyebaran informasi, baik di tingkat masyarakat untuk memperluas dukungan bagi gerakan perlawanan, maupun di tingkat internasional untuk membangkitkan kesadaran tentang Timor-Leste. Kampanye umumnya dilakukan oleh kelompok-kelompok orang muda, termasuk pelajar sekolah menengah dan mahasiswa universitas, serta anggota kelompok-kelompok pemuda gereja seperti Mudika. Sebagian orang yang disebutkan di atas sebagai *estafeta* terlibat dalam membangun kegiatan ini di dalam jaringan klandestin.

147. Aquilina Imaculada, misalnya, bergabung dengan jaringan klandestin sebagai seorang *estafeta* dan kemudian menjadi seorang juru kampanye yang terkemuka. Pada tahun 1995, pada usia 17 tahun, ia mengorganisasikan beberapa kelompok klandestin di Baucau. Dengan nama klandestin Peregrina, ia menjadi penghubung antara L-7 dan Sagrada Familia, yang merupakan salah satu jaringan klandestin terbesar di Baucau. Kemudian Peregrina beranjak ke pengorganisasian kegiatan kampanye “dari pintu ke pintu” di kalangan pemuda, perempuan dan orang tua. Metode kampanye ini dilakukan melalui berbagai diskusi rahasia, sering kali diselenggarakan di acara-acara pesta ulang tahun atau perayaan lainnya untuk menghindari kecurigaan.<sup>122</sup>

148. Gregório Saldanha, juga seorang *estafeta*, kemudian berlanjut menjadi pemimpin organisasi pemuda klandestin, OJETIL, serta menjadi pengurus Komite Eksekutif dalam Front Klandestin.

149. Kunjungan-kunjungan orang asing pada dasawarsa 1990-an, meskipun terbatas dan diawasi secara ketat, telah membuka peluang baru untuk kampanye. Demonstrasi terbuka, yang biasanya diselenggarakan dan dihadiri aktivis-aktivis pelajar dan pemuda, mulai digunakan sebagai taktik untuk menarik perhatian internasional. Para aktivis menggunakan sejumlah taktik seperti melemparkan batu, bertanya kepada orang-orang Indonesia, “Kapan pulang?”, dan menulis grafiti atau menempelkan berbagai selebaran dan poster anti-integrasi di tempat-tempat umum.<sup>123</sup>

150. Antara tahun 1989 dan 1999, gerakan kemerdekaan menyelenggarakan setidaknya 60 demonstrasi di Timor-Leste dan Indonesia<sup>†</sup> Sebagian demonstrasi terjadi secara spontan. Belchior Francisco Bento Alves Pereira menyampaikan kepada Komisi:

---

<sup>\*</sup> Lihat juga UNICEF, halaman 44. Salah satu studi kasus adalah mengenai Luis, yang berusia 10 tahun ketika bergabung dengan gerakan klandestin sebagai *estafeta* dan mata-mata: “Saya harus mencari informasi untuk Falintil. Saya harus mendengarkan pembicaraan orang-orang lain dan melaporkannya kepada kakak saya, Fabio. Ketika melakukan ini, saya takut. Saya mengawasi rumah orang-orang tertentu. Kakak saya menyuruh saya pergi dan melakukan ini dan saya beritahukan kepadanya apa yang mereka bicarakan dan lakukan. Di desa tidak ada pemuda lain yang melakukan pekerjaan ini. Saya juga membawa air dan sayur-mayur untuk Falintil di ladang di belakang desa. Saya pura-pura mau bekerja di ladang. Saya melakukan tugas-tugas klandestin setelah pulang dari sekolah.”

<sup>†</sup> “Karena aksinya cukup terbuka, strategi ini bisa disebut ‘semi-klandestin’ meskipun aksi-aksi ini direncanakan oleh kelompok-kelompok klandestin.” Vitorino dos Reis, wawancara dengan Gregório Saldanha, *Talitakum* (Dili), No. 38, 25 Maret-1 April 2002, halaman 24-25.

*Pada tanggal 17 Maret 1990, ada kejadian di dekat SMP St. Paulus di Dili. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi pagi hari ketika kami datang di sekolah, bendera dan tali [dari tiang bendera] telah dicuri oleh seseorang. Ada coretan di tembok-tembok sekolah kami. Ada tulisan bahwa integrasi itu tidak baik. Kami tidak memperhatikan tulisan itu dan terus belajar. Kemudian, banyak intel [orang-orang yang bekerja secara resmi maupun tidak untuk jaringan intelijen Indonesia] muncul di sekitar sekolah kami, maka kami pun bereaksi. Kami keluar dari sekolah dan melemparkan [benda-benda] ke arah mereka. Saya yang mulai melempar pertama kali. Pada waktu itu saya baru berumur 13 atau 14 tahun.*

151. Akan tetapi, sebagian besar demonstrasi direncanakan secara cermat agar bersamaan waktunya dengan kunjungan internasional. Para aktivis pemuda sering terlibat dalam merencanakan atau menyelenggarakan aksi-aksi ini,<sup>†</sup> tetapi dalam banyak kasus, mereka diarahkan para tokoh senior dalam Perlawanan yang mengirimkan instruksi melalui jaringan klandestin. Mateus dos Santos, misalnya, terlibat dalam kegiatan sel klandestin Aleixo Cobra di awal dasawarsa 1990-an dan diberi informasi serta instruksi melalui jaringan ini setiap kali ada rencana demonstrasi.<sup>‡</sup>

152. Demonstrasi terbesar di masa pendudukan terjadi pada tanggal 12 November 1991. Demonstrasi ini pada awalnya direncanakan diselenggarakan bertepatan dengan kedatangan suatu delegasi parlemen Portugis yang dijadwalkan pada awal November, tetapi kunjungan ini dibatalkan mendadak pada saat terakhir. Tetapi pada malam hari tanggal 28 Oktober, satu gerombolan penjahat, yang tampaknya didukung oleh anggota-anggota ABRI menyerang gereja Motael dan membunuh aktivis pro-kemerdekaan berusia 18 tahun, Sebastião Gomes. Kemudian direncanakan satu demonstrasi yang diselenggarakan setelah misa peringatan yang akan diadakan pada tanggal 12 November, dua minggu setelah penguburan Sebastião dan ketika Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan, Pieter Kooijmans, sedang mengunjungi Dili.

153. João da Silva, seorang pemimpin pemuda di Becora, Dili, ingat bahwa, "semua informasi yang berhubungan dengan setiap aspek persiapan selalu datang melalui jaringan klandestin."<sup>124</sup> Constâncio Pinto, dari Komite Eksekutif dalam Front Klandestin, mengenang bahwa Xanana Gusmão mendukung demonstrasi tersebut, tetapi jelas bahwa para pemimpin pemuda klandestin Dili siap untuk melaksanakan aksi mereka sendiri bila tidak ada keputusan dari atas.

154. Pada akhirnya, banyak anak menebus dengan mahal keterlibatan mereka dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa 12 November atau Pembantaian Santa Cruz. Dari 271 orang yang terdaftar telah terbunuh di Santa Cruz, 42 orang berusia di bawah 17 tahun, termasuk

---

<sup>†</sup> Belchior Francisco Bento Alves Pereira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004. Lihat juga boks Bab 7.6: Pengadilan Politik. Dalam satu kejadian lainnya, satu demonstrasi spontan terjadi setelah adanya komentar seorang pejabat Indonesia di sebuah sekolah menengah pertama (SMPN 4) pada tanggal 17 Maret 1990. Carolino Soares, yang pada waktu itu berusia 15 tahun, ingat bahwa pejabat itu mengatakan: "Kalau membuat satu batang korek api saja belum bisa, maka Timor-Leste belum bisa merdeka." Dan kekecewaan kalangan siswa SMPN 4 yang buntutnya muncul reaksi melakukan aksi demonstrasi. Sesaat kemudian satuan Brimob langsung datang ke lokasi kejadian. Dengan kedatangan para Brimob itu, maka terjadi aksi lempar-melempar antara siswa dan polisi Brimob. Pada saat itu juga ada saudari sepupu saya yang bernama Ana Maria Soares mati karena ditembak polisi Brimob di jalan raya SMPN 4 Dili." Pernyataan HRVD 00195-1.

<sup>‡</sup> Misalnya, organisasi kepanduan Katolik, Escuteiros, berperan penting dalam demonstrasi yang diadakan pada bulan Oktober 1989 di Tacitolu, Dili, saat kunjungan Paus Yohanis Paulus II ke Timor-Leste. Ini adalah demonstrasi besar di depan umum yang pertama sejak invasi. Constâncio Pinto dan Matthew Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle*, halaman 108-109.

<sup>‡</sup> Wawancara CAVR dengan Mateus dos Santos, Suai, 31 Oktober 2003. Lihat juga boks mengenai Naldo Gil da Costa pada bagian 7.8.3 Penahanan sewenang-wenang, pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Pada bulan Agustus 1992, Xanana Gusmão memintanya untuk mengorganisir demonstrasi di Dili bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok di Jakarta yang dijadwalkan diselenggarakan bulan September 1992.

beberapa orang yang masih berusia 10 tahun.<sup>125</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam bagian selanjutnya, para pelajar secara khusus dijadikan sasaran pasukan keamanan setelah pembantaian di pekuburan Santa Cruz dan Sekolah Externato de São José ditutup tahun berikutnya. Selain membuat Timor-Leste menjadi masalah internasional, Pembantaian 12 November menyuburkan perasaan nasionalis yang bahkan lebih kuat di kalangan orang muda yang telah menyaksikan teman-teman, teman-teman sekolah dan saudara-saudara laki-laki dan perempuannya dibunuh pada waktu dan setelah pembantaian itu.<sup>\*</sup>

155. Bagian penting yang dimainkan oleh pelajar dan pemuda dalam demonstrasi-demonstrasi barangkali bisa dijelaskan dengan adanya kesediaan besar mereka untuk ditahan atau menanggung risiko pribadi lainnya demi perjuangan. Meskipun demikian, sebagaimana bisa dilihat dalam kasus Santa Cruz, keterlibatan mereka sering kali berdampak pribadi yang berat, berkisar dari dikeluarkan dari sekolah sampai dengan penahanan, penyiksaan, bahkan kematian. Jelas bahwa aparat keamanan memandang demonstrasi sebagai suatu ancaman dan para peserta demonstrasi sebagai sasaran yang layak. Seorang pelajar yang pada waktu itu berumur 15 tahun mengenang:

*Saya pertama kali ikut demonstrasi pada waktu kunjungan Duta Besar Amerika Serikat...ke Dili, khususnya ke Hotel Turismo pada tahun 1990. Setelah demonstrasi, kami dikejar oleh aparat keamanan [Indonesia]. Saya lari ke pantai, banyak demonstran dipukuli dan ditangkap di sana...Ketika itu saya memakai seragam SMP, saya kemudian berpura-pura sedang duduk-duduk di pantai, melepaskan sepatu dan bermain-main di air, sampai saya yakin keadaannya sudah aman.<sup>126</sup>*

156. Alexandrino da Costa, yang berumur 14 tahun pada 1991, terluka parah dalam demonstrasi di Santa Cruz tetapi kembali ambil bagian dalam demonstrasi lain pada tahun 1995. Ia ditangkap oleh polisi dan militer, dan diancam: "Kamu tidak takut mati, kamu masih ikut demonstrasi?"<sup>127</sup> Menurut Xanana Gusmão:

*Di mata para penyerbu Indo [sic], pemuda tampak sebagai golongan masyarakat yang paling berbahaya.<sup>128</sup>*

157. Dalam bagian-bagian berikut, pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak yang terlibat dalam gerakan perlawanan dibahas lebih terperinci.

#### 7.8.2.4. Anak-anak dalam Falintil

158. Pemuda berusia 17 tahun ke bawah bergabung dengan Milisinya Falintil sejak sebelum invasi sampai hari-hari tepat sebelum Konsultasi Rakyat pada bulan Agustus 1999. Anak-anak semuda 14 tahun direkrut menjadi milisi sebelum invasi Indonesia dan sebagian dari mereka ini kemudian didaftarkan sebagai anggota tetap Falintil. Dilaporkan bahwa pada tahun 1976 ada anak-anak berusia 13 tahun yang menjadi prajurit Falintil, tetapi kebanyakan anggota anak-anak berumur 15-18 tahun. Usia ini sesuai tidak bertentangan dengan Protokol Tambahan 1977 pertama Konvensi-Konvensi Jenewa, yang mengatur umur 15 tahun sebagai umur minimum.<sup>†</sup>

---

<sup>\*</sup> Wawancara CAVR dengan João Sarmento, Dili, 5 Juni 2004. João Sarmento, yang pada waktu itu berusia 16 tahun berada dalam jarak 50 meter dari pekuburan ketika penembakan dimulai. Di kemudian hari ia menjadi salah seorang pendiri Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor Timur, yang berperan penting dalam masa menjelang Konsultasi Rakyat pada bulan Agustus 1999.

<sup>†</sup> Protokol Tambahan I tahun 1977 pada Konvensi-Konvensi Jenewa menyatakan, "Para pihak yang terlibat konflik harus menempuh segala langkah yang mungkin agar anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun tidak ambil bagian langsung dalam permusuhan dan khususnya, mereka harus menahan diri untuk tidak merekrut anak-anak ke dalam angkatan bersenjata mereka." (<sup>Protocol I, Pasal 77</sup>). Satu Protokol Opsional pada Konvensi Hak Anak mulai berlaku pada

Satu penelitian UNICEF dari tahun 2000 menemukan bahwa sebagian besar, namun tidak semua, prajurit anak dalam Falintil berusia antara 15 dan 18 tahun.<sup>129</sup> Beberapa mantan tentara anak yang termuda menjelaskan bahwa pertama-tama mereka diberi pekerjaan yang kurang berbahaya dan kemudian mulai ambil bagian dalam operasi-operasi militer setelah beberapa tahun. Sebagian besar tentara anak melaporkan bahwa mereka diperlakukan baik.

159. Anak-anak termasuk di antara para prajurit tentara yang menyerah atau tertangkap atau terbunuh pada akhir dasawarsa 1970-an, tetapi ada juga anggota Falintil yang direkrut ketika masih anak-anak dan terus berjuang sampai pendudukan Indonesia berakhir. Ketika kekuatan pasukan dan persenjataan Falintil menyusut pada akhir dasawarsa 1970-an, kemungkinan besar jumlah tentara anak menurun. Tetapi, sepanjang dasawarsa 1990-an, remaja kadang-kadang masih bergabung dengan Falintil, termasuk anggota-anggota gerakan bawah tanah yang melarikan diri dari kota dan desa karena dijadikan sasaran.

160. Selain dihadapkan pada bahaya pada waktu pertempuran, banyak dari para pemuda ini yang mengalami berbagai kesulitan setelah tugas mereka berakhir. Setelah menyerah atau tertangkap, seperti anggota Falintil yang lebih tua, mereka umumnya menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Mereka yang menjalani demobilisasi setelah bertugas cukup lama dalam Falintil, bisa menghadapi masalah dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan sipil.

## Perekrutan

1975-1979

161. Bahkan sebelum terjadinya konflik partai-partai politik, lelaki muda, meskipun tidak selalu anak-anak, terlibat dalam Fretilin melalui organisasi keamanan tingkat desanya, Organização Popular de Segurança (OPS, Organisasi Rakyat untuk Keamanan).<sup>†</sup> Setelah UDT dikalahkan, Fretilin mendirikan milisi yang, khususnya dalam masa menjelang invasi, mencakup anak laki-laki di bawah usia 18 tahun, dan ada sebagian yang berusia di bawah 15 tahun.

162. Sebagai akibat penyusupan lintas batas oleh ABRI dan pasukan Partisan yang dimulai pada bulan Agustus 1975, Falintil mulai mengorganisasikan milisi berdasarkan instruksi dari Komite Sentral Fretilin.<sup>‡</sup> Perekrutan ke dalam milisi ini umumnya bersifat sukarela, namun anak-anak yang direkrut tidak selalu diberikan pemahaman sepenuhnya mengenai risiko keterlibatan mereka. Seorang peserta ingat bahwa semua orang yang berusia 14 tahun ke atas diajak bergabung. Jaime Ribeiro berusia 17 tahun pada waktu itu. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa

---

tahun 2002, yang menaikkan batas usia minimum dari 15 menjadi 18 tahun untuk prajurit yang ambil bagian langsung dalam permusuhan.

<sup>†</sup> Anak-anak dalam penelitian UNICEF, kebanyakan masih dalam FDTL, menjelaskan bahwa mereka diperlakukan lebih baik oleh Falintil daripada keluarga sendiri. Salah seorang dari mereka mengatakan, "Para komandan memperlakukan kami dengan baik. Mereka membantu kami di saat kami harus bertempur dan mereka memperlakukan kami lebih baik daripada orang tua kami sendiri" (halaman 27). Tetapi ada juga yang menyampaikan tentang penahanan kalau mereka ingin menyerah atau tidak mentaati peraturan (lihat Pernyataan HRVD 02160-01 dan 04846-01). Pada tahun 1977, seseorang yang direkrut pada usia 16 tahun bermaksud untuk menyerah, tetapi seorang komandan [C10] memberikan perintah untuk menangkapnya. Ia diikat dan ditahan selama tujuh hari di Gua Batu (Pernyataan HRVD 02160-01). Pernyataan HRVD 04846-01 menyampaikan bahwa pada tahun 1977 seorang prajurit Falintil berusia 16 tahun ditangkap di Bemalae (Manufahi) oleh seorang komandan Fretilin dengan tuduhan menjadi intelijen ABRI. Ia ditahan di rumah kosong tidak beratap dengan penjagaan yang ketat selama satu pekan.

<sup>‡</sup> OPS adalah kelompok keamanan di tingkat masyarakat yang dibentuk Fretilin sebelum invansi ketika infiltrasi oleh tentara Indonesia dari tapal batas barat sudah dimulai, untuk menjaga keamanan masyarakat setempat.

<sup>§</sup> "Fretilin sudah mempunyai angkatan bersenjata (Falintil) dan garis-garis komando yang jelas di bawah Panglima Nicolau dos Reis Lobato dan wakilnya. Dan ini diperkuat dengan para milisi yang dibentuk oleh CCF [Komite Sentral Fretilin]. Para milisi pada waktu itu dibentuk oleh Camacho secara luas di seluruh wilayah Timor-Leste, yang kemudian menjadi salah satu kekuatan untuk membela kemerdekaan." Wawancara CAVR dengan Eli Foho Rai Boot (Cornelio Gama, L-7), Laga, Baucau, 9 April 2003; lihat juga Bagian 5: Perlawanan: Struktur dan Strategi; lihat juga James Dunn, *A People Betrayed*, ABC Books, Sydney, 1996, halaman 128, yang memperlihatkan anak-anak laki-laki yang sedang berlatih dengan menggunakan senapan di kawasan barat pada bulan Oktober 1975.

dirinya melarikan diri dari Bazartete (Liquiça) ke Tibar (Liquiça) bersama keluarganya dan direkrut bersama pemuda lainnya ke dalam milisi Falintil:

*Pihak keamanan [Falintil] setempat memanggil kami untuk menerima senjata. Tetapi saya tidak tahu apa yang sedang terjadi...[Mereka mengatakan]: "Sekarang negeri kita sudah aman dan kita sudah merdeka. Mulai dari yang berusia 14-15 sampai dengan 18, jika merasa mampu, boleh masuk latihan untuk menjaga keamanan nasional, karena kita sudah merdeka"...*

*Waktu itu kami milisi, bukan tentara!...Perekrutan pun belum selesai. Tanggal 7 Desember 1975, invasi Indonesia. Kami tidak tahu – kami seharusnya melakukan apa? Tentara [Falintil] pun sekali tembak langsung sembunyi karena tidak tahu harus bagaimana. Problema! Polisi Militer pun melarikan diri sampai senjatanya dibuang. Apalagi milisi!..*

*Dulu saya mengira bersenjata itu sesuatu yang baik. Ternyata sekarang menghadapi perang! Jika saya tahu sebelumnya, pasti saya tidak akan mau menerima senjata dan sekarang bisa menyelamatkan diri bersama keluarga.\**

163. Seperti anggota milisi lainnya, Jaime Ribeiro selanjutnya menjadi anggota Falintil sesudah invasi. L-7 menjelaskan:

*Di antara anggota milisi, ada yang menjadi Falintil setelah melalui proses seleksi.<sup>130</sup>*

164. Faustino Cardoso Gomes adalah contoh lain tentang seorang anggota milisi yang berlanjut dengan menjadi anggota Falintil. Kepada Komisi ia mengatakan bahwa dirinya bergabung dengan milisi pada waktu UDT melancarkan gerakan bersenjata tanggal 11 Agustus 1975, ketika usianya 15 tahun. Pertama ia bekerja sebagai juru ketik yang mencatat pembagian pakaian seragam di satu pangkalan militer di Taibessi (Dili). Ketika tentara Indonesia melakukan invasi, ia pergi ke hutan dan bertugas sebagai prajurit Falintil selama empat tahun sampai tertangkap.<sup>131</sup>

165. Sesudah invasi, Fretilin juga merekrut para anggota baru tanpa pengalaman dalam pasukan milisi, termasuk anak-anak dan pemuda.<sup>†</sup> Dari informasi yang diberikan kepada Komisi, secara umum para anggota baru yang direkrut itu berusia 15 tahun ke atas. Manuel Alves Pereira Morreira ingat mengenai perekrutan orang-orang yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 1976, ketika dirinya menjadi wakil komandan. Ia menjelaskan bahwa perekrutan itu dilakukan berdasarkan instruksi dari para pemimpin Falintil, termasuk Hermenegildo Alves, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus sebagai Kepala Staf Umum dan hal itu bersifat sukarela.<sup>132</sup>

166. Misalnya, perekrutan orang muda dilakukan di Cailalui (Laleia, Manatuto) pada tanggal 14 Juni 1976. Menurut seorang yang direkrut pada usia 17 tahun, perekrutan ini dilakukan berdasarkan instruksi langsung Komandan Regional (Comandante Região, pada waktu itu

---

\* Jaime Ribeiro menjadi terkenal dengan nama Samba Sembilan dan bertahan sebagai pejuang Falintil selama 26 tahun, sampai pembentukan FDTL pada tanggal 1 Februari 2001. "Samba" berarti ikan, karena gerak-geriknya licin seperti ikan. "Sembilan" adalah angka yang ia peroleh setelah letusan senjatanya berhasil menyalakan nyawa sembilan lawannya dalam satu operasi militer. (Jaime Ribeiro, *Arsip Proyek Oral History Tuba Rai Metin*, Submisi kepada CAVR, CD No. 9.)

<sup>†</sup> Pernyataan HRVD 06942 menyebutkan tentang seorang remaja berusia 16 tahun yang menjadi tentara setelah melarikan diri saat terjadinya invasi pada tahun 1976: "Saya melarikan diri ke hutan di wilayah Laclubar [Manatuto] karena takut tentara Indonesia. Di Laclubar saya menerima senjata dari komandan Fretilin untuk ikut dalam mempertahankan tanah air kita melawan ABRI."

Tomás Anucaí), melalui kepala desa Busa Kuak (Laleia, Manatuto). Sekitar 20 orang muda yang berusia 15 sampai 20 tahun direkrut.<sup>133</sup> Manuel dos Reis, yang pada waktu itu berusia 15 tahun, mengingatnya:

*Pada tahun 1975 saya lari ke dalam hutan, sampai di satu tempat yang disebut Fatululi. Saya mendapat sepucuk senjata, sebuah Mauser, untuk digunakan berperang.<sup>134</sup>*

167. Namun demikian, Komisi telah menerima sejumlah keterangan langsung dari orang-orang yang direkrut sebagai prajurit Falintil pada saat mereka belum mencapai usia 15 tahun, dan anak-anak ini ingat bahwa ada anak-anak lain seumur mereka yang direkrut. Felix do Rosário berusia 13 tahun ketika direkrut di Alas (Manufahi). Ia mengatakan kepada Komisi bahwa banyak orang yang mengungsi ke hutan bersama Falintil antara tahun 1976 dan 1977 kemudian direkrut untuk berjuang. Siapa saja yang bisa mengangkat senjata direkrut, tanpa memandang usia dan banyak anak yang mau bergabung; maka ada banyak anak berusia 13 atau 14 tahun yang menjadi prajurit Falintil pada waktu itu.<sup>135</sup>

168. Constâncio Pinto mengatakan bahwa ia bergabung dalam Falintil pada tahun 1977 ketika berusia 13 tahun, dengan izin orang tuanya. Kesatuannya sebagian besar berusia antara 15 dan 18 tahun dan ia mengenal anak-anak lain berumur 12 tahun yang bergabung dengan kakak lelaki atau ayah mereka di garis depan. Remaja perempuan kadang-kadang membawa makanan untuk pejuang, namun mereka jarang ke garis depan. Constâncio menuliskan tentang pengalamannya:

*Ini bukan karena saya ingin membuktikan bahwa saya bukan anak kecil lagi; pada waktu itu saya merasa sudah seperti lelaki dewasa. Perang membuat orang muda sangat cepat menjadi dewasa.<sup>136</sup>*

169. Sebagian orang muda yang direkrut diberi tugas yang kurang berbahaya, walaupun kondisi membuat mereka tidak pernah lepas sama sekali dari pertempuran. Ketika Evaristo de Araújo, yang pada waktu itu berusia sekitar delapan tahun, turun dari Gunung Kablaki (Manufahi) bersama keluarganya untuk mencari makanan, ia mengatakan bahwa seorang anggota Linud 100 menembak kakinya. Ia diselamatkan seorang anggota Falintil dan dirawat selama satu tahun:

*Pada sore hari Antônio de Araújo dan Ernesto datang membawakan obat untuk saya...Setelah satu tahun kaki saya sembuh. Kami terus berjuang di Gunung Kablaki dan pada tahun 1977 tentara mulai beroperasi ke Gunung Kablaki. Waktu itu saya memegang senjata untuk berjaga di pos pengamanan.<sup>137</sup>*

170. Tahun 1979, ketika berusia 16 tahun, Evaristo tertembak lagi dan tertangkap.

171. Ada suatu pola yang serupa dalam kasus penelitian UNICEF dari dasawarsa 1980-an, di mana para prajurit termuda diberi tugas yang kurang berbahaya tetapi kadang-kadang masih ambil bagian dalam operasi menyerang maupun bertahan.

172. Orang-orang yang memiliki keterampilan cepat dipromosikan, tanpa pandang usia. Gabriel Ximenes adalah seorang guru pemberantasan buta huruf yang berusia 17 tahun ketika bergabung dengan Falintil setelah invasi:



*Ketika musuh menginvasi masuk di Ermera pada tahun 1976, saya telah berusia 17 tahun, bersama keluarga evakuasi ke hutan. Di hutan kami tinggal di wilayah Fatubesi. Kemudian saya menggabungkan diri dengan pasukan Fretilin, memegang senjata berperang melawan musuh.*

*Tak lama kemudian pada tahun 1977, komandan sektor tengah barat Ermera mengangkat saya menjadi komandan peleton untuk daerah perbatasan bagian utara. Setelah menduduki posisi demikian saya memimpin pasukan satu peleton dengan kekuatan senjata 100 pucuk.*

173. Sementara sebagian besar mantan gerilyawan anak mengatakan bahwa partisipasi mereka itu sukarela, seorang deponen melaporkan bahwa dirinya direkrut secara paksa ketika berusia 17 tahun pada tahun 1976:

*Pada tahun 1975 ketika kami lari ke hutan dan dengar bahwa tentara Indonesia masuk di Timor Leste, ada teman kami yang seumur – dia sudah sebagai komandan – yang memaksa saya untuk masuk anggota Fretilin untuk menjaga malam. Ketika itu mereka menyuruh Fretilin lain menangkap saya untuk masuk anggota Fretilin. Setelah itu membawa saya ke asrama militer, lalu mereka serahkan senjata kepada saya untuk menjadi anggota. Waktu itu saya belum tahu memegang senjata, lalu saya memencet [pelatuk] pada waktu di tempat penjagaan dan akhirnya senjata itu bunyi, maka mereka datang menangkap saya, dan menghukum saya dengan mengikat saya dari malam hingga jam empat pagi baru mereka lepas saya. Yang datang menangkap saya adalah dari komando militer Fretilin. Tangkap saya di Nakroman [Lacluta, Viqueque]. Mereka mengambil kembali senjata dari saya dan diserahkan pada teman lain, lalu saya mereka suruh untuk mencari makanan.<sup>†</sup>*

174. Reorganisasi yang terjadi setelah pertemuan Komite Sentral Fretilin di Soibada (Manatuto) pada bulan April-Mei 1976 membentuk tiga kekuatan utama: pasukan tempur (Forças de Sector, Pasukan Tempur), Pasukan Pertahanan Diri (Força Auto-Defesa, FAD) dan pasukan bersenjata tajam tradisional (*Armas Brancas*). Komisi tidak menerima informasi bahwa anak-anak dimasukkan dalam konsep “pertahanan rakyat” yang diterapkan oleh Fretilin dari zona turun sampai ke tingkat aldeia. Menurut Virgílio Guterres, seorang mantan aktivis, *Armas Brancas* mencakup semua orang yang berusia 17 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bagian dari konsep “perang rakyat”.<sup>‡</sup>

---

<sup>†</sup> Wawancara CAVR dengan Gabriel Ximenes, Ermera, 13 Agustus 2003. Ia menyerah kepada Batalyon 611 pada tahun 1979 bersama dengan satu kelompok besar sesudah terjadinya konflik antar Fretilin dan selama beberapa bulan mengalami kelaparan di Fatubesi dan Ermera. Sesudah diizinkan pulang, ia ditahan oleh ABRI dan Hansip dalam suatu kelompok yang terdiri dari 100 orang dari Ermera, Sakoko dan Ponilala dan dipindahkan untuk membuka lahan baru selama empat tahun di suatu tempat yang di masa selanjutnya menjadi kota Gleno.

<sup>‡</sup> Pernyataan HRVD 04845. Satu Profil Komunitas dari desa Clacuok, Welaluhu, Fatuberliu, Manufahi, 10 Februari 2004, melaporkan bahwa pada tahun 1981, “anak-anak ditangkap Falintil untuk ronda, namun tidak pernah kembali.”

<sup>‡</sup> Wawancara CAVR dengan Virgílio da Silva Guterres, Dilli, 25 Mei 2004: “Semua orang berusia di atas 17 tahun, tanpa memandang jenis kelamin maupun kedudukan apapun, dikenai kewajiban jaga malam. Yang kena kewajiban ini adalah setiap orang, bukan setiap keluarga. Termasuk yang terkena kewajiban jaga malam adalah Secretário da Zona dan Adjunto, orang-orang tertinggi dalam struktur pemerintah dan partai. Dalam satu malam tugas jaga digilir dalam dua kali.”

*Saat pertama kali bergabung dengan Falintil [pada 1983], saya melihat banyak anak muda yang berusia di bawah 18 tahun, tetapi banyak dari mereka yang terbunuh dan kini hanya sedikit dari kami yang tersisa.<sup>138</sup>*

175. Pada awal dasawarsa 1980-an, Falintil terus merekrut prajurit berusia di bawah 18 tahun. penelitian UNICEF meliputi kasus seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Bersama, yang dibawa oleh Falintil setelah ayahnya, seorang pemimpin klandestin, dibunuh di hutan oleh tentara Indonesia. Komandan Ular mengingat: "Tidak ada pilihan pada waktu itu. Kami tidak bisa meninggalkan Bersama ketika kami mundur."<sup>139</sup> Bersama, diberi tugas pertama menulis daftar dan inventaris, selanjutnya menulis surat-surat dan catatan sejarah perang. Setelah dua tahun, ia juga mulai ambil bagian dalam operasi pertempuran:

*Saya tidak memegang senjata ketika pertama kali bergabung dengan Falintil...Tugas saya adalah untuk bersembunyi, bukan bertempur. Saya secara resmi bergabung dengan Falintil pada tahun 1987 dan sebelum itu saya sudah pernah membawa senjata. Orang-orang yang dapat menggunakan senjata bisa mengambil senjata dari Falintil, sekaligus masuk ke dalam Falintil. Saya berumur 14 tahun saat pertama kali memegang senjata. Pada waktu itu ayah saya sakit, jadi saya harus menggantikannya. Senjata pertama saya adalah sepucuk FBP [senapan kecil]. Prajurit-prajurit lainnya mau mengambil senjata itu dari saya, namun saya tidak mau memberikannya kepada mereka dan saya katakan kepada mereka bahwa saya sangat menyukai senjata ini!...*

*Ketika saya harus bertempur, saya tidak maju ke garis depan karena walaupun senang memegang senjata, saya waktu itu takut, jadi saya tetap di belakang dan membantu [mereka dengan] berteriak dan berseru!...Mereka meminta pemuda untuk bersembunyi bila kelompok kami terlibat dalam pertempuran – tapi bila musuh lebih kuat daripada kami, masing-masing dari kami harus mencari cara untuk menyelamatkan diri.<sup>140</sup>*

176. Ada berbagai indikasi bahwa pada dasawarsa 1980-an, ketika tenaga manusia dan peralatan sedang berada di titik terendah, Falintil menolak anak-anak yang ingin bergabung. Menurut Komandan Ular, pada pertengahan dasawarsa 1980-an, Falintil tidak mau banyak orang muda masuk ke dalam pasukan Falintil karena tiga alasan:

14. Strategi perang gerilya yang sedang dijalankan waktu akan efektif bila dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil;
15. Pemuda kota jarang yang cukup kuat untuk menanggung kondisi hidup di pegunungan; dan
16. Lebih penting bagi Timor-Leste masa depan yang merdeka jika anak-anak tetap bersekolah.<sup>141</sup>

177. Sebagai sebuah contoh ilustratif, Naldo Gil Da Costa mengatakan kepada Komisi bahwa setelah Yonif 503 membunuh ayahnya, José da Costa, pada tanggal 3 Maret 1985, ia berusaha masuk Falintil, namun gagal:

*Waktu saya lari ke hutan saya bertemu dengan Falintil Adjunto Larimau. Kemudian saya tanya kepada Larimau kalau boleh saya tinggal bersama dengannya, tetapi Larimau mengatakan umur saya masih kecil dan perlu sekolah untuk memperjuangkan Perlawanan. Tetapi saya tetap berprinsip bahwa saya harus bekerja untuk Falintil demi kemerdekaan Timor-Leste.<sup>142</sup>*

1990-1999

178. Pada dasawarsa 1990-an terjadi peningkatan penolakan terhadap pemerintah pendudukan Indonesia melalui demonstrasi publik, yang sering kali diorganisasikan atau dihadiri kelompok-kelompok pemuda dan pelajar Timor-Leste. Tanggapan militer Indonesia menyebabkan banyak orang muda yang melarikan diri ke hutan. Sebagian dari mereka menjadi prajurit gerilya, sedangkan yang lainnya hanya tinggal bersama Falintil sampai merasa aman untuk kembali.<sup>143</sup> Julio José Exposto Gago adalah pelajar kelas terakhir sekolah menengah pertama di Hatulia (Ermera), ketika ia ambil bagian dalam demonstrasi Santa Cruz (Dili). Pada saat kembali ke Hatulia dari Dili, ia ditangkap dan diminta menjelaskan ketidakhadirannya di sekolah. Kemudian ia melarikan diri ke hutan. Julio José memperkirakan bahwa sekitar 70 orang bergabung dengan Falintil sebagai akibat dari penumpasan setelah Pembantaian Santa Cruz; semuanya, kecuali satu orang, adalah orang muda, meskipun tidak jelas berapa banyak dari mereka yang berusia di bawah 18 tahun.<sup>144</sup>

179. Laporan UNICEF mengenai anak-anak Timor-Leste dalam konflik bersenjata mencatat bahwa Mausina diterima sebagai prajurit pada tanggal 20 Agustus 1999 pada waktu berusia 17 tahun – ini adalah perekrutan terakhir di Region II sebelum Konsultasi Rakyat. Ia adalah satu dari banyak pemuda yang melarikan diri ke wilayah-wilayah Falintil ketika kekerasan meluas pada tahun 1999. Ia menjelaskan:

*Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi Falintil sebelum saya bergabung dengan gerakan klandestin, tapi setelah beberapa waktu bekerja untuk kelompok-kelompok bawah tanah, saya putuskan bahwa saya mau menjadi prajurit Falintil. Saya sudah pernah berhubungan dengan Falintil sebelum saya mendatangi mereka. Pada waktu itu saya dengar bahwa Falintil memerlukan pemuda untuk bekerja bersama mereka dan itu merupakan satu alasan tambahan yang kuat untuk bergabung.<sup>145</sup>*

## **Latihan**

180. Jumlah dan jenis latihan yang disediakan bagi prajurit anak dalam Perlawanan sangat berbeda-beda. Beberapa mantan prajurit anak menyatakan bahwa mereka mendapatkan latihan, dalam milisi maupun Falintil. Misalnya, Joaquim Simião mengatakan bahwa setelah direkrut pada tahun 1976, ia bertemu dengan Komandan Regional dan diberi sepucuk senjata serta latihan. Ia mendapatkan latihan tempur mengenai bagaimana cara menggunakan senjata, bagaimana berlari dan bagaimana bersembunyi. Setelah itu ia segera dikirim untuk bertempur di Manatuto. Joaquim menjelaskan bahwa orang muda direkrut untuk menggantikan anggota-anggota yang dianggap sudah terlalu tua.<sup>146</sup>

181. Namun demikian, sebagian lainnya mengatakan bahwa satu-satunya latihan yang mereka dapatkan adalah melalui pengalaman. Beberapa mantan prajurit anak yang diwawancarai UNICEF menekankan bahwa mereka hanya mendapatkan sedikit latihan sebelum pengalaman pertempuran mereka yang pertama:

*Saya tidak pernah mendapat latihan militer apapun sebelumnya. Ketika saya menembak ke arah musuh untuk pertama kalinya, itulah latihan bagi saya...Saya selalu ketakutan ketika pertama kali masuk ke hutan, tapi setelah satu tahun, saya tidak merasa takut lagi, karena saya pikir walaupun kami takut, tidak ada tempat lain bagi kami untuk pergi. Inilah tanah kami.<sup>147</sup>*

*Saya tidak pernah mendapatkan latihan militer apapun – satu-satunya latihan yang saya dapat adalah bagaimana membersihkan senjata, membongkar bagian-bagiannya dan memasangkan kembali. Satu-satunya yang saya diajari Falintil tentang bertempur adalah “kalau kamu melihat musuh, tembak dia. Kalau kamu tidak menembaknya, kamu akan dibunuh.”<sup>148</sup>*

182. Anak-anak juga belajar tentang politik dan hak asasi manusia, termasuk tentang perlindungan untuk penduduk sipil, dari para komandan mereka. Felix do Rosário mengisahkan kepada Komisi bahwa ketika direkrut Komandan Manuel Adão di Labok (Alas, Manufahi) di usia 13 tahun pada 1977, ia mendapatkan instruksi politik dari seorang anggota Komite Sentral Fretilin. Ia juga diberi kesempatan untuk bersekolah guna belajar membaca dan menulis.<sup>149</sup>

### **Risiko bergabung dengan Falintil**

183. Seperti semua anggota Falintil lainnya, anak-anak adalah penempur dan karena itu merupakan sasaran militer yang sah. Mereka bukan hanya menghadapi risiko terluka parah, tetapi juga kematian. Kondisi kehidupan mereka ekstrem dan tidak berbeda dengan kondisi hidup orang-orang dewasa yang bersama mereka. Satu pernyataan yang diambil CAVR mengungkapkan mengenai seorang prajurit berusia 15 tahun yang tertembak dan terbunuh secara tidak sengaja oleh pihaknya sendiri saat berlangsungnya invasi.<sup>150</sup> Cisto Fernandes (Helio Espírito Santo) direkrut oleh markas Falintil di Bika Lari di wilayah subdistrik Uatu-Lari (Viqueque, Zona 17 de Agosto) saat berusia 15 tahun dan mengikuti berbagai operasi militer sejak tahun 1975. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa dirinya tidak dipaksa ambil bagian, melainkan lebih karena berminat pada agenda politik Fretilin. Pada tahun 1978, lengan kanannya terluka parah saat sepucuk granat meledak sebelum waktunya. Ia diungsikan oleh Falintil dan dirawat di Osoleru (Quelicai, Baucau).<sup>151</sup>

184. Risiko-risiko yang dihadapi sesudah ditangkap tentara Indonesia cukup berat. Ini meliputi eksekusi, ditahan, dijadikan sasaran penganiayaan fisik dan mental serta penyiksaan dan direkrut paksa sebagai TBO.\*

185. Menyerah juga ada risikonya. Dalam satu kasus, Manuel dos Reis menjelaskan bagaimana pada tanggal 1 November 1978 ia menyerah di Hauba (Bobonaro, Bobonaro) sesudah ditahan Fretilin selama tujuh hari karena dicurigai berencana menyerah. Ia kemudian ditangkap ABRI, diinterogasi dan dipukuli, sebelum dibawa ke Koramil di Bobonaro dan ditahan di sana selama tiga bulan lagi. Setelah dilepaskan, ia menjadi TBO dan mengikuti satu operasi di Hedalau (Cailaco, Bobonaro). Dalam operasi ini, ia ditembak oleh Falintil bersama dengan beberapa orang Timor-Leste lain anggota militer Indonesia dan terluka parah.†

---

\* Misalnya, kasus awal Faustino Cardoso Gomes yang dijadikan seorang TBO sesudah ia ditangkap ketika bertempur bersama Falintil. Wawancara CAVR dengan Faustino Cardoso Gomes, Dili, tidak bertanggal.

† Pernyataan HRVD 02160-01; Pernyataan HRVD 03758 mencakup suatu kejadian di mana deponen dan seorang anggota Falintil yang berusia 15 tahun ditangkap pada bulan November 1979 di Haefu-Madabenu (Ermera), kemudian diikat, dipukul, disundut dengan rokok dan dibawa untuk dibunuh. Sampai di tengah jalan deponen berhasil meloloskan diri, tetapi akhirnya ditangkap kembali bersama penduduk sipil oleh ABRI.

186. Felix do Rosário menguraikan bagaimana setelah kehancuran basis-basis Perlawanan, Komite Sentral Fretilin dan para komandan senior Falintil menginstruksikan para anggota Falintil dan Fretilin serta masyarakat yang masih tinggal di hutan untuk mengambil langkah apapun yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan diri, termasuk menyerah. Ia menyerah pada tanggal 13 September 1979 bersama dengan para gerilyawan lainnya dan kemudian ditangkap. Ia dihukum atas keanggotaannya dalam Falintil dengan dipaksa membersihkan jalan-jalan di Same dan bekerja dalam pembangunan jalan raya Ainaro-Alas. Ia juga dimasukkan ke sebuah tangki yang diisi air kotor dan ular. Hukumannya berlangsung selama satu tahun, sampai Komite Palang Merah Internasional (ICRC) turun tangan menyelamatkannya.<sup>152</sup>

### **Demobilisasi dan perubahan menjadi FDTL**

187. Tidak diketahui berapa banyak dari sekitar 750 orang prajurit Falintil yang ditempatkan di Aileu pada bulan November 1999 yang berusia di bawah 18 tahun. Pada tahun 2001 Falintil didemobilisasi dan dibentuk Angkatan Pertahanan Timor-Leste (Força Defesa de Timor-Leste, FDTL) dengan batas usia minimum 18 tahun untuk keanggotaannya. Seorang mantan tentara anak mengatakan kepada UNICEF bahwa:

*Usia yang baik untuk masuk ketentaraan adalah di atas 18 tahun, karena anggota yang baru direkrut, yang berusia di bawah 18 tahun, masih anak-anak dan mereka tidak bisa mengambil keputusan sendiri secara benar.<sup>153</sup>*

188. Seperti para mantan anggota gerakan klandestin, banyak mantan anggota Falintil tidak memperoleh pendidikan yang cukup. Dalam pesannya kepada pemuda Katolik di Timor-Leste dan Indonesia pada bulan Mei 1986, Xanana Gusmão menyebutkan gerilyawan yang “banyak dari mereka seusia kalian dan belum pernah duduk di bangku sekolah.”<sup>154</sup> Akibatnya sekarang mereka tidak memiliki pendidikan atau keahlian yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan di Timor-Leste yang baru merdeka. Sebagian mungkin mendapatkan cedera semasa di hutan, yang membatasi jenis pekerjaan yang dapat mereka lakukan. Kisah Annas Nasution adalah contoh mengenai ini. Dulunya ia adalah anggota anak-anak dalam gerakan klandestin dan sejak 1995 menjadi anggota Falintil. Walaupun kemudian melamar untuk masuk FDTL, ia tidak terpilih. Kini ia mengatakan:

*Saya memutuskan untuk selamanya tinggal di Timor-Leste. Tetapi, masih ragu-ragu karena sampai saat ini saya belum punya tempat tinggal yang sah, sementara saya sudah berkeluarga. Saat ini saya tidak bisa bekerja berat karena sering sakit terutama berak darah. Dengan keadaan seperti ini, saya sering menangis memikirkannya, kadang sampai stres...Semuanya serba sulit. Saya mencoba melamar pekerjaan ke sana ke mari walaupun sebagai security, namun hasilnya tetap nihil.<sup>155</sup>*

### 7.8.3. Penahanan sewenang-wenang, pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap anak-anak

#### 7.8.3.1. Penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang

##### **Pendahuluan**

189. Penahanan anak-anak dilakukan semua pihak yang terlibat dalam konflik politik di Timor-Leste dan berlangsung dalam seluruh periode mandat Komisi.

190. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang atau tidak sah serta penyiksaan telah dibahas lebih mendalam dalam Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Penganiayaan. Ketentuan-ketentuan tersebut juga berlaku bagi anak-anak. Namun demikian, sebagaimana disebutkan di atas berkenaan dengan anak-anak, pihak-pihak tersebut diwajibkan untuk memberikan perlindungan tambahan kepada anak-anak oleh hukum internasional maupun dan untuk kasus Indonesia, oleh hukum dalam negeri. Sebagian besar dari perlindungan ini bersifat umum, yang mensyaratkan misalnya, agar anak-anak diperlakukan secara berperikemanusiaan dalam keadaan apapun dan agar hak mereka untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi dihormati. Sedangkan mengenai penangkapan, penahanan dan penyiksaan, kewajiban pihak-pihak tersebut kepada anak-anak sama dengan kewajiban mereka kepada orang dewasa. Akan tetapi, sebagai akibat dari ratifikasi oleh Indonesia atas Konvensi Hak Anak pada tanggal 5 September 1990, maka Indonesia mengemban kewajiban-kewajiban tambahan yang berkaitan dengan penahanan anak-anak.

191. Oleh karena itu, ketika hendak mencabut kebebasan seorang anak, Indonesia terikat untuk mengingat kebutuhan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam tindakannya (Pasal 3 [1]). Kewajiban Indonesia berdasarkan Pasal 37 Konvensi ini adalah menjamin agar tidak ada anak yang dirampas kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan ataupun pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai suatu langkah pilihan terakhir serta hanya untuk jangka waktu yang paling singkat. Setiap anak yang dicabut kebebasannya harus diperlakukan dengan berperikemanusiaan dan penghormatan pada martabat yang melekat dalam pribadi manusia dan dengan cara yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seumur itu. Yang lebih umum, berdasarkan Pasal 38, Indonesia diwajibkan untuk "mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin perlindungan dan pengasuhan anak-anak yang terkena oleh suatu konflik bersenjata". Berdasarkan Pasal 39, Indonesia wajib untuk membantu pemulihan fisik dan kejiwaan serta reintegrasi sosial anak-anak korban konflik, bukannya memperburuk keadaan mereka dengan penangkapan, penahanan ataupun penyiksaan.

##### **Pola penahanan anak-anak**

192. Dalam masa konflik antar partai, baik UDT maupun Fretilin menahan pendukung muda pihak lawannya, serta anak di bawah umur yang merupakan anggota keluarga pendukung itu. Dari penahanan anak di bawah umur yang dilaporkan kepada Komisi, 2,9% (42/1.426) dilakukan oleh UDT sementara 11,3% (161/1.426) dilakukan oleh pasukan Fretilin dan Falintil. Angka tersebut mencakup kurun waktu 1975-1979, ketika Fretilin memegang kendali atas wilayah dan penduduknya. Dalam kurun waktu itu, Fretilin menahan anak-anak, baik sendiri maupun bersama anggota keluarga, karena pelanggaran terhadap peraturan Fretilin atau karena dicurigai bekerjasama dengan pihak Indonesia.

193. Pihak berwenang Indonesia bertanggung jawab untuk mayoritas sangat besar penangkapan dan penahanan anak-anak di bawah umur. Dari penahanan anak-anak di bawah

umur yang dilaporkan kepada Komisi, 73% (1.043/1.426) dilakukan oleh tentara Indonesia. Tentara Indonesia umumnya menahan anak-anak karena satu dari dua alasan: karena mereka atau keluarga mereka dicurigai menjalin hubungan dengan anggota-anggota Fretilin/Falintil yang masih berada di hutan; atau khususnya dalam tahun-tahun belakangan, karena keterlibatan mereka dalam kegiatan bawah tanah.

194. Komisi menerima sedikit sekali laporan mengenai penyiksaan anak-anak di bawah umur oleh UDT ataupun Fretilin, walaupun anak-anak banyak ditempatkan dalam kondisi yang sangat keras. Tetapi, pihak berwenang Indonesia secara teratur menggunakan penyiksaan dan memperlakukan dengan buruk anak-anak selama masa pendudukan.

195. Dalam analisis kuantitatif Komisi mengenai laporan-laporan naratif tentang penahanan sewenang-wenang, 45,1% (38.910/86.263) kasus menyebutkan umur korban. Ada 1.426 kasus jelas penahanan anak-anak di bawah umur. Gambar [[g220400b.pdf](#)] berikut menunjukkan jumlah besar penahanan anak-anak sepanjang akhir dasawarsa 1970-an, mencapai puncaknya untuk anak lelaki dan perempuan pada tahun 1981.<sup>\*</sup> Puncak ini mencerminkan meningkatnya pengumpulan pernyataan mengenai penahanan seluruh keluarga di pulau Atauro yang dimulai pada periode itu.<sup>†</sup> Pelanggaran yang dilaporkan menurun ke tingkat yang rendah setelah tahun 1981, dengan puncak-puncak kecil pada tahun 1986 dan 1991, sebelum meningkat lagi pada tahun 1997-1998, dan akhirnya pada tahun 1999 kembali ke tingkat seperti dasawarsa 1970-an. (Lihat grafik: Penahanan Sewenang-wenang yang dilaporkan terhadap Korban Anak Sepanjang Waktu.)

196. Seperti yang bisa dilihat pada Gambar [g220400b.pdf](#), mayoritas penahanan anak-anak di bawah umur terjadi antara 1975 dan 1983 dan pada tahun 1999. Sementara penyiksaan terhadap anak-anak di bawah umur kebanyakan terpusat pada tahun 1999, seperti yang bisa dilihat pada Gambar [g220600b.pdf](#).

[\[INSERT Figures g220400b.pdf and g220600b.pdf about here\]](#)

197. Dari anak-anak yang ditahan, anak-anak berumur belasan tahun adalah yang paling sering dilaporkan menjadi korban yang didokumentasikan oleh Komisi. Seperti ditunjukkan angka di bawah, sejauh ini kelompok umur korban penahanan yang terbesar adalah kelompok umur 20-24 tahun dan orang-orang yang berumur antara 15 dan 19 tahun hanyalah kelompok umur korban terbesar kelima.

[\[INSERT g31210000400: Number of Reported Acts of Detention by Age and Sex - 1974-1999\]](#)

198. Anak-anak (orang yang berusia 17 tahun atau dibawahnya) adalah 5,2% (577/11.135) dari kasus penyiksaan dan 5,6% (1.426/25.383) dari insiden penahanan sewenang-wenang dan penculikan.<sup>‡</sup> Kebanyakan anggota kelompok ini berusia 12-17 tahun (tiga per empat dari korban penyiksaan dan dua per tiga penahanan anak di bawah umur adalah kelompok umur ini). Umur rata-rata tahanan dari 1.426 kasus anak-anak korban penahanan adalah 12, umur tengahnya adalah 14.<sup>§</sup>

199. Laki-laki merupakan mayoritas terbesar dari korban dalam kedua kategori ini dan karena itu distribusi usia korban laki-laki lebih-kurang mencerminkan keseluruhan distribusi usia dari semua korban penyiksaan di bawah umur dan korban penahanan di bawah umur. Sebagaimana

<sup>\*</sup> Penahanan penduduk umum memuncak pada 1982 sesudah serangan terhadap Mauchiga dan ada satu puncak yang kurang terkenal pada tahun 1980 sesudah jatuhnya Matebian.

<sup>†</sup> Puncak tahun 1981 mungkin terkait dengan Operasi Keamanan atau mungkin saja hanya merupakan hasil dari kegiatan pengumpulan data.

<sup>‡</sup> Banyak entri dalam basis data informasinya mengenai umur tidak lengkap atau tidak ada sehingga tidak dimasukkan dalam analisis ini.

<sup>§</sup> Statistik-statistik ini didasarkan pada data dari Human Rights Violation Database (HRVD, Basisdata Pelanggaran Hak Asasi Manusia) CAVR.

dalam kasus pembunuhan, korban perempuan sedikit lebih muda dari pada yang laki-laki dalam kedua kelompok, dengan anak-anak terhitung merupakan 12% (108/857) dari semua perempuan korban penyiksaan dan 11,6% (408/3.521) dari perempuan korban penahanan, yang sekali lagi kebanyakan berusia 12-17 tahun. Dalam kasus penahanan perempuan, gadis-gadis berusia 12-17 tahun adalah kelompok terbesar keempat, di belakang tiga kelompok berusia 18-35 tahun.

**INSERT g3121000400: Number of Reported Acts of Detention by Age and Sex - 1974-1999**  
**[Jumlah Tindakan Penahanan Berdasar Umur dan Jenis Kelamin Yang Dilaporkan – 1974-1999]**

200. Dili menunjukkan laporan tertinggi kejadian penahanan sewenang-wenang terhadap orang di bawah umur yang jumlahnya 18,0% (257/1.426) dari penahanan orang di bawah umur, kemudian disusul Bobonaro 14% (203/1.426)], Lautém 13,3% (189/1.426), dan Baucau 11,2% (160/1.426).

### **Penahanan oleh pihak berwenang Indonesia**

1975-79

201. Pada tahun-tahun awal setelah invasi Indonesia, pihak berwenang Indonesia menahan anak-anak dengan berbagai alasan, tetapi biasanya bersama dengan keluarga mereka. Banyak kasus penahanan anak-anak yang dilaporkan kepada Komisi dari periode ini berkaitan dengan pemusatan orang-orang sipil yang baru ditangkap atau menyerah untuk mengisolasi mereka dari orang-orang yang masih berada di hutan.

202. Mayoritas besar orang, termasuk anak-anak, yang menyerah atau tertangkap dalam periode ini, ditahan di berbagai jenis kamp, di mana mereka dikenai banyak sekali pembatasan atas kebebasan gerak mereka (diuraikan secara rinci dalam Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan). Namun demikian, sebagian orang termasuk anak-anak, dipisahkan dari orang-orang lain yang menyerah dan ditempatkan di tempat penahanan. Dalam satu kasus seperti itu, Pedro Alexandre Belo melaporkan bahwa ketika ia berusia 16 tahun ia bersama anggota-anggota keluarganya ditangkap oleh ABRI di hutan pada tanggal 11 Agustus 1976. Mereka ditahan di Hotel Flamboyan di Baucau. Pedro disiksa selama beberapa minggu dan kemudian ditahan selama enam bulan.<sup>156</sup> Damião da Silveiro dari Lupal (Lolotoe, Bobonaro) melaporkan kepada Komisi bahwa ketika berumur 12 tahun, ia ditangkap bersama satu kelompok besar pada tanggal 7 Mei 1978 oleh Yonif 131. Ia ditahan selama tujuh bulan di Koramil Lolotoe (Bobonaro), di mana ia dipaksa bekerja di proyek pembangunan sebuah gedung.<sup>157</sup> Igidio Corte Real, berusia 16 tahun ketika menyerah di Letefoho (Same, Manufahi) pada 25 Agustus 1979. Ia ditahan oleh seorang anggota ABRI dan tiga orang anggota Hansip selama 14 hari dan dipukuli.<sup>158</sup>

203. Sebagaimana yang telah disebutkan, gerilyawan anak termasuk yang ditahan dan disiksa setelah menyerah. Dalam satu kasus, José da Conceição Carvalho, seorang anggota Falintil berumur 15 tahun, menyerah di Dili pada tahun 1977. Ia ditahan selama 12 hari oleh dua orang anggota intelijen, C11 (orang Indonésia) dan C12 (orang Timor-Leste), karena tidak membawa senjatanya ketika menyerah. Ia dilepaskan setelah memberitahukan tempat senjata itu.<sup>159</sup>

204. Selain anak-anak yang ditahan ketika menyerah atau tertangkap, anak-anak juga ditahan ketika anggota keluarganya ditangkap dalam periode ini. Sonia, seorang anak berumur satu tahun dari Quelicai (Baucau) ditahan bersama ibunya, Domingas Morreira, pada tanggal 1

---

<sup>156</sup> Romesh Silva, *Sex-Age Distributions of Victims of Reported Human Rights Violation* [Distribusi Jenis Kelamin dan Usia dari Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dilaporkan], HRVD CAVR, 21 Mei 2004. Distribusi frekuensi ini hanya menunjukkan distribusi usia dan jenis kelamin para korban yang informasi tentang usianya dilaporkan kepada Komisi sebagai bagian dari proses pengambilan pernyataan. Laporan usia untuk masing-masing korban dihitung dari usia sebenarnya yang dilaporkan kepada petugas pengambil pernyataan Komisi atau, kalau ini belum ditranskripsi/dikodifikasi ke dalam HRVD, disimpulkan dari informasi tanggal kelahiran korban dan tanggal pelanggaran yang dilaporkan.



November 1976. Mereka ditahan di Hotel Flamboyan, Baucau kota, selama satu minggu di dalam satu sel gelap sebelum diinterogasi mengenai kegiatan Domingas selama di hutan. Mereka akhirnya dilepaskan pada tanggal 4 Mei 1978 dengan perintah untuk wajib lapor setiap minggu.<sup>160</sup>

205. Pihak berwenang Indonesia membunuh setidaknya seorang anak dalam penahanan pada periode ini: Jaquiel da Costa Ximenes melaporkan tentang seorang anak berumur empat tahun, Joaquim Ximenes, dari satu keluarga yang beranggotakan tujuh orang, ditahan di Afaça (Quelicai, Baucau) pada tanggal 14 April 1979. Menurut Jaquiel, Joaquim dipukuli sampai mati dalam penahanan oleh anggota-anggota Yonif 321 dan Sukarelawan (suatu pasukan yang terdiri dari orang Timor-Leste mantan partisan).<sup>161</sup>

206. Dalam kasus-kasus lain, orang-orang dewasa yang ditahan bersama anak-anak mereka dibunuh dalam penahanan, setelah itu anak-anak tersebut ditempatkan dalam penahanan atau dilepaskan. José Pereira melaporkan bahwa ketika ia berumur 12 tahun, di Babulu (Same, Manufahi) pada tahun 1976, ia dipanggil bersama lima orang dewasa untuk membantu mengangkut beras di Kodim Same. Saat tiba di sana, mereka dituduh telah bekerja bersama Fretilin dan kelima orang dewasa itu dieksekusi. José ditahan dalam satu sel di Kodim selama sembilan bulan, di mana ia diancam, ditanyai dan dipaksa bekerja di lahan-lahan basis militer itu.<sup>162</sup> Duarte Ximenes mengungkapkan bahwa pada tahun 1979, seorang anak laki-laki berumur 10 tahun, Domingos Ximenes, ditangkap bersama ayahnya oleh ABRI di Tequinomata (Laga, Baucau). Militer membawa mereka ke Quelicai (Baucau). Ayahnya dibunuh sedang Domingos dikembalikan kepada keluarganya.<sup>163</sup>

207. Anak-anak juga ditahan untuk tujuan mengumpulkan informasi mengenai orang lain. Juliana de Jesus menyampaikan kepada Komisi bahwa pada tanggal 20 Oktober 1979, ketika berumur 11 tahun, ia ditahan dua kali di pos Yonif 745 di Liurai, Fuiluro (Lospalos, Lautém) bersama dengan saudara perempuannya dan seorang anak laki-laki lain. Mereka diinterogasi mengenai seorang lelaki setempat yang dituduh telah menghubungi anak laki-lakinya, seorang anggota Falintil.<sup>164</sup>

208. Pihak penguasa Indonesia menangkap seluruh keluarga berdasarkan kecurigan bahwa mereka membantu Falintil, atau untuk mencari informasi tentang para gerilyawan serta jaringan-jaringan klandestin yang sedang berkembang. Isabel dos Santos Neves bersaksi bahwa ia ditangkap di Maubisse (Ainaro) pada tahun 1979 saat ia berumur 16 tahun, karena saudara laki-lakinya diketahui sebagai anggota Fretilin yang masih tinggal di hutan:

*Saya ditangkap bersama kakak laki-laki saya. Saat interogasi kami dipukul dan kedua adik saya yang masih kecil dipaksa untuk mengaku tentang keberadaan Fretilin di hutan. Kakak saya dibawa pergi pada malam hari oleh tentara. Pada pagi harinya seorang Hansip yang menyaksikan pembunuhan kakak saya memberitahu ayah saya bahwa kakak saya sudah dibunuh oleh tentara. Hansip tersebut hanya mengantarkan cincin dan topinya untuk ditunjukkan kepada kami. Mendengar informasi itu ayah saya diam saja, tetapi ayah lalu berkata bahwa itu konsekuensi perang.<sup>165</sup>*

1980-1988

209. Pada akhir tahun 1981, masih ada anak-anak yang ditahan setelah tertangkap di hutan. Namun demikian, sebagian besar kejadian penahanan anak di bawah umur dalam periode ini terjadi sebagai bagian dari tindakan yang lebih luas terhadap pemberontakan atau karena anak tersebut dicurigai menjalin hubungan dengan Falintil. Bentuk penahanan yang paling umum sepanjang tahun-tahun ini adalah pemindahan seluruh keluarga ke pulau Ataúro (Dili) untuk

memisahkan mereka dari sanak-saudara yang masih berada di hutan. Sementara demonstrasi terbuka mendukung kemerdekaan belum mulai, kelompok-kelompok klandestin menjadi semakin canggih dan tersebar luas. Upaya-upaya Indonesia untuk menguasai mereka juga membawa pada terjadinya penahanan dan kadang kala penyiksaan anggota-anggota muda dari jaringan-jaringan ini.

210. Di awal dasawarsa 1980-an, bermacam taktik kontra-pemberontakan Indonesia terutama berbentuk penumpasan sebagai tanggapan terhadap kegiatan tertentu perlawanan dan tindakan untuk menutup sumber dukungan materi, informasi dan politik bagi para gerilyawan, khususnya jaringan klandestin yang sedang berkembang di kota-kota.

211. Setelah terjadinya serangan Falintil terhadap instalasi penyiaran di Marabia dan markas Yonif 744 di Becora, Dili, pada tanggal 10 Juni 1980, setidaknya dua remaja ditahan untuk waktu yang singkat. Luis de Jesus, waktu itu berusia 14 tahun, melaporkan bahwa ia ditangkap pada tanggal 10 Juni 1980 dan ditahan sebentar di Koramil Becora sebelum dipindahkan ke penjara Comarca Balide di Dili.<sup>166</sup> Alberto de Deus Maia, waktu itu berusia 11 tahun, menyatakan bahwa Yonif 744 dan Brimob (Brigade Móbil) Polri, menangkapnya pada tanggal 11 Juni 1980 dan menahannya di Balibar, di selatan Dili, di mana ia dipaksa mengangkut air.<sup>167</sup>

212. Adelino Araújo ditahan dan disiksa bersama banyak orang lain setelah kebangkitan bersenjata (*levantamento*) pada bulan Agustus 1982 di Mauchiga (Hatubuilico, Ainaro). Penumpasan oleh militer ini mencakup banyak macam pelanggaran hak asasi manusia:

*Levantamento 20 Agustus 1982, di Mauchiga [Hatu-Builico, Ainaro], saya masih berumur 14 tahun. Dari pemimpin pergerakan atau revolta [pemberontakan], menghidupkan kembali kegiatan Fretilin. Pada pemberontakan tersebut banyak penduduk yang mati terbunuh oleh tentara. Maka pada waktu itu saya sebagai anak ditawan oleh tentara [di Koramil Hatu-Builico]. Saya diikat dan dipukul sampai tidak berdaya lagi, saya dibakar dengan puntung rokok, saya hanya bertahan dan menangis dan saya saksikan bagaimana tentara memperkosa wanita-wanita yang ada di daerah itu [di lapangan kantor desa Mauchiga].<sup>168</sup>*

213. Kadang-kadang tantangan terhadap kekuasaan Indonesia pada periode ini berakibat pada penghukuman kolektif seluruh komunitas, termasuk penahanan dan penyiksaan anak-anak. Penduduk Porlamano, Mehara (Tutuala, Lautém) melaporkan bahwa pada tahun 1983, setelah Hansip dan para pemuda lari ke hutan, sejumlah anggota Yonif 641 menahan dan menyiksa para istri, anak-anak dan kerabat perempuan mereka di pos militer. Satu aldeia lain di desa yang sama melaporkan bahwa di tahun yang sama, prajurit-prajurit tentara dari Yonif 745, 321, 641 dan Batalyon Linud 100 memaksa anak-anak berusia 15 tahun ke atas untuk berkumpul di satu lapangan terbuka, di mana mereka disiksa dan dibenamkan ke air.<sup>169</sup>

214. Kegiatan klandestin dalam dasawarsa 1980-an banyak didasarkan atas ikatan keluarga, dan pihak berwenang Indonesia menggunakan penangkapan dan penahanan untuk memutuskan jalur dukungan ini. Francisco Soares mengungkapkan bahwa pada tahun 1982 ketika berusia 14 tahun, ia dicurigai telah membawa makanan untuk ayahnya yang berada di hutan. Ia ditangkap oleh seorang anggota Hansip bernama C13 atas perintah Komandan Koramil Rifai (orang Indonesia), C108 (anggota badan legislatif Indonesia), dan C15, seorang komandan Hansip. Ia dibawa ke Koramil di Iliomar untuk diinterogasi. Setelah satu minggu ia dilepaskan, dengan syarat wajib lapor selama satu tahun. Keluarga ini kemudian dipindahkan ke Ataúro selama satu tahun karena ayahnya menolak menyerah.<sup>170</sup>

215. Dalam upaya untuk memisahkan pasukan Falintil dari anggota keluarga yang dianggap mendukung mereka, ribuan orang dikirim ke pulau Ataúro pada awal 1980-an. Lonjakan dalam grafik mengenai penahanan anak-anak di atas, ada kaitannya dengan kebijakan ini.

216. Sebagian anak yang dikirimkan ke pulau Ataúro dipisahkan dari orang tua mereka atau memang sudah menjadi yatim piatu (lihat boks di bawah), walaupun sebagian besar pergi bersama keluarga mereka:

*Saya Rosalina José da Costa, dibawa bersama dengan orang tua saya ke Ataúro, karena ketika kami masih berada di Viqueque selalu membawa makanan ke Fretilin di hutan. Sehingga diketahui oleh tentara, maka saya bersama keluarga dipindahkan ke Ataúro sebagai orang tahanan. Waktu itu saya baru berumur 10 tahun. Kami diantar dengan mobil TNI ke Laga [Baucau] dan ikut kapal tentara, nomor 509. Bukan kami sendiri saja tetapi kami bersama dengan keluarga lain dan anak-anak mereka. Ketika kami berada di Ataúro sebagai orang tahanan, kami sangat susah dapat makanan dan banyak orang sakit sampai meninggal dunia, terlebih anak-anak. Setiap hari satu sampai tujuh orang anak yang meninggal dunia.<sup>171</sup>*

217. Sebagian lainnya kehilangan orang tua mereka di pulau itu, termasuk Mário Correia, yang mengatakan kepada Komisi bahwa ketika ia berumur 12 tahun, orang tuanya meninggal dunia karena kelaparan; diperlukan waktu dua setengah tahun lagi sampai anggota-anggota lainnya dari keluarga itu diperbolehkan pulang.<sup>172</sup>

218. Orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kegiatan klandestin juga dikirimkan ke Ataúro dan sebagian di antara orang-orang ini adalah remaja. Armando de Jesus Barreto melaporkan bahwa Kopassandha menangkap dirinya di Dili Barat pada tanggal 10 Juni 1980 ketika usianya 17 tahun. Ia ditahan di Penjara Comarca Balide, disiksa di Korem dan kemudian dikirimkan ke Ataúro selama empat tahun.<sup>173</sup>

### Seorang anak di Ataúro

Joana Pereira ditahan di Ataúro sejak 1 September 1981 sampai November 1982. Pada tahun 1978, orang tuanya meninggal di hutan, Joana bersama adik laki-lakinya, Mateus Pereira, menyerah kepada militer Indonesia. Mereka tinggal bersama kakak-kakak kandung mereka di Lacolio (Quelicai, Baucau). Sementara itu, kakak lelaki mereka, Pascoal Pereira, adalah seorang anggota Falintil di hutan, dengan nama perjuangan Nixon.

Menurut Joana, pada tanggal 29 August 1981, saat dirinya berumur 13 tahun, Koramil Quelicai (Baucau) mengumumkan kepada masyarakat bahwa orang-orang yang punya anggota keluarga di hutan akan dihukum. Di depan kantor desa dipasang selebar papan yang bertuliskan nama-nama orang yang akan dihukum di Ataúro. Nama Joana dan Mateus ada dalam daftar tersebut. Mateus baru berumur sembilan tahun pada waktu itu.

Pada tanggal 30 Agustus 1981, Koramil Quelicai mengangkut para tahanan dalam empat truk menuju pelabuhan Laga (Baucau). Keesokan harinya, sekitar pukul 07.00 pagi, semua tahanan yang telah dikumpulkan dari Seiçal, Buibau, Quelicai dan Laga, diangkut dengan kapal perang

<sup>171</sup> Petunjuk teknis Korem tahun 1982 menyebutkan bahwa orang-orang yang termasuk dalam jaringan pendukung Falintil harus dipindahkan ke Ataúro: "Dengan cara ini, kita bisa memutuskan hubungan antara jaringan pendukung di pemukiman dan jaringan pendukung di Nurep." ABRI, "Petunjuk Tehnis tentang Kegiatan Babinsa," Juknis 06/IV/1982 (Korem 164, Wira Dharma, Seksi Intelijen, Williem da Costa [Kepala Seksi Intelijen]), terjemahan bahasa Inggris ada dalam Budiardjo dan Liong, *The War in East Timor*, Zed Books, London, halaman 181.

502 ke Dili. Kapal itu tiba di Dili sekitar pukul 07.00 malam. Pada tanggal 1 September 1981 pukul 08.00 pagi, para tahanan diberangkatkan ke Ataúro dengan kapal perang 511.

Mereka tiba di Ataúro pada tengah hari. Mereka bertemu dengan para tahanan yang telah terlebih dahulu berada di pulau itu, yang membongkar muatan kapal. Setelah nama mereka diperiksa satu per satu, para tahanan yang baru tiba dibawa ke tempat penghukuman masing-masing. Joana ditempatkan di rumah No. 22 bersama dengan 60 orang, sementara Mateus ditempatkan di rumah No. 24 bersama 70 tahanan lainnya.

Para tahanan tidak mendapat makanan saat kedatangan mereka di Ataúro. Joana dan Mateus hanya punya makanan yang mereka bawa dari Quelicai. Setelah satu bulan, masing-masing keluarga mendapat tiga kaleng jagung dari ABRI, dua kali setiap satu bulan. Karena lapar, sebagian orang mencuri pepaya dan ketela pohon dari ladang-ladang penduduk setempat. Namun banyak orang mati, terutama anak-anak dan orang-orang yang sudah tua. Joana ingat bahwa yang mati terutama adalah tahanan yang berasal dari Lospalos dan Viqueque. Setiap hari, dua sampai lima orang mati.

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) diizinkan mengunjungi Ataúro pada tahun 1982 dan memberikan bantuan bahan makanan seperti beras, kacang hijau, kacang kedelai, ikan asin, gula, garam dan ikan kalengan. Bantuan ICRC ini memungkinkan para tahanan untuk bertahan hidup dan tidak ada lagi yang mati sesudahnya.

Pada bulan Oktober 1982, saudara laki-laki Eduardo Freitas mengunjungi Ataúro. Setelah kembali ke Dili, ia melapor kepada Kodim. Pada bulan November 1982, Joana dibawa kembali ke Dili dengan kapal. Ia tinggal bersama pamannya, Paulo, di Fomento (Comoro, Dili) dan harus melapor kepada kepolisian setiap hari. Mateus telah dibawa ke Dili terlebih dahulu dan tinggal di Panti Asuhan Motael.<sup>174</sup>

219. Tujuan penangkapan sebagian anak ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang kerabat mereka. Aida Maria dos Anjos berusia 14 tahun pada 1983 ketika ia diinterogasi di Viqueque tentang keberadaan saudara laki-lakinya, Virgílio dos Anjos (Ular), salah seorang organisator *levantamento* Kraras:

*Dalam interogasi Nanggala memaksa saya untuk memberi informasi tentang keberadaan Komandan Ular. Interogasi selalu dilakukan oleh lima orang anggota Nanggala. Waktu itu C16 yang menjabat sebagai camat Viqueque sedang C17 sebagai Sekwilda [Sekretaris Wilayah Daerah] Viqueque. Mereka aktif menghadiri setiap interogasi saya.*<sup>175</sup>

220. Seiring dengan berkembangnya jaringan klandestin, anak-anak ditahan dan kadang-kadang disiksa sebagai konsekuensi dari kegiatan mereka sendiri, bukannya karena hubungan keluarga mereka. Pada tahun 1982, seorang anak berumur 14 tahun ditahan dan kemudian disiksa di Ainaro karena dicurigai telah menjalin kontak dengan Falintil:

*Pada tahun 1982, saya, Pedro dos Santos, sebagai seorang pemuda yang menjalankan klandestin bersama dengan Falintil. Oleh karena itu, pada suatu hari (saya lupa tanggalnya) seorang intel, C18 datang ke rumah dan membawa saya ke kampung Tatiri [Hatu Builico, Ainaro]. Sampai di sana, C18 mengikat kaki dan tangan saya dengan kabel plastik, saya digantung pada atap rumah, lalu dipukul dengan tongkat selama dua jam menyebabkan seluruh badan saya bengkak. Pada pagi harinya, C18 membawa saya ke Dare, Mauchiga [Hatu Builico, Ainaro]. Di sana saya ditahan selama dua hari. Kemudian, C18 membawa saya untuk ditahan di Kasi Satu, Ainaro. Sesampainya di Ainaro, Kasi Satu C19 meminta informasi. Karena saya tidak menjawab yang sebenarnya, maka saya ditampar dua kali di bagian muka, kemudian saya disetrum dengan listrik di bagian ibu jari dan telinga selama setengah jam. Hingga menyebabkan indera pendengaran saya mengalami gangguan...Setelah itu saya ditahan bersama banyak orang yang saya tidak kenal, selama empat bulan.\**

221. Pada bulan Agustus 1983, sebagai bagian dari penumpasan sesudah pemberontakan Kraras, sejumlah gadis muda termasuk di antara orang-orang yang ditahan di Viqueque. Adalgisa Ximenes, yang pada waktu itu berusia 14 tahun dan aktif dalam suatu jaringan bawah tanah, ditahan selama enam bulan dan diinterogasi oleh Komandan Kodim, Mayor C20. Ia dan teman-temannya ditangkap pada tanggal 7 Agustus 1983 tanpa sepengetahuan orang tua mereka, berdasarkan kecurigaan bekerja untuk Fretilin di hutan. Ia diinterogasi oleh militer, kadang-kadang sampai pagi hari dan diancam akan dibunuh kalau tidak mengatakan yang sebenarnya.<sup>176</sup>

222. Anak-anak juga ditahan karena pelanggaran terhadap kontrol ketat kehidupan sipil pada waktu itu. Maria Amaral dari Tutuloro (Same, Manufahi) melaporkan bahwa pada tahun 1983, ketika berumur 15 tahun, ia termasuk di antara sekelompok orang yang ditahan dan disiksa oleh ABRI di Kodim Manufahi selama satu minggu. Mereka ditangkap karena telah pergi bekerja di kebun keluarga tanpa surat jalan dan oleh karena itu dicurigai membantu Falintil.<sup>177</sup>

223. Sejak akhir 1983, pihak berwenang Indonesia mulai mendakwa dan mengajukan ke pengadilan beberapa tahanan politik. Akan tetapi, mekanisme ini agaknya tidak diterapkan secara luas pada anak-anak yang ditahan; dari 267 sidang pengadilan politik yang diidentifikasi melalui arsip pengadilan dari masa empat tahun pertama proses peradilan (1983-1987) yang juga merupakan masa tersibuk, hanya dua terdakwa yang di bawah umur.<sup>†</sup> Keduanya dinyatakan bersalah telah melakukan makar.<sup>‡</sup>

---

<sup>†</sup> Pernyataan HRVD 07180. Dalam kasus serupa lima tahun sebelumnya, Luis de Jesus seorang anak berusia 11 tahun yang dicurigai telah menyediakan pasokan untuk Fretilin termasuk dalam sejumlah 11 orang yang ditahan dan disiksa oleh Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Sang Tai Hoo (satu bekas toko milik orang Cina yang oleh tentara Indonesia digunakan sebagai tempat penyiksaan) pada bulan Agustus 1977. Ia kemudian dikirimkan ke sel tanpa penerangan di Penjara Comarca Balide (Dili) dan selanjutnya ditahan dalam sel biasa selama enam bulan (Pernyataan HRVD 05679).

<sup>‡</sup> Ada kemungkinan bahwa angkanya kecil karena sejak tahun 1983 pengadilan untuk orang di bawah umur dilaksanakan secara berbeda dengan orang dewasa. Ini mencakup ketentuan bahwa sidang dilakukan secara tertutup. Arsip kasus-kasus ini, seperti banyak arsip pengadilan yang lain, mungkin telah hilang. Lihat: *Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.06-UM>01 Tahun 1983 Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang* untuk keterangan lebih lanjut tentang prosedur persidangan.

<sup>‡</sup> Akan tetapi, menurut satu pernyataan, mekanisme hukum akhirnya digunakan dalam kasus anggota di bawah umur satu kelompok bawah tanah. Pada tanggal 2 Februari 1986 di Baucau, dua orang anak berusia 15 tahun anggota satu kelompok bawah tanah ditangkap setelah satu orang anggota tertembak secara tidak sengaja oleh Falintil dan kemudian

224. Penahanan dan penyiksaan juga digunakan pihak berwenang Indonesia untuk merekrut informan dan paramiliter. Lucas da Silva melaporkan bahwa pada tahun 1986, ketika berusia 17 tahun, ia termasuk di antara satu kelompok yang terdiri dari empat orang yang ditangkap oleh dua orang anggota pasukan khusus, satu di antaranya bernama C21 berpangkat sersan kepala. Mereka ditahan dan disiksa di rumah ketua rukun tetangga di Venilale (Baucau). Keempat orang itu dibawa ke Uatuhaco (Venilale, Baucau) di mana mereka ditanyai sambil dicekik dengan rantai dan disetrum. Akhirnya, mereka terpaksa menjadi informan dan setelah tiga tahun, mereka direkrut ke dalam Tim Sera, satu kelompok milisi awal.<sup>178</sup> Yang lebih terkenal, Eurico Guterres adalah seorang pelajar sekolah menengah berusia 19 tahun pada 1988 ketika ditangkap karena menjadi anggota satu kelompok klandestin setengah-keagamaan, Santo António. Ia dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena menjadi anggota kelompok ilegal. Dalam dasawarsa 1990-an ia bergabung dengan Gadapaksi (Garda Muda Penegak Integrasi). Ia menjadi terkenal pada tahun 1999 sebagai komandan kelompok milisi bermarkas di Dili, Aitarak, dan wakil panglima organisasi gabungan milisi, Pasukan Pejuang Integrasi (PPI).

1989-1998

225. Dengan pembukaan terbatas Timor-Leste bagi orang luar pada tahun 1989, gerakan kemerdekaan mulai menggunakan demonstrasi terbuka menentang pendudukan sebagai salah satu bentuk perlawanan. Metode ini sangat bertumpu pada keterlibatan pelajar. Demonstrasi-demonstrasi ini biasanya disusul, dalam beberapa kasus didahului, dengan penangkapan orang-orang yang dicurigai sebagai organisator.

226. Pada bulan Oktober 1990, organisasi-organisasi internasional hak asasi melaporkan lebih dari 100 penangkapan. Banyak dari orang yang ditangkap adalah pelajar sekolah menengah yang ditahan untuk waktu yang singkat, dan disiksa. Metode penyiksaan yang digunakan meliputi penyetruman, menyundut dengan rokok menyala dan pemukulan yang parah. Penangkapan terjadi menyusul penyerangan terhadap seorang tentara Indonesia oleh pemuda Timor-Leste, pencemoohan terhadap seorang pejabat Indonesia di satu sekolah menengah pertama, dan munculnya tulisan anti-Indonesia di dinding-dinding sekolah Externato.<sup>179</sup> Belchior Francisco Bento Alves Pereira menyampaikan kepada Komisi bagaimana ia ditahan dan disiksa di sebuah rumah SGI di Colmera (Dili) pada tahun 1990 karena terlibat dalam kasus Sekolah St. Paulus (lihat bagian 7.8.2.3 Anak-anak dalam gerakan klandestin). Ia menjalani waktu empat tahun di Penjara Comarca Balide, Dili, sebelum dilepaskan pada tahun 1995.

227. Para pelajar secara khusus dijadikan sasaran dalam penumpasan setelah terjadinya Pembantaian Santa Cruz. Mateus dos Santos terlibat dalam kegiatan klandestin pada waktu itu dan diberi informasi oleh jaringan setiap kali akan ada demonstrasi. Ia ingat bahwa militer Indonesia mengarah langsung ke sejumlah sekolah menengah atas setelah pembantaian itu untuk mengidentifikasi para demonstran:

*Ketika dengar tembakan, kami balik ke sekolah, tapi ABRI sudah keprung sekolah kami, pakai mobil Hino di depan pintu semua. Pada saat itu mereka pakai seragam. Ada pasukan BTT dari Jawa punya, pengganti dari [Yonif] 508. Nomor tidak ingat. Kami dikeprung, sekolah ditutup. Mereka sudah tahu, tahu persis. Mereka takut amukan massal, terus mereka cek absen-absen siswa sekolah. Itu perintah kepada guru-guru. Saya dengar langsung dari*

---

ditangkap oleh ABRI. Mereka awalnya ditahan di Pos Kopassus di Baucau, di mana mereka disetrum di tangan, telinga dan hidung mereka, ditelanjangi dan dipukuli selama satu minggu. Mereka kemudian dibawa ke Penjara Comarca Balide di Dili, di mana mereka ditahan selama satu bulan. Selanjutnya mereka dibawa ke Kantor Urusan Sosial dan Politik (Sospol), di mana mereka diinterogasi selama satu hari. Kemudian mereka diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara satu tahun. (Pernyataan HRVD 04199.)

<sup>178</sup> Menurut penelitian CAVR kemungkinan batalyon itu adalah Batalyon Infantri 516.

*guru. Setelah dari sekolah, intel Kopassus dengan intel polisi disuruh mengintai kami, siapa yang tidak masuk pada tanggal 12 November 1991.\**

228. Menyadari ancaman yang bisa timbul dari aksi-aksi ini, pihak berwenang Indonesia melakukan berbagai penahanan pencegahan yang berhubungan dengan kunjungan orang asing atau kecurigaan akan adanya demonstrasi (lihat boks di bawah). João Baptista Monis melaporkan bahwa pada bulan Maret 1992, ketika berusia 15 tahun, ia ditahan di Dili bersama seorang temannya. Keduanya telah berpartisipasi dalam demonstrasi Santa Cruz. Para agen intelijen membawa mereka awalnya ke kantor desa Caicoli, kemudian ke Kodim Dil, dan akhirnya ke Taibesi di mana banyak tahanan lain sedang dipukuli dan ditendangi para prajurit tentara.<sup>180</sup>

229. Naldo Gil Da Costa menyampaikan kepada Komisi pada Audiensi Publik Nasional mengenai Anak dan Konflik, mengenai penangkapan dan penyiksaannya ketika berusia 16 tahun sebelum berlangsungnya satu demonstrasi yang telah direncanakan:

---

\* Wawancara CAVR dengan Mateus dos Santos, Dili, 31 Oktober 2003; lihat juga Pernyataan HRVD 02726 tentang seorang anak laki-laki berusia 16 yang ditahan selama tiga bulan setelah peristiwa Santa Cruz.

### **Kesaksian Naldo Gil da Costa**

*Pada tanggal 28 Agustus 1992 kami menerima sepucuk surat dan sebuah kaset dari Xanana meminta agar kami menyelenggarakan demonstrasi memprotes kejadian Santa Cruz, pada saat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok di Jakarta, yang akan berlangsung dari tanggal 3 sampai 6 September. Setelah menelusuri berbagai kemungkinan di bawah pengawasan ketat SGI, akhirnya kami menulis surat kepada Xanana mengatakan bahwa tidak mungkin mengadakan demonstrasi. Akibatnya terjadi pertengkaran di antara pemuda. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa kita harus tetap mengadakan demonstrasi karena ini perintah Komandan Xanana. Akhirnya demonstrasi tetap dilaksanakan oleh kurang lebih 20 orang.*

*Tetapi pada akhirnya semua 20 orang dari kami itu ditangkap oleh SGI. Saya dicari-cari dan ditangkap. Mereka memborgol saya, menutup mata saya dengan kain dan terus-menerus memukuli saya. Mereka memasukkan sepucuk pistol ke dalam mulut saya dan menyiksa saya sampai saya hampir jatuh. Mereka kemudian melemparkan saya ke dalam mobil dan dibawa ke SGI Farol. Di Farol, tangan saya masih diborgol dan kain tetap diikat pada mata saya kemudian kaki saya diikat ke sebuah kursi dan seorang perwira SGI memukuli saya dengan sebatang besi. Saat itu sekujur tubuh saya dialiri listrik. C108 dan 10 anak buahnya menginterogasi saya. Karena tetap diam akhirnya C108 marah dan mulai memaki saya berkali-kali dengan kata-kata "Anak-pelacur, kamu asal dari mana?" Sejak itu saya dipukuli terus-menerus. Tulang-tulang kami patah dan darah mengucur dari luka-luka kami.*

*Pada tanggal 6 September saya dibawa oleh dua tentara dan empat orang sipil ke gedung sekolah dasar di Tacitolu. Setelah menelanjangi saya, mereka mengikat saya di bagian belakang sebuah mobil lalu diseret sejauh kira-kira 200 meter. Kemudian saya dibawa ke Fatuk, Dili, tempat di mana biasanya orang-orang dibunuh. Mereka memaksa saya menggali kuburan saya sendiri, menyuruh saya masuk ke dalamnya dan berdoa karena saya akan dibunuh. Ketika mereka hendak menembak kepala saya, salah seorang tentara berkata, "Kalau kita bunuh anak ini kita tidak akan masuk surga. Anak ini tidak bersalah. Kita harus membiarkan dia hidup." Mereka menarik saya keluar dengan sebuah linggis dan cangkul, kemudian menyiksa saya sepanjang perjalanan dari Tacitolu ke SGI Colmera.*

*Selama seminggu ditahan di SGI, saya dipukuli dan diinterogasi. Kemudian bersama beberapa teman lain, kami dipindahkan ke Penjara Balide, di mana kami diborgol kemudian ditendangi dan dipukuli oleh 50 tentara. Setelah itu borgol kami dilepas dan kami dimasukkan ke sel. Toilet di dalam sel itu penuh dan meluap sehingga kotoran manusia dan air kencing membanjiri dan menutupi lantai. Kami semua telanjang. Saya dan teman saya Marcos menertawakan diri sendiri karena kami menduduki tahi yang menutupi lantai. Pada tanggal 16 September 1992 tentara dari Batalyon 745 di Lospalos mengambil Marcos dari sel dan setelah itu ia tidak pernah kelihatan lagi.*

230. Alexandrino da Costa mengungkapkan kepada Komisi tentang penangkapan dan penahanan dirinya setelah suatu demonstrasi pada tahun 1995:



*Pada tanggal 9 Januari 1995 mahasiswa UNTIM [Universitas Timor Timur] mengadakan demonstrasi dan saya terlibat di dalamnya. Saya ditangkap kembali oleh tentara dan polisi. Mereka katakan bahwa saya tidak takut mati, masih mau mengikuti demonstrasi. Seorang dari mereka memukul dan menendang sambil menyeret saya dan membuang ke dalam mobil Hino. Saya dibawa ke Polwil [Kepolisian Wilayah] di Comoro, Dili untuk diinterogasi. Di Polwil saya diinterogasi, dipukul, ditendang dan distrum dengan listrik. Seluruh tubuh distrum termasuk alat kelamin. Pakaian saya dilepas semua. Kami yang ditangkap ketika itu berjumlah 20 orang. Kami ditahan di Polwil hampir satu tahun. Setelah itu sekitar tahun 1995 kami dipindahkan ke LP [Lembaga Pemasyarakatan] Becora, Dili. Kami diadili dan dijatuhi hukuman penjara di penjara Becora kurang lebih dua tahun delapan bulan.<sup>181</sup>*

231. Demonstrasi dan penangkapan terus berlanjut sepanjang dasawarsa 1990-an. Pada tanggal 15 November 1995, sekelompok pelajar sekolah menengah atas berjalan kaki untuk bergabung dalam satu demonstrasi di kampus Universitas Timor Timur. Mereka dikepung dua truk polisi anti-huru-hara di dekat Hotel Mahkota, Dili. Banyak yang berhasil melarikan diri, tetapi sekitar 30 orang dilaporkan dipukuli dan dibawa ke markas kepolisian sebelum dilepaskan.<sup>182</sup>

232. Anak-anak juga ditahan di sepanjang dasawarsa 1990-an karena dicurigai melakukan kontak dengan Falintil. Zeca Soares melaporkan kepada Komisi bahwa ketika dirinya menjadi seorang *estafeta* berumur 16 tahun pada tahun 1994, ia dibawa oleh sekretaris desa ke pos SGI di Letefoho (Ermera). Di sana ia ditahan di dalam satu sel gelap dan dipukuli oleh tiga orang sipil atas perintah SGI. Ia dilepaskan setelah dua bulan, tetapi beberapa bulan kemudian ia ditangkap kembali oleh anggota-anggota SGI di daerah Asulau (Ermera) dan dibawa ke Tata Hatulia (Ermera). Di jalan, ia dimasukkan ke dalam sebuah karung dan dilemparkan ke satu jurang. Masih hidup, ia kemudian dibawa ke pasukan Rajawali Yonif 713 (Kostrad) di Suai dan ditahan selama satu minggu di mana ia dipukuli berkali-kali.<sup>183</sup>

1999

233. Pada tahun 1999 ada gelombang baru penahanan oleh militer dan milisi-milisi pembantunya (lihat Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan, dan Penganiayaan). Anak-anak termasuk di antara mereka yang ditahan. Misalnya, pada bulan April 1999, komandan SGI di Marco (Cailaco, Bobonaro), bernama C22, memerintahkan kepada TNI dan milisi Halilintar untuk bekerja bersama mengidentifikasi orang-orang yang telah membunuh tokoh pro-otonomi setempat, Manuel Gama. Para prajurit tentara dan anggota milisi melakukan penyisiran di desa-desa sekitar dan menahan 30 penduduk, termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka dipaksa berjalan kaki ke Koramil Cailaco di Marco, di mana mereka ditahan sampai empat hari.<sup>184</sup>

234. Penahanan kadang-kadang diikuti dengan perekrutan paksa. Misalnya Komisi menerima kesaksian yang menguraikan proses perekrutan paksa pemuda untuk menjadi milisi Laksaur di Covalima.<sup>185</sup>

235. Juga Florentino Nunes mengatakan kepada Komisi bahwa pada tanggal 8 April 1999, saat ia berusia 17 tahun, ia dicurigai sebagai simpatisan CNRT. Ia dipukuli oleh anggota-anggota milisi BMP di Leopa (Liquiça, Liquiça) dan ditahan di rumah Bupati Liquiça selama beberapa hari. Kemudian ia ditahan di benteng di Maubara (Liquiça) selama dua bulan lagi.<sup>186</sup>

236. Seorang remaja lain, yang berusia 17 tahun, termasuk dalam kelompok empat orang pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Beco (Suai, Covalima) yang ditahan oleh seorang

anggota Mahidi bernama C23, seorang anggota tentara bernama C22 dan beberapa orang lainnya. Mereka dibawa ke markas Mahidi di Zumalai (Covalima) dan ditahan semalaman untuk ditanyai. Keesokan harinya, mereka dikembalikan ke rumah masing-masing, yang digeledah untuk mencari bukti keterlibatan dan senjata Fretilin, dan di sana mereka dipukuli serta disundut dengan rokok. Kemudian mereka dibawa ke rumah komandan Mahidi setempat, C24, dan ditahan selama tiga hari lagi untuk ditanyai yang sepanjang waktu itu mereka tidak diberi makan ataupun minum.<sup>187</sup>

### Penahanan oleh UDT

237. Komisi telah menemukan bahwa UDT melakukan sejumlah penangkapan pada bulan Agustus 1975 (lihat Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan, dan Penganiayaan). Komisi menerima dua pernyataan yang menguraikan kasus penahanan remaja pendukung Fretilin yang dilakukan oleh UDT, masing-masing sekitar satu minggu, di masa “kudeta” Agustus 1975. Bernardino da Costa melaporkan bahwa ia berumur sembilan tahun pada waktu ditangkap oleh seorang anggota UDT bernama C25 di Atudara (Cailaco, Bobonaro).<sup>188</sup> João do Carmo de Araújo mengisahkan bahwa ia ditangkap oleh UDT di Ataúro Vila (Ataúro, Dili) bersama dengan tiga orang lain, termasuk satu orang anak berumur 15 tahun bernama Agostinho.<sup>189</sup> Luis de Jesus Guterres mengungkapkan bahwa seorang anak berumur satu tahun bernama Filomeno de Jesus Pereira, adalah salah satu dari sekelompok orang yang ditahan oleh UDT pada tanggal 11 Agustus 1975 di Ailoklaran (Dili).<sup>190</sup> Juga ada satu laporan dari Domingos do Santos yang menyatakan bahwa tiga prajurit tentara Portugis menahannya di Dili pada bulan Agustus 1975, ketika berusia 16 tahun. Pemuda ini dibawa ke kantor UDT di Palapaço, di mana ia ditahan selama tiga hari sebelum berhasil melarikan diri.\*

### Penahanan oleh Fretilin

238. Pada tahun 1975-1976, Fretilin biasa menahan anak-anak bersama kerabat mereka yang dewasa atas alasan yang terkait dengan konflik antar-partai. Selanjutnya, anak-anak ditahan karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan, dicurigai menjadi “pengkhianat” atau akibat dari konflik-konflik di dalam partai.

239. Anak-anak ditahan bersama orang tua mereka oleh Fretilin pada masa konflik antar-partai. Seorang pendukung UDT, João da Costa, menyampaikan kepada Komisi bagaimana ia ditahan dan disiksa selama lima bulan yang dimulai pada September 1975. Dia ditahan bersama anak perempuannya, Saturnina yang baru berumur tiga bulan, temannya, João Castro, dan anak João Castro yang baru berumur enam bulan. João da Costa dan istri serta bayinya telah melarikan diri ke Venilale (Baucau) pada saat terjadi “kontra-kudeta” oleh Fretilin, namun tertangkap di sana bersama para pendukung UDT lainnya. João da Costa dan João Castro dipukuli, sedangkan Saturnina dan bayi João Castro ditikam dengan pisau. Kemudian Fretilin membawa keluarga-keluarga itu ke Viqueque, di mana mereka terus disiksa.<sup>191</sup>

240. Sejumlah anak yang lebih tua ditahan selama berlangsungnya konflik ini tanpa keluarga mereka, karena afiliasi politik mereka atau afiliasi politik keluarga mereka. Misalnya, Antero Soares bersaksi bahwa ia ditahan Fretilin pada tahun 1974 ketika berusia 16 tahun di Mindelo (Turiscaí, Manufahi), karena ayahnya adalah seorang pendukung Perkumpulan Kerakyaaan Demokratis Timor (Associação Popular Democrática Timorense, Apodeti).<sup>192</sup>

---

\* Lihat juga Pernyataan HRVD 04677 yang menyebutkan: “Pada bulan Juli 1975, saya ditangkap oleh tiga orang tentara Portugis yang saya tidak kenal identitasnya di depan lapangan terbang helikopter Dili di mana waktu itu saya sedang menunggu mobil untuk ke Liquiça. Setelah menangkap saya, mereka (tentara Portugis) langsung memukul saya sampai jatuh pingsan selama lima menit. Kemudian saya sadar kembali. Mereka langsung mengikat tangan saya dan membawa saya ke kantor UDT di Palapaço, Dili. Sampai di Palapaço, mereka menyerahkan saya pada bapak Manuel Carrascalão. Kemudian beliau menyuruh anak buahnya melepaskan tali yang diikat pada tangan saya, lalu memasukkan saya ke dalam ruang atau sel tahanan selama tiga hari, tiga malam dan tidak diberi makan dan minum. Kemudian saya melarikan diri dari tahanan di kantor UDT pada waktu situasi di kota Dili dalam keadaan kacau.”

241. Hubungan keluarga terus berperan penting dalam persaingan di dalam dan antar partai, dan ada beberapa keterangan tentang anak-anak yang ditahan oleh Fretilin bersama keluarga luas mereka. Constantinho Ornai mengungkapkan kepada Komisi tentang penahanannya pada tahun 1976, saat berusia 11 tahun, karena konflik di dalam Fretilin:

*Pada bulan Oktober, Comite Região [Komite Region] mau menangkap kami di Uatu-Carbau [Viqueque]. Pada suatu pagi subuh kami ditangkap dan dibawa ke Iliomar [Lautém]. Di Iliomar kami diikat dan dibawa ke Salari [Ilomar, Lautém]. Di sana kami dimasukkan ke dalam kandang babi dalam keadaan terikat. Kami diinterogasi secara berurutan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak, termasuk saya. Kami diikat selama beberapa hari. Kami hanya dapat makanan satu kali sehari. Kami diikat dengan tali pohon enau dan tali pohon sagu. Kedua tangan kami diikat ke belakang dengan ikatan tiga, pertama ikat di telapak tangan, kedua di siku dan ketiga di lengan tangan, kemudian digantung pada pohon. Sedang kaki kami dipasung dengan satu batang bambu dan satu batang pohon pinang.*

*Kemudian C27, komandan operasional membawa saya dalam keadaan dijaga dengan sebuah senjata G-3 untuk diinterogasi. Lalu Komandan C28 dan C29 menginterogasi saya. Setelah diinterogasi saya menjadi tahanan bebas luar untuk bertugas di dapur umum. Dengan tugas itu, saya menimba air dan mengambil kayu bakar. Selang satu malam saya menjadi tahanan dapur umum. Paman saya bersama beberapa orang lainnya dibunuh oleh kubu Fretilin yang dipimpin oleh Komandan C28 dan C29, sekitar tanggal 16 November 1976.<sup>193</sup>*

242. Keluarga-keluarga terancam dicurigai berencana menyerah atau menghubungi musuh, jika mereka kedatangan sedang mencari makanan tanpa izin. Isabel Amaral menyatakan kepada Komisi bahwa pada tahun 1976, ketika berusia 17 tahun, ia ditahan sebentar bersama keluarganya oleh Fretilin karena mereka berusaha kembali ke tempat di mana mereka menyembunyikan makanan.<sup>194</sup> Komisi juga telah mendengar dari Luzia de Jesus Barreto, ibu Bastião, bahwa pada tahun 1978 ketika Bastião berumur 14 tahun ia pergi mencari makanan di Remexio (Aileu) dan ditahan karena dicurigai menjadi pengkhianat. Ia kemudian meninggal di dalam satu Kamp Rehabilitasi Nasional (Campo de Reabilitação Nacional, Renal) Fretilin karena penyakit.<sup>195</sup>

243. Ada juga beberapa kasus, seperti disebutkan dalam bagian tentang Anak-anak dalam Falintil di atas, mengenai gerilyawan di bawah umur yang ditahan karena pelanggaran disiplin. Ijaias da Costa menyatakan bahwa ketika berumur 17 tahun, pada tahun 1976, di Berelau (Liquidoe, Aileu), ia ditahan selama dua hari untuk perbuatan tidak sengaja melepaskan tembakan.<sup>196</sup> Masa penahanan sebagai untuk tindakan pelanggaran disiplin bisa mencapai satu tahun atau lebih, misalnya karena memungkinkan seorang tahanan melarikan diri. Jaime da Costa mengisahkan kepada Komisi bagaimana pada Juni 1977, ketika berusia 14 tahun, sebagai seorang anggota Falintil memungkinkan seorang tahanan melarikan diri karena tertidur saat bertugas jaga. Jaime ditahan di Lacro (Manatuto) pada tanggal 19 Juni 1977 berdasarkan "surat perintah penahanan" yang dikeluarkan *comandante da região* (komandan region). Ia ditahan selama satu tahun tiga bulan, yang sebagian waktu dilalui dalam sebuah lubang dan diharuskan bekerja di ladang.<sup>197</sup>

244. Anak-anak ditahan Fretilin dengan keadaan yang berbeda-beda. Constantinho Ornai menjalani sebagian waktu sebagai seorang tahanan sebelum diberi status “tahanan bebas” dan diharuskan bekerja.<sup>198</sup> Kadang-kadang anak-anak ditahan dalam waktu singkat dan kemudian diberi tugas kerja untuk suatu periode yang bisa berlangsung mulai dari hanya beberapa hari sampai bertahun-tahun. Paulino Laserdo da Costa mengisahkan bahwa ketika ia berusia 16 tahun, pada tahun 1976, dia ditahan di Cairui (Laleia, Manatuto). Ia ditahan hanya selama 30 menit sebelum diberi status “tahanan bebas” dan diharuskan bekerja mengumpulkan garam dari laut yang ditukarkannya dengan makanan untuk Falintil.\*

245. José dos Santos yang berusia 12 tahun bersama keluarganya mengalami kondisi yang jauh lebih sulit. Ayahnya adalah seorang pendukung UDT, tetapi José tinggal di wilayah Fretilin di Manatuto bersama anggota-anggota lain dari keluarga besarnya, yang beberapa di antaranya aktif di Falintil dan Fretilin. Karena dicurigai menjalin kontak dengan ayah mereka dan pembagian kekayaan keluarga, seluruh keluarga ini ditahan pada akhir tahun 1976 atau awal 1977. Selama 18 bulan berikutnya mereka berpindah-pindah di sekitar Manatuto bersama Fretilin sampai akhirnya mereka terkepung dan ditangkap Yonif 315 pada tanggal 20 Juli 1978. Pertama, keluarga ini ditahan di Welihumeta (Laclo, Manatuto) selama tiga atau empat bulan. Di sini, José dan anggota-anggota keluarga lainnya ditahan dalam sebuah lubang di tanah, sementara yang lainnya, termasuk dua saudara laki-lakinya yang masing-masing berusia 13 tahun dan dua bulan, ditempatkan dalam sebuah gubuk. Kemudian mereka dibawa ke Hatuconan (Laclo, Manatuto) tempat pimpinan Fretilin setempat bermarkas. Anak-anak di bawah umur 10 tahun ditempatkan di sebuah bangunan kecil yang berfungsi sebagai tempat pengasuhan anak, sementara José, saudara laki-lakinya yang berusia 13 tahun dan tiga anak lelaki lainnya yang bukan kerabat mereka yang berusia 10-12 tahun tinggal bersama pemimpin Fretilin, mencuci pakaian dan membantu membagikan perbekalan. José pernah satu kali dikirimkan ke satu Renal (kamp “rehabilitasi” Fretilin), di mana dia ditahan dalam sebuah gubuk selama empat hari sebelum dikirimkan kembali ke Hatuconan. Setelah setahun di sana, yang disusul dengan tiga bulan di Manalete (Laclo, Manatuto), mereka pindah berkali-kali sampai mereka tertangkap.<sup>199</sup>

246. Setelah kehancuran “wilayah bebas (*zonas libertadas*) pada awal 1979, Fretilin tidak lagi menguasai cukup wilayah atau penduduk yang memungkinkan mereka melakukan penahanan, dan meskipun masih disebutkan adanya beberapa kasus, namun jumlahnya kecil dan tidak satu pun dari kasus-kasus yang diketahui Komisi yang melibatkan anak-anak.

### 7.8.3.2. Pembunuhan dan penghilangan

#### Pendahuluan

247. Anak-anak mati sebagai akibat konflik politik di Timor Leste, mulai dari hari-hari pertama konflik antar partai pada tahun 1975 sampai hari-hari terakhir kekuasaan Indonesia. Akan tetapi, konteks dalam mana anak-anak tersebut meninggal berbeda-beda sepanjang masa tersebut. Sesudah invasi Indonesia pada tahun 1975, banyak sekali anak-anak yang mati akibat kekurangan makan (lihat Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan), tetapi banyak juga yang mati dalam penyerangan tentara baik yang bersasaran maupun yang sembarangan dan ada juga yang dibunuh secara sendiri-sendiri. Pada dasawarsa 1980-an kasus-kasus yang diidentifikasi Komisi cenderung berupa anak-anak yang dibunuh bersama orang-orang dewasa dalam pembunuhan massal, seperti yang terjadi di Kraras, Bibileo (Viqueque) atau di Gunung Aitana (Laleia, Manatuto). Ada juga kasus-kasus terpisah selama masa ini tentang anak-anak yang dibunuh karena dicurigai terlibat kegiatan pro-kemerdekaan. Dalam dasawarsa 1990-an, kecenderungan ini berlanjut, terutama dalam hubungannya dengan demonstrasi-demonstrasi terbuka, yang paling terkenal di antaranya adalah pembantaian Santa Cruz, 12 November 1991.

---

\* Pernyataan HRVD 05226; dalam satu kasus lainnya di Manatuto, Sebastião da Silva mengatakan bahwa ia berumur 12 tahun pada waktu ditahan dan diharuskan bekerja. Ia ditahan bersama dengan kakaknya di Barique (Manatuto) oleh Fretilin pada tahun 1976 karena mereka mantan pendukung UDT dan Fretilin takut mereka “berkepala dua.” Ia dipaksa mengolah sagu untuk Falintil selama tiga tahun. (Pernyataan HRVD 06513.)

Pada tahun 1999 terjadi gelombang pembunuhan anak-anak, banyak di antaranya adalah anggota gerakan bawah tanah atau dari keluarga atau kampung-kampung pro-kemerdekaan. Pembunuhan-pembunuhan ini sering terjadi sebagai bagian dari penyerangan membabi-buta atas kelompok-kelompok yang mencari perlindungan di gereja-gereja atau rumah-rumah pribadi, tetapi ada juga kejadian di mana anak-anak sengaja dibunuh bersama anggota keluarga lainnya atau sebagai pengganti anggota keluarga yang tidak tertangkap. Sementara sebagian besar pembunuhan anak-anak dilakukan oleh ABRI/TNI dan badan-badan paramiliter yang diciptakannya, Fretilin dan Falintil juga bertanggungjawab atas pembunuhan anak-anak.

248. Dalam penelitian yang dilakukannya, Komisi tidak menemukan bahwa anak-anak sebagai kelompok dijadikan sasaran khusus oleh kelompok manapun selama periode mandat Komisi. Meskipun demikian, anak-anak yang meninggal dalam periode ini harus diakui dan dikenang. Karenanya, pembahasan berikut ini merupakan garis besar dari sebab-sebab dan konteks anak-anak dibunuh akibat dari konflik-konflik politik.

### Profil Pelanggaran

249. Dari 5.120 kasus pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan kepada Komisi, 7,1% (362/5.120) penduduk sipil yang dilaporkan dibunuh adalah anak-anak kecil, meskipun hanya 41,4% (2.120/5.120) kasus yang memasukkan umur korban. Ini menunjukkan bahwa anak-anak bukanlah sasaran pembunuhan, khususnya jika proporsi seluruh penduduk yang di bawah umur diperhitungkan (lihat Gambar <g4910000100.pdf>). Akan tetapi, karena keengganan untuk membunuh anak-anak itu lebih kuat dibandingkan dengan membunuh orang dewasa dan kemungkinan bahwa anak-anak pada umumnya tidak begitu banyak di garis depan politik maupun militer (walaupun mereka terlibat dalam keduanya), angka-angka ini menunjukkan bahwa kenyataannya anak-anak yang terbunuh jumlahnya melebihi proporsinya.

INSERT Figure <g4910000100.pdf> about here

250. Gambar <g220100b.pdf> berikut menunjukkan pola pembunuhan penduduk sipil anak-anak sepanjang waktu. Kelihatan bahwa bagian terbesar pembunuhan anak-anak terjadi dalam mana keseluruhan pembunuhan relatif tinggi. Lebih jauh, 63,3% (229/362) dari pembunuhan penduduk sipil yang terdokumentasikan pelakunya adalah militer Indonesia. Dengan demikian, militer Indonesia agaknya telah melakukan pembunuhan skala besar dengan cara yang mengungkapkannya tidak diambilnya langkah yang memadai untuk mencegah pembunuhan anak-anak.

Insert graph <g220100b.pdf> – percent acts of civilian killings committed against children  
[prosentase pembunuhan penduduk sipil anak-anak]

251. Jumlah terbesar pembunuhan anak-anak terjadi pada kurun waktu 1975-1979 (terutama 1975 dan 1978) dan pada 1999. Sesudah reda pada 1980, jumlah anak-anak yang terbunuh meningkat sedikit pada 1981-1982 dan pada paruh kedua dasawarsa 1990-an. Polanya sejalan dengan pembunuhan orang dewasa (dengan perkecualian bahwa jumlah anak-anak yang terbunuh turun pada tahun 1983). Mengenai jenis kelamin korban, dilaporkan bahwa 77,6% (281/362) korban pembunuhan anak-anak adalah laki-laki, sementara angka untuk korban perempuan adalah 21,0% (76/362).

252. Militer Indonesia bertanggungjawab untuk 63,3% pembunuhan anak-anak dari seluruh kasus yang dilaporkan, Fretilin/Falintil 27,6% (100/362), milisi yang didukung militer Indonesia 11,9% (43/362), dan UDT 1,9% (7/362).\*

---

\* Ketika proporsi pertanggungjawaban kekerasan dihitung, beberapa kekerasan mungkin dihitung lebih dari satu kali karena pelakunya lebih dari satu orang.

253. Di dalam kategori pembunuhan anak-anak sipil di bawah umur, anak-anak yang lebih tua, berumur 15-19 tahun adalah korban utama, hampir dua kali lipat jumlah pembunuhan kelompok umur terbesar kedua, 10-14 dan 0-4 tahun. Jumlah terkecil pembunuhan anak-anak dilaporkan berada dalam kelompok umur 5-9 tahun, yang hanya 10,5% dari seluruh pembunuhan anak-anak sipil. Usia median (tengah) korban yang dilaporkan kepada Komisi melalui proses pengambilan pernyataan adalah 14 tahun dan hampir seperempat dari seluruh korban berusia 16-17 tahun.

254. Persentase anak laki-laki dari seluruh laki-laki yang terbunuh mencerminkan gambaran umum dan ini tidak mengherankan karena anak laki-laki adalah mayoritas yang sangat besar dari seluruh kasus 77,6% (281/362). Kelompok terbesar laki-laki yang terbunuh adalah kelompok umur 30-35. Sedangkan perempuan yang dibunuh cenderung lebih muda usianya. Dalam semua kasus perempuan yang dibunuh, lebih dari seperempatnya berasal dari kelompok umur 0-17 tahun. Kelompok umur 12-17 tahun adalah kelompok kedua terbesar di bawah kelompok yang sedikit lebih tua, yaitu kelompok umur 18-23 tahun. Agaknya perempuan dalam kedua kelompok umur ini adalah yang paling rentan terhadap kejahatan-kejahatan lain, seperti perkosaan, yang dalam beberapa kasus terkait dengan pembunuhan, walaupun dukungan untuk adanya hubungan ini kecil.<sup>200</sup>

255. Penghilangan orang memperlihatkan pola umur yang serupa dengan pembunuhan, dengan 7,1% (59/835) korban penghilangan dalam kelompok umur 0-17 tahun dan 32,3% (23/59) kelompok umur 12-17 tahun.

256. Profil demografis umur dan jenis kelamin mengenai sejumlah korban penghilangan yang dilaporkan mirip dengan pembunuhan orang sipil. Khususnya, kebanyakan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi dilakukan terhadap laki-laki muda berumur antara 20 dan 34. Dari penghilangan anak-anak yang dilaporkan, hampir semuanya adalah terhadap anak laki-laki dalam kelompok umur 15-19, seperti diperlihatkan dalam Gambar [\[g31210000500\]](#):

[Insert <FIGURE 31210000500.pdf> about here](#)

## **Invasi dan operasi militer**

1975-1979

257. Sebagaimana dicatat sebelumnya, jumlah terbesar anak-anak dibunuh pada periode dari 1975 sampai dengan 1979 dalam seluruh masa yang menjadi mandat Komisi. Pola ini sejalan dengan seluruh pembunuhan penduduk. Angka tersebut menunjukkan bahwa anak-anak bukanlah target, tetapi terperangkap dalam kekerasan dan kekacauan bersama dengan orang dewasa. Analisis kualitatif yang dilakukan dalam penelitian Komisi juga menunjukkan bahwa pada periode ini anak-anak dibunuh dengan alasan yang sama seperti orang dewasa dan sering pada waktu yang sama dengan orang dewasa.

258. Sejumlah anak mati dalam pertempuran pada saat invasi Indonesia atau sesudahnya dalam operasi-operasi militer terhadap Falintil. Tetapi, dari pernyataan-pernyataan yang diterima Komisi, banyak yang tidak jelas apakah sesuatu pembunuhan disebabkan oleh penyerangan yang membabi buta atau eksekusi dengan sasaran tertentu. Misalnya, pada tahun 1978 empat orang anak dari satu keluarga dari Lupal (Lolotoe, Bobonaro) terbunuh ketika tempat pengungsian mereka di Gunung Manulor diserang oleh tentara Indonesia. Santana da Costa berumur tujuh tahun pada waktu itu. Ia menjelaskan:

*Selama dua minggu di gunung, adik laki-laki dan adik perempuan saya, Lesu Bere [umur tidak diketahui], Olandina [umur 5 tahun], dan Olosili [umur 2 tahun], mati setelah kena peluru dari tentara Indonesia, sedangkan*

*seorang lagi bernama Olasila mati karena kena pecahan peluru.<sup>201</sup>*

259. Pola kedua kematian anak-anak pada dasawarsa 1970-an adalah anak-anak dibunuh ketika mereka menjadi bagian kelompok yang sedang mencari makanan. Komisi menerima sejumlah laporan yang menggambarkan bagaimana orang-orang yang sedang mencari makanan menghadapi risiko diserang oleh ABRI (dan pembantunya, seperti anggota-anggota Hansip) maupun oleh Fretilin/Falintil. ABRI menganggap keberadaan kelompok-kelompok seperti itu di hutan mencurigakan karena mereka mungkin bermaksud mengadakan hubungan dengan Perlawanan atau bahkan mereka itu sendiri adalah anggota Perlawanan. Sedangkan Fretilin/Falintil menjadikan kelompok-kelompok itu sasaran karena dianggap mata-mata atau orang-orang yang akan menyerah (lihat bawah).

260. Pola ini memperjelas salah satu ciri utama konflik politik di Timor-Leste: kegagalan umum untuk membedakan antara orang sipil dan orang tempur. Kegagalan ini mungkin adalah akibat dari doktrin militer, seperti strategi 'perang rakyat' Fretilin dan strategi *Hankamrata* ABRI/TNI yang serupa dalam hal ini, yang memberikan pembenaran atas pembentukan satuan-satuan paramiliter dan pertahanan rakyat. Mungkin juga ini akibat dari kecurigaan terhadap semua orang sipil yang didapati di wilayah yang sedang diperebutkan, yang menyebabkan mereka menjadi sasaran militer yang sah. Anak-anak tidaklah terkecualikan atau terlindungi dari kegagalan ini.

261. Komisi mendapatkan kesaksian yang menyebutkan korban sipil di tangan kesatuan-kesatuan ABRI dan Hansip.<sup>202</sup>

262. Komisi menerima kesaksian mengenai anggota-anggota Hansip di Uai-Oli (Venilale, Baucau) membunuh seorang anak perempuan berumur enam tahun bernama Kenauatu dan ayahnya. Adik laki-lakinya, José Ximenes, menjelaskan bagaimana mereka dibunuh dan bagaimana ia diambil dan diasuh para pelaku pembunuhan itu:

*Pada tahun 1978 kami turun dari gunung Matebian menuju Uai-Oli, aldeia Ibihæ [Venilale, Baucau]. Seluruh keluarga saya berangkat ke kota Venilale, tetapi saya bersama ayah saya Uatusu'u, kakak perempuan saya Kenauatu tinggal di Uaibæ, Uai-Oli. Setelah kira-kira satu minggu, komandan Hansip bernama C36, bersama anggotanya: C37, C38, C39, dan yang lain, menemukan tempat persembunyian kami di Nabolo. Mereka menangkap kakak dan ayah saya dan membawa mereka jauh dari saya sekitar 200 meter. Kemudian mereka dibunuh dan mayatnya dibuang saja di Nobolo, Uaile, Uai-Oli. Tetapi karena saya baru berumur kira-kira lima tahun, C36 dan C37 membawa saya ke Ossu. Sampai di Ossu saya tinggal dengan C37 yang mengasuh saya sampai saya dewasa. Pada tahun 1995, keluarga saya ketemu saya dan bawa saya ke Venilale [Baucau] untuk tinggal bersama dengan mereka.<sup>203</sup>*

263. Anak-anak yang tertinggal ketika yang lain lari ke hutan juga menghadapi risiko. Felicidade Ximenes mengungkapkan bahwa seorang laki-laki kerabatnya tidak ikut lari dan tinggal bersama anak perempuannya, Helena, berumur 15 tahun, di Uai-Oli (Venilale, Baucau) pada tahun 1979, sedangkan anggota keluarganya yang lain melarikan diri ke hutan. Para anggota Batalyon 745 tiba di daerah itu dan disebutkan memaksa laki-laki itu untuk membunuh anak perempuannya sendiri.<sup>204</sup>

264. Anak-anak juga dibunuh dalam berbagai konteks lain selama periode ini. Seperti ditulis dalam bagian mengenai TBO, ada beberapa kasus TBO di bawah umur dicurigai terbunuh dalam operasi pertempuran atau dibunuh oleh anggota tentara di kesatuan mereka sendiri.

Pembunuhan-pembunuhan lain berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang lain, seperti pemerkosaan. Misalnya, menurut Paolo da Costa Soares seorang anggota tentara Indonesia dan seorang anggota Hansip dari Atabae (Bobonaro), C40 dan C41, menangkap dua perempuan bersaudara berumur kurang dari 18 tahun, yang salah satunya sedang hamil enam bulan. Setelah diperkosa selama enam jam oleh dua orang tersebut, kedua perempuan muda ini berusaha melarikan diri. Salah satu dari keduanya ditembak dan meninggal dunia, sedangkan yang hamil menderita keguguran kandungan.<sup>205</sup> Gaspar Dias melaporkan tentang suatu kasus pada tahun 1975 yang tampaknya terjadi secara acak. Ia mengatakan bahwa Albano Dias, laki-laki berumur 15 tahun, sedang bekerja di ladangnya di Fatlau (Aileu), ketika ditembak mati oleh seorang prajurit ABRI yang tidak diketahui identitasnya.<sup>206</sup>

1980-1988

265. Pada tahun 1980 Indonesia telah mengkonsolidasikan penguasaannya atas Timor-Leste. Banyak orang sipil telah menyerah atau tertangkap dan dipindahkan ke berbagai kota atau desa. Serangan-serangan Falintil terus berlanjut dan tindakan-tindakan balasan oleh ABRI dan berbagai operasi lainnya seringkali sasarannya begitu luas sehingga di antara yang mati terdapat anak-anak. Seperti dalam periode sebelumnya, anak-anak tidak khusus dijadikan sasaran, tetapi terbunuh di dalam kelompok yang ada orang dewasanya. Tetapi, konteks dari pembunuhan ini bukan lagi invasi atau serangan udara seperti yang terjadi pada periode sebelumnya. Tetapi merupakan tindakan pembalasan terhadap perlawanan aktif yang terus berlanjut terhadap pendudukan. Juga ada jenis baru operasi militer seperti serangkaian operasi 'pagar betis' yang dikenal sebagai Operasi Kikis yang melibatkan mobilisasi besar-besaran penduduk sipil untuk menghabisi pejuang Perlawanan. Yang paling dikenal dari operasi ini terjadi pada Juli-September 1981 (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik, dan Bagian 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan).

266. Anak-anak sering terperangkap ketika terjadi pembunuhan terhadap kelompok. Contohnya, anak-anak dilaporkan ada di antara korban-korban pembunuhan yang terjadi di Uaidada, desa Cairui (Laleia, Manatuto) pada akhir Operasi Kikis pada bulan September 1981.<sup>207</sup> Di desa Leuro (Lospalos, Lautém) masyarakat menggambarkan keadaan menjelang Operasi Kikis berakhir:

*Masyarakat semakin takut, trauma dan tidak tenang, tidak bebas melakukan sehari-hari karena ABRI selalu jaga di sejumlah pos.<sup>208</sup>*

267. Masyarakat mengatakan bahwa 10 orang ditembak mati pada waktu itu, termasuk seorang anak berumur 15 tahun bernama Jepokilu.

268. Banyak anak juga terbunuh dalam serangkaian pembunuhan di distrik Viqueque oleh ABRI dan Hansip sebagai pembalasan atas pembunuhan 14 prajurit di desa Kraras, Bibileo (Viqueque) pada 8 Agustus 1983. Komisi telah menerima keterangan bahwa paling sedikit 26 dari para korban berumur 17 tahun atau lebih muda dan di antaranya lebih dari separuhnya berumur 10 tahun atau kurang. Silvino das Dores Soares mengisahkan bahwa pada beberapa minggu setelah kematian para prajurit ABRI, militer berpatroli di gunung-gunung di sekitar tempat itu dan sejumlah eksekusi dilakukan dalam operasi-operasi ini, termasuk terhadap seorang anak berusia 15 tahun di Uma Qui'ic (Viqueque) sekitar 12 September 1983.<sup>209</sup>

269. Dalam salah satu tindakan pembalasan setelah pemberontakan Kraras, pembunuhan di aldeia Fahite-Laran, Carau-Balo (Viqueque, Viqueque) pada 16 September 1983, meliputi banyak perempuan dan anak-anak kecil. Seorang mantan komandan Hansip, Jerónimo da Costa Amaral mengatakan kepada Komisi:

---

<sup>205</sup> Pernyataan HRVD 02130501, Daftar nama korban dalam laporan Korban; Pernyataan HRVD 04146 juga mengidentifikasi dua anak di antara yang terbunuh dalam satu insiden yang berhubungan dengan Kraras pada 17 September 1983 di sawah Tahu-Bein, Baha Fou (Bikarin, Viqueque): Eugenio (14 tahun) dan Abílio Gomes (16 tahun).



*Pada suatu hari sekitar pukul 02.00 siang, 12 orang tentara panggil kami, dari kesatuan mana saya tidak tahu...Saya bersama tiga orang anggota saya.... membawa 18 orang [penduduk sipil]. Ada yang hamil tua, ada yang punya anak kecil dan beberapa laki-laki tua. Kami membawa mereka ke atas...sampai Karuik...Pasukan Indonesia dari tempat lain datang menjemput mereka. Saya melihat tertulis di lengan seragam Yonif 312. Kemudian, [para prajurit itu] bilang kepada kami bahwa mereka membawa orang ini untuk bertemu dengan keluarganya [yang masih berada di hutan] dan memanggil mereka untuk menyerahkan diri. Para prajurit dan 18 orang itu belum jalan jauh, kami mendengar letusan senjata.<sup>210</sup>*

270. Para saksi lain menyebutkan jumlah korban antara 26 dan 54 orang, tetapi semuanya setuju bahwa banyak perempuan dan anak-anak kecil dalam kelompok itu. Komisi menemukan bahwa 14 anak dibunuh dalam pembantaian ini, berumur antara satu dan 17 tahun (pembantaian Carau-Balo dan Tahu Bein (diuraikan dalam Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa). Keesokan harinya di Tahu Bein (Viqueque) tentara mengepung dan menembak semua laki-laki, termasuk yang remaja, dari desa Bahalarauain. Sembilan orang dari korban yang dilaporkan adalah anak di bawah umur, satu berumur 10 tahun dan selebihnya antara 15-17 tahun.

271. Dalam dasawarsa 1980-an jaringan klandestin meluas dengan pesat. Anak-anak menjadi terlibat dalam kegiatan-kegiatan jaringan ini sebagai *estafeta* atau pembawa pesan. Ini menempatkan anak-anak pada risiko tertangkap dan bahaya dari pihak militer. Laporan paling awal mengenai kematian anak-anak klandestin terjadi setelah terjadinya serangan Perlawanan di Marabia dan Becora (Dili) pada tanggal 10 Juni 1980. Setelah serangan itu, pihak berwenang Indonesia meluncurkan gelombang penangkapan dan penahanan. Filomeno Ximenes melaporkan bahwa di antara yang ditangkap dan hilang atau yang dibunuh ketika dalam tahanan, adalah tiga orang tahanan berusia 15-17 yang hilang dari Penjara Comarca Balide. Mereka termasuk Sancho Sarmento (17 tahun) dan dua bersaudara, Cesmundo (15 tahun) dan Edmundo (16 tahun), yang diidentifikasi sebagai anggota gerakan bawah tanah. Menurut Filomeno, mereka ditangkap Kodim 1627 di Mercado Lama, Dili.<sup>211</sup>

1989-1998

272. Jaringan klandestin semakin meluas setelah tahun 1988 dan berbagai kelompok baru bermunculan di kalangan pelajar sekolah menengah dan mahasiswa universitas. Penyelenggaraan demonstrasi terbuka mulai 1989 memerlukan pengerahan orang dalam jumlah besar yang bersedia menghadapi risiko penahanan dan kekerasan. Anak-anak dan pemuda sangat banyak terlibat. Ketika para demonstran menghadapi kekerasan, seperti yang terjadi pada Pembantaian Santa Cruz 12 November 1991, korban di bawah umur jumlahnya besar. Dari 271 yang tercatat terbunuh di Santa Cruz, 42 orang berusia di bawah 17 tahun, ini mencakup beberapa orang yang berumur 10 tahun.<sup>212</sup> Ada satu petunjuk bahwa sebagian dari korban ini sengaja dijadikan sasaran dalam kekerasan tersebut. Menurut Belchior Francisco Bento Alves Pereira:

*Tidak lama setelah tiba di Santa Cruz tentara Indonesia mulai tembak, sehingga saya sembunyikan diri di dekat tembok kuburan. Pada saat itu saya melihat polisi masuk melakukan pemeriksaan di dalam kuburan Santa Cruz. Tentara yang ada di dalam kuburan Santa Cruz menusuk orang secara membabi buta. Tidak lama saya dengar **Alau***

*memanggil nama saya, Abessy, dan mengatakan ingin mencari anak-anak sekolah dari Santo Paulus. Dia panggil saya dan suruh saya duduk di atas sebuah kuburan lalu seorang polisi pukul saya sampai babak belur.*

273. Anak lelaki dan perempuan terlibat dalam berbagai demonstrasi massal dan mengalami luka-luka. Pada Juni 1998, serangkaian demonstrasi, demonstrasi balasan dan bentrokan terjadi pada waktu kunjungan satu delegasi Uni Eropa. Dua lelaki muda terbunuh dalam dua peristiwa yang terpisah. Dua orang anak perempuan, Dirce Elisabet do Rosário (15 tahun) dan Maria Imaculada do Rosário (17 tahun), ada di antara orang-orang yang luka parah karena pasukan keamanan menembaki demonstran di luar tempat kediaman Uskup Basilio Nascimento di Baucau (di tempat ini delegasi Uni Eropa akan menemui sang uskup) setelah sebuah kendaraan milik intelijen Indonesia dikepung massa.<sup>213</sup>

1999

274. Kekerasan yang dilakukan oleh TNI dan milisi pada 1999 memperkuat pola yang sudah terbentuk sebelumnya: anak-anak dibunuh dalam pembantaian, sebagai anggota komunitas yang dicurigai pro-kemerdekaan, atau sebagai pendukung pro-kemerdekaan itu sendiri. Pembunuhan juga terjadi dalam peristiwa penghukuman kolektif sebagai ganjaran untuk tindakan membantu Falintil atau penyerangan terhadap TNI.

275. Banyak anak terbunuh dalam kekerasan yang terjadi pada tahun 1999, baik sebelum maupun sesudah Konsultasi Rakyat. Raimundo Sarmento, seorang pemimpin Perlawanan dari Laclubar (Manatuto), menguraikan pembalasan yang terjadi menyusul pembunuhan seorang prajurit TNI oleh Perlawanan. Ia mengungkapkan bagaimana militer (Marinir, Rajawali, dan Batalyon 741) bersama dengan milisi pergi ke setiap rumah yang mereka curigai menyembunyikan Raimundo dan akhirnya menangkap dan membunuh Marcelino, seorang tokoh Perlawanan dan adiknya, yang bersekolah di sekolah menengah pertama:

*Tanggal 24 April 1999, pagi pukul 10.00, mereka sudah masuk [ke tempat Raimundo]...mereka melewati kali, melewati tempat-tempat persembunyian. Mereka masuk dari bawah langsung menangkap penanggungjawab utama saya yang bernama Marcelino dan seorang anak laki-laki...bernama Mateus...Marcelino dan Mateus dikubur, mereka betul-betul dibunuh, kepalanya dipotong dan ditukarkan baru dikubur dalam posisi duduk dengan tubuh melingkar.<sup>214</sup>*

276. Pernyataan lain yang diperoleh Komisi menyebutkan kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi milisi di tempat pembunuhan tersebut.<sup>215</sup>

277. Banyak pemuda yang melarikan diri ke pegunungan menjelang pemungutan suara Konsultasi Rakyat atau dalam kekerasan yang terjadi sesudahnya. Ketika makanan menjadi langka, kembali terjadi pola, setelah dua dasawarsa berlalu, pembunuhan terhadap orang yang melarikan diri ke pegunungan dan kemudian kembali untuk mencari makanan. Jorge Ximenes menyampaikan kepada Komisi mengenai pembunuhan seorang laki-laki berumur 17 tahun:

---

<sup>213</sup> Belchior Francisco Bento Alves Pereira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004. Bagian mengenai Anak dalam jaringan klandestin mencatat bahwa setelah Santa Cruz demonstran-demonstran di bawah umur dicari-cari di sekolah-sekolah dan rumah-rumah mereka dan ditangkap.

*Pada tanggal 21 September 1999, saya dengan teman-teman Felix da Costa, Horacio Pinheiro, Olivio, Joanico, Elias, Alfredo Araújo dan Calisto Rodrigues [17 tahun] dengan 20 teman lainnya datang mencari makanan di Ira Ara, desa Parlamento, Moro [Lautém], karena di lokasi pengungsian kami bahan makanannya terbatas. Tidak disangka sekelompok milisi Tim Alfa di bawah Komandan C109 menembak kami hingga kami melarikan diri dan teman saya yang bernama Alfredo Araújo tertembak mati dengan Calisto Rodrigues. Setelah lewat 10 hari kami mengambil mayatnya untuk disemayamkan.*<sup>216</sup>

278. Dalam beberapa pembunuhan yang paling mengerikan yang terjadi pada tahun 1999, sasarannya adalah laki-laki dewasa yang dipisahkan dari perempuan dan anak-anak sebelum pembunuhan dilakukan. Inilah yang terjadi ketika pada 5 September, milisi memaksa keluar orang-orang yang mengungsi di kompleks Dioses Dili.<sup>217</sup> Perempuan dan anak-anak juga dipisahkan dari laki-laki di Passabe (Oecusse) di mana sekitar 47 orang muda dibunuh milisi Sakunar pada 10 September.<sup>218</sup>

279. Tetapi, Pembantaian Gereja Suai 6 September tidak demikian dan anak-anak juga dibunuh. Ketika 27 mayat digali dari tiga kuburan massal yang berisi korban-korban Pembantaian Suai (Covalima) pada November 1999, ditemukan sisa-sisa tubuh seorang anak yang berusia kira-kira lima tahun dan seorang perempuan belasan tahun.<sup>219</sup> Dalam satu kasus terkenal lainnya, pembunuhan dilakukan oleh kelompok milisi Tim Alfa di Lospalos (Lautém). Pada 25 September 1999, Tim Alfa menyerang sebuah mobil, membunuh dua biarawati, tiga biarawan, seorang perempuan awam, seorang wartawan Indonesia dan sopir mereka. Dua anak laki-laki yang sedang mendorong kereta di jalan sebelum penyerangan tersebut dikejar oleh milisi. Izino Freitas Amaral tidak melarikan diri. Ia diikat di sebatang pohon di mana ia menyaksikan eksekusi mereka yang ada di dalam mobil dan kemudian dibunuh.<sup>220</sup>

280. Dalam satu di antara kasus-kasus yang dilaporkan mengenai pembunuhan anak-anak pada 1999, si korban khusus dijadikan sasaran sebagai pengganti orang tuanya. Dalam pembunuhan besar-besaran di Kantor Kepolisian Maliana (Bobonaro) pada 8 September 1999:

Di antara para korban yang pertama, ada seorang anak laki-laki berusia 13 tahun, José Barros Soares, yang dibacok milisi di depan adik perempuannya. Tetapi kekerasan itu tidak seacak seperti yang dikesankan oleh adegan itu. Para penyerang itu jelas-jelas mengincar tokoh-tokoh pro-kemerdekaan untuk dibunuh. Korban-korbannya termasuk sejumlah pemimpin CNRT, selain seorang camat, dua orang kepala desa dan beberapa orang pegawai negeri yang bersimpati pro-kemerdekaan.

Para milisi itu juga menargetkan keluarga tokoh-tokoh itu. Menurut satu laporan, misalnya, para milisi yang membunuh José Barros Soares, anak laki-laki kecil itu, mengatakan kepada adik perempuannya bahwa mereka membunuhnya karena tidak dapat menemukan ayahnya, seorang tokoh kemerdekaan yang dikenal.<sup>221</sup>

281. Menurut informasi lain yang diterima Komisi, ayah José Barros Soares, seorang pengurus CNRT dari Manapa (Cailaco, Bobonaro), sedang diburu para anggota milisi Dadurus Merah Putih dan TNI, tetapi ia sudah lari ke Dili. Mereka membunuh anaknya sebagai gantinya.<sup>222</sup>

282. Dalam satu kasus lain di Bobonaro, dua orang anak laki-laki dibunuh ketika mereka tidak mau meninggalkan ayah mereka yang baru saja ditembak mati oleh anggota TNI dari Koramil Maliana. Pada 10 September 1999, TNI datang ke rumah Duarte Gouveia Lopes, seorang pengurus CNRT di Holsa, Maliana (Bobonaro) dan menembak matinya di depan kedua anak laki-lakinya, Viriato berumur 17 tahun dan Vitorino berumur 12 tahun. Para prajurit tersebut menyuruh anak-anak itu pergi, tetapi ketika mereka menolak dan mengatakan mereka lebih suka dibunuh juga daripada hidup tanpa ayah mereka, mereka juga dibunuh.<sup>223</sup>

283. Beberapa orang anak dibunuh bersama anggota keluarga mereka yang dikenal sebagai pendukung pro-kemerdekaan. Maria Santina Tilman Alves menceritakan bagaimana adik perempuannya, Georgina Tilman, dibunuh bersama lima orang anaknya, yang terkecil baru berumur dua tahun. Keluarga Georgina dikenal sebagai pendukung kemerdekaan. Rumah mereka di Ermera dibakar milisi setelah referendum. Georgina melarikan diri bersama suami dan anak-anaknya ke Dili. Ia dan lima orang anaknya dibawa ke kantor Kepolisian Daerah (Polda), di mana sudah banyak yang dikumpulkan untuk menunggu deportasi dan kemudian dikirimkan ke Atambua (Belu, Timor Barat). Suaminya kehilangan kontak dengan Georgina dan kelima orang anaknya. Kemudian ia mengetahui bahwa setelah tiba di Atambua, TNI dan anggota-anggota milisi (C47 dan C48, dua anggota Kodim 1637 Ermera dengan C49 dan C50) membawa Georgina dan anak-anaknya dengan mobil kembali ke Timor-Leste, ke Manduki (Atabae, Bobonaro). Ia kemudian mengetahui bahwa mereka ditembak di Manduki dan mayatnya ditinggal tanpa dikubur. Mertua dari pengemudi mobil itu kemudian pergi menguburkan mayat-mayat itu dan pakaian anak-anak itu ditinggalkan sebagai tanda. Merekalah yang memberi tahu suami Georgina apa yang terjadi pada Georgina dan anak-anak itu.<sup>224</sup>

### **Pembunuhan anak-anak oleh Fretilin dan Falintil**

284. Fretilin dan Falintil bertanggung jawab atas sekitar seperempat dari pembunuhan terhadap anak-anak yang dilaporkan dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi, 38 korban dalam 20 kejadian. Sebagaimana halnya dengan pembunuhan yang dilakukan oleh TNI, kebanyakan anak dibunuh sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar yang terdiri dari orang dewasa. Selain pernyataan-pernyataan ini, ada keterangan-keterangan lain yang dapat dipercaya mengenai remaja aktivis partai yang dibunuh oleh Fretilin maupun UDT.

### **Periode konflik partai**

285. Anak-anak dalam jumlah yang tidak diketahui dibunuh oleh anggota-anggota partai politik sebelum dan sesudah invasi tentara Indonesia, karena hubungan keluarga atau karena afiliasi politik mereka sendiri. Angelo Araújo Fernandes, seorang pendukung UDT, mengungkapkan kepada Komisi mengenai pembunuhan keluarga besarnya pada tahun 1976 oleh beberapa anggota Fretilin dari desanya sendiri. Setelah ditahan Fretilin selama beberapa hari, ia menyaksikan pembunuhan saudara lelakinya, tetapi ia sendiri berhasil melarikan diri. Menurut Fernandes:

*mereka kembali dan menembak mati semua keluarga saya yang berjumlah 37 orang di desa Lahiria [Loré I, Lautém] termasuk anak-anak dan perempuan hamil. Saya hanya mendengar letusan senjata dari arah Lahiria, tempat mereka berada.*

286. Filomeno Pedro Cabral Fernandes adalah seorang aktivis UDT dari satu keluarga yang beranggotakan pendukung-pendukung Fretilin dan Apodeti. Bersama dengan ayahnya, seorang pemimpin Apodeti, ia ditahan di Dili dan dibawa ke Aileu setelah invasi tentara Indonesia:

---

<sup>223</sup> Untuk keterangan yang lebih rinci lihat boks dalam Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Pemindahan Paksa, berjudul "Kesaksian Angelo Araújo Fernandes: Pembunuhan oleh Fretilin di Lautém."

*Saya tidak tahu persis mengapa saya jadi tahanan politik, atau apakah ditahan karena orang tua saya. Pada tanggal 26 Desember 1975 malam, kami dengar bunyi senjata. Setelah kami mengkonfirmasi, ternyata ayah saya bersama 75 orang tahanan lainnya dibunuh pada saat itu di Mantane [Aileu Vila, Aileu]. Di antara mereka yang dibantai usianya paling muda adalah António Pinto dan Rui Maia. Mereka berdua usianya 15 tahun waktu itu. Saya dan Jerónimo Maia berusia 16 tahun. Kami empat orang masih kecil.<sup>225</sup>*

287. Ada juga berbagai bukti mengenai pembunuhan pendukung Fretilin yang masih di bawah umur oleh pendukung UDT pada periode ini. Ijidio Maria de Jesus berbicara pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian mengenai pembunuhan ayahnya José Maria dan 10 orang lainnya oleh anggota UDT. Enam dari yang dibunuh pada tanggal 27 Agustus 1975, di Wedauberek (Alas, Manufahi) adalah anggota Unetim, perhimpunan pelajar yang berafiliasi dengan Fretilin, termasuk salah seorang adik Nicolau Lobato, Domingos Lobato. Mereka ditahan sejak 11 Agustus dan ditahan di Alas, kemudian di Same (Manufahi) dan Natarbora (Manatuto), sebelum kembali ke Besusu (Alas, Manufahi) pada 27 Agustus, di mana Ijidio melihat ayahnya duduk di belakang sebuah truk yang lewat.

288. Pada pukul 02.00 sore, Ijidio dan ibunya, ketika melarikan diri ke hutan, mendengar suara-suara tembakan dari Meti-Oan. Empat hari kemudian ia mendengar kabar bahwa penduduk Besusu (Alas, Manufahi) telah menemukan 11 mayat di dekat Meti-Oan, termasuk mayat ayahnya dan ia pergi ke sana untuk melihat. Tangan salah seorang pelajar yang mati, Domingos Ribeiro, telah dipotong dari tubuhnya. Selain Domingos Ribeiro, di antara siswa-siswa itu ada ketua Unetim, Domingos Lobato dan empat orang anggota lain Unetim, Chiquito Kaduak, Francisco, Alexandre da Costa dan adik laki-laki Domingos Ribeiro yang berusia 17 tahun, Tonito Ribeiro.

289. Dalam kasus yang lain, Vicente Rosário mengungkapkan bagaimana anggota UDT di desa Baltalde-Merkoluli (Turiscai, Manufahi), C109 dan C110, membunuh keluarga Vincente karena mereka adalah anggota Fretilin. Dari enam korban meninggal, tiga masih anak-anak: Dau Mali (tujuh tahun), Malolo (enam tahun) dan Luru Leki (lima tahun).<sup>226</sup>

290. Beberapa pernyataan mengesankan bahwa selama periode ini ada anak-anak yang dibunuh karena sengketa pribadi dan keluarga yang sudah lama ada maupun karena perbedaan politik. Menurut pernyataan Manuel da Silva mengenai satu insiden di Aitutu (Maubisse, Ainaro):

*Pada tahun 1975, saya UDT tetapi tidak melakukan apa-apa terhadap Fretilin. Anggota mereka datang membawa Koli-bere I [umur 16 tahun] dan Koli-Bere II [umur 16 tahun]...[Pelakunya] adalah C51, C110, dan C111. Tiga orang itu membawa dua tahanan tersebut dan kemudian menyerahkan mereka kepada delegado Fretilin, C112 yang menyuruh C113 membunuh kedua Koli-bere. Mereka berdua tidak punya kesalahan apa-apa tetapi mereka dibunuh hanya balas dendam karena mereka masuk partai UDT dan karena masalah adat keluarga.<sup>227</sup>*

---

<sup>225</sup> CAVR, Ijidio Maria de Jesus, *Koleksi Ringkasan Kasus*, 2003. Walaupun hanya umur Tonito yang disebutkan, Unetim adalah organisasi pelajar sekolah menengah dan beberapa orang lainnya kemungkinan masih di bawah umur.

291. Pembunuhan anak-anak oleh Fretilin dan Falintil setelah invasi Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa kategori: pembunuhan yang berhubungan dengan konflik di dalam partai atau antar partai-partai, pembunuhan orang yang dicurigai membantu tentara Indonesia (termasuk kematian dalam tahanan dan pembunuhan orang yang dibunuh ketika mencari makanan) dan serangan militer.

292. Pernyataan-pernyataan menunjukkan bahwa imbas dari konflik partai dirasakan lama setelah invasi tentara Indonesia dan bahwa anak-anak terus saja menjadi korban. Lorenço Ximenes menyampaikan tentang penangkapan keluarganya, yang adalah anggota-anggota Apodeti, di Baucau pada bulan Oktober 1976:

*Saya bersama keluarga saya mengungsi ke Nai Naha [Quelicaí, Baucau] karena takut serangan ABRI. Di Nai Naha mereka ditangkap oleh pasukan Falintil karena dicurigai ada kontak dengan ABRI. Tangannya diikat lalu diikatkan pada kayu besar selama tiga hari dan diinterogasi. Mereka dilepaskan kembali dengan dipaksa untuk bekerja mengangkat dan membawa tanah untuk membuat fondasi sebuah rumah hingga selesai. Kemudian tanggal 2 November 1976 keluarga dipaksa untuk menggali lubang sekitar lima meter. Setelah selesai menggali, Lourenço Ximenes sembunyikan diri dan melihat pasukan Falintil membunuh tiga korban antara lain anaknya Filomeno [Ximenes] [umur 12 tahun], keponakannya Quii Quele [20 tahun] dan adiknya Laca Labi [umur tidak diketahui]. Setelah dibunuh, mayat ketiga korban dimasukkan dalam lubang yang sudah digali.<sup>228</sup>*

293. Komisi juga telah menerima pernyataan-pernyataan mengenai beberapa insiden dalam mana Fretilin/Falintil membunuh orang-orang yang dicurigai membantu Indonesia. Pada beberapa kasus, kematian terjadi dalam penahanan, dalam kasus lain setelah kelompok yang keluar untuk mencari makanan bertemu dengan prajurit Falintil. Setelah invasi, Fretilin menahan orang yang dicurigai sebagai kolaborator dan tahanan politik di pusat-pusat rehabilitasi politik (Renal). Kematian dalam penahanan terjadi akibat eksekusi dan penyiksaan, selain juga karena kekurangan makan dan dibiarkan begitu saja (lihat kasus Bastião da Silva yang diuraikan di atas dalam bagian mengenai Penahanan oleh Fretilin).

294. Pada bulan April 1976, Mariano Lopes berumur 10 tahun ketika ia dan keluarganya lari dari Koliata-Leo Telo (Hatulia, Ermera) ke Letefoho (Ermera) sebelum kampung mereka diserbu tentara Indonesia. Bulan berikutnya keluarga itu pergi ke kebunnya untuk memanen ubi jalar:

*Pada bulan Mei 1976, kami takut karena lapar, saya bersama ibu saya, Bimori dan kakak saya, Lakamau, Bibi Sara dan ipar saya Afonso dengan kakak saya Joaquina, dari Letefoho berangkat ke kebun untuk menggali ubi jalar. Di dalam kebun seorang anggota Fretilin C52 menangkap ibu saya, saudari perempuan dan saya dibawa ke Hauhei...Sesampai di jurang Manufunu, mereka menembak secara membabi buta. Butir peluru mengenai saudari saya, [dan] Joaquina jatuh ke jurang. Saya tiarap ke tanah, butir peluru kena di pipi kanan saya sampai robek. Ibu saya, Bimori dan kakak saya, Lakamau, langsung mati di tempat. Dipikir bahwa kami meninggal*

*semua, mereka lepas begitu saja dan pergi. Bibi Sara dan ipar Afonso, mereka sempat lari ketika mendengar bunyi senjata. Melihat tempat sudah sepi mereka datang untuk membawa lari saya bersama dengan saudari Joaquina kembali ke Letefoho. Dua tahun kami tinggal di Letefoho baru kembali lagi.*

295. Ada berbagai alasan lain mengapa anggota Fretilin atau Falintil membunuh anak-anak. Orang-orang, termasuk anak-anak, kadang-kadang dibunuh sebagai contoh untuk masyarakat. Bernardo Rodrigues melaporkan kepada Komisi bahwa adiknya, Abrão (umur 17 tahun) bersama dengan satu anggota keluarga lainnya dibunuh di muka umum pada bulan Maret 1978 di Lequidoe (Aileu). Kedua pemuda itu berusaha mencuri jagung milik seorang laki-laki bernama C53. C53 menangkap mereka dan menahan mereka selama satu malam, kemudian menyerahkan mereka kepada pasukan Fretilin. Mereka ditembak mati oleh pasukan Fretilin di muka umum atas perintah dari *Adjunto* C54.<sup>229</sup>

296. Dalam kasus lain, Armindo Barreto mengisahkan tentang seorang Falintil yang berusaha membunuh anak bayi Armindo yang berumur satu bulan, bernama Domingas, pada tahun 1978 di Zumalai (Suai, Covalima) karena bayinya menangis dan dapat membuat tentara Indonesia mengetahui tempat mereka:

*Anak saya kedinginan dan lapar, lalu menangis. Anak itu digendong oleh ibunya. Baru satu bulan umurnya, namanya Domingas. Tidak lama kemudian anggota Falintil bernama António panggil satu kali. Kami masih terus berjalan. Panggil kedua kali pun, sama dan yang ketiga kali, saya katakan pada istri saya Arminda Amaral, "Daripada kamu yang dibunuh oleh Falintil, lebih baik biarkan dia membunuh anak itu." Dari situ kami berjalan sekitar 100 meter. Falintil itu datang dan mengambil anak itu dari gendongan ibunya, dia tarik lalu cekik leher anak itu kemudian buang ke sungai di Bemean. Kami pun takut, kami berjalan terus, kami berjalan sudah jauh, saya dengar bayi itu belum meninggal, bayi itu masih menangis. Kemudian saya suruh seorang Falintil bernama Olivio dos Santos untuk membawa satu lembar kain sarung untuk membalut bayi itu. Lalu kami berjalan terus. Tidak tahu anak itu hidup atau meninggal dunia. Kami tidak tahu lagi, karena kami sudah jauh dan hampir dekat di Gunung Kolimau [Bobonaro] mau melanjutkan perjalanan ke Fatubessi [Hatulia, Ermera]...*<sup>230</sup>

#### *Serangan Falintil*

297. Ada satu keterangan mengenai seorang anak yang dibunuh dalam operasi Falintil. Paterno Soares melaporkan kepada Komisi bahwa adik perempuannya bernama Ines Soares, berumur 14 tahun, dibunuh ketika Falintil menyerang desa Carlilo (Manatuto, Manatuto) pada tahun 1982. Para pejuang itu membakar sejumlah rumah di desa tersebut, termasuk rumah Paterno. Ines, bersama dengan orang tuanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam kobaran api.<sup>231</sup> Sementara Falintil sekali-sekali membunuh orang sipil yang menjaga pos keamanan ABRI, sedikit sekali bukti bahwa anak-anak menjadi korban dari serangan seperti itu yang diperoleh Komisi.

---

<sup>229</sup> Pernyataan HRVD 06221; ada lima kasus dari tahun 1976-1978 yang menyangkut 13 orang korban dari Aileu, Ermera dan Manufahi, dalam mana para korban adalah bagian dari satu kelompok yang keluar untuk mencari makan. Lihat Pernyataan HRVD 02056, 04095, 04604, and 04992.

### 7.8.3.3. Kekerasan seksual

298. Kejadian kekerasan seksual selama masa mandat Komisi, penyebab serta akibatnya, dibahas dengan terperinci dalam Bab 7.7: Kekerasan Seksual dari Laporan ini. Akan tetapi, kasus-kasus kekerasan seksual yang korbannya anak-anak dibahas secara terpisah dalam bagian ini dari Laporan untuk mengangkat pengalaman khusus anak-anak dalam konteks ini. Kekerasan seksual mungkin adalah pelanggaran terkejam dan merupakan pelanggaran yang paling merusak perasaan dan kejiwaan yang bisa diperbuat terhadap anak-anak, ini adalah suatu pengkhianatan terhadap kemurnian anak-anak.

299. Dalam bab mengenai kekerasan seksual, Komisi mengadopsi definisi kerja kekerasan seksual sebagai semua bentuk dari “kekerasan, baik fisik maupun psikologis, yang dilakukan dengan cara-cara seksual atau dengan sasaran seksualitas.”<sup>232</sup> Definisi ini mencakup pemerkosaan, yaitu penyerangan fisik yang bersifat seksual, yang dilakukan terhadap orang dalam keadaan yang bersifat menekan. Ini merupakan tindakan seks yang terjadi tanpa persetujuan dari korban. Perbudakan seksual juga termasuk dalam definisi tersebut.<sup>†</sup>

300. Penelitian Komisi telah menemukan bahwa korban pelanggaran seksual yang dilaporkan yang berhubungan dengan konflik politik hampir seluruhnya adalah perempuan, khususnya pemerkosaan dan perbudakan seksual. Seperti di banyak masyarakat lain, kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan remaja di Timor-Leste bisa terkait erat dengan posisi mereka dalam masyarakat. Ini mencakup pembakuan yang ketat mengenai jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan status umum yang lebih rendah perempuan yang mendorong sikap-sikap yang menjadikan perempuan obyek yang bisa dimiliki dan digunakan sesuai dengan keinginan laki-laki.

301. Dalam hubungannya dengan anak-anak, dampak dari sikap seperti itu diperparah oleh kerentanan besar fisik dan emosional anak-anak. Konteks dari konflik yang keras tanpa adanya aturan hukum yang berfungsi kerap berarti bahwa orang-orang pada posisi yang lebih kuat atas anak-anak dapat memanfaatkan kesempatan dalam suatu suasana yang terbebas dari hukum. Jadi, sekali lagi, anak-anak didesak ke garis depan konflik.

302. Dari seluruh kasus yang didokumentasikan mengenai kekerasan seksual, 14,9% (127/853) dilakukan terhadap anak-anak. Dari seluruh kekerasan seksual terhadap anak-anak tersebut, 98,4% (125/127) dilakukan terhadap anak-anak perempuan. Akan tetapi harus dicatat bahwa 33,9% (289/853) dari kekerasan seksual yang dilaporkan kepada Komisi, umur korban tidak tercantum.

303. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai kekerasan seksual, ada stigma kuat yang melekat pada korban kekerasan seksual, yang berarti bahwa perbuatan-perbuatan seperti ini sungguh sering tersembunyi di balik dinding ketakutan dan kebungkaman. Dalam budaya yang menjunjung tinggi keperawanan, inilah yang sering terjadi bagi korban anak-anak. Oleh karena itu sangat mungkin bahwa jumlah kejadian kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dilaporkan sebenarnya jauh lebih rendah daripada yang sesungguhnya terjadi.

304. Yang terakhir, penting dicatat bahwa seksualitas terikat dengan norma kebudayaan dan sosial. Tidak ada usia internasional seseorang dianggap cukup dewasa untuk menyetujui ajakan

---

<sup>232</sup>Pemukosaan adalah penetrasi seksual, walau sekecil apapun: (a) terhadap vagina atau anus dari korban oleh penis dari pelaku atau benda apapun yang digunakan oleh pelaku; atau (b) terhadap mulut dari korban oleh penis dari pelaku, dengan pemaksaan atau kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan terhadap korban atau orang ketiga. Ini adalah definisi tindak pemukosaan dari kasus Furundzija pada Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia.

<sup>†</sup>Perbudakan seksual terjadi jika perempuan dewasa dan anak-anak direnggut kebebasannya, dipaksa ke dalam “perkawinan”, penghambaan rumah tangga atau kerja paksa lain yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual tanpa persetujuan, termasuk pemukosaan oleh orang-orang yang menahan mereka. Keadaan keseluruhannya harus dikaji untuk memastikan apakah kuasa kepemilikan telah dijalankan atas diri manusia lain.



seks, tetapi menurut Konvensi Hak Anak, anak-anak umumnya adalah orang muda berusia di bawah 18 tahun. Ini adalah usia mayoritas yang digunakan dalam Laporan ini.

305. Sejak 1990 Indonesia menjadi negara peserta Konvensi Hak Anak, tetapi pengesahannya tergantung pada hukum Indonesia sendiri. Undang-undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak mulai berlaku tanggal 23 Juli 1979 dan menetapkan bahwa anak-anak adalah siapa saja yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah. Usia sah untuk menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Di Timor-Leste, seorang perempuan dianggap sebagai orang dewasa jika ia sudah menikah. Tetapi, Komisi percaya bahwa persetujuan untuk tindakan seksual menjadi batal oleh bentuk penahanan atau pemaksaan apapun, baik yang bersifat fisik, psikologis atau yang berhubungan dengan keadaan. Usia persetujuan sebetulnya tak ada hubungannya dengan jenis kekerasan seksual yang diselidiki Komisi.

### **Pola pelanggaran**

306. Dari kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dilaporkan kepada Komisi, 41,0% (61/127) adalah perkosaan, 35,4% (45/127) adalah perbudakan seksual dan 16,5% (21/127) adalah tindakan-tindakan kekerasan seksual lainnya.

307. Dari 72,8% (91/125) kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan, korban berusia antara 14 dan 17 tahun. Dari semua kekerasan seksual terhadap anak-anak yang didokumentasikan oleh Komisi, 68,5% (87/127) terpusat di lima distrik, yaitu Ermera 19,7% (25/127), Ainaro 15,0% (19/127), Manufahi 13,4% (17/127), Bobonaro 10,2% (13/127) dan Aileu (10,2% (13/127).

308. Kekerasan terbesar terhadap anak-anak di bawah umur yang didokumentasikan Komisi terjadi selama periode konflik dalam mana pelanggaran fisik, pembunuhan dan penghilangan juga sering terjadi. Misalnya, 70,9% (90/127) dari kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur terjadi antara 1975 dan 1983, dan 12,6% (16/127) pada tahun 1999. Pola sementara kekerasan seksual terhadap orang dewasa dan anak-anak berkorelasi positif. Ketika kekerasan seksual terhadap anak-anak cenderung naik atau turun begitu pula kekerasan seksual terhadap orang dewasa. Pola ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak-anak didorong oleh faktor yang sama dengan yang terjadi terhadap orang dewasa.

309. Militer Indonesia disebut sebagai pelaku dalam 72,4% (92/127) kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dilaporkan, 34,7% (44/127) dilakukan oleh orang Timor-Leste yang bergabung dengan militer Indonesia, dan 2,4% (3/127) oleh pasukan Fretilin/Falintil. Tidak ada kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan oleh UDT.

*1974-1979*

310. Sebagian besar kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dilaporkan kepada Komisi terjadi pada periode kekerasan dan kekacauan dalam paruh kedua dasawarsa 1970-an. Pemerksaan anak-anak memperlihatkan pola yang serupa dengan pemerksaan perempuan dewasa. Anak-anak perempuan diperksa setelah mereka dan keluarga mereka menyerah; mereka diperksa di markas militer, di rumah dan di penahanan atau pada saat dibebaskan.

311. Pola pertama yang dapat dicatat pada masa ini adalah jumlah kekerasan seksual yang terjadi di berbagai kamp dan desa di mana anggota masyarakat yang baru menyerah atau ditangkap, dilepaskan. Setelah menyerah atau ditangkap, anak-anak ditempatkan di bawah

---

\* Berdasarkan angka tahunan kekerasan seksual, koefisien korelasi kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan anak-anak adalah 0,61.

penguasaan langsung penjaga dan anggota militer lainnya.\* Eufrasia de Jesus Soares memberitahukan kepada Komisi bahwa ia ditangkap bersama keluarganya oleh Yonif 721 pada tanggal 13 Oktober 1979 dan ditempatkan di kamp di Railaco (Ermera). Ia menyebutkan perlakuan terhadap anak-anak perempuan di dalam kamp:

*Mereka memilih perempuan yang mereka anggap cantik, menyuruhnya mandi lalu membawanya untuk satu atau dua minggu dan pada akhirnya membawanya kembali ke keluarganya.*<sup>233</sup>

312. Juga ada kasus-kasus yang dilaporkan mengenai anak-anak perempuan yang dipaksa menjalani perbudakan seksual di kamp pemukiman. Seorang anak perempuan berusia 14 tahun, CM menyampaikan bahwa pada tahun 1978 ia ditangkap bersama keluarganya dan ditempatkan di satu kamp di Soro (Ainaro). Setelah lima bulan, seorang Babinsa bernama C58 mengancam untuk menembak anak itu, ayahnya dan kakak laki-lakinya jika ia tidak mau menjadi "istrinya." Dari hubungan ini, ia melahirkan satu anak sebelum laki-laki tersebut meninggalkan Timor-Leste dan ia melanjutkan kegiatan bawah tanahnya.<sup>234</sup>

313. Pola kedua pada periode ini adalah kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak perempuan untuk menghukum anggota keluarganya yang terlibat dalam Fretilin/Falintil: menjadi sasaran pengganti.<sup>†</sup> Misalnya, Komisi memperoleh beberapa kesaksian dari para mantan TBO tentang pelanggaran seksual yang dilakukan anggota tentara dalam kesatuannya terhadap perempuan dan anak-anak sebagai satu bentuk penyiksaan psikologis terhadap tahanan. Alfredo Alves, seorang TBO dari 1978-1982, memberikan kesaksian kepada Komisi sebagai berikut:

*Saya melihat sendiri bagaimana tahanan disiksa, anak-anak perempuan dan istri mereka disiksa di depan mereka!...Saya menyaksikan bagaimana mereka memperlakukan perempuan berusia 15 ke atas...Saya melihat bagaimana mereka diperlakukan. Sejak itu, saya benar-benar memahami apa artinya pelanggaran...Sepanjang sore mereka membawa perempuan sesukanya. Ada beberapa hal yang tak bisa saya ungkapkan karena terjadi dengan orang yang dekat dengan saya.*<sup>235</sup>

314. Penelitian Komisi mengenai perempuan di Lalerek Mutin (Viqueque, Viqueque) menemukan sejumlah kasus perbudakan seksual terhadap anak-anak pada masa ini. Pada tahun 1978, DM berumur 15 tahun ketika ia dan ibunya menyerah dan tinggal di Beobe (Viqueque). Saudara laki-laki dan ayahnya tetap tinggal di hutan dan DM dicurigai berhubungan dengan mereka. Ia diinterogasi di Kodim selama 10 hari. Setelah dibebaskan, seorang anggota

---

\* Bab 7.7: Pemerksaan, perbudakan seksual dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual mendokumentasikan kasus-kasus yang serupa di kamp: "Ketika kami tiba di Dotik [Alas, Manufahi], tidak ada rumah di situ...Mereka [ABRI] menyuruh masyarakat untuk membangun rumah sendiri. Setelah tinggal di sana selama sebulan, kami tetap berada di bawah penguasaan mereka. Setiap malam mereka akan membuat suatu rencana, mereka berpura-pura memanggil gadis yang mereka suka. Hal yang sama terjadi pada saya. Suatu malam mereka memanggil saya, untuk apa saya tidak tahu. Mereka membawa saya ke suatu tempat yang rumputnya tinggi. Mereka mulai mengancam saya, 'Kalau kamu tidak tunduk, kamu akan mati di di sini juga. Kamu melakukannya dengan Falintil, kenapa tidak dengan kita?' Karena diancam mereka, saya lakukan saja apa yang mereka minta." Pernyataan HRVD 07241; lihat juga wawancara CAVR dengan EM, Mauchiga, 31 Mei 2003 untuk kasus lain penahanan di kamp Dotik; lihat juga Bab 7.7: Pemerksaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual, bagian E Studi Kasus: Pemerksaan dan perbudakan seksual di Dotik (Alas, Manufahi).

<sup>†</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam bab mengenai kekerasan seksual, kekerasan pengganti adalah "kekerasan yang dilakukan karena sasaran utamanya tidak hadir...dengan tujuan untuk menghancurkan/menundukkan musuh." Lihat juga Galuh Wandita, "Sisa dari mati: Violence towards Women and Transitional Justice." Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Surabaya, Surabaya, 2000.

tentara yang bernama C57 mulai datang ke rumahnya. DM berusaha untuk menghindarinya dengan tidur di rumah tetangganya tetapi ia kemudian dituduh mencari keluarganya di hutan. Ketika ia sedang bersembunyi di tumpukan jagung di bagian atap rumah adat, C57 menemukannya:

*Lalu dia naik ke atas tempat persembunyian saya. Karena takut saya lari turun tetapi saya terjatuh. Saya tidak bisa lari karena kesakitan, ia langsung datang dan menggendong saya masuk ke dalam kamar. Pada saat itu juga kami berdua hidup sebagai suami istri sampai saya mendapatkan seorang anak dari dia. Dia berjanji pada saya akan kembali tiga tahun lagi. Tetapi sampai sekarang dia tidak pernah muncul.<sup>236</sup>*

315. FM, juga dari Beobe, berumur 14 tahun ketika dicurigai terlibat dalam satu insiden kecil dan menjalani masa perbudakan seksual yang lama. Pada tahun 1978, FM ditangkap atas kecurigaan menutup jalan dan menghalangi kendaraan patroli ABRI. Ia dibawa ke kantor desa Beobe dan diinterogasi oleh Babinsa C58, Wakil Babinsa C59 dan anggota Yonif 330 bernama C60. Ketika interogasi, C60 mulai menelanjangi FM. FM menangis karena sedang datang bulan, tetapi diancam, "Kalau kamu tidak melakukan apa yang kami perintahkan, kami akan memotongmu sekarang."<sup>237</sup> Ketiga laki-laki itu lalu memperkosanya.

316. FM ditahan di kantor desa selama tiga hari dan diperkosa berulang kali oleh tiga laki-laki tadi. Setelah dibebaskan, anggota-anggota Kodim mengambilnya dari rumahnya ke Kodim Viqueque di mana ia disekap dalam kamar selama tiga bulan dan diperkosa berulang kali oleh Komandan Kodim C61, seorang operator radio dan seorang supir. Sebulan setelah dibebaskan, FM dibawa oleh Komandan Koramil dan dijadikan "istri" selama 18 bulan serta dipaksa untuk memberikan layanan seksual kapan saja sesuai permintaan. Pada akhirnya ia melahirkan seorang bayi darinya.

317. Seperti diperlihatkan kasus di atas, sekali dilanggar, perempuan menjadi rentan terhadap eksploitasi jangka panjang, yang mengarah pada perbudakan seksual yang lama atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan seksual yang berulang. Pernyataan GM, yang diidentifikasi sebagai anggota Falintil, mengungkapkan penangkapannya pada tahun 1976 ketika berumur 16 tahun di Hatu Bulico (Ainaro), oleh kepala desa Mulo dan C63, seorang anggota Koramil:

*Komandan kompi, Hansip C64, dan [prajurit] Koramil C63 menginterogasi saya tentang Komandan Hauta-Lafera. Setelah diinterogasi...C65 yang melepaskan rok dalam dan celana dalam saya untuk dibakar, membuat saya telanjang. Baru C65 memperkosa saya pertama – membuang saya ke lantai dan membuka paha saya. Saya teriak, menangis tetapi mereka tetap merusak saya.*

*Kemudian, pada tahun yang sama, Hansip C65 melakukan kekerasan seksual terhadap saya, memaksa saya menjadi istri dengan senjata Mauser...dia menelanjangi saya dan kemudian memanggil teman Hansipnya untuk datang dan melihat saya dan mereka tertawa...baru mereka antar saya ke Koramil Maubisse. Dia datang dan melanggar saya sampai saya melahirkan seorang anak.<sup>238</sup>*

---

<sup>236</sup> Lihat Pernyataan HRVD 08736 tentang anak perempuan berusia 17 tahun, yang diperiksa pada tanggal 28 Maret 1979 oleh Kasi I ABRI, C69, di Lospalos karena ia punya keluarga di hutan. Kemudian ia dipaksa untuk menjadi "istri simpanan" selama dua tahun.

318. Seorang anggota Fretilin yang berumur 14 tahun melaporkan bahwa ia ditahan bersama sepupunya di Letefoho (Ermera) pada tahun 1977. Mereka dibawa ke sebuah kamar, diancam akan dibunuh dan diperkosa oleh anggota tentara dari Koramil Letefoho. Setelah empat hari ia dibawa ke Kodim Ermera selama satu tahun. Selama masa itu ia diperkosa berulang kali, dilarang untuk bertemu dengan keluarganya dan dipaksa untuk “menikah” dengan seorang perwira berpangkat letnan satu. Ia melahirkan dua anak dalam dua tahun berikutnya. Ia mengenal dua perempuan lainnya yang menderita nasib yang sama.<sup>239</sup>

319. Kadang-kadang pejabat sipil bekerja sama dengan militer dalam menjadikan perempuan sasaran perbudakan seksual, untuk mereka sendiri atau untuk militer. Pada tahun 1979, di Betano (Same, Manufahi), kepala desanya, C67, ingin menikahi tiga perempuan yang aktif dalam Organisasi Kerakyatan Perempuan Timor (Organização Popular da Mulher Timor, OPMT) yang baru saja menyerah. Mereka termasuk HM, berumur 16 tahun. HM mengatakan bahwa karena ditolak, kepala desa itu memberikan nama tiga perempuan tersebut kepada Kodim. Mereka ditangkap oleh Kepala Staf Kodim (Kasdim) bernama C68 dan diinterogasi, sementara C67 kemudian memaksa mereka untuk menjadi “selir-selirnya.”<sup>240</sup>

1980-1989

320. Selain pemaksaan terang-terangan dan ancaman kekerasan yang ditunjukkan kasus-kasus di atas, terdapat juga kasus-kasus perempuan yang terlibat dalam hubungan seksual dengan orang-orang yang punya kedudukan berkuasa. Meskipun sebagian kasus tampaknya mendapatkan persetujuan dari anak-anak yang bersangkutan, menurut hukum persetujuan mereka tidak sah. Oleh karena itu hubungan seksual dengan anak di bawah umur, dengan atau tanpa persetujuan mereka, adalah tindakan ilegal.<sup>†</sup> Mário Carrascalão mantan Gubernur Timor Timur, mengungkapkan kepada Komisi tentang kesulitan mendatangkan guru laki-laki muda dari Indonesia tanpa pengawasan yang cukup mengenai perilaku mereka:

*Ketika, tahun 1983, dimulai sistem wajib belajar di Timor Timur, tidak hanya anak berusia enam tahun yang mulai mengikuti sekolah, tetapi juga orang muda yang berusia sampai 16, 17 tahun mengikuti sekolah dasar. Sebagian kecil sekolah dasar Timor Leste guru-gurunya ditunjuk untuk menyeleksi banyak guru Indonesia. Hanya laki-laki, bujangan atau menikah (tapi jika menikah istrinya tetap tinggal di Indonesia), guru-guru dikirim ke Timor Leste. Orang Timor yang diseleksi untuk mengajar di sekolah dasar juga, sebagian besar, laki-laki, muda yang baru saja menyelesaikan sekolah mereka dan bujangan atau menikah... Akibat dari situasi ini sampai ke pemerintah dalam bentuk cerita-cerita tentang keterlibatan guru “Bapak” [orang Indonesia] atau orang Timor Leste dengan murid-murid perempuan mereka. Distrik Covalima, Maliana, Liquiçá dan Baucau adalah yang mencatat banyak kasus. Di Baucau, seorang guru dari Indonesia memperkosa 22 murid perempuannya. Kasus ini dibawa ke pengadilan dan si pemerkosa diputus hanya dua setengah tahun penjara. Laki-laki ini akhirnya dikirim pulang ke daerah asalnya, tanpa menyelesaikan hukumannya di penjara.<sup>241</sup>*

<sup>†</sup> Umur korban lainnya tidak disebutkan.

<sup>†</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pasal 287. Hukum pidana Indonesia menyiratkan bahwa umur persetujuan adalah 15 tahun.

## **Pengadilan kasus pemerkosaan anak di bawah umur, Pengadilan Dili, 1982**

Pada tahun 1982, seorang Hansip bernama C111, berumur 17 tahun, dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Dili karena memerkosa anak perempuan berumur 12 tahun bernama IM. Dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan),<sup>\*</sup> C111 menyampaikan kejadiannya sebagai berikut:

*Pada tanggal 22 Juni 1982 saya bertugas sebagai Hansip di Pasar Mercado Dili dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan surat-surat bagi setiap orang yang datang berkunjung di pasar waktu malam dan bermalam di pasar tersebut. Bahwa pada waktu itu kebetulan saya memeriksa seorang wanita yang bernama IM yang barusan turun dari Baucau, di mana waktu itu saya menanyakan surat jalan, terus ia mengatakan bahwa surat jalannya itu ada pada kakaknya yang bermalam di Bekora. Oleh karena itu saya pada malam itu juga menahan IM di pos induk Pasar Mercado di mana saya bertugas. Bahwa kemudian pada jam 04.00 pagi saya lalu menanyakan lagi kepada IM di mana surat jalannya dan iapun tetap menjawab bahwa surat jalannya itu ada pada kakaknya yang tidur di Bekora. Pada waktu itu timbul niat saya untuk melakukan persetubuhan dengan IM oleh karena waktu itu hanya kami berdua sendiri sedangkan semua orang masih tidur. Kemudian saya membawa IM ke pos polisi untuk menakutkan dia, agar supaya niat saya untuk bersetubuh dengan IM bisa tercapai. Bahwa ketika kami sampai di belakang Pasar Mercado saya dengan paksa memerintahkan IM untuk duduk di rumput, akan tetapi ia tidak mau dan akhirnya saya memukulnya sebanyak dua kali pada badannya sehingga IM takut, lalu tidur di atas rumput-rumput.*

C111 melanjutkan dengan menggambarkan pemerkosaan tersebut dan bagaimana ia kemudian membebaskannya untuk kembali ke rumah. Akan tetapi IM segera melaporkan insiden ini kepada Komandan Hansip. Keesokan harinya, C111 ditangkap oleh seorang anggota Hansip lainnya dan dibawa ke kepolisian. C111 segera mengakui tentang kejahatan ini dan ditahan oleh kepolisian. Dalam persidangannya di bulan November 1982 itu, C111 dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan pemerkosaan dan dihukum kurungan penjara 1 tahun dan 6 bulan. Hukuman dijatuhkan atas dasar pengakuannya dan pernyataan tertulis dari korban, dua saksi dan seorang dokter yang memeriksa korban dan menyatakan selaput darahnya telah koyak. Baik korban maupun para saksi tidak ada yang menghadiri sidang. Putusan pengadilan menyebutkan bahwa selaput dara perempuan tersebut telah robek, tetapi tidak menyebutkan fakta bahwa korban adalah anak di bawah umur. Pengadilan menyatakan bahwa tindakan C111 menyalahgunakan wewenang merupakan hal yang memberatkan hukumannya.

321. JM melaporkan kepada Komisi bahwa pada tahun 1982, di Mauchiga (Hatu Bullico, Ainaro) ketika itu ia berumur 14 tahun, seorang anggota Yonif 744 membawanya secara paksa dari rumahnya ke satu ladang kosong dan memerkosanya. JM menyatakan bahwa ia mengetahui adanya lima perempuan lainnya yang mengalami nasib yang sama. Pemerkosaan terjadi setiap malam dalam satu pekan.<sup>242</sup>

322. Dalam satu kasus lain, KM memberikan pernyataan yang mengungkapkan bahwa pada tahun 1982, ia adalah murid kelas dua yang berumur 10 tahun di Ossowalu (Vemasse, Baucau). Suatu hari dua anggota Yonif 328 datang ke rumahnya. Salah satu dari mereka bernama C70. KM mengingat, "Dia memegang tangan saya dan berkata, 'Mau melakukannya dengan saya?' Saya menjawab, 'Saya terlalu muda.'" Tetapi ia menarik KM, menelanjinginya dan memerkosanya. Alat kelamin KM berdarah akibat penetrasi yang kasar. Keesokan harinya orang tua KM kembali dari kebun mereka dan terkejut mendengar apa yang telah terjadi. Selama tiga hari berikutnya anggota TNI dari Yonif 328 datang ke rumah mereka dan menuduh mereka menyembunyikan anggota Fretilin. KM diperkosa berulang kali sampai akhirnya menjadi hamil.<sup>243</sup>

<sup>\*</sup> Berkas Pengadilan No: 17/PID.S.B/1982/PN.DIL, Hakim: Doris A.A. Taulo, SH, Panitera: Petrus Lamapaha, Penuntut: M. Darwin, Putusan: 19 November 1982. CAVR belum melakukan penelitian yang menyeluruh atas semua berkas dalam Koleksi Pengadilan Negeri Dili dan tidak dapat mengatakan apakah kasus ini biasa atau luar biasa. Namun Komisi mengamati dari berkas-berkas pengadilan bahwa kekerasan seksual adalah kasus yang sering ditangani pengadilan ini.

323. Kasus LM juga mengemukakan kerentanan anak-anak sekolah, serta keterlibatan pejabat pemerintah sipil yang membolehkan militer melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap anak-anak. LM mengungkapkan kepada Komisi bahwa ketika ia berumur 13, pada bulan September 1983, anggota Kodim 1630 Viqueque datang ke kelasnya dan mengambil beberapa teman perempuannya tanpa penjelasan. Ketika LM pulang setelah mengantar makanan untuk bibinya, yang ditahan di Viqueque, ia bertemu dengan kepala desa Waimori (Viqueque), C71. Kepala desa itu menyuruh LM datang ke rumahnya di Beobe (Viqueque) keesokan harinya dan agar membawa serta teman sekelasnya NM:

*Langsung pada malam itu saya harus melayani Dandim C72, NM melayani Danramil C73 dan OM melayani Babinsa Kraras yaitu C74. Setiap malam saya dijemput dan dibawa ke Kodim untuk melayani mereka dan lalu pagi hari saya pulang ke rumah, sedangkan OM dan NM tak pernah pulang ke rumah dari Kodim. Ini berlangsung selama tiga bulan sampai OM dan NM hamil dan mereka berdua menjalani aborsi.*

*Setelah tiga bulan, Dandim itu dilantik sebagai Bupati Viqueque dan membawa istrinya dari Jawa ke Viqueque. Sejak itu saya tidak pernah melayani Dandim lagi. Untung saya tidak hamil...tiap malam mereka menjemput dan membawa ke Kodim. Beberapa teman sekolah melihat kami dan saya malu sekali. Akhirnya saya meninggalkan sekolah.<sup>244</sup>*

324. Pola anggota klandestin menjadi sasaran militer Indonesia dalam kasus pelanggaran seksual berlanjut pada dasawarsa 1980-an. Tidak ada perbedaan antara anggota klandestin perempuan yang dewasa dan yang anak-anak. Seorang narasumber mengatakan kepada Komisi bahwa seorang anak perempuan berumur 12 tahun disekap selama tiga bulan pada tahun 1980 di markas Komando Pasukan Khusus di Farol, Dili. Ia menjadi sasaran perbudakan seksual oleh para anggota pasukan khusus itu secara bergiliran. Ini terjadi karena rumah korban diketahui sebagai titik informasi klandestin.<sup>245</sup>

325. PM berumur 17 tahun pada 1980, ketika ABRI mengambalnya bersama suaminya dari rumah mereka di desa Macadiqui (Uatu-Lari, Viqueque) ke Koramil Uatu-Lari. PM sudah terlibat dalam kegiatan klandestin seperti menyediakan makanan untuk Falintil. Di Koramil, ia ditelanjangi dan bajunya dikencingi. Kemudian tiga orang anggota Hansip, C75, C76, dan C77, memperkosanya di depan suaminya. Meskipun masa penahanannya tidak jelas, PM mengatakan bahwa anggota-anggota Hansip memperkosanya tiap malam.<sup>246</sup> QM, seorang perempuan berusia 17 tahun, dari Dare, Mauchiga (Hatu Builico, Ainaro) menolong anggota Falintil yang terluka pada bulan Agustus 1982. Akibatnya ia dibawa tentara ke Koramil Dare dan diserahkan kepada kesatuan ABRI yang beroperasi di Gunung Kablaki. Mereka memperkosanya tiap hari sampai ia melarikan diri di bulan Oktober tahun itu.<sup>247</sup>

326. RM melaporkan bahwa ketika berumur 12 tahun, ia ditangkap pada tahun 1980, bersama ayahnya RM1, di Suhurama, Dili oleh dua orang anggota pasukan khusus. Mereka dibawa ke Mandarin, satu tempat penahanan di Dili, di mana para prajurit pasukan khusus, dibantu oleh seorang penerjemah bernama C78, menginterogasi mereka. Selama interogasi RM disundut dengan rokok pada wajah dan tangannya dan mereka menyalakan rambutnya dengan korek gas sampai akhirnya hangus. RM disekap di WC. Ia dibawa kembali ke ruang duduk di mana ia menyaksikan bapak dan pamannya, RM2, ditelanjangi, disetrum dan dipukul dengan sebatang besi. Ia juga melihat beberapa perempuan diperkosa oleh anggota-anggota Komando Pasukan Khusus. Setelah tiga minggu di Mandarin, RM dan ayahnya dipindahkan ke penjara Balide. Ketika akhirnya dilepaskan, RM diperkosa oleh anggota-anggota Komando Pasukan Khusus di Pantai Kelapa, Dili. Ia dilepaskan dengan syarat wajib lapor kepada militer selama satu tahun.<sup>248</sup>

327. Pada satu insiden lain, Komisi menerima informasi bahwa 19 anggota klandestin berasal dari sekitar Viqueque ditangkap Kopassus pada bulan Mei 1986 dan dibawa ke markas Kopassus di Baucau di mana mereka disiksa dan diinterogasi tentang kegiatan mereka. Salah satu anggota dari kelompok itu, Caetano Alves, memaparkan apa yang dilihatnya terjadi pada empat perempuan muda anggota klandestin: SM (14 tahun), TM (16 tahun), UM (10 tahun), dan VM (16 tahun):

*Saya berdiri di luar dan melihat lewat jendela kaca ternyata teman-teman saya juga diperlakukan sama dengan yang saya alami: tak terkecuali teman-teman wanita juga mereka telanjangi dan disetrum di buah dada dan kemaluannya. Bahkan beberapa orang wanita mereka bakar dengan puntung rokok di tubuh dan kemaluannya. Selain penganiayaan-penganiayaan tersebut teman-teman wanita juga mengalami pelecehan seksual seperti dihina dengan kata-kata kotor serta diajak untuk bersetubuh dengan mereka. Setiap hari selama lima hari kami tetap diinterogasi dan disiksa seperti itu.<sup>249</sup>*

328. Pada awal dasawarsa 1980-an, terjadi penumpasan besar-besaran oleh militer di berbagai daerah yang terjadi pemberontakan Falintil. Kekerasan seksual, termasuk terhadap anak-anak, merupakan bagian dari strategi penumpasan ini. WM lahir pada tahun 1966 dan berusia sembilan tahun ketika ia melarikan diri ke Gunung Kablaki bersama keluarganya. Meskipun keluarganya kemudian menyerah di Ainaro, mereka terus membantu para pejuang Falintil. Pada tahun 1982, setelah *levantamento* di Dare, Mauchiga (Hatu Bullico, Ainaro) WM ditangkap dan disiksa. Ia lolos dari maut hanya karena seseorang menyarankan untuk menggunakannya sebagai pelayan dapur dan budak seks. WM berumur 17 tahun pada waktu itu:

*[Para prajurit] berkata, "Wakil Danramil adalah orang jahat, lebih baik membawa dia dan membunuhnya di Maumeta-Kio di tengah Kali, daripada membiarkannya hidup." Tetapi banyak yang tidak setuju dan lebih suka kami tinggal di Koramil dan bekerja di dapur mereka. Lalu, setiap malam kami dijemput...mereka mengatakan atas permintaan Komandan Kodim...Sadar akan status kami sebagai tahanan perempuan, kami hanya tunduk dengan putus asa. Ini berjalan secara rutin, lalu setiap dua atau tiga hari kami dijemput pada larut malam.<sup>250</sup>*

329. Seperti banyak korban kekerasan seksual lainnya, WM menjadi hamil karena orang yang menangkapnya. Ia mempunyai anak dari seorang anggota ABRI bernama C79.

330. Sesudah pemberontakan Mauchiga, sejumlah perempuan muda dari wilayah itu ditahan dan dipaksa untuk "menikah" dengan anggota tentara. XM, berusia 15 tahun, ditahan di Kodim Ainaro dan berulang kali diperkosa oleh petugas-petugas intelijen yang bertugas di sana: Kasi I C80, Sersan Kepala C81 dan Sersan Satu C82. XM selanjutnya dipindahkan ke Koramil Dare dan dipaksa untuk tinggal di rumah Sersan Satu C83 sampai ia pulang pada tahun 1999.

1990-1998

331. Jumlah insiden kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur menurun pada masa ini, mungkin ketika kehidupan masyarakat menjadi lebih normal dan kesempatan untuk tindakan acak pemerkosaan dan penganiayaan seksual berkurang. Dari berbagai pernyataan dan penelitian Komisi, hanya satu kasus dari masa ini berhubungan dengan anak-anak,

walaupun lagi-lagi harus dicatat bahwa 33,9% (289/853) kasus tidak ada data mengenai usia korban.

332. Insiden yang dilaporkan kepada Komisi menunjukkan bahwa pemerkosaan masih digunakan untuk menghukum perempuan muda anggota jaringan klandestin. YM berumur 15 tahun pada tahun 1993 dan tinggal di Malabe (Atsabe, Ermera). Ia melaporkan bahwa dirinya tertangkap dengan dua perempuan lainnya ketika sedang kembali dari pertemuan dengan Falintil, kemudian ditahan dan diperkosa di Polsek Atsabe oleh seorang polisi bernama C84 (sekarang bertugas dalam Kepolisian Nasional Timor-Leste, PNTL).<sup>251</sup>

1999

333. Pada tahun 1999, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan kepada Komisi terjadi dalam kekacauan dan kekerasan setelah pemungutan suara Konsultasi Rakyat. Desa-desa dibakar dan anak-anak dipisahkan dari keluarga mereka pada saat terjadi pemindahan paksa penduduk ke Timor Barat. Ini membuat anak-anak menjadi rentan terhadap kekerasan dan penganiayaan.

334. Mungkin kasus yang paling terkenal adalah kisah ZM yang dibawa oleh seorang anggota milisi ke Timor Barat ketika berumur 15 tahun dan sampai hari ini belum kembali ke rumahnya.



## ZM

### (Sebagaimana yang diceritakan oleh bibinya, ZM1, pada bulan November 1999)

Ayah ZM sudah lebih dulu mencari perlindungan di hutan setelah pemungutan suara. ZM dan adik laki-lakinya ZM2 [13 tahun] harus lari ke gereja di Suai [Covalima] bersama saya, bibinya, ZM1, bersama Pastor Hilário pada 5 September 1999. Keesokan harinya 6 September 1999 sekitar pukul 14.45, gereja diserang oleh kelompok milisi Mahidi, kelompok milisi Laksaur dan TNI dan para pejabat pemerintah...Saat itu juga, berbagai kekerasan dilakukan seperti penembakan secara membabi buta, pemboman, penyiksaan dan pembakaran. ZM melihat adiknya, ZM2 dibunuh dalam penyerangan itu.

Pengungsi dipaksa meninggalkan gereja. Kami pengungsi dibagi dalam dua kelompok, yaitu ada yang ke Kodim dan ada yang ke gedung SMP 2 Suai. Kami berada di Kodim selama satu minggu dari tanggal 6 sampai tanggal 12 September 1999. Pada saat di Kodim, di depan saya sendiri dan di depan Bupati Herman dan anggota Laksaur bernama C86 mengambil ZM. Ia mengatakan, "Ini sebagai hadiah perang untuk saya." Mulai saat itu ZM dipisahkan dari keluarganya dan dibawa ke mana saja C86 pergi melakukan kegiatannya.

ZM dibawa tinggal di markas Laksaur di Raihenek Betun (Suai, Covalima) bersama dua orang istri C86. ZM selalu dijaga ketat oleh Laksaur ke manapun dia pergi, ke kamar mandi untuk buang air kecil pun dijaga. ZM tidur sekamar dengan istri C86 yang lain, posisi tempat tidur diapit oleh kedua istri C86. Pada saat pertama saya bertemu dengan ZM86, dia hanya menangis tidak dapat bercerita banyak karena diawasi dan dijaga ketat. ZM pernah masuk rumah sakit dan diinfus karena kondisinya sangat lemah...Saat itu saya diizinkan masuk untuk bertemu dengan ZM tetapi dengan pengawasan para milisi Laksaur.

ZM sekarang dalam keadaan hamil dua bulan [November 1999]. Ia masih di tangan Laksaur, khususnya C86. Keluarganya menginginkan dia kembali, tetapi mereka takut nasibnya.<sup>252</sup> Saat ini ZM masih bersama C86 di Timor Barat, Indonesia.

335. Setelah pembantaian di Gereja Suai, perempuan dan anak-anak dari Suai ditahan di gedung sekolah menengah pertama. AN berusia 17 tahun pada waktu itu. Ia ingat bahwa setiap malam para perempuan dibawa keluar satu-satu. Ia mengisahkan tentang gilirannya:

*Pada tanggal 11 September 1999...milisi Laksaur datang dengan memegang senter sambil mengarahkan senter ke depan muka saya dan membuka kain sarung yang saya pakai...Milisi Laksaur menyuruh saya bangun dan mengancam kalau tidak...mereka akan menembak orang-orang yang berada di sekitar saya. Saya terpaksa bangun dan mereka menarik saya keluar dari ruang dan dibawa pergi oleh milisi Laksaur bernama C87. Saya diperkosa, setelah itu dipulangkan ke ruang semula. Di ruang tersebut saya hanya menangis.<sup>253</sup>*

336. Sesudah ini, para perempuan dibawa ke gedung yang lain. AN diperkosa lagi pada tanggal 14 September, kali ini oleh seorang polisi yang juga anggota intelijen Indonesia.

337. Beberapa kasus dari distrik Aileu juga memberikan petunjuk mengenai kejadian pada waktu itu. Pada bulan September 1999, BN berumur 14 tahun ketika ia dipindahkan dari rumahnya di Liquidoe (Aileu) ke kota Aileu dalam persiapan untuk melarikan diri ke Atambua. Ia dan kakak perempuannya tinggal di gedung Puskesmas. BN dipanggil ke rumah camat dan

dalam perjalanan diperkosa oleh C88, seorang anggota milisi AHI (Aileu Hametin Integrasi) dan kemudian oleh seorang anggota Brigade Mobil (Brimob) Polri. Ia mengisahkan:

*Tetapi di tengah jalan, saya dipaksa oleh C88 ke sebuah rumah kosong yang di dekat lapangan sepak bola Aileu. Tiba di sana, saya ditodong pisau bahwa harus menyerahkan diri untuk diperkosa. Karena saya takut, saya menyerah untuk diperkosa oleh C88. Lalu pada malam berikutnya, saya dibawa pergi lagi oleh tiga orang anggota Brimob [identitas tidak diketahui] ke sebuah rumah kosong dekat Puskesmas Aileu kota, lalu saya diperkosa oleh seorang anggota Brimob, sedangkan dua orang lainnya tidak ikut memperkosa saya tetapi berjaga-jaga di pintu dengan senjata.<sup>254</sup>*

338. Pada tanggal 1 September 1999, CN, seorang anak perempuan berumur 12 tahun, menghadiri latihan tari tradisional untuk kampanye CNRT di desanya Namleso (Lequidoe, Aileu). Tanggal 9 September, milisi AHI datang dan membakar rumah-rumah di desanya. Keesokan harinya mereka kembali dan mulai menembak dan CN bersama keluarganya melarikan diri. Ketika mereka mencapai jalan utama, anggota milisi C89 mendekatinya, menampar mukanya, meremas buah dada dan pantatnya serta mengancam untuk membunuhnya dengan senapan.

339. Juga di Aileu, pada tanggal 4 September 1999, DN bersama ibunya melarikan diri ke kota Aileu karena mereka mendengar bahwa desa mereka Seloi Kraik akan dibakar. DN yang pada waktu itu berumur 17 tahun tinggal dengan pamannya di Aileu. Setelah beberapa hari seanggota milisi, C90, mengancam ibunya untuk memberikan DN padanya. C90 membawa DN selama satu minggu, memperkosanya pada malam hari. Ketika berusaha untuk melarikan diri, ia diancam akan dibunuh. Tanggal 14 September C90 membawa DN ke Dili dan kemudian DN pergi dengan keluarga C90 ke Atambua. DN hidup dengan keluarga C90 di Atambua selama dua minggu sampai istrinya menjadi curiga dan DN mengakui bahwa ia telah diambil sebagai istri kedua. DN diusir dari rumah itu dan akhirnya berhasil kembali pulang.<sup>255</sup>

340. EN mempunyai kisah serupa dari Ainaro. Ia mengungkapkan bagaimana pada tanggal 23 September 1999, ketika masih berumur sembilan tahun, milisi Mahidi datang dan membakar desanya dan memaksa penduduk untuk berjalan dengan mereka menuju Atambua. EN berjalan dengan ibunya tetapi ibunya tertinggal jauh di belakang dan ditembak oleh C91, seorang anggota Mahidi dan kerabat dari ayahnya.

341. Sewaktu mereka sampai di Betun (Timor Barat), C91 mengambil EN untuk tinggal dengannya dan istrinya. Ia ditempatkan di sebuah kamar tanpa pintu selama satu minggu dan C91 memperkosanya tiap malam. Ia memaparkan:

*Pada malam hari C91 menggunakan kesempatan di saat istrinya sedang tidur untuk masuk ke kamar saya, saat itu saya ingin berteriak tetapi C91 menutup mulut saya. Setelah itu C91 juga memaksa dan melepaskan pakaian saya dan C91 tidur di atas saya. Saat itu badan saya tidak ditutupi oleh satu benang pun. C91 mencium saya dan memperkosa saya sebanyak tiga kali. Tidak lama karena C91 takut akan ketahuan oleh istrinya.<sup>256</sup>*

342. Setelah satu minggu, EN diambil oleh pamannya, seorang anggota TNI.

#### 7.8.4. Pemindahan anak-anak ke Indonesia

343. Dari tahun-tahun awal pendudukan sampai saat kedatangan pasukan penjaga perdamaian di bulan September 1999 beberapa ribu anak Timor-Leste telah dibawa atau dipindahkan ke Indonesia. Walaupun sebagian dari anak-anak ini tetap berhubungan dengan keluarga mereka dan pada akhirnya dapat kembali, sebagian lainnya tidak pernah kembali ke Timor-Leste dan nasib atau keberadaan mereka tidak pernah diketahui oleh keluarga mereka.

344. Dalam tahun-tahun awal setelah invasi, sebagian besar kasus anak-anak yang dibawa ke Indonesia melibatkan prajurit perorangan yang membawa anak tersebut karena ada kesempatan, biasanya tanpa persetujuan dari keluarga atau pihak lain. Dengan berjalannya waktu, praktek memindahkan anak-anak menjadi diatur secara resmi. Tetapi pada prakteknya anak-anak terus diculik atau persetujuan orang tua banyak didapatkan melalui pemaksaan, baik secara terang-terangan atau lebih terselubung.

345. Pejabat-pejabat pemerintah dan kemudian departemen-departemen pemerintah, juga terlibat dalam pemindahan anak-anak. Sejak akhir dasawarsa 1980-an, lembaga-lembaga keagamaan perannya terus meningkat dalam praktek ini. Mereka mengirimkan anak-anak Timor-Leste ke berbagai lembaga di Indonesia untuk tinggal dan belajar, dalam sebagian kasus tanpa restu dari keluarga mereka atau tanpa memberikan cara bagi keluarga untuk tetap berhubungan dengan anak-anak mereka.

346. Setelah pemungutan suara Konsultasi Rakyat tahun 1999, terjadi gelombang pemindahan baru yang didorong oleh pemindahan ribuan keluarga dan upaya kaum pro-integrasi untuk meneruskan perjuangan bagi masa depan Timor-Leste dengan cara lain. Sebagian besar anak-anak dipindahkan dari kamp-kamp di Timor Barat, yang kebanyakan dengan izin dari orang tua atau penanggungjawab yang menginginkan tempat yang lebih aman bagi anak-anak yang mereka asuh. Namun sebagian orang tua yang menyetujui pemindahan sementara anak-anak ini belakangan mengalami kesulitan untuk membawa mereka kembali pulang atau bahkan untuk menghubunginya.

347. Menulis tentang periode 1999, Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) mencatat bahwa:

*....perjuangan lebih luas untuk kemerdekaan Timor-Leste dalam hal tertentu terlihat dari, atau dilakukan melalui upaya-upaya menguasai anak-anak.<sup>257</sup>*

348. Pernyataan ini sama berlakunya untuk keseluruhan masa pendudukan. Praktek umum pengambilan anak-anak memperlihatkan satu pandangan bahwa dengan menguasai wilayah Timor-Leste, Indonesia juga memiliki kekuasaan tak terbatas atas anak-anak. Ini terwujud selama masa kekuasaan rezim Orde Baru. Anggota-anggota ABRI dan orang-orang lain yang berkuasa di Timor-Leste merasa bahwa mereka berhak untuk mengambil seorang anak Timor-Leste tanpa ijin orang tuanya.

349. Juga ada peragaan di muka umum anak-anak Timor-Timur di Istana Presiden di Jakarta pada tahun 1977 (lihat bagian berjudul Pemindahan oleh pejabat pemerintah dan organisasi amal di bawah ini). Praktek ini, khususnya ketika hal ini menjadi semakin terlembaga di masa pendudukan, sering dihubungkan dengan pencapaian tujuan politik, agama atau ideologi yang lebih luas. Badan-badan militer, pemerintah dan keagamaan sering bertindak bersama-sama.

350. Standar internasional mengatur bagaimana anak-anak, khususnya anak-anak yang tidak dirawat keluarga, harus diperlakukan oleh negara, dalam situasi konflik maupun pada masa damai. Menurut Konvensi Jenewa IV, Indonesia sebagai Kekuasaan Pendudukan memiliki

tanggungjawab pada anak-anak Timor-Leste selama periode mandat. Indonesia wajib melakukan:

- mengungsikan anak-anak dari medan perang (Pasal 17)
- memastikan bahwa anggota keluarga yang sama tidak dipisahkan (Pasal 49);
- memastikan bahwa anak-anak berusia di bawah 15 tahun yang terpisah dari keluarga atau kehilangan orang tua, tidak boleh dibiarkan tanpa ada yang mengasuh (Pasal 24)
- menjamin anak-anak dipersatukan kembali dengan orang tua mereka atau menempatkan mereka dengan keluarga atau teman (anak-anak hanya boleh ditempatkan di lembaga sebagai pilihan terakhir);
- memastikan semua langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi anak-anak dan mencatat nama orangtua mereka (Pasal 50) (negara tidak dapat mengubah status pribadi seorang anak); dan
- memastikan agar pendidikan disediakan, sedapat mungkin, oleh orang-orang dengan kebangsaan, bahasa dan agama yang sama (Pasal 50).

351. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak pada bulan September 1990 dan sebagai kekuasaan negara yang efektif di Timor-Leste, Indonesia mendapatkan kewajiban untuk memberikan prioritas pada kepentingan terbaik anak-anak ketika membuat keputusan yang berhubungan dengan anak-anak. Ini berarti bahwa di masa pendudukan Indonesia diwajibkan untuk:

- menjamin, jika dimungkinkan keadaan, bahwa pandangan anak-anak menjadi pertimbangan (Pasal 3[1]);
- mengatur proses adopsi dan memastikan bahwa adopsi dilakukan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku (Pasal 21);
- memerangi pemindahan gelap anak-anak ke luar negeri (Pasal 11);
- memerangi penculikan, penjualan atau perdagangan anak-anak (Pasal 35);
- menjamin bahwa anak-anak harus selalu bebas untuk memilih agama atau kepercayaan lain (Pasal 30);
- menjamin bahwa jika seorang anak dipisahkan dari keluarganya, negara memberikan pengasuhan yang mempertimbangkan latar belakang budaya anak tersebut (Pasal 20); dan
- melindungi anak-anak dari eksploitasi jenis apapun (Pasal 36).

352. Tidak seperti bagian lain dalam bab ini, pemindahan anak dari Timor-Leste ke Indonesia tidak menjadi bahan penelitian atau analisis statistik. Tetapi, temuan-temuan Komisi diambil dari banyak sekali bukti yang dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan Komisi dan peneliti-peneliti independen, baik di Timor-Leste maupun di Indonesia, serta sumber-sumber sekunder. Komisi tidak menerima informasi, tetapi juga Komisi tidak melakukan penelitian khusus tentang, anak-anak yang dikirimkan secara paksa ke negara lain, selain Indonesia.

#### 7.8.4.1. Jumlah anak-anak yang dipindahkan ke Indonesia

353. Karena pemindahan anak-anak dari Timor-Leste ke Indonesia hampir seluruhnya tidak diatur selama masa pendudukan dan dijalankan melalui bermacam-macam cara, maka mustahil untuk menentukan dengan tepat jumlah anak-anak yang dipindahkan. Namun perkiraan dapat dibuat dari berbagai keping informasi. Palang Merah Internasional menyampaikan kepada Komisi bahwa telah menerima lebih dari 4.000 laporan tentang orang-orang yang hilang selama periode

ini, sebagian besar dari akhir dasawarsa 1970-an dan dasawarsa 1980-an. Ratusan dari mereka adalah anak-anak di bawah umur pada saat hilang dan termasuk anak-anak yang diambil tentara setelah bertugas sebagai TBO.<sup>258</sup> Mario Carrascalão juga mengatakan kepada Komisi bahwa selama 10 tahun bertugas sebagai Gubernur Timor Timur antara 1982 dan 1992, 20-30 anak setiap tahun dilaporkan hilang kepadanya.<sup>259</sup>

354. Angka tertinggi yang pernah disebut datang dari seorang pensiunan perwira, yang bertugas di Timor-Leste kurang lebih satu dasawarsa pada akhir dasawarsa 1970-an dan awal dasawarsa 1980-an, yang bertugas sebagai staf dari Jenderal Benny Moerdani. Ia mengatakan bahwa para prajurit tentara membawa ribuan anak dari Timor-Leste. Perkiraanannya tidak termasuk anak-anak yang dikirimkan oleh berbagai lembaga keagamaan atau lembaga amal pada periode tersebut.<sup>260</sup>

355. Jika anak-anak yang dipindahkan pada tahun 1999 dimasukkan dalam hitungan, angka perkiraan seluruh anak yang dibawa ke Indonesia meningkat tetapi angka yang disebutkan sangat berbeda-beda. Satu penelitian yang dilakukan bersama oleh International Refugee Council (IRC) dan UNHCR dengan Dewan Solidaritas Mahasiswa pada akhir tahun 2001, setelah banyak pengungsi sudah pulang, memperkirakan bahwa seluruhnya 2.400 anak telah dipindahkan ke Indonesia selama masa pendudukan. Seorang perwakilan UNHCR mengatakan pada satu audiensi publik bahwa antara tahun 1976 dan 1999 kemungkinan ada 4.534 anak yang telah dipindahkan dari Timor-Leste.<sup>\*</sup>

356. Berdasarkan perkiraan ini, Komisi yakin bahwa beberapa ribu anak telah dikirimkan ke Indonesia dari Timor-Leste. Namun, adalah penting untuk diakui bahwa pemindahan terjadi dengan berbagai cara mulai dari pemindahan anak-anak yang tidak teregulasi tanpa meminta persetujuan, pemaksaan terhadap anak-anak dan orang tua, sampai dengan pemindahan yang meminta persetujuan mereka.

357. Seperti halnya jumlah keseluruhan, jumlah kasus yang tidak terselesaikan juga sulit untuk ditentukan karena lembaga yang berbeda menggunakan kriteria yang berbeda dalam memutuskan tetap dibukanya sebuah kasus. Satu lokakarya oleh UNHCR yang diadakan di Dili pada bulan Mei 2003, mengidentifikasi 770 kasus belum selesai dari seluruh masa pendudukan.<sup>†</sup> Menurut UNHCR, sampai tanggal 29 Februari 2004, masih ada 221 anak di Indonesia yang terpisah dari orang tuanya di Timor-Leste, berkurang dari 600 pada bulan Juni 2003.<sup>261</sup> Pada saat penutupan program penyatuan kembali UNHCR pada tanggal 31 Desember 2004, masih ada 107 kasus yang ditangguhkan; 72 anak masih berada di Indonesia (Jawa dan Sulawesi), dan 27 anak tidak diketahui tempat keberadaannya.<sup>262</sup> Namun demikian, mandat UNHCR hanya terbatas pada pemisahan tahun 1999, tidak termasuk kasus-kasus yang kedua orang tua dan anak-anaknya berada di Indonesia dan menganggap suatu kasus ditutup ketika anak itu telah memasuki usia 18 tahun. Oleh karena itu, jumlah anak-anak yang dipindahkan dan yang belum kembali sudah pasti jauh lebih banyak.

---

<sup>\*</sup> Kesaksian UNHCR pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, 29-30 Maret 2004. Angka-angka itu menunjukkan jumlah kasus yang didaftarkan pada UNHCR. Dari 1999 sampai 31 Desember 2004, 2.365 anak berkumpul kembali dengan keluarga atau pengasuh mereka dan 2.062 kasus ditutup karena perpindahan tanggungjawab atas anak-anak itu. 107 kasus ditangguhkan. Wawancara CAVR dengan Manuel Carceres, UNHCR, Dili, 28 Maret 2005.

<sup>†</sup> United Nations High Commissioner For Refugees, Evaluation And Policy Analysis Unit, *Evaluation on UNHCR's repatriation dan reintegration programme in East Timor, 1999-2003*, dipersiapkan oleh Chris Dolan, Judith Lange, Naoko Obi, UNHCR, Jenewa, 24 Februari 2004, halaman 61; rinciannya adalah 508 anak laki-laki dan 262 perempuan, dengan 29 orang berusia 0-5 tahun, 262 orang berusia 6-12 tahun, 228 orang berusia 13-15 tahun, dan 251 orang berusia 16-18 tahun.

#### 7.8.4.2. Pola selama periode mandat

##### 1976-1979

358. Sebagian besar kasus anak-anak yang dipindahkan keluar Timor Leste ke Indonesia terjadi pada periode antara tahun 1976 dan 1979. Ini adalah periode kekacauan besar-besaran bagi keluarga dan kehidupan komunitas orang Timor-Leste yang timbul akibat dari invasi Indonesia dan operasi-operasi militer selanjutnya. Suasana kacau, pemaksaan dan impunitas yang berlangsung, serta tingginya jumlah anak-anak yang kehilangan orang tua atau yang terpisah dari anggota keluarga, menciptakan kondisi bagi berlangsungnya pemindahan yang meluas.

359. Dua pola muncul dalam penelitian Komisi mengenai periode ini. Yang pertama adalah personil militer tingkat rendah sampai menengah membawa anak-anak yang ditemukan sendirian di medan pertempuran atau mengambil anak-anak langsung dari keluarga mereka. Sebagian besar kasus seperti ini yang dilaporkan kepada Komisi terjadi tanpa persetujuan orang tua atau yang lain. Pola kedua adalah anak-anak dipindahkan ke Indonesia oleh pejabat-pejabat pemerintah atau lembaga amal terkemuka. Pola-pola ini menimbulkan masalah yang berbeda mengenai persetujuan dan tanggung jawab negara, yang akan dibahas secara terpisah di bawah ini.

*Anak-anak dibawa oleh anggota tentara perorangan*

360. Komisi telah menerima laporan langsung dari orang tua dan anak-anak dan dari para anggota militer, mengenai anak-anak yang diambil dari Timor-Leste oleh anggota tentara secara perorangan. Seperti yang dikutip di atas, seorang pensiunan perwira dalam militer Indonesia memperkirakan bahwa ribuan anak diambil dengan cara ini. Mayoritas kasus ini melibatkan anggota-anggota tentara yang berpangkat rendah yang membawa anak-anak ketika mereka pulang. Seorang laki-laki, yang pergi secara sukarela dengan kapal militer pada tahun 1976 ketika berumur 18 tahun, mengingat bahwa ia melihat sejumlah anak di atas kapal:

*Pada saat itu ada 21 anak di atas kapal. Mungkin ada dua anak yang situasinya baik seperti saya. Ada beberapa yang bekerja untuk perusahaan itu. Ada juga yang mungkin sudah diterlantarkan...sebagian tidak memiliki orang tua maka dari itu mereka dibawa. Mungkin beberapa dari mereka [prajurit tentara] tidak mempunyai anak.<sup>263</sup>*

361. Anak-anak yang dibawa dengan cara ini biasanya ditemukan di medan pertempuran setelah orang tua mereka terbunuh atau terpisah dari keluarga mereka. Komisi mendengarkan kesaksian dari para pegawai dua lembaga yang kadang menjadi tempat para prajurit menitipkan anak-anak ini menunggu kepulangannya. Menurut seorang lelaki yang bekerja di Rumah Sakit Wirahusada, rumah sakit militer di Dili, pada tahun 1976 anggota-anggota militer membawa banyak anak kecil dari luar Dili untuk dirawat di rumah sakit. Anak-anak itu biasanya sangat lemah dan berat badannya di bawah rata-rata dan banyak yang meninggal dunia. Para prajurit yang sama seringkali membawa mereka yang selamat ke Indonesia ketika masa tugasnya selesai. Jika mereka bisa, pegawai orang Timor-Leste membawa anak-anak itu pulang dari rumah sakit, agar para prajurit tidak membawa mereka.<sup>264</sup>

362. Para anggota tentara juga menempatkan anak-anak dalam pengasuhan Panti Asuhan Seroja di Dili.

## Panti Asuhan Seroja

Panti Asuhan Seroja didirikan kembali oleh tentara dari Kodam VIII Brawijaya di bekas panti asuhan di Bairro Formosa, Dili, pada tanggal 1 April 1976, tidak lama setelah invasi Indonesia.

Pada saat pembukaannya ada 26 anak di panti asuhan tersebut, tetapi angka itu bertambah dengan pesat. Prajurit-prajurit memasukkan anak-anak dari wilayah-wilayah tempur.\*

Menurut Guilherme dos Reis Fernandes, yang selama bertahun-tahun bekerja di Panti Asuhan Seroja dan menjadi kepalanya dari tahun 1980 sampai 1990, lembaga ini tidak hanya menerima anak yatim-piatu tetapi juga anak-anak yang kehilangan salah satu orang tuanya, yang orang tuanya di hutan, atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah anaknya. Ia juga mengingat:

*Banyak anak-anak yang dibawa dari distrik-distrik tanpa penjelasan dan seringkali ada orang tua yang datang mencari anaknya dan membawa mereka kembali.*

Salah satu mantan rekan kerjanya di panti asuhan menambahkan bahwa anak-anak itu seringkali ditinggal dengan sedikit atau tidak sama sekali informasi tentang di mana mereka ditemukan atau keadaan yang telah menyebabkan mereka dibawa ke sana. Halangan bahasa sering memperparah masalah-masalah ini. Menurut salah satu penghuni:

*Kadang-kadang nama kami diubah menjadi nama tentara yang membawa kami ke Panti Asuhan Seroja.<sup>265</sup>*

Selain mengasuh anak-anak sampai saatnya diambil anggota tentara untuk dibawa ke Indonesia, Seroja juga berperan langsung dalam pengiriman kelompok-kelompok anak dari Timor-Leste. Guilherme dos Reis Fernandes diberitahu bahwa dalam dua tahun ketika Seroja berada di tangan militer (sebelum ia mulai bekerja di sana) sekitar 60 anak dikirim ke Indonesia dari panti asuhan itu. Di antara mereka adalah kelompok yang dikenal sebagai "Anak-anak Presiden", yang Petrus Kanisius Alegria adalah salah satunya (lihat di bawah). Mário Carrascalão mengatakan kepada Komisi bahwa pendahulunya, Arnaldo dos Reis Araújo, menggunakan panti asuhan itu untuk menyelenggarakan pengiriman anak-anak ke Bandung (Jawa Barat) dan Semarang (Jawa Tengah).

Pada bulan Agustus 1978, Kodam Brawijaya menyerahkan panti asuhan itu kepada Dinas Sosial provinsi. Anggota-anggota tentara masih datang untuk mengunjungi anak-anak yang kira-kira berjumlah 80 anak pada hari-hari libur atau untuk merayakan hari jadi kesatuan mereka. Salah satu mantan penghuni menceritakan bahwa kira-kira pada tahun 1983 setelah kedatangan satu kelompok yang berjumlah 15 anak dari Ataúro, anggota-anggota tentara datang secara teratur untuk memeriksa apakah anak-anak itu telah melakukan kontak dengan orang tua mereka.<sup>266</sup>

Setelah penyerahan panti asuhan ke Dinas Sosial, seorang staf mengingat dalam sebuah pengarahan lisan dikatakan bahwa anak-anak Timor-Leste tidak boleh diadopsi oleh orang-orang dari luar wilayah itu, terutama tentara.

363. Prajurit-prajurit yang lain membawa anak-anak yang telah bertugas dengan mereka sebagai TBO. Alfredo Alves mengingat keberangkatannya dari Dili dengan kapal laut:

*Saya melihat banyak anak yang lain di atas kapal tapi saya tidak tahu ada berapa. Ada tujuh anak di peleton kami. Satu batalyon Indonesia mempunyai empat kompi dan*

\* Wawancara CAVR dengan Maria Margarida Babo, Dili, [tanggal tidak tercatat], yang bekerja di Seroja sejak 10 hari setelah pembukaannya.

*satu kompi terdiri dari tiga peleton. Jika kita perkiraan bahwa ada 3-4 anak dalam tiap peleton, maka seluruhnya mungkin ada 30-40 anak. Tapi mungkin ada peleton-peleton yang komandannya mengikuti instruksi dan tidak memperbolehkan anak buahnya untuk membawa anak-anak pulang dengan mereka.<sup>267</sup>*

364. Kisah Alfredo Alves juga menggambarkan bagaimana anak-anak ditipu untuk meninggalkan Timor-Leste (lihat boks di bawah).

365. Komisi juga menerima sejumlah kasus dalam mana prajurit menculik anak-anak dari keluarga mereka. Di Ponilala, Ermera, seorang anak bernama Veronica diambil dari ibunya pada tahun 1977 ketika umurnya masih delapan tahun. Pada saat itu Manuel Martins bekerja sebagai TBO untuk seorang prajurit yang ia ingat bernama C92, seorang anggota polisi militer. Ia ingat bahwa dirinya melihat C92 memberikan pakaian dan susu kepada Veronica, memandikannya, dan menggendongnya. C92 mengatakan bahwa ia tidak memiliki anak perempuan dan Veronica seperti anaknya sendiri. Pada hari ketika masa tugas C92 di Ermera berakhir, ia mendatangi rumah Veronica dan membawanya pergi dan hanya meninggalkan sekantong beras. Ia berjanji untuk mendidik dan mengembalikan Veronica ke Timor-Leste tetapi keluarganya setelah itu tidak bisa menghubungi Veronica, walaupun ibunya telah meminta bantuan ICRC untuk mencari anak perempuannya.<sup>268</sup>



## Yuliana (Bileki)

Satu kisah lain yang mungkin berakhir bahagia. Seorang anak perempuan berumur lima tahun, Buileki, dari Dare (Hatu Builico, Ainaro) dibawa ke Jakarta pada tahun 1978 oleh seorang prajurit Kopassus, yang telah menolongnya dan memberinya coklat dan hadiah. Setelah selama lima hari tinggal dengan keluarga anggota tentara itu, ia diserahkan kepada dua keluarga lain. Yang terakhir adalah rumah yang baik untuknya dan ia diberi nama Yuliana. Setelah dewasa, menikah, dan memiliki tiga orang anak, Yuliana berusaha mencari keluarganya di Timor-Leste melalui surat kabar namun tidak berhasil. Ia bertemu dengan seorang peneliti Komisi di Jakarta dan berhasil menghubungi keluarganya melalui radio Komisi.<sup>269</sup> Yuliana dibawa ke Timor-Leste oleh Komisi pada bulan Juli 2004 dan dipertemukan kembali dengan keluarganya di Ainaro. Ia mengungkapkan kisahnya pada satu audiensi publik Komisi.

*Pada suatu hari Minggu setelah misa pertama, saya dikejar-kejar oleh seorang tentara, kemudian saya ditangkap dan dibawa ke lapangan terbang Ainaro dan langsung dinaikkan ke helikopter kemudian dibawa ke Dili. Pada saat hendak dibawa, paman saya tidak mau melepaskan saya karena C93 bukan ayah saya dan saat itu situasi sedang perang dan saya harus berpisah dengan orang tua. Di Dili saya tinggal dengan ibu-ibu tentara di sebuah asrama. Saya sempat hampir tersesat di Dili ketika berusaha melarikan diri untuk mencari orang tua saya, paman saya dan saudara-saudara saya.*

*Setelah tiga atau enam bulan di Dili dan perang di Ainaro selesai C93 pulang ke Dili dan langsung saya dibawa ke Jakarta. Di Jakarta saya tinggal dengan C93 kurang dari setahun. Kemudian saya tinggal berpindah beberapa kali. Dari C93 kemudian saya tinggal dengan Pak Ordin, hingga akhirnya saya tinggal dengan bapak angkat saya Tatang Yogosara. Saat itu saya sangat sedih karena masih kecil. Saya sangat kesepian ketika tinggal dengan keluarga Bapak Tatang Yogosara. Pada saat itu yang saya ingat hanya nama orangtua saya, Kuilbere dan Maria dan kakak saya Maumali serta nama asli saya, Bileki.*

*Selama tinggal dengan keluarga Bapak Tatang Yogosara saya tidak merasa dibeda-bedakan karena saya orang lain. Saya tinggal dengan keluarga yang saling mengasihi. Mungkin ada saudara-saudara yang bernasib saya seperti saya. Saat ini saya sudah berkeluarga dan punya anak tiga. Suami saya Petrus Tapis, berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi. Ketiga anak saya adalah Veronika Ratu Rosari, Klara Monika Misi, dan Abraham Moris.*

*Sebenarnya pada tahun 1999 sebelum kerusuhan Timor-Leste saya sudah mencari keluarga saya melalui koran Suara Timor Timor. Di koran tersebut saya tuliskan pesan...Ketika itu hampir ada tanggapan...orang koran STT bilang kalau kakak saya Maumali mencari saya tetapi keburu kejadian 1999. Sejak saat itu tidak ada kontak lagi sampai saya ketemu Ibu Filomena dan Ibu Helena [seorang peneliti yang bekerja untuk Komisi].*

*Suami saya adalah warganegara yang baik, yang menghargai hak-hak orang, dia tahu saya orang Timor Timur, saya mesti ke Timor Timur, bukan berarti saya meninggalkan keluarga saya dan suami saya, bukan, bukan! Namanya silahturami antara saudara, jangan sampai Tuhan panggil saya, sebelum saya bertemu keluarga saya.<sup>270</sup>*

366. Maria Legge Mesquita dibawa oleh anggota-anggota tentara sesudah ayahnya terbunuh di hutan. Ia dan anak-anak lain yang diculik diselamatkan oleh satu keluarga yang ulet ketika mereka akan pergi ke Indonesia:

*Ketika tentara siap untuk pergi, setelah masa tugas mereka selesai, mereka mengambil lima anak termasuk saya dan memasukkan kami ke dalam peti-peti. Kami dimasukkan ke dalam peti, tiap peti satu anak, seperti ayam. Saya ingat ada satu keluarga, yang bekerja untuk*

*Palang Merah, yang mencari anak-anak mereka – mereka takut anak mereka sudah dibawa oleh tentara. Mereka menemukan kami dan kami semua dilepaskan. Anggota-anggota keluarga itu lalu dipukuli tapi kami tidak ditemukan lagi dan kami tidak jadi pergi.<sup>271</sup>*

367. Kisah Maria menggambarkan bahwa anak-anak tidak hanya diculik, tetapi bahwa keluarga yang menentang dianiaya.

368. Pengalaman QN serupa:

### **Penculikan seorang bayi di Ermera**

QN mengisahkan kepadanya bagaimana ia hampir diculik oleh seorang anggota militer. QN lahir pada tahun 1978 dan tinggal dengan keluarganya di sebuah kamp konsentrasi di Kota Lama, Ermera. Seorang komandan kompi di kamp, C94 dari Sulawesi memaksa kakak laki-lakinya untuk menjadi TBO. Komandan itu juga ingin membawa QN, tetapi keluarganya menolak. Kemudian QN dimasukkan ke dalam sebuah peti oleh perwira itu dan dibawa ke Dili.

Ibu QN segera melaporkan penculikan itu kepada pastor di Ermera, yang selanjutnya menghubungi para suster dan pastor di Dili. Seorang TBO yang bekerja di Kodim melaporkan kepada suster-suster bahwa di sana ada seorang bayi dari Ermera di dalam sebuah peti di Kodim. Ibu QN segera datang ke Dili dan menghadapi anggota tentara yang telah mengambil anaknya. Ia ditendang berkali-kali karena menolak untuk mundur, tetapi akhirnya ia diperbolehkan untuk melihat bayinya. Untungnya, ia bisa membuktikan bahwa bayi itu adalah anaknya karena ia bisa menunjukkan bahwa bayi itu memiliki tanda lahir di belakang lehernya, dan QN pun dikembalikan ke ibunya.

Namun akibat konfrontasi ini, keluarga QN menanggung akibat yang berat, dan perwira itu masih berusaha untuk membawa bayi itu pergi dengannya. Di Ermera, C94 menembak ibu QN dan menangkap kakak laki-laki QN yang berumur 18 tahun, memukuli dan menyiksanya. Sang kakak dimasukkan ke dalam satu lubang yang penuh dengan kotoran. Di tempat itu beberapa hari kemudian ibunya menemukannya. Dua kakak perempuan QN juga disiksa dan diperkosa oleh C94 dan salah satunya menjadi hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan. C94 kembali ke Ermera dan membawa bayi perempuan itu bersamanya ke Indonesia. Tidak ada berita tentang anak itu yang pernah diterima oleh keluarganya.<sup>272</sup>

369. Kisah QN merupakan salah satu dari banyak kisah dalam mana anggota tentara meminta (atau memaksa) persetujuan dari orang tua atau wali untuk membawa anak-anak mereka ke Indonesia.

370. Domingos de Deus Maia, seorang pastor yang bekerja di tempat penampungan di Letefoho (Ermera) pada tahun 1977, mengingat bagaimana para anggota tentara memintanya untuk menandatangani satu surat pelepasan anak agar mereka bisa membawa anak itu pulang ke Indonesia. Ia menolak. Tidak lama kemudian, orang tua kedua anak ini memberitahunya bahwa tentara akan mengambil anak mereka secara paksa. Ia segera melapor kepada komandannya, yang beragama Kristen, yang kemudian menghampiri sebuah truk yang sedang dimuati, siap untuk meninggalkan Letefoho (Ermera). Komandan membongkar muatan truk tersebut dan menemukan seorang anak tersembunyi di dalam sebuah peti. Kemudian mulai terdengar adu mulut antar para prajurit tersebut.<sup>273</sup>

---

<sup>271</sup> Menurut ingatan QN, komandan kompi itu berasal dari Batalyon Infantri 152 tetapi penelitian Komisi mengindikasikan bahwa yang lebih mungkin adalah Batalyon Infantri 122.

371. Kadang-kadang orang tua diminta untuk menandatangani surat adopsi. Mereka memberikan persetujuan karena alasan yang berbeda-beda. Dalam beberapa kasus mereka menyerah karena ancaman dan paksaan terang-terangan. Komisi juga memperoleh kesaksian tentang kasus-kasus yang penekanannya berlangsung lebih terselubung, yang berasal dari suasana yang pada akhirnya mustahil untuk menolak permintaan seorang anggota tentara. Sementara ada juga yang yakin bahwa anak-anak mereka akan lebih aman atau berpendidikan lebih baik di luar Timor-Leste. Dalam situasi yang terakhir, banyak orang tua yang diberitahu bahwa suatu hari anak mereka akan dipulangkan, sebuah janji yang jarang ditepati.

372. Dalam beberapa kasus, surat adopsi resmi dibuat dan ditandatangani oleh pejabat militer. Salah satu berkas surat adopsi ini terdiri dari kesepakatan yang ditulis dengan tangan dengan disaksikan oleh Komandan Koramil Bobonaro, Camat dan beberapa orang lainnya, bersama dengan satu pernyataan tercetak yang menyebutkan orang tua asli dan orang tua angkat berserta saksi dari masing-masing pihak.<sup>\*</sup> Akan tetapi, lagi-lagi kesepakatan untuk menyerahkan anak untuk diadopsi tidak selalu dibuat secara bebas.

---

<sup>\*</sup> Dokumen ini ada dalam Arsip CAVR. Dalam dokumen ini juga tertera tanda tangan Komandan Kompi Markas Batalyon 507 dan kepala desa Bobonaro (Bobonaro).

### **Adopsi paksa: kisah Aida**

*Pada tahun 1975 saya keluar dari hutan dan tinggal di sebuah kamp di Bobonaro. Suami saya sudah mati dan saya memiliki seorang anak perempuan bernama Constantina, yang kira-kira berumur tiga tahun. Ketika kami tinggal di sana, [seorang tentara Indonesia] bernama C95 biasa membawa anak saya ke pos militer. Setiap pagi dia datang dan membawanya dan di sore hari dia mengembalikannya. Dia selalu mengatakan bahwa itu untuk kesenangan saja. Ini terjadi cukup lama, walaupun begitu saya tidak pernah pergi ke pos militer, kami takut pada tentara. Selalu ada pertanyaan dalam pikiran saya mengapa tentara itu begitu sering datang dan membawa anak saya.*

*Pada suatu hari, dia datang kepada saya dan bilang: "Saya sangat suka anak anda karena saya sendiri tidak punya anak." Benar bahwa dia tidak terlalu muda – cukup dewasa [untuk mempunyai anak]. Dia meneruskan: "Saya ingin membawa dia pulang. Saya ingin memberinya pendidikan dan setelah itu dia bisa kembali." Dia berkata bahwa sebagai perempuan yang masih sendiri saya tidak akan bisa menyekolahkaninya.*

*Dia mengatakan bahwa saya harus pergi dengannya ke Koramil untuk mencatat nama saya. Ayah dan paman saya juga dipanggil untuk ikut bersama kami. Ada beberapa orang yang di Koramil, tapi saya tidak tahu siapa mereka dan saya tidak bisa membaca. Saya tidak tahu apakah komandan ada di sana. Saya tidak tahu apakah semua orang yang menandatangani benar-benar ada di sana. Temukung (kepala desa saya) juga tidak bisa membaca surat-surat itu dan tidak tahu apa yang mereka katakan karena kami tidak tahu bahasa Indonesia dan mereka tidak memberitahu saya siapa mereka. C95 hanya mengatakan bahwa dia ingin mengirimnya ke sekolah dan kemudian dia akan kembali. Dia memberi saya sedikit uang tapi tidak lebih dari itu.*

*C95 sudah siap untuk pergi. Tas-tasnya sudah dikemas. Setelah dia pergi keluarga saya mengatakan bahwa saya telah meninggalkan cap ibu jari saya [di surat-surat itu] dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saya menyerahkan anak saya karena saya takut. Mereka punya senjata dan saya merasa saya tidak punya pilihan. Tapi sekarang saya hidup dengan harapan akan janji orang itu bahwa suatu hari anak saya akan kembali ke saya... Saya sering pergi ke pinggir laut, menghirup udara segar dan mengingat anak saya yang diambil dari saya yang berada di seberang laut itu.<sup>274</sup>*

*Apakah pemindahan anak-anak adalah kebijakan resmi militer?*

373. Komisi menemukan sedikit bukti bahwa pengambilan anak-anak Timor-Leste ke Indonesia merupakan kebijakan resmi militer.<sup>\*</sup> Bukti justru memperlihatkan bahwa, setidaknya ketika anggota tentara berpangkat rendah terlibat, para perwira militer yang berpangkat lebih tinggi tidak menyetujui praktek ini. Satu pola yang umum untuk beberapa kasus yang dikutip di atas adalah anak-anak dibawa secara diam-diam – dimasukkan ke dalam peti dan diselundupkan keluar dengan kapal. Alfredo Alves (lihat boks di bawah) ingat dirinya disembunyikan di dalam sebuah peti setelah mendengar polisi militer mengatakan bahwa para prajurit itu tidak diperbolehkan membawa anak-anak pulang ke Sulawesi. Keterangan Domingos de Deus Maia mengenai prajurit yang dihukum oleh komandan mereka karena membawa anak-anak adalah bukti tambahan bahwa para anggota tentara bertindak atas inisiatif sendiri.

374. Ada bukti bahwa setelah beberapa tahun militer berusaha untuk mengatur pemindahan anak-anak dengan mensyaratkan, misalnya, persetujuan dari orang tua dan pejabat yang berwenang.<sup>†</sup> Namun, tidak ada cukup bukti untuk memastikan apakah langkah ini sudah cukup

<sup>\*</sup> Walaupun ada desas-desus mengenai dokumen militer yang menginstruksikan kepada anggota tentara untuk membawa anak-anak ke Indonesia untuk mendidik mereka sebagai Muslim, Komisi tidak dapat menemukan dokumen tersebut.

<sup>†</sup> Ijin mungkin tidak sulit untuk diperoleh. Seorang staf Panti Asuhan Seroja mengatakan kepada Komisi tentang seorang anak laki-laki bernama Thomas yang pernah tinggal di Seroja. Perwakilan dari Persatuan Isteri Tentara (Persit), datang

untuk mengurangi jumlah anak-anak yang dibawa ke Indonesia. Dalam praktek, dalam suasana pemaksaan yang berlaku, langkah seperti ini tidak bisa menjamin bahwa persetujuan orang tua diberikan secara bebas. Ada cukup banyak bukti bahwa para anggota tentara menghindari peraturan, seperti yang terjadi dalam sejumlah kasus anak-anak yang diselundupkan keluar Timor-Leste dengan kapal. Lebih jauh, tidak ada kepastian bahwa setelah di Indonesia, seorang anak yang dipindahkan itu diasuh oleh keluarga dari anggota tentara yang telah menandatangani kesepakatan atau bahwa anak itu mendapat pendidikan. Ada bukti yang berlimpah bahwa anak-anak diserahkan kepada keluarga yang menginginkan anak, atau ditempatkan di sebuah lembaga. Tidak ada bukti yang mengatakan bahwa praktek penyerahan anak-anak dengan cara ini berada di dalam suatu sistem regulasi.

*Pemindahan oleh pejabat pemerintah dan organisasi amal*

375. Tidak hanya anggota tentara yang mengambil anak-anak dari Timor-Leste ke Indonesia pada tahun-tahun setelah invasi. Pejabat-pejabat pemerintah dan yayasan-yayasan amal, termasuk keluarga Presiden Soeharto, juga terlibat. Kegiatan-kegiatan mereka pada umumnya terorganisasi dengan baik dan mereka konon memberikan pendidikan kepada anak-anak Timor-Leste. Namun lagi-lagi tidak ada peraturan yang memadai, anak-anak diambil tanpa izin orang tua dan hak orang tua untuk tetap berhubungan dengan anak-anak mereka seringkali diabaikan.

376. Komisi mendapatkan informasi mengenai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta yang datang ke Timor-Leste dan berusaha meyakinkan para orang tua untuk mengirim anak-anak mereka ke Indonesia di mana mereka akan disekolahkan. C96 berasal dari Timor Barat, tetapi sebelum invasi Indonesia ia tinggal di desa Beobe (Viqueque). Ia kemudian menjadi seorang anggota DPR, mewakili Provinsi Timor Timur. Pada tahun 1977, ia mendekati sejumlah orang tua, termasuk seorang perempuan bernama Ana Maria dan menjanjikan kepada mereka bahwa anak-anak mereka akan memperoleh pendidikan di Jawa. Ana Maria setuju untuk mengirimkan anaknya, Cipriano. Beberapa hari kemudian C96 datang dan menjemput Cipriano bersama dengan empat anak lainnya dari desanya dan tiga lagi dari desa lain dan membawa mereka dengan helikopter tentara. Menurut pamannya, Duarte Sarmiento, Cipriano dan saudara sepupunya diserahkan kepada C96 dengan persetujuan orang tua mereka karena keadaan yang sulit pada saat itu, tetapi mereka diberitahu bahwa mereka akan diberi alamat anak-anaknya di Jawa. Saudara sepupu Cipriano kembali ke Timor-Leste untuk yang pertama kalinya pada tahun 1984 tetapi tanpa Cipriano. Ia mengatakan kepada keluarganya bahwa istri dari seorang tentara mengunjungi rumah yatim-piatu dan membawa dua anak bersamanya, Cipriano dan seorang anak perempuan dari Ainaro.

377. Yayasan-yayasan keluarga Soeharto berperan penting dalam pendanaan lembaga-lembaga yang terlibat dalam mencari, memindahkan, memberikan akomodasi dan mendidik anak-anak Timor-Leste pada periode ini. Pensiunan perwira militer, yang sudah dikutip menyebutkan jumlah anak-anak yang diambil oleh tentara, menjelaskan bahwa sebagian besar anak-anak ditempatkan di lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh orang-orang Muslim, Katolik atau Protestan. Biaya pendidikan mereka biasanya dibayar oleh Yayasan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), satu yayasan yang didanai dan dikelola oleh keluarga Soeharto.<sup>275</sup> Nilai propaganda dari keterlibatan ini tergambarkan dari pemindahan yang mencolok sejumlah anak ke Jawa yang dikenal sebagai "Anak-anak Presiden".

---

ke panti asuhan ini dengan surat rekomendasi dari organisasinya dan surat ijin dari Departemen Sosial untuk mengadopsi anak laki-laki berusia dua tahun itu. Wawancara CAVR dengan Maria Margarida Babo, Dili, tidak bertanggung.

<sup>275</sup> Wawancara CAVR dengan Duarte Sarmiento, Kupang, tidak bertanggung; Wawancara CAVR dengan seorang anak [nama dirahasiakan], Bandung, Indonesia, 28 dan 31 Januari 2004. Seorang anak lain, pergi dengan anggota-anggota tentara secara sukarela dan diberi beberapa kesempatan untuk mengunjungi keluarganya di Timor-Leste, tetapi selalu memilih untuk kembali ke Jawa. Wawancara CAVR dengan Achmad Viktor da Silva, Jakarta, Indonesia, Maret 2003 dan 22 Januari 2004.

## **“Anak-anak Presiden”**

Pada tahun 1977 satu kelompok yang terdiri dari 20 anak dikirimkan ke Jawa, rupanya dengan maksud untuk memperbaiki pandangan umum tentang Timor-Leste. Petrus Kanisius Alegria, salah seorang dari beberapa “perwakilan” dari distrik Aileu, adalah yang paling tua dalam kelompok itu:

*Pada tanggal 1 September 1977 saya bersama beberapa anak lainnya dibawa ke Jakarta. Kami dibawa oleh Letnan Kolonel Mulyadi [dari Sulawesi]. Gubernur Timor Timor ketika itu adalah Arnaldo dos Reis Araújo. Beliau juga bersama kami ke Jakarta. Keluarga kami tidak diberitahu bahwa kami akan dibawa ke Jakarta. Kami tiba di Jakarta tanggal 6 September 1977.<sup>276</sup>*

Petrus Kanisius Alegria dibawa ke Panti Asuhan Seroja pada bulan April 1977 oleh anggota tentara dari Komando Distrik Militer (Kodim) Aileu. Orang tuanya meninggal sebelum terjadinya invasi dan dia tinggal dengan seorang kakak laki-lakinya di Aileu ketika seorang anggota tentara dari Kodim memberitahu kakak laki-lakinya bahwa mereka mencari anak-anak berumur 10-11 tahun yang orang tuanya sudah mati di hutan untuk dikirim ke Dili untuk disekolahkan.<sup>277</sup> Kakaknya tidak diberi tahu mengenai, dan oleh karena itu ia tidak mengizinkan, Petrus dibawa ke Indonesia.

Anak-anak itu, yang rata-rata berumur 10 tahun dan yang datang dari distrik-distrik bagian barat dan tengah, dikirimkan dengan pesawat angkut militer Hercules.<sup>278</sup> Setibanya di Jakarta mereka dibawa ke tempat-tempat pariwisata seperti Taman Mini (Jakarta Timur) dan menghadiri upacara penyambutan yang dihadiri oleh Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sultan Hamengkubuwono IX. Presiden mengatakan kepada mereka:

*Kalian adalah anak-anak kami, milik negara dan mulai sekarang kami akan bertanggung jawab atas kesejahteraan kalian, mulai makanan, pakaian dan sekolah, termasuk pendidikan selanjutnya, adalah tanggung jawab negara.<sup>279</sup>*

Pengiriman anak-anak ini didukung oleh Yayasan Dharmais, salah satu yayasan Soeharto. Arnaldo dos Reis Araújo, Gubernur Timor Timur, mengirimkan sepucuk surat bertanggalkan 25 Agustus 1977 kepada Yayasan Dharmais.<sup>\*</sup> Ada satu persetujuan yang ditandatangani oleh Dharmais dan Panti Asuhan Santo Thomas di Ungaran (Semarang, Jawa Tengah), bertanggalkan 4 Agustus 1977,<sup>†</sup> yang menyebutkan Dharmais berjanji untuk membiayai makanan, pakaian dan pendidikan anak-anak itu.<sup>‡</sup> Soeharto mengatakan kepada media bahwa yayasannya akan memberikan Rp 150 setiap hari untuk setiap anak. Walaupun ada jaminan seperti itu, menurut Petrus Kanisius Alegria, panti asuhan tersebut tidak menerima dana yang cukup untuk merawat anak-anak itu dengan baik.<sup>280</sup>

1980 - 1989

378. Pada dasawarsa 1980-an praktek tentara membawa anak-anak ke Indonesia masih berlanjut. Banyak dari anak-anak ini adalah anak yatim-piatu atau terpisah dari orang tua mereka. Jumlah anak yatim-piatu di Timor-Leste pada saat itu sangat tinggi; Mário Viegas Carrascalão

<sup>\*</sup> Tembusan surat Gubernur Arnaldo dos Reis Araújo disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial di Jakarta serta Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial di Dili. Juga kepada Kordinator Wilayah (Korwil), Komando Daerah Pertahanan Keamanan (Kodahankam) dan Komandan Komando Resor Militer/Daerah Pertahanan Keamanan (Danrem Dahankam).

<sup>†</sup> Disaksikan oleh Bupati Semarang (Jawa Tengah) Iswanto dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial di Semarang, Kardoyo Karjosoemarto. Dari pihak Panti Asuhan St. Thomas, yang menandatangani adalah Suster Petrona dan Dharmais yang menandatangani adalah Soedardi.

<sup>‡</sup> “Anak-anak diserahkan...supaya mereka mendapat perawatan, pelayanan, pembinaan serta pendidikan yang baik. Biaya makan, pakaian dan pendidikan dari anak-anak tersebut menjadi tanggungan dari Yayasan dan disesuaikan dengan kemampuan serta ketentuan yang berlaku pada Yayasan Dharmais.”

pernah memprakarsai satu penelitian dan mendapatkan jumlah lebih dari 40.000 anak, yang kebanyakan berada di lembaga:

*Masalahnya adalah yang tidak dalam perawatan Misi Katolik. Ini dipergunakan oleh militer. Ada sebagian yang menyukai anak-anak berkulit putih. Mereka suka anak-anak yang berdarah campuran. Anak-anak ini yang mereka bawa ke Indonesia.<sup>281</sup>*

379. Pada dasawarsa 1980-an muncul satu pola baru anak-anak diambil oleh pejabat sipil dan perwira militer tingkat tinggi. Menurut Mário Carrascalão:

*Ketika personil angkatan bersenjata Indonesia kembali ke Indonesia, mereka selalu membawa anak-anak. Semua perwira berpangkat tinggi, seperti [Brigadir Jenderal] C101 [Panglima Kolakops – Komando Pelaksana Operasi 1990-1991] dan [Brigadir Jenderal] Mantiri [Panglima Kolakops 1987-1988] membawa anak-anak pulang dengan mereka.<sup>282</sup>*

380. Mayor Jenderal TNI C103 bertugas sebagai seorang perwira intelijen Kopassus di Timor-Leste pada dasawarsa 1980-an dan kembali pada tahun 1999 sebagai wakil TNI pada Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur. Ia memiliki sekitar 10 orang anak laki-laki yang tinggal di rumahnya di Jakarta. Mereka termasuk saudara-saudara sepupu Mário Freitas dan Hercules, yang orang tuanya terbunuh sewaktu serangan bom di tahun 1978. Mereka bekerja di kebun, membersihkan, dan melakukan tugas jaga. Mário Freitas melarikan diri setelah dipaksa untuk beragama Islam dan selanjutnya dididik oleh pastor-pastor Katolik di Jakarta dan Bali, sementara Hercules menjadi seorang pemimpin satu gerombolan penjahat di Jakarta.<sup>283</sup> C104 juga “mengadopsi” 10 pemuda Timor-Leste.

### **Kasus Thomas da Costa**

Thomas da Costa lahir di Lospalos (Lautém) pada tanggal 3 April 1980. Ketika ABRI menyerang Fretilin di hutan, ayahnya, seorang anggota Fretilin, tertembak mati. Thomas, yang pada waktu itu berumur lima tahun, bersama keluarganya ditangkap oleh tentara Indonesia dan dibawa ke Koramil di Iliomar (Lautém). Para prajurit memisahkan Thomas dari ibunya dan anggota keluarga lainnya dan membawa mereka ke barak Batalyon 745 di Lospalos, di mana ia diserahkan kepada Mayor C105 dari Batalyon 745.

Setelah beberapa hari interogasi, Mayor C105 mulai memberi pekerjaan kepada Thomas seperti mengumpulkan kayu bakar, memasak, mengambil air dan mencuci pakaian. Selama beberapa bulan Thomas tinggal dengan Batalyon 745 sebelum C105 memberi tahu padanya bahwa ia akan mulai bersekolah di sekolah dasar terdekat. Ia bersekolah tetapi tetap bekerja untuk militer.

Pada sekitar tahun 1989, Mayor C105 kembali ke Indonesia dan membawa Thomas bersamanya ke desanya di Bantul (Yogyakarta, Indonesia). Keluarga C105 mengasuh Thomas dan ia bersekolah di sekolah dasar Bantul untuk setahun lagi sebelum kelulusan. Kemudian ia melanjutkan ke sekolah menengah pertama, tetapi pada sekitar waktu itu istri C105 mulai memukuli dan memperlakukannya seperti pembantu. Setelah satu kejadian Thomas dianiaya

<sup>1</sup> Keith Loveard, “Rising 2-Star,” *Asiaweek*, 13 April 1997. Mário Carrascalão mendengar bahwa ketika isteri Prabowo, anak perempuan Presiden, Titiek Soeharto, datang ke Timor-Leste pada awal 1990-an, ia meminta kepada Wakil Gubernur, Brigadir Jenderal A.B. Saridjo, untuk mencarikan seorang anak yang orang tuanya berjuang di gunung-gunung dan tidak dapat mengambil anaknya kembali. Menurut Mário Carrascalão, seorang anak dari Lospalos (Lautém) dikirimkan ke Jakarta, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, walaupun ia mendengar bahwa isteri Prabowo ingin mengembalikan anak itu. Wawancara CAVR dengan Mário Carrascalão, Dili, 12 September 2003.

oleh C105 dan istrinya, mereka membentaknya, “Kamu anak Fretilin! Pulang ke tempatmu sendiri!” Thomas melarikan diri dan menemukan sebuah kapal yang bisa membawanya pulang. Ia tiba di Dili pada tanggal 11 Mei 1988 dan naik bis ke Lospalos di mana ia bertemu kembali dengan keluarganya.<sup>284</sup>

381. Ada beberapa kemungkinan alasan mengapa pejabat sipil dan perwira militer tingkat tinggi mendukung pengiriman anak-anak. “Adopsi” publik anak-anak mungkin dimaksudkan untuk memperkuat kesan bahwa Timor-Leste adalah bagian dari Indonesia. Janji untuk memberikan pengasuhan adalah sebuah gambaran mengenai penegasan Indonesia bahwa Indonesia akan membangun wilayah itu, yang tidak seperti Portugal dan mengenai keyakinan bahwa hal ini akan memperkuat klaim kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste. Tidak diketahui apakah anak-anak tersebut mengalami sesuatu bentuk perbudakan di Indonesia.

#### *Lembaga keagamaan dan pemindahan anak-anak*

382. Pada dasawarsa 1980-an sejumlah lembaga keagamaan Indonesia juga mulai aktif di Timor-Leste. Satu aspek penting mengenai kegiatan mereka adalah pengiriman anak-anak ke berbagai sekolah keagamaan di Indonesia. Salah satu lembaga keagamaan yang paling penting adalah satu badan dakwah yang bernama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Menurut kepala masjid Sultan Alauddin yang berafiliasi DDII di Makassar (Sulawesi Selatan), ada beberapa pendakwah DDII yang bekerja di Timor-Leste sejak tahun 1983. Namun, karena para pendakwah itu tidak bisa melakukan kegiatan mereka dengan bebas, DDII mengatur pengiriman anak-anak dari Timor-Leste ke Makassar antara akhir dasawarsa 1980-an dan awal dasawarsa 1990-an. Ada laporan bahwa pengiriman-pengiriman ini dilaksanakan bekerja sama dengan anggota-anggota “Bimbingan Mental dan Rohani” militer.<sup>285</sup>

383. Pada tahun 1982, Yayasan Kesejahteraan Islam Nasrullah (Yakin), didirikan di tanah yang luas di Culuhun (Dili). Organisasi ini mendirikan sekolah dasar dan sekolah menengah, termasuk satu sekolah teknik menengah dan satu pesantren dengan akomodasi untuk para pelajar dari distrik-distrik. Yakin merekrut pelajar dari keluarga-keluarga miskin di Lautém, Baucau, Viqueque dan Manufahi, yang tidak semuanya Muslim.

384. Antara tahun 1983 dan 1999, Yakin menyelenggarakan pengiriman sebagian dari anak-anak ini, yang mencakup anak-anak yatim-piatu, ke pesantren di Indonesia. Sebagian besar dari mereka berumur 10 tahun atau di atasnya.<sup>286</sup> Salim Sagram, Ketua Yakin, mengatakan kepada seorang peneliti Komisi bahwa Yakin mendapatkan persetujuan resmi dari para orang tua. Tetapi Komisi tidak bisa memverifikasi hal ini karena diberi tahu bahwa semua berkasnya hilang pada tahun 1999.<sup>†</sup> Wawancara-wawancara oleh petugas Komisi dan para peneliti independen dengan para orang tua anak-anak yang dibawa ke Indonesia melalui jaringan Yakin telah gagal untuk menegaskan bahwa para orang tua memang menandatangani formulir persetujuan. Yayasan-yayasan lain yang dilaporkan mengirimkan anak-anak untuk belajar di sekolah-sekolah Muslim adalah Hidayatullah, An-Nur dan Yayasan Lemorai.<sup>287</sup>

385. Anak-anak Timor-Leste yang direkrut oleh organisasi semacam DDII dan Yakin pergi belajar di berbagai lembaga Islam di seluruh Indonesia. Kelompok yang mungkin terbesar adalah kelompok yang ada di Sulawesi Selatan dan Bandung, tetapi ada juga yang bersekolah di

<sup>†</sup> DDII mendirikan Yakin pada tanggal 18 Juli 1981, George J. Aditjondro, “Yayasan-yayasan Suharto: Cakupan, Dampak, dan Pertanggungjawabannya,” 31 Januari 1998, halaman 134, <<http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/4427/mpr.htm>> pada 30 Maret 2005.

<sup>†</sup> “Yakin mencari pelajar menurut kriteria [jumlah, umur dan jenis kelamin] dari lembaga yang meminta di Indonesia. Jika mereka sudah ada di lembaga di Culuhun, Dili, para pelajar tersebut akan dikirimkan; kalau tidak mereka akan mengirimkan seorang perwakilan atau anggota staf ke distrik-distrik untuk memberitahu *ustad*, guru agama di mesjid, mengenai permintaan untuk mendapatkan anak-anak. Dia mengumpulkan mereka dan membawa mereka ke Dili.” Wawancara dengan Salim Sagram sebagaimana dikutip dalam Helene van Klinken, *Islamic Children Educated in Indonesia*, Submisi kepada CAVR, 2003, halaman 5.



wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi), di Jawa Tengah (Salatiga) dan Jawa Timur (Surabaya, Jombang, dan Malang). Seorang peneliti independen memberitahu Komisi bahwa koordinator Mahasiswa Muslim Asal Timor Timur (Mamtim) mengatakan padanya bahwa sangat sulit untuk melacak identitas atau jumlah anak-anak itu karena tidak ada berkas yang disimpan. Anak-anak itu tidak diawasi oleh satu organisasi apapun dan pada kedatangannya di berbagai panti asuhan dan pesantren, nama mereka banyak yang diubah. Yakin dan An-Nur disebutkan mendanai pendidikan mereka, dengan maksud agar setelah mereka lulus mereka kembali ke Timor-Leste untuk menyebarkan agama Islam.<sup>288</sup>

1990-1998

386. Praktek anggota tentara membawa anak-anak ke Indonesia ternyata berlanjut dalam dasawarsa 1990-an. Leonel Guterres ingat bahwa anak-anak dibawa pergi dari Quelicai (Baucau) oleh anggota-anggota tentara pada 1993-1995. Satu kelompok yang terdiri dari 13 orang anak, berumur dari lima sampai 10 tahun, semua berasal dari keluarga miskin. Anggota-anggota tentara bertanya apakah mereka bisa membawa anak mereka, tetapi Leonel mengatakan bahwa menghadapi permintaan seperti itu, tidak ada pilihan lain. Sebagian dari anak-anak ini telah kembali ke rumah mereka di Quelicai.<sup>289</sup>

*Anak-anak yang dibawa oleh lembaga-lembaga keagamaan*

387. Pada dasawarsa 1990-an, jumlah anak-anak yang dipindahkan ke Indonesia dengan sponsor dari lembaga keagamaan meningkat. Sementara pada awal pendudukan Indonesia kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi Islam dibatasi, pada pertengahan dasawarsa 1990-an meningkatnya pengaruh Islam di Indonesia memungkinkan organisasi-organisasi ini untuk beroperasi lebih terbuka di Timor-Leste. Yayasan-yayasan berpusat di Timor-Leste dan organisasi-organisasi nasional meneruskan perekrutan anak-anak untuk belajar di pesantren atau lembaga-lembaga lain di seluruh Indonesia.

388. Sebagian besar, namun tidak semua, dari anak-anak ini berasal dari komunitas yang sudah sejak dulu Muslim atau pun yang baru menjadi Muslim. Sering kali, orang-orang Timor-Leste, yang sudah dibawa ke Indonesia untuk belajar dalam tahun-tahun sebelumnya, kembali ke Timor-Leste setelah lulus dan merekrut pelajar generasi baru. Sebagian pelajar yang didekati dengan cara ini adalah bukan orang Muslim, tetapi melihat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Setelah sampai di Indonesia, mereka diberi nama baru dan didorong untuk bertukar agama. Lembaga-lembaga Muslim juga pergi ke wilayah-wilayah miskin dan terpencil untuk merekrut anak-anak, menjanjikan kepada orang tua bahwa mereka akan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka dan kemudian akan memulangkan mereka.

389. Tampaknya keluarga-keluarga Muslim dan bukan Muslim mengalami kesulitan mempertahankan hubungan dan menjamin kepulangan anak-anak mereka. Ketika seorang pelajar yang telah menyelesaikan pendidikannya di suatu lembaga akan pulang pada tahun 2000, banyak teman yang berasal dari Timor-Leste bertanya kepadanya bagaimana mereka juga bisa kembali ke Timor-Leste. Sebagian besar dari mereka berasal dari Manufahi, Viqueque, Baucau dan Lautém; beberapa tidak tahu siapa orang tua mereka karena mereka dibawa pergi ketika masih sangat kecil.<sup>290</sup>

*Program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Tenaga Kerja*

390. Pada dasawarsa 1990-an, departemen-departemen pemerintah juga melaksanakan program-program di Timor-Leste yang melibatkan pengiriman anak-anak ke Indonesia. Program-program ini seolah-olah diciptakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesempatan kerja bagi pemuda Timor-Leste dan dalam pengertian itu bukan merupakan pelanggaran hak anak. Tetapi, Komisi mendapatkan keterangan bahwa anak-anak dipaksa untuk berpartisipasi dalam program-

program itu, yang merupakan suatu pembatasan terhadap kebebasan bergerak mereka. Lebih jauh, ini menunjukkan bahwa pengiriman paksa anak-anak menjadi kebijakan pemerintah untuk tujuan politik dan keamanan.

391. Program-program Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) kelihatannya bertujuan utama mengurangi banyaknya pemuda yang menganggur yang siap berpartisipasi dalam berbagai demonstrasi atau bentuk-bentuk lain kegiatan politik. Depnaker meluncurkan program pertamanya di tahun 1990, bekerja sama dengan Yayasan Tiara pimpinan Siti Hardiyanti Rukmana, anak Presiden Soeharto, untuk membawa orang-orang muda Timor-Leste bekerja di Indonesia. Anak-anak dikirim untuk bekerja di berbagai pabrik yang terkait dengan keluarga Presiden, seperti pabrik Indocement di Cibinong (Bogor, Jawa Barat), dua pabrik tekstil, Kanindotex di Bawen (Semarang, Jawa Tengah) dan Sritex di Sukoharjo (Solo, Jawa Tengah), serta pabrik kayu Barito Pacific di Kalimantan Timur.<sup>291</sup>

392. Peluncuran program-program ini dilakukan segera setelah adanya keputusan untuk membuka Timor-Leste. Mungkin yang lebih bermakna, peluncuran ini bertepatan dengan awal gelombang demonstrasi, protes dan ketidakpuasan sosial umum yang menjadi ciri berkelanjutan pada dasawarsa terakhir pendudukan Indonesia. Sebagian dari perwujudan ketidakpuasan ini, seperti ketegangan etnis dan keagamaan yang berkejolak di seluruh wilayah pada bulan Januari 1995, jelas terkait dengan kekecewaan yang semakin meningkat pemuda pengangguran Timor-Leste.

393. Sering kali janji mengenai pekerjaan dengan upah yang bagus, yang menarik orang muda untuk datang ke Jawa dan bagian-bagian lain Indonesia, tidak dipenuhi. Satu laporan Asia Watch tahun 1992 mengemukakan bahwa para pemuda yang meninggalkan Timor-Leste sebagai bagian dari program pada umumnya pergi dengan sukarela tetapi:

karena mereka dikelabui mengenai keadaan yang sebenarnya dari pekerjaan dan pelatihan yang akan mereka dapat dan karena mereka tidak mempunyai uang untuk kembali, seluruh proyek ini tidak berbeda dengan kerja paksa.<sup>292</sup>

394. Keterangan-keterangan tangan pertama mengindikasikan bahwa militer sangat terlibat dalam perekrutan para pekerja muda, termasuk memaksa para pemuda untuk bergabung dalam program ini. João da Costa, dari Baucau, saat itu berumur 17 tahun dan terlibat dalam kegiatan bawah tanah ketika seorang kerabatnya yang bertugas dalam militer Indonesia menemukannya untuk bergabung dalam program Depnaker. João da Costa adalah salah seorang dari satu kelompok yang terdiri dari 75 pemuda yang direkrut untuk bekerja di Indonesia pada saat itu. Beberapa anggota kelompok itu berusia lebih muda darinya, semua kecuali lima orang dari mereka adalah lelaki dan hampir semua berasal dari Dili atau Baucau. Militer menyelenggarakan transportasi mereka ke Dili, di mana mereka ditempatkan di akomodasi militer dan kemudian mewawancarai para pemuda itu. João ditanya apakah ia tahu mengenai Fretilin atau apakah ia terlibat dalam demonstrasi Santa Cruz. Mereka juga mendapat pelatihan seperti militer, yang "Fisik, Mental, Disiplin – FMD" dari Batalyon Infantri 744.<sup>293</sup>

395. Saat tiba di tempat tujuannya, Makassar (Sulawesi, Indonesia), João diberi uang saku dan mengikuti kursus tukang bangunan dan praktek kerja yang diselenggarakan oleh Depnaker, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan seperti yang telah dijanjikan. Akhirnya ia mendapatkan pekerjaan tetapi pada bulan Maret 1999 ia kembali ke Timor-Leste berkampanye untuk referendum, bersama dengan sebagian besar orang lainnya di dalam kelompok itu.<sup>294</sup>

1999\*

396. Ada banyak laporan mengenai anak-anak yang dibawa ke Indonesia setelah Konsultasi Rakyat. Sebagian dari kasus-kasus ini terjadi dalam konteks evakuasi anak-anak keluar dari Timor-Leste demi keselamatan anak-anak itu. Panti Asuhan Seroja, misalnya, mengungsikan anak-anak asuhannya pada bulan September 1999 setelah milisi mengambil kendaraan-kendaraan milik Seroja dan mengancam bahwa mereka akan menyerang panti asuhan anak yatim itu dengan granat apabila stafnya tidak mengevakuasi penghuninya.<sup>295</sup> Dengan mengambil jalur jalan yang digunakan oleh orang-orang yang diungsikan dengan paksa dari Dili pada saat itu, 74 anak yang tinggal di Seroja, serta para pegawai dan keluarga mereka, dibawa ke kantor polisi dan kemudian ke pelabuhan Dili untuk selanjutnya diberangkatkan ke Kupang (Indonesia) dengan sebuah kapal. Setelah 10 hari, para pejabat dari kantor pusat Kinderdorp di Bandung (Jawa Barat) menolong mereka untuk pergi ke panti asuhan anak yatim Kinderdorp di Flores (Nusa Tenggara Timur, Indonesia). Pada tanggal 4 November 1999, anak-anak itu diserahkan ke UNHCR, yang membawa mereka kembali ke Timor-Leste. Mereka tinggal di Susteran Carmelita sampai mereka bisa dikembalikan ke keluarga masing-masing. Beberapa anak tidak bisa menemukan keluarga mereka dan tetap tinggal di biara tersebut.<sup>296</sup>

397. Kekacauan pada pekan-pekan sesudah Konsultasi Rakyat menimbulkan suasana yang mendorong pemindahan anak-anak keluar dari Timor Barat. Banyak anak yang terpisah dari keluarga mereka, baik karena orang tua mereka pergi ke bersembunyi atau karena kehilangan mereka di tengah-tengah kekacauan. Banyak yang dilindungi oleh orang-orang yang mengangkat diri sendiri sebagai pelindung. Para orang tua dan pelindung yang hidup dalam kondisi kekurangan serta intimidasi militer dan milisi di kamp-kamp di Timor Barat, mendapatkan bahwa tawaran untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka di luar kamp itu menarik dan mungkin akan cepat-cepat menandatangani persetujuan dengan lembaga yang menawarkan keamanan dan topangan hidup bagi anak-anak mereka. Dalam kondisi seperti itu, tidak bisa dikatakan bahwa orang tua selalu memberikan persetujuan mereka secara bebas atau memahami sepenuhnya konsekuensi dari keputusan mereka.<sup>†</sup> Lebih lanjut, seperti yang digambarkan dalam kasus di bawah ini, kondisi anak-anak ini tidak selalu seperti yang dijanjikan oleh lembaga-lembaga itu.

398. Lembaga Protestan yang bekerja di Timor-Leste di masa pendudukan Indonesia adalah Yayasan Cinta Damai yang beroperasi di Matata, Ermera. Yayasan ini mendekati para orang tua dan meminta agar anak-anak mereka dibawa ke Kupang (Timor Barat, Indonesia) untuk disekolahkan dibawah pengawasan yayasan tersebut. Anak-anak tersebut setibanya di Kupang hanya ditampung sementara di Pante Asuhan Gereja Oebaha, Kupang, sebelum akhirnya diserahkan ke keluarga-keluarga yang akan menjadi keluarga angkat mereka. Karena sering ditelantarkan, sebagian dari anak-anak tersebut kini telah kembali ke orang tua mereka, di Timor-Leste tetapi sebagian masih tetap tinggal di Kupang. Setelah Konsultasi Rakyat, para orang tua dari anak-anak tersebut mengadakan hal ini kepada UNHCR dan Jesuit Refugee Service (JRS) di Kupang.<sup>297</sup>

---

\* Banyak anak yang diambil dari kamp-kamp di Timor Barat dan dikirimkan ke lembaga-lembaga di Indonesia dipisahkan dari orang tua mereka setelah bulan Oktober 1999, akhir dari periode mandat CAVR. Namun, karena pemisahan tersebut terjadi akibat kejadian-kejadian bulan September 1999 dan merupakan kelanjutan dari praktek-praktek yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, bagian ini tidak akan lengkap tanpa sekurangnya pembahasan singkat mengenai praktek ini.

<sup>†</sup> "Sebaliknya, tampak bahwa sebagian orang tua ditekan untuk melepaskan anak mereka tanpa mengetahui konsekuensi penuh dari persetujuan yang dimaksud. Beberapa dipaksa untuk menandatangani selebar formulir persetujuan, menyerahkan hak asuh dan kunjungan orang tua kepada anak-anak mereka. Dalam beberapa kasus, setelah orang tua kembali ke Timor-Leste dan mencari jalan untuk mendapatkan anak mereka kembali, para pengasuh menolak untuk memperkenankan anak-anak itu kembali atau menuntut ganti rugi finansial untuk pengembalian mereka." United Nations High Commissioner for Refugees, Evaluation and Policy Analysis Unit, *Evaluation of UNHCR's repatriation and reintegration programme in East Timor, 1999-2003*, dipersiapkan oleh Chris Dolan, Judith Large, Naoko Obi, UNHCR, Jenewa, 24 Februari 2004, halaman 60.

399. Organisasi-organisasi lain, yang tidak pernah mengirimkan anak-anak dari Timor-Leste, baru menjadi aktif setelah pemungutan suara Konsultasi Rakyat. Yang paling dikenal dari mereka adalah Yayasan Hati, yang mengirimkan sekitar 150 anak dari berbagai kamp di Timor Barat ke Jawa Tengah. Anak-anak itu ditempatkan di lembaga-lembaga Katolik atau di satu lembaga swasta di Wonosari (Jawa Tengah), 45 km di sebelah timur Yogyakarta. Lembaga di Wonosari tersebut didirikan oleh seorang mantan pejabat pemerintah Indonesia, yang pernah bekerja di Dili sebagai kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>298</sup>

400. Keadaan yang kacau seputar pemindahan anak-anak ke Jawa Tengah terus mempergelap harapan mereka untuk bergabung kembali dengan keluarga mereka. Peninggalan pahit penarikan Indonesia dari Timor-Leste semakin memperkeruhnya. Pada bulan November 2000, anak-anak ini menjadi topik dalam satu rapat antar-lembaga yang memberi perhatian pada situasi mereka. JRS menyatakan dalam rapat bahwa dari 118 anak di berbagai lembaga di Jawa Tengah, keluarga dari 83 anak meyakini bahwa anak-anak mereka masih berada di Timor Barat. Banyak yang tinggal di Kamp Tuapukan, Kupang (Nusa Tenggara Timur, Indonesia) dan dianggap bermaksud untuk tetap tinggal di Indonesia. Sebagian besar keluarga ini dilaporkan berasal dari Beobe (Viqueque).<sup>299</sup>

401. UNHCR dan IRC pergi ke Viqueque untuk melacak anggota keluarga dan menemukan bahwa, dalam beberapa kasus, bukan orang tua yang mengatur pengiriman anak-anak itu ke Jawa melainkan para pelindung (termasuk anggota keluarga besar dengan siapa anak-anak itu mungkin akan tinggal seumur hidupnya). Delapan orang tua di Timor-Leste meminta bantuan dari UNHCR untuk mengembalikan anak-anak mereka.<sup>300</sup> Sejumlah anak di Jawa Tengah telah mengatakan bahwa mereka ingin bergabung kembali dengan keluarga mereka setelah menyelesaikan sekolah menengah atas. Beberapa keluarga di Timor Barat sudah mengunjungi anak-anak mereka.

402. Sulit untuk menyatukan kembali para orang tua dengan anak-anak mereka setelah pemindahan mereka dari kamp-kamp karena banyak orang tua yang tidak tahu siapa orang atau lembaga mana yang telah membawa anak-anak mereka. Anak-anak itu dikirimkan ke berbagai tempat di seluruh penjuru kepulauan. Seorang wakil dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Indonesia) memberitahu Komisi bahwa mereka telah menemukan banyak kasus anak-anak yang dibawa oleh orang-orang tidak dikenal dari kamp-kamp di Timor Barat ke Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Palembang (Sumatra Selatan), Denpasar (Bali) dan Sulawesi.<sup>301</sup> dengan janji akan diberi beasiswa, yang kemudian terputus hubungan dengan orang tua mereka.

403. Beberapa kasus menunjukkan bahwa lembaga-lembaga itu dengan sengaja mencegah anak-anak untuk menghubungi orang tua mereka atau kembali ke Timor-Leste. Satu organisasi non-pemerintah yang bekerja di kamp-kamp Timor Barat untuk kepentingan Yayasan Hati melaporkan bahwa wakil-wakil Yayasan Hati dan satu organisasi non-pemerintah lainnya, Geni, pergi ke kamp-kamp dan meminta para orang tua untuk mengirimkan anak-anak mereka ke Jawa Tengah. Di kamp Noelbaki (Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia) dilaporkan bahwa salah satu dari wakil-wakil tersebut menjanjikan kepada para orang tua bahwa pemerintah akan membiayai pendidikan anak-anak mereka sampai ke tingkat universitas dan menempatkan mereka di asrama. Ia juga menjanjikan bahwa anak-anak akan mengunjungi orang tua mereka di kamp setelah tiga tahun. Tidak satu pun dari janji-janji ini disebutkan dalam perjanjian tertulis. Penghubung Yayasan Hati di kamp Tuapukan (Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia) dilaporkan mendesak para orangtua untuk tidak mengirimkan surat kepada anak-anak mereka di Jawa. Sebagian keluarga tidak mengetahui alamat anak-anak mereka.

404. Anak-anak itu dibawa ke Semarang dengan kapal. Organisasi Yayasan Sosial Soegijopranto, bekerja dengan Keuskupan Semarang, memberikan mereka tempat tinggal untuk beberapa hari sebelum menyalurkan mereka ke sejumlah lembaga lokal. Di antara tempat-tempat lain, delapan anak dikirimkan ke Boro (Jawa Tengah), 84 ke Jimbaran (Denpasar, Bali), 21 ke Temanggung (Jawa Tengah), dan yang lainnya ke Wonosari.<sup>302</sup> Menurut Yayasan Hati,

164 anak dikirimkan ke Jawa dalam tiga kelompok pada bulan November 1999, Desember 1999, dan Mei 2001.<sup>303</sup>

405. Ketua Yayasan Hati, Natercia Soares, mengatakan bahwa anak-anak ini adalah anak-anak Indonesia karena ia menganggap integrasi Timor-Leste dengan Indonesia masih sah. Ia mengatakan bahwa:

Sampai sekarang pemerintah belum mencabut UU No. 7/76 yang mengakui Timor Timur sebagai wilayah kedaulatan RI dan secara otomatis mengakui seluruh warga Timor Timur sebagai warga negara Indonesia.<sup>\* 304</sup>

406. Organisasi Al Anshar di Sulawesi Selatan juga menolak memulangkan anak-anak. Dalam perundingan-perundingannya dengan lembaga-lembaga dan para orang tua, lembaga ini terus-menerus mengubah sikapnya mengenai apakah dan dengan syarat apa mereka akan menyerahkan anak-anak itu. Kepulangan dua orang anak dari Al Anshar di Sulawesi memperoleh pemberitaan pers yang sangat kritis di Indonesia dan kepala lembaga ini menuduh UNHCR menculik anak-anak itu dan menuntut lebih dari US\$ 5.000 sebagai "kompensasi."<sup>305</sup>

407. Pada bulan November 1999, satu yayasan di Kalimantan Selatan, Yayasan Tunas Kalimantan, mengirimkan stafnya ke berbagai kamp pengungsi di Timor Barat dan menawarkan pendidikan di Banjar Baru. Sekitar 19 anak dibawa ke Kalimantan Selatan; tiga dari yang lebih tua berhasil kembali ke Atambua sendirian. Mereka dilaporkan dipaksa untuk mempelajari Islam, mengatakan bahwa tidak akan mendapat makanan jika menolak. Semua anak itu memiliki orang tua di Timor Barat atau di Timor-Leste. Seperti di Sulawesi, upaya-upaya untuk mengembalikan anak-anak kadang-kadang digagalkan oleh berubah-ubahnya tuntutan lembaga tersebut.<sup>306</sup>

408. Bahkan ketika anak-anak diberi pilihan apakah akan menetap di Indonesia atau tidak, keputusan mereka mungkin tidak dibuat secara bebas atau tidak mencerminkan keinginan mereka yang sebenarnya. Zacarias Pereira menyaksikan keadaan seperti itu di satu pesantren di Jawa Barat, di mana ia dikirimkan oleh Yayasan Lemorai pada tahun 1999. Setelah tiga tahun, yang sepanjang waktu itu ia beragama Islam, Zacarias bisa menghubungi ayahnya melalui UNHCR. UNHCR membawa ayahnya ke pesantren tersebut untuk menjemputnya. Ia memaparkan kunjungan UNHCR:

*Ayah saya datang ke Bandung dengan UNHCR tanggal 7-11 Oktober 2002...bersama dengan seorang polisi dan seorang pejabat pemerintah. Hasan Basri bertanya: "Siapa yang ingin kembali ke Timor?" Hanya dua anak yang mengangkat tangannya. Di sana ada seorang ibu dan salah satu dari tiga anaknya ingin pulang. Ibu ini, Domingas, adalah kakak dari istri Hasan Basri. Anak-anak yang lain tidak ada yang berani untuk mengangkat tangan. Tetapi kalau orang tua mereka datang untuk menjemput mereka, saya rasa mereka mau pergi.*

*Sebelumnya, Hasan Basri mengatakan kepada saya bahwa walaupun orang tua saya datang untuk menjemput saya, saya sekarang tidak perlu kembali ke Timor, lebih baik saya untuk menyelesaikan [sekolah] dulu. Tapi dia tidak bilang saya jangan pergi. Ketika mobil UNHCR pergi,*

---

<sup>\*</sup> Pada 17 Juli 1976 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU No. 7/1976, menyatakan bahwa Timor Timur adalah provinsi ke-27 Indonesia. Undang-undang ini tidak pernah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 25 Oktober 1999, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1272 membentuk Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste (UNTAET), yang dengan demikian memisahkan Timor-Leste dan Indonesia dengan hukum internasional [lihat juga Bagian 2: Mandat Komisi].

*satu anak lain, Abe dari Ossu [Viqueque], lari dan bersembunyi di jalan keluar. Dia memberhentikan mobil itu dan meminta mereka untuk membawanya pulang...Jadi akhirnya tiga anak yang pulang.<sup>307</sup>*

409. Zacarias menetap di pesantren tersebut bersama dengan 20 anak Timor-Leste lainnya, banyak di antaranya yang berasal dari keluarga besar Basri. Beberapa dari mereka sudah kembali ke Timor-Leste dan beberapa masih di Jawa. Kisah Zacarias menunjukkan bahwa sementara anak-anak secara fisik tidak dilarang untuk pergi, mereka tidak diberi kesempatan untuk membuat keputusan secara pribadi. Kenyataan bahwa seorang anak bersembunyi di luar dan mendekati kendaraan UNHCR menunjukkan adanya tekanan yang kuat untuk tidak pulang.

410. Basri mengatakan kepada seorang wartawan pada bulan September 2002:

*Apapun itu, meskipun mereka datang dengan tanda tangan atau foto orang tua, saya tidak akan menyerahkan mereka...saya tidak akan menyerahkan mereka. Tidak akan meskipun UNHCR datang bersama polisi. Saya tidak akan menyerahkan mereka.<sup>308</sup>*

#### 7.8.4.3. Kondisi anak-anak yang tinggal di Indonesia

411. Keadaan yang dihadapi anak-anak dan kondisi yang mereka alami setelah mereka dikirimkan ke Indonesia berbeda-beda. Anak-anak dikirimkan ke seluruh wilayah di Indonesia, kadang-kadang sendirian dan kadang-kadang dalam kelompok. Sebagian anak dikirimkan ke lembaga negara atau swasta, sebagian ke sekolah atau universitas keagamaan dan sebagian lagi diadopsi oleh keluarga-keluarga sebagai anak atau dijadikan pembantu. Walaupun begitu, ada sejumlah tema yang sama dalam kisah anak-anak itu mengenai pengalaman mereka.

#### **Hilangnya identitas kebudayaan**

412. Sebagian anak-anak yang diambil melaporkan kehilangan perasaan tentang identitas budaya mereka, dalam tingkatan yang berbeda-beda, dengan kehilangan bahasa, diberi nama lain, atau dipaksa untuk menganut agama lain. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang diambil ketika mereka masih bayi tidak pernah diberitahu bahwa mereka adalah orang Timor-Leste. Selama masa jabatannya sebagai Gubernur Timor Timur, Mário Viegas Carrascalão telah mengunjungi kurang lebih 45 anak Timor-Leste yang tinggal di dua lembaga di Bandung: Kinderdorf dan Panti Penyantunan Anak Taruna Negara (PPATN). Mayoritas berasal dari keluarga-keluarga Apodeti. Ia mendapati bahwa anak-anak itu dirawat dengan baik, tetapi jelas bahwa anak-anak itu tidak tahu sama sekali mengenai kebudayaan dan bahasa mereka.<sup>309</sup>

413. Salah satu dari anak-anak itu ingat bahwa sebelum Mário Carrascalão mengunjungi mereka, mereka tidak pernah berbicara tentang Timor-Leste. Setelah kunjungan itu mereka mulai membicarakan mengenai keluarga dan asal mereka. Mário Carrascalão mengambil langkah untuk menyelenggarakan sejumlah kunjungan ke kampung halaman<sup>310</sup> dan akhirnya diselenggarakanlah satu kunjungan ke kampung halaman.

414. Dampak dari kunjungan ke kampung halaman ini diungkapkan oleh seorang anak laki-laki yang dibawa ke Panti Asuhan Seroja di Dili oleh sanak keluarganya ketika ia berumur lima tahun. Ia adalah salah satu dari 10 anak yang dikirimkan ke PPATN di Bandung pada tahun 1979. Ia mengenang:

*Di Bandung saya tinggal di lingkungan yang asing walaupun sebagian besar anak-anak Timor tinggal di satu gedung milik PPATN. Kami tidak pernah berbicara*

*mengenai Timor, kami tidak bisa berbicara dengan bahasa Tetum dan kami tidak pernah mengirim surat ke Timor. Kami dibesarkan sebagai orang Sunda di Jawa. Saya tidak tahu mengapa saya di sana, hanya tahu bahwa ada perang di Timor.*

*Saya merasa senang mendapatkan pendidikan di Bandung tapi dalam hati saya merasa bahwa saya selalu bertanya-tanya siapa diri saya yang sebenarnya. Saya merasa sudah dicuci otak. Akhirnya saya berteman dengan anak-anak dari Timor, tapi saya merasa ketinggalan dan malu berada di sekitar mereka karena saya tidak bisa bahasa Tetun. Seringkali saya harus meninggalkan ruangan, atau lebih sering lagi saya diam. Saya berusaha belajar bahasa dan kebudayaan saya.*

*Hidup tanpa keluarga saya juga sangat sedih bagi saya. Sangat sedih...bahkan sekarang jika saya melihat gambar seorang ibu sedang menggandeng anaknya, air mata menggenang di mata saya. Juga menyedihkan bahwa saya tidak akan pernah merasa dekat dengan keluarga saya.<sup>311</sup>*

415. Setelah meninggalkan panti asuhan pada tahun 1990, seorang anak perempuan mengunjungi Timor-Leste lagi pada tahun 1995 dan 2003, tetapi mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri. Ia masih tinggal di Bandung bersama saudara laki-lakinya, meskipun tiga saudara yang lain yang pergi bersamanya pada tahun 1976 telah pindah kembali ke rumah.<sup>312</sup>

## **Penganiayaan**

416. Komisi mendapatkan sejumlah laporan mengenai anak-anak yang dianiaya oleh orang-orang atau organisasi-organisasi yang mengasuh mereka. Beberapa anak, seperti Alfredo Alves atau Thomas da Costa melaporkan telah dipukuli hingga mereka melarikan diri dari rumah baru mereka. Dalam kasus-kasus lain penganiayaan berlangsung lebih halus.

417. Misalnya, anak-anak yang menjadi "Anak-anak Presiden" mengungkapkan tentang perasaan didiskriminasikan di panti asuhan anak yatim Katolik di Ungaran, tempat mereka tinggal. Walaupun mereka mengatakan mendapat perawatan yang cukup untuk tiga tahun pertama, mereka mulai merasa didiskriminasikan jika dibandingkan dengan anak-anak Indonesia di lembaga itu, yang banyak dari mereka membayar biaya yang besar di sana. Ketika beberapa anak Timor-Leste melarikan diri dan tidak ada reaksi, Petrus dan yang lainnya memprotes kepada Kantor Departemen Sosial setempat, namun tidak menghasilkan apa-apa. Menurut Petrus: "Saya merasa mereka menganggap kehidupan kami tidak ada harganya. Seperti seekor binatang."<sup>313</sup> Pada tahun 1982, anak-anak itu "mogok" selama satu minggu memprotes diskriminasi. Sebagian anak kembali ke Timor-Leste pada tahun 1994. Seorang mahasiswa filsafat yang kuliah di Yogyakarta mengunjungi Ungaran pada tahun 1983 setelah mendengar cerita-cerita tentang protes anak-anak tersebut. Ia mendapati mereka sangat tidak puas dengan keadaan mereka, terutama dengan makanan yang tidak cukup dan bermutu rendah.<sup>314</sup>

418. Menurut Sudirman, yang pernah menjadi bagian dari sekelompok anak yang dikirimkan ke satu pesantren di Makassar (Sulawesi Selatan), banyak anak di pesantren tersebut mengeluhkan tentang pengabaian, pemukulan dan kerinduan pada rumah, serta ingin kembali ke keluarga di Timor-Leste. Ia juga ingat para orang tua yang datang mengunjungi anak mereka, tetapi dilarang membawa mereka pulang.<sup>315</sup>

419. Dalam banyak kasus yang dilaporkan kepada Komisi, apakah ada penganiayaan atau tidak, janji-janji yang diberikan kepada anak-anak dan orang tua mereka tidak ditepati. Kesempatan pendidikan dan pekerjaan tidak terwujud. Anak-anak ditempatkan di lembaga-lembaga dan bukan bersama keluarga atau sebaliknya. Komunikasi antara anak-anak dan orang tua mereka terputus dan anak-anak tidak dikembalikan ke rumah sebagaimana yang telah disepakati.



## **Kisah Alfredo Alves**

*Setelah operasi, kami kembali ke Aileu dan batalyon kami mulai mempersiapkan diri untuk pulang. Saya dan lima orang TBO lainnya...dibawa ke Taibessi di Dili. Kami tidak tahu mengapa kami dibawa ke sana. Suatu hari saya dengar komandan tentara mengatakan bahwa tentara tidak boleh membawa anak kecil ke Indonesia.*

*Setelah beberapa hari, tentara menyiapkan barangnya untuk pulang. C107 [anggota tentara yang dilayani Alfredo] bilang kepada saya, "Kau boleh ikut melihat pelabuhan tetapi sebaiknya kau masuk dalam kotak supaya tidak dilihat oleh polisi." Saya merasa aneh tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai di pelabuhan saya merasa diangkat dan dimasukkan dalam kapal. Kemudian saya berusaha melihat ke luar, ternyata saya sudah berada di atas kapal. Teman lain juga ada di situ dalam kapal itu. Mereka mengatakan bahwa mereka juga disembunyikan di dalam kotak. Tidak lama kemudian tentara mengatakan harus sembunyi, polisi akan datang. Kemudian saya mendengar suara kapal berbunyi dan kapal mulai bergerak.*

*Setengah jam kemudian kami diperbolehkan keluar dari kotak. Kami lihat Dili semakin jauh, saya sangat sedih karena saya tidak pernah bertemu dengan mama sejak saya diambil [oleh tentara] dari halaman sekolah di Maubisse [Ainaro]. Hal ini terjadi sekitar bulan Februari 1980 ketika saya berumur 13 tahun.*

*C107 membawa saya ke kampung orang tuanya di Lamikonga, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara. Orang tua dan keluarga C107 memperlakukan saya seperti budak. Beberapa tahun kemudian C107 menikah dan dia pindah tempat. Saya tinggal dengan mereka. Isteri C107 sangat baik terhadap saya tetapi C107 ingin kembalikan saya kepada orang tuanya.*

*Saya tidak mau tinggal dengan orangtua C107. Saya dengan teman saya dari Timor, Afonso, membuat rencana untuk melarikan diri...Rencana kami gagal, kami ditangkap di pelabuhan. C107 sangat marah dan pukul mata dan muka saya sampai bengkak. Saya kembali ke orangtua C107. Suatu malam saya main ke rumah teman dan tidak pulang tanpa ijin. Sekali lagi saya kena pukulan C107. Malam itu juga saya berangkat dari rumah hanya dengan pakaian yang saya pakai menuju pelabuhan. Di pelabuhan saya mendapat kapal ke Samarinda, Kalimantan. Saya bertemu dengan seorang pekerja di kapal itu yang membayar tiket kapal untuk saya – mungkin orang kasihan pada saya karena muka saya masih bengkak. Akhirnya saya sampai di Samarinda. Ketika itu saya berumur sekitar 16 tahun.*

*Saya bekerja dan belajar di SMP selama hampir dua tahun. Kemudian saya dengar bahwa ada kapal dari Surabaya ke Timor-Leste. Suatu hari saya dengar bahwa ada kapal yang akan berangkat dari Kalimantan ke Surabaya. Saya tinggalkan pekerjaan dan pacar saya dan berangkat menuju Surabaya hanya dengan membawa uang yang saya terima untuk hari itu.*

*Ketika sampai di Surabaya saya mencari kapal ke Timor. Tiba-tiba saya ditangkap pegawai bea dan cukai. Empat hari kemudian saya menghubungi Panglima Kodam di Surabaya. Saya menunggu selama dua hari dan puji Tuhan permohonan saya diterima. Kepada Panglima saya menceritakan semua pengalaman saya. Panglima mau membantu dan memberi surat kepada saya. Saya bawa surat itu ke pelabuhan dan dengan surat itu saya diperlakukan dengan sangat baik.*

*Saya menumpang kapal ke Dili dan gembira sekali ketika tiba. Saya langsung berangkat ke Maubisse. Ketika saya ditanyai tentang surat jalan, saya menunjukkan surat dari Panglima Kodam. Aparat keamanan kaget melihat surat itu. Setelah sampai di Maubisse saya langsung menuju rumah mama saya. Tetapi tidak ada lagi orang yang tinggal di rumah itu. Saya menemui paman saya tetapi dia sudah lupa saya dan menjadi curiga. Tetapi akhirnya seorang teman bernama Tomás ingat saya. Saya sangat gembira dan akhirnya saya dibawa ke rumah mama saya yang ternyata masih hidup.*

*Beberapa lama kemudian, mama saya menyarankan agar saya mencari pekerjaan dengan seorang paman yang tinggal di Dili. Paman ini akhirnya memberi saya pekerjaan sebagai sopir truk. Tahun 1987 saya aktif menjadi anggota klandestin. Saya selalu suka naik kapal di pelabuhan. Lalu saya diberi tugas merusakkan sebuah kapal perang Indonesia. Pada 22 Juli 1995 saya menjadi kapten dan membawa 18 orang naik kapal melarikan diri ke Australia. Inilah satu-satunya kelompok "orang perahu" yang berhasil mencapai Australia. Kelompok berikutnya tertangkap dan sesudah itu tidak ada lagi.<sup>316</sup>*

### 7.8.5. Kesimpulan dan temuan

420. Pertarungan untuk menguasai Timor-Leste sebagian juga dilancarkan dalam pertempuran memperebutkan anak-anaknya. Anak-anak menjadi korban, pelaku, tenaga bantuan dan saksi dalam konflik politik yang berkobar di Timor-Leste sejak tahun 1974. Kewajiban semua pihak untuk menempatkan kepentingan terbaik anak-anak sebagai yang utama telah secara luas diabaikan.

421. Prinsip hukum internasional memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang timbul dari pengakuan atas kerentanan khusus anak-anak. Tanggung jawab semua pihak untuk memenuhi kewajiban mereka melindungi anak-anak sangat mendesak, terutama dalam periode konflik, pada saat ketimpangan perimbangan kekuatan antara anak-anak dan orang dewasa sangat mencolok. Komisi menemukan bahwa semua pihak yang terlibat konflik gagal untuk memenuhi tanggung jawab mereka ini, akan tetapi bentuk pelanggaran yang paling keji dilakukan oleh Indonesia.

422. Indonesia, sebagai kekuasaan negara yang efektif di Timor-Leste, mempunyai kewajiban yang jelas untuk menghormati hak anak. Tanggung jawab ini timbul dari hukum humaniter internasional yang tercantum dalam Konvensi Jenewa IV. Selain kewajiban yang sifatnya khusus, Indonesia mempunyai kewajiban umum untuk melindungi anak-anak dan tidak membahayakan mereka dengan menempatkan mereka dalam keadaan yang berbahaya. Pihak Indonesia gagal dalam memenuhi kewajiban ini yang tampak paling jelas saat mereka memperlakukan anak-anak seperti hak milik sendiri yang bisa dikerahkan ke medan tempur dan pada saat memisahkan anak-anak dari keluarga mereka serta mengirimkan ke Indonesia di mana identitas budaya mereka tidak diakui.

423. Sepanjang masa pendudukan, Indonesia juga terikat oleh standar-standar hak asasi manusia yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Standar-standar ini selalu dilanggar dengan bermacam-macam cara, termasuk merekrut anak-anak untuk membantu angkatan bersenjata, mengabaikan hak hidup anak-anak, kebebasan dan keselamatan diri pribadi, dan hak atas kebebasan hati nurani dan berpendapat. Bahkan setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, Indonesia gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang mengikatnya secara hukum. Secara umum, Indonesia tidak memenuhi kewajibannya untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak-anak ketika mengambil keputusan-keputusan yang ada kaitannya dengan anak-anak dan bila mungkin mempertimbangkan pendapat anak-anak (Pasal 3 (1)). Indonesia juga melanggar banyak dari kewajiban khusus yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan kewajiban mengenai kebebasan berpendapat dan memilih.

#### 7.8.5.1. Anak-anak dalam konflik bersenjata dan gerakan klandestin

424. Anak-anak digunakan oleh semua pihak yang terlibat konflik politik di Timor-Leste dalam sepanjang periode mandat Komisi.

## **Anak-anak yang digunakan militer Indonesia sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO)**

425. Komisi menemukan bahwa:

17. Militer Indonesia merekrut beberapa ribu anak sebagai TBO.
18. TBO direkrut dalam seluruh periode pendudukan tetapi angka perekrutan tertinggi terjadi dalam masa 1976-81 saat operasi militer mencapai puncaknya.
19. ABRI menggunakan berbagai cara untuk merekrut anak-anak sebagai TBO, mulai dari pemaksaan terang-terangan sampai tawaran pemberian sesuatu. Sebagian anak bergabung menjadi TBO secara sukarela. Tetapi dalam suasana yang mendesak pada waktu itu, batas antara perekrutan sukarela dan perekrutan paksa tidak pernah jelas.
20. Militer Indonesia lebih cenderung menggunakan anak-anak sebagai TBO dan secara aktif merekrut anak-anak di bawah umur daripada orang dewasa.
21. Perekrutan anak-anak oleh anggota tentara secara perorangan diketahui pada tingkatan tertinggi struktur militer. Tidak ada upaya untuk mencegah hal ini; justru upaya-upaya untuk mengatur praktek tersebut menunjukkan bahwa hal ini justru diresmikan.
22. Meski diakui secara resmi, TBO bukan anggota angkatan bersenjata dan tidak mendapatkan imbalan seperti anggota tentara pada umumnya, seperti gaji, pangkat atau seragam.
23. TBO anak-anak tidak menerima gaji dari militer Indonesia untuk jasa yang mereka berikan. Meskipun mereka sering menerima makanan dan tempat tinggal, ini bukanlah imbalan yang adil.
24. Tidak ada ketentuan mengenai perlakuan TBO anak-anak oleh prajurit perseorangan.
25. Hubungan antara TBO anak-anak dan prajurit yang mereka layani sama sekali tidak seimbang. Dalam beberapa kasus, prajurit memperlakukan TBO seolah-olah mereka mempunyai hak milik atas anak-anak tersebut. Mereka mengendalikan gerak-gerik, tugas, kondisi hidup dan akhirnya, hidup mati mereka. Kadang-kadang para prajurit ini masih menguasai TBO mereka meskipun tugas mereka sudah selesai; kadang-kadang mereka menyerahkan anak-anak ini kepada prajurit lain; kadang-kadang mereka ditinggalkan begitu saja.
26. TBO anak-anak melakukan tugas-tugas, yang walaupun tidak melibatkan mereka secara langsung dalam pertempuran, tetapi menempatkan mereka dalam bahaya. Paling tidak, kondisi kerja mereka tidak sehat dan telah merusakkan kesempatan belajar mereka. Dalam banyak kasus, kerja yang dilaksanakan TBO anak-anak tidak sesuai dengan kemampuan fisik dan intelektual mereka.
27. Selain perekrutan mereka sebagai TBO, anak-anak juga ditugaskan bersama orang dewasa untuk operasi militer. Dalam kasus Operasi Kikis, bulan Juli-September 1981, di beberapa tempat anak-anak berusia 10 tahun direkrut bersama beribu-ribu orang Timor-Leste untuk mengepung basis-basis Falintil.

426. Berdasarkan temuan-temuan di atas, Komisi yakin bahwa praktek tentara Indonesia menggunakan anak-anak TBO:

- Merupakan satu bentuk perbudakan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap larangan kebiasaan dasar atas perbudakan dan merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa (secara sengaja mengakibatkan kesengsaraan atau luka berat terhadap tubuh atau kesehatan: Konvensi Jenewa IV (Pasal 147) dan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang.
- Merupakan satu bentuk kerja paksa yang melanggar Pasal 51 Konvensi Jenewa IV, yang mengharuskan bahwa, apabila Kekuasaan Pendudukan menggunakan tenaga penduduk sipil dari wilayah yang diduduki, mereka wajib membayar mereka dengan upah yang layak dan “pekerjaan yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan fisik dan intelektual.”

*Anak-anak dalam Falintil dan gerakan klandestin*

427. Komisi menemukan bahwa:

1. Anak-anak di bawah usia 15 tahun menjadi pejuang gerilya bersama Falintil, tetapi jumlahnya tidak banyak.
2. Tidak ada bukti bahwa anak-anak direkrut secara paksa oleh Falintil. Beberapa anak yang pernah direkrut oleh Falintil memberikan kesaksian bahwa mereka sangat berkeinginan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Timor-Leste; beberapa anak lain mengatakan bahwa upaya mereka untuk mendaftar ditolak karena mereka terlalu muda. Ini membedakan anak-anak yang menjadi anggota Falintil dengan tentara anak-anak di bagian-bagian lain dunia yang secara paksa direkrut karena kepatuhan dan kesediaan mereka untuk melakukan kekerasan.
3. Perekrutan anak-anak tampaknya bersifat *ad hoc*, informal dan tidak dikendalikan dari pusat. Sebagian anak meninggalkan rumah mereka untuk bergabung, ada yang secara resmi "direkrut", yang lainnya tinggal bersama masyarakat yang mengungsi ke hutan dan menjadi terlibat karena keberadaan mereka di sana.
4. Perlakuan terhadap anak-anak yang direkrut umumnya baik; meskipun mereka menghadapi perlakuan keras yang sama dengan yang dihadapi orang lain yang direkrut. Kasus-kasus perlakuan kasar biasanya berkaitan dengan pelanggaran prosedur kedisiplinan, konflik dalam tubuh Fretilin atau untuk mencegah menyerahkan diri.
5. Keterlibatan anak-anak ini bukannya tanpa biaya. Selain mereka bisa terbunuh dalam pertempuran, banyak dari orang muda ini juga mengalami kesulitan menyesuaikan diri setelah tugas mereka selesai, termasuk dijadikan sasaran sebagai pendukung kemerdekaan oleh pasukan keamanan Indonesia dan kesulitan menyesuaikan diri kembali pada kehidupan sipil setelah mereka dibebastugaskan.

428. Komisi yakin bahwa:

- Dengan menerima anak-anak di bawah 15 tahun sebagai pejuang gerilya, Falintil melanggar standar hukum humaniter internasional yang diuraikan dalam Protokol Opsional I tahun 1977 Konvensi Jenewa.
- Perekrutan anak-anak berusia 15-17 tahun secara sukarela bukanlah suatu pelanggaran instrumen hak asasi manusia atau hukum humaniter.

429. Komisi menemukan bahwa:

6. Anak-anak merupakan bagian penting dari unsur klandestin dalam Perlawanan terhadap Kekuasaan Pendudukan, baik sebagai *estafeta*, peserta demonstrasi atau memberikan dukungan dalam bentuk lain.
7. Pimpinan Perlawanan merekrut anak-anak dan pemuda ke dalam gerakan klandestin tepat karena sumbangan unik yang bisa mereka berikan.
8. Sangat sedikit bukti bahwa anak-anak terlibat kegiatan klandestin karena dipaksa. Justru pengalaman langsung menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia terhadap diri mereka maupun keluarga dekat mereka sering menjadi pendorong untuk bergabung dengan Perlawanan. Sulit menilai sejauh mana keputusan mereka untuk bergabung dalam kegiatan klandestin merupakan keputusan yang diambil dengan penuh kesadaran. Namun demikian, anak-anak yang sudah cukup umur dan mencapai kematangan mempunyai kebebasan untuk berpendapat dan bertindak sesuai dengan hati nurani mereka.
9. Anak-anak Timor-Leste yang terlibat dalam gerakan klandestin berisiko besar mendapatkan hukuman dari militer Indonesia dan/atau kaki-tangannya. Banyak yang menderita karena keterlibatan mereka.

430. Komisi yakin bahwa:

- Meskipun perekrutan anak-anak dalam gerakan klandestin oleh pelaku non-negara bukan merupakan pelanggaran hukum internasional, hal ini bertentangan dengan standar hak asasi manusia yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus diutamakan.
- Tindakan militer Indonesia yang sangat keras terhadap anak-anak yang terlibat gerakan klandestin merupakan pelanggaran hak setiap orang untuk menikmati kebebasan hati nurani dan berpendapat, yang dalam hubungannya dengan anak-anak tertuang dalam Pasal 12 dan 13 Konvensi Hak Anak.

#### **Anak-anak yang direkrut oleh milisi pro-otonomi pada tahun 1999**

431. Komisi menemukan bahwa:

10. Sejak akhir tahun 1998 anak-anak direkrut menjadi milisi yang menteror Timor-Leste.
11. Hampir semua anak yang direkrut dipaksa bergabung karena anak-anak tersebut atau keluarga mereka diintimidasi. Sebagian anak bergabung secara sukarela, biasanya karena mereka atau keluarga mereka adalah pendukung integrasi dan setuju dengan tujuan milisi.
12. Anggota milisi yang anak-anak terlibat dalam tindakan pelanggaran berat hak asasi manusia termasuk pembunuhan, penyerangan fisik dan pemerkosaan serta dalam tindakan luas perusakan harta-benda.
13. Anak-anak ini hanya sesekali diberi imbalan, berupa uang yang jumlahnya sedikit atau makanan.
14. Indonesia tidak melakukan apapun untuk melindungi anak-anak dari perekrutan paksa menjadi anggota kelompok-kelompok kriminal; kenyataannya, anggota-anggota militer sangat terlibat dalam kegiatan ini.
15. Praktek perekrutan paksa anak-anak untuk menjadi milisi tampaknya, sebagian, dirancang untuk memberikan kesan bahwa sangat banyak pemuda yang fanatik mendukung integrasi dan menarik anak-anak muda ini ke dalam kegiatan-kegiatan kriminal yang menghancurkan hubungan keluarga dan kemasyarakatan yang menjadi menopang gerakan kemerdekaan.
16. Anak-anak yang direkrut biasanya berasal dari kalangan masyarakat Timor-Leste yang paling tidak beruntung, yang menjadi kejam karena partisipasi mereka dalam kekerasan dan karena menyaksikan kekerasan dan mendapatkan stigma berada di pihak yang salah. Ada bukti yang menunjukkan bahwa dari semua anak yang direkrut oleh pihak-pihak yang terlibat konflik selama 25 tahun, anak-anak yang menjadi milisi kemungkinan adalah yang paling mengalami trauma akibat pengalaman mereka.
17. Komisi tidak menemukan bukti bahwa Indonesia telah mengambil langkah untuk memajukan pemulihan fisik dan psikologi serta reintegrasi sosial anak-anak ini.

432. Komisi yakin bahwa:

- Memaksa seorang anak untuk bergabung dalam milisi dan memaksanya untuk melakukan tindak kriminal, yang kadang-kadang korbannya adalah warga masyarakatnya sendiri, merupakan perlakuan tidak berperikemanusiaan dan/atau menyebabkan penderitaan besar atau luka yang berat terhadap tubuh dan kesehatan anak-anak yang bersangkutan. Ini adalah pelanggaran Pasal 147 Konvensi Jenewa IV dan hukum dan kebiasaan perang. Ini juga merupakan satu pelanggaran terhadap kewajiban hak asasi manusia Indonesia berdasarkan Pasal 38 Konvensi Hak Anak untuk menjamin penghormatan pada ketentuan-ketentuan khusus tentang anak dalam hukum humaniter internasional.
- Menggunakan anak-anak untuk mencapai tujuan politik merupakan suatu bentuk eksploitasi. Karena itu Indonesia melanggar hak anak-anak tersebut untuk mendapat perlindungan dari eksploitasi agar kesejahteraan mereka terjamin – yang bertentangan dengan Pasal 36 Konvensi Hak Anak.
- Indonesia telah gagal memenuhi kewajibannya untuk mengambil semua langkah untuk memulihkan kesehatan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial anak-anak ini sesuai dengan Pasal 39 Konvensi Hak Anak.

### **Perlakuan tidak berperikemanusiaan terhadap anak-anak**

#### *Penahanan sewenang-wenang*

433. Komisi menemukan bahwa:

18. Anak-anak menjadi korban penahanan sewenang-wenang hampir dalam seluruh masa mandat Komisi. Anggota UDT menahan anak sewenang-wenang selama periode konflik partai. Anggota Fretilin juga melakukan penahanan sewenang-wenang selama periode ini dan beberapa tahun setelah invasi Indonesia. Pasukan keamanan Indonesia melakukan penahanan sewenang-wenang terhadap anak-anak dalam skala yang jauh lebih besar. Perlakuan terhadap mereka selama dalam penahanan mengandung pelanggaran sistematis dalam seluruh 25 tahun periode pendudukan.
19. Selama masa pendudukan, aparat pemerintah Indonesia menahan anak secara sewenang-wenang dan bertanggung jawab atas pelanggaran yang luas dan sistematis hak anak dalam tahanan. Dari tahun 1975 sampai 1999 anak-anak diikat, dipukuli, ditendang, diperkosa, disetrum, disundut dengan rokok, direndam dalam air, dimasukkan dalam sel gelap, diancam dibunuh dan diteror oleh anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia. Sejumlah anak meninggal karena perlakuan ini. Komisi tidak menemukan kasus pelaku pelanggaran ini diberi hukuman atau dikenai tindakan disipliner.
20. Pada tahun-tahun awal setelah invasi, anak-anak ditahan dalam skala besar setelah mereka ditangkap atau menyerah dan mereka dikirim ke “kamp pemukiman.” Makanan, tempat tinggal dan pelayanan kesehatan yang mereka terima sangat tidak memadai dan mereka tidak bisa bergerak bebas dan hal ini membatasi kemampuan mereka dan keluarga mereka untuk mendapatkan makanan yang diperlukan untuk menambah jatah yang mereka terima yang jumlahnya sedikit. Anak-anak kadang-kadang juga ditahan di tempat penahanan resmi dan fasilitas militer setelah mereka menyerah atau tertangkap. Anak-anak juga merupakan bagian yang cukup besar dari orang-orang yang ditahanan di pulau Atauro antara tahun 1980 dan 1986, baik bersama anggota keluarga mereka atau terpisah dari mereka. Beberapa ribu anak meninggal dunia karena kondisi yang sangat keras di kamp-kamp pemukiman di Atauro.
21. Sebab penahanan anak-anak oleh militer Indonesia serupa dengan penahanan orang dewasa: keterlibatan mereka dalam kegiatan klandestin, untuk mematahkan dukungan kepada anggota Falintil dan untuk mendapatkan informasi mengenai Falintil atau gerakan klandestin. Anak-anak juga ditahan karena kegiatan orang tua mereka atau anggota keluarga yang lain.



22. Mahasiswa dan anak-anak sekolah menjadi sasaran penangkapan dan penahanan ketika demonstrasi terbuka mulai diselenggarakan pada dasawarsa 1990-an. Pihak berwenang Indonesia menahan anak-anak pada saat dan sesudah terjadinya demonstrasi dan kadang-kadang untuk mencegah terjadinya demonstrasi. Banyak tahanan anak yang menjadi sasaran pelanggaran, termasuk penyiksaan. Anak-anak juga ditangkap dan ditahan oleh anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia dan milisi kaki-tangan mereka selama kekerasan yang terjadi di seputar Konsultasi Rakyat tahun 1999. Kadang-kadang penahanan ini dipergunakan untuk memaksa anak-anak bergabung dalam milisi.
  23. Setelah gerakan bersenjata UDT tanggal 11 Agustus 1975, anak-anak ada di antara orang-orang yang ditawan UDT di tempat-tempat yang dikhususkan untuk tujuan itu. Komisi tidak mendapatkan bukti tentang penyiksaan atau perlakuan kejam lainnya yang dilakukan oleh UDT terhadap tahanan anak-anak.
  24. Selama masa konflik partai, anak-anak termasuk dalam kelompok orang yang ditahan sewenang-wenang oleh anggota-anggota Fretilin, karena mereka atau anggota keluarga mereka diyakini berafiliasi dengan partai politik lawan. Penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap tahanan anak-anak dilakukan oleh Fretilin, tetapi tidak meluas atau dilakukan secara sistematis.
  25. Setelah invasi Indonesia, Fretilin melakukan penahanan anak-anak secara sewenang-wenang, tetapi kebanyakan karena bersamaan dengan penahanan orang dewasa. Meskipun demikian, ada juga kasus anak-anak yang ditangkap sebagai pengganti sanak-saudara yang menjadi anggota partai lain yang berada di wilayah yang tidak dikuasai oleh Fretilin dan yang ditangkap karena tuduhan melanggar disiplin. Meskipun terbukti bahwa ada "surat penangkapan" dalam beberapa kasus, penangkapan, penyiksaan, pengabaian proses hukum dan penggunaan anak sebagai sandera yang sering terjadi selanjutnya, tidak mempunyai dasar hukum.
434. Komisi yakin bahwa:

- Penahanan anak-anak oleh anggota pasukan keamanan Indonesia melibatkan pelanggaran berganda dan berulang terhadap hukum Indonesia, standar hak asasi manusia dan hukum internasional. Penangkapan biasanya dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai wewenang resmi untuk melakukan penangkapan menurut hukum Indonesia.
- Penyiksaan dan perlakuan tidak layak yang luas yang menyebabkan penderitaan besar atau luka yang berat terhadap tubuh maupun kesehatan merupakan pelanggaran berat Konvensi Jenewa IV (Pasal 147) yang berlaku untuk Indonesia sebagai hukum kebiasaan dan hukum perjanjian.
- Tidak memberikan makanan dan obat-obatan yang memadai kepada anak-anak yang ditahan merupakan pelanggaran Pasal 55 Konvensi Jenewa IV.
- Tidak memperbolehkan pengiriman yang bebas bahan makanan, obat-obatan dan pakaian yang ditujukan kepada anak-anak di bawah 15 tahun merupakan pelanggaran Pasal 23 Konvensi Jenewa IV.
- Tidak memberi penjelasan kepada tahanan anak-anak tentang hak dan sebab penahanan mereka merupakan pelanggaran Pasal 71 Konvensi Jenewa IV.
- Indonesia melanggar kewajiban khususnya menurut Konvensi Hak Anak, yang diratifikasinya pada tahun 1990, terutama Pasal 37, yang menetapkan kewajiban untuk menjamin agar tidak seorang anakpun direnggut kebebasannya secara tidak sah dan agar penangkapan, penahanan dan pemenjaraan anak harus sesuai dengan hukum serta hanya dilakukan sebagai tindakan terakhir dan hanya untuk jangka waktu sependek mungkin.
- Tindakan anggota-anggota UDT dan Fretilin dalam masa konflik partai melanggar standar hak asasi manusia, hukum Portugis yang berlaku dan hukum internasional. Menurut hukum Portugis, tidak ada satu anggota dari partai manapun yang mempunyai kewenangan hukum untuk menangkap, menahan, menyerang atau memperlakukan seseorang secara tidak layak.
- Anggota-anggota kedua partai melalaikan kewajiban mereka berdasarkan Pasal 3 Konvensi-Konvensi Jenewa, yang melarang kekerasan terhadap kehidupan dan manusia dan pelecehan terhadap martabat pribadi, seperti perlakuan yang menghinakan atau merendahkan orang dan mengambil sandera.
- Penyiksaan, penahanan secara tidak sah dan penggunaan anak-anak sebagai sandera oleh Fretilin dalam periode setelah invasi Indonesia merupakan pelanggaran berat Konvensi Jenewa IV.

*Pembunuhan sewenang-wenang terhadap anak-anak*

435. Komisi menemukan bahwa:

26. Kegagalan semua pihak untuk membedakan orang sipil dari penempur juga meluas pada anak-anak. Anak-anak umumnya dibunuh karena sebab yang sama dengan orang dewasa dan sering dibunuh bersama orang dewasa. Oleh karena itu buktinya tidak mencukupi untuk menyebutkan bahwa anak-anak secara khusus dijadikan sasaran. Pada saat yang sama, anak-anak juga tidak mendapat perlindungan atau diperlakukan secara khusus dalam kekerasan yang terjadi selama konflik politik.
27. Anak-anak dibunuh dalam konteks yang berbeda-beda, termasuk dalam konflik bersenjata terbuka, dalam pembantaian massal, dalam tahanan dan dalam eksekusi cepat. Pada tahun-tahun awal konflik banyak anak terbunuh bersama keluarga mereka dalam operasi militer atau saat mereka terperangkap di wilayah yang diperebutkan. Pada tahun-tahun belakangan, korban di bawah umur cenderung remaja yang menjadi sasaran karena dicurigai terlibat kegiatan pro-kemerdekaan.

28. Dalam periode konflik bersenjata internal, anak-anak dibunuh oleh Fretilin dan UDT. Mereka dibunuh dalam tahanan, karena afiliasi politik mereka sendiri atau afiliasi politik keluarga mereka. Kebanyakan mereka dibunuh dalam kelompok bukannya sendiri-sendiri dan bersama anggota keluarga mereka.
  29. Angkatan bersenjata dan agen-agen Indonesia membunuh anak-anak selama periode 1975-79 sebagai bagian dari kampanye lebih luas Indonesia untuk menguasai Timor-Leste. Indonesia tidak membedakan anak-anak dengan orang dewasa. Anak-anak yang sedang keluar mencari makan, baik sendiri maupun bersama orang dewasa, berisiko ditembak oleh anggota-anggota ABRI atau Hansip. Kelompok-kelompok orang sipil tidak bersenjata, termasuk anak-anak, yang tinggal di luar kamp pemukiman yang dikontrol Indonesia bisa saja dieksekusi secara acak.
  30. Sejak tahun 1980, anak-anak dibunuh ketika ABRI melakukan pembalasan secara besar-besaran dan tanpa pandang bulu sebagai balasan atas serangan-serangan pejuang Perlawanan. Anak-anak termasuk yang menjadi korban terbunuh dalam penumpasan besar-besaran yang terjadi setelah penyerangan oleh Falintil terhadap Dili pada bulan Juni 1980, terhadap Koramil Mauchiga pada bulan Agustus 1982 dan terhadap kesatuan Zeni di Kraras pada bulan Agustus 1983. Dalam kasus-kasus tersebut, anak-anak dibunuh dalam penyerangan membabi buta terhadap kelompok-kelompok penduduk sipil dan karena mereka sendiri dicurigai memberikan dukungan kepada Falintil.
  31. Pada tahun 1999, anak-anak dibunuh dalam operasi-operasi pencarian anggota klandestin atau Falintil, dalam penyerangan milisi untuk menghukum kampung-kampung yang mendukung atau membantu Perlawanan atau sebagai bagian pembunuhan massal setelah pengumuman hasil pemungutan suara atau saat keluar mencari makan. Anak-anak menjadi sasaran yang mudah saat terjadi penyerangan di tempat-tempat penampungan pengungsi. Menurut laporan, pelakunya adalah anggota milisi yang terkait dengan militer Indonesia atau anggota TNI sendiri.
436. Komisi yakin bahwa:

- Pembunuhan anak-anak merupakan pelanggaran hak mereka untuk hidup, yang merupakan salah satu hak asasi manusia paling dasar. Dalam banyak kasus, mereka mati akibat tindakan di luar hukum yang bisa dianggap sebagai tindak kejahatan perang, yang merupakan pelanggaran hukum dan kebiasaan perang atau pelanggaran berat Konvensi-Konvensi Jenewa 1949.
- Pembunuhan anak-anak oleh UDT dan Fretilin merupakan pelanggaran terhadap hukum Portugal, yang tidak memberikan wewenang kepada partai manapun, sebagai pelaku non-negara, untuk mencabut nyawa orang, apalagi anak-anak, dalam keadaan apapun.
- Pembunuhan anak-anak sipil dalam periode konflik internal bersenjata merupakan pelanggaran Pasal Bersama 3 Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949, yang secara jelas melarang pihak-pihak untuk membunuh orang yang tidak ambil bagian aktif dalam permusuhan.
- Setelah konflik internal berubah menjadi konflik internasional, ketentuan-ketentuan yang mengatur konflik bersenjata internasional berlaku di Timor-Leste untuk mengatur perilaku UDT, Fretilin dan Indonesia. Perlindungan yang diberikan kepada anak-anak berdasarkan Hukum Internasional mengenai Konflik Bersenjata lebih luas, namun perlindungan untuk mereka dalam kaitannya dengan hak untuk hidup sama dengan perlindungan untuk orang sipil dewasa.
- Pembunuhan anak-anak sipil oleh militer Indonesia atau kaki-tangannya selama periode konflik bersenjata internasional merupakan tindak kejahatan perang menurut hukum dan kebiasaan perang serta Konvensi Jenewa IV.
- Anak-anak yang dibunuh karena hubungan mereka dengan gerakan klandestin atau dalam tindakan pencarian pejuang Perlawanan juga adalah penduduk sipil tidak bersenjata yang tidak terlibat konflik militer. Pembunuhan semacam itu dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan perang biasa, yang melanggar hukum dan kebiasaan perang serta Konvensi Jenewa IV.

*Kekerasan seksual terhadap anak-anak*

437. Komisi menemukan bahwa:

32. Pasukan keamanan Indonesia, orang Timor-Leste kaki-tangan mereka dan orang lainnya yang mempunyai wewenang telah menggunakan kekerasan seksual terhadap anak-anak secara strategis maupun untuk memanfaatkan kesempatan, dalam sepanjang masa pendudukan.
33. Kekerasan seksual strategis digunakan untuk menegakkan kontrol melalui teror, baik sebagai bentuk hukuman terhadap korban, sebagai upaya untuk mendapatkan informasi atau untuk tujuan lebih luas merusak hubungan keluarga.
34. Skala kekerasan seksual memanfaatkan kesempatan mencerminkan suatu suasana impunitas yang meluas dari pejabat tinggi militer sampai orang Timor-Leste kaki-tangan mereka dan orang sipil yang mempunyai kedudukan berwenang.
35. Kekerasan seksual terhadap anak perempuan tampaknya sering didorong oleh keinginan untuk menghukum anggota keluarga yang terlibat dalam kegiatan perlawanan.
36. Anak perempuan maupun perempuan dewasa menjadi sasaran kekerasan seksual yang sama selama periode mandat Komisi. Kedua golongan itu sangat berisiko terutama di kamp pemukiman atau ketika ditahan oleh pihak berwenang Indonesia.
37. Setelah terjadi pelanggaran seksual, anak-anak perempuan menjadi rentan terhadap eksploitasi berkepanjangan, yang mengarah pada perbudakan seksual untuk waktu yang lama atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual yang berulang.

38. Praktek kekerasan seksual terhadap anak-anak, dalam banyak kasus, dilakukan secara terbuka tanpa takut akan adanya sanksi baik oleh anggota militer berpangkat rendah maupun perwira atasan mereka, serta orang-orang yang mempunyai wewenang sipil seperti kepala desa, polisi dan guru.
  39. Kebanyakan kasus kekerasan seksual yang dipelajari oleh Komisi terjadi di dalam tahanan militer atau di kompleks militer atau tempat-tempat lain yang bisa dianggap resmi.
  40. Meskipun pejabat senior pemerintah sipil Indonesia jelas mengetahui bahwa tindakan-tindakan tersebut melanggar hukum, Komisi menemukan bahwa hanya ada satu kasus seorang pegawai pemerintah dihukum atas tindakannya. Penting dicatat bahwa kasus ini melibatkan seorang anggota Hansip berpangkat rendah.
438. Komisi yakin bahwa:

- Berdasarkan sifat kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak dan impunitas yang dinikmati para pelaku, maka bisa disimpulkan bahwa di Timor-Leste ada suatu keadaan dalam mana kekerasan seksual diperbolehkan, bahkan dianjurkan.
- Pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual berat adalah penyerangan yang menghancurkan keamanan seseorang; tindakan-tindakan tersebut juga merupakan perlakuan keji yang tidak berperikemanusiaan dan merendahkan martabat, yang dalam keadaan tertentu bisa digolongkan sebagai penyiksaan. Kejahatan-kejahatan yang mengerikan ini semakin diperparah ketika dilakukan terhadap anak-anak, yang karena kerentanannya membutuhkan perlindungan khusus. Prinsip-prinsip ini secara universal tercantum dalam hukum internasional serta hukum Indonesia (KUHP Bab XIV).
- Beberapa kasus kekerasan seksual yang diteliti oleh Komisi merupakan perlakuan kasar, yang tidak berperikemanusiaan dan merendahkan martabat atau penyiksaan. Penyiksaan dalam keadaan yang telah dijelaskan di atas merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa dan pelanggaran hukum dan kebiasaan perang, serta pelanggaran terhadap larangan penyiksaan.
- Dalam keadaan Timor-Leste yang diinvasi dan diduduki, banyak tindak kekerasan seksual terhadap anak-anak, termasuk pemerkosaan, merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa (Pasal 147 Konvensi Jenewa IV untuk orang sipil) karena menyebabkan penderitaan besar atau luka berat pada tubuh maupun kesehatan, atau karena merupakan tindakan tidak berperikemanusiaan.
- Tindakan-tindakan ini merupakan pelanggaran hukum dan kebiasaan perang, karena memperlakukan orang sipil secara tidak layak dan penghinaan terhadap martabat dan kehormatan pribadi (Pasal Bersama 3 dan Pasal 76 (1) dari Peraturan Tambahan Konvensi Den Haag IV).
- Perbudakan seksual dan praktek-praktek menyerupai perbudakan lainnya, seperti pemaksaan memberikan pelayanan seksual, yang dilakukan terhadap anak-anak sipil merupakan pelanggaran Pasal 27 Konvensi Jenewa IV dan merupakan pelanggaran berat terhadap konvensi ini (Pasal 147). Praktek-praktek ini melibatkan pelanggaran berganda standar-standar hak asasi manusia yang mencakup pengurangan secara tidak sah, menimbulkan penderitaan besar atau luka berat terhadap tubuh maupun kesehatan, penyiksaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan.
- Karena hampir semua tindak kekerasan seksual yang diteliti oleh Komisi dilakukan oleh pejabat atau petugas-petugas Kekuasaan Pendudukan, Indonesia bertanggungjawab atas penderitaan yang mereka alami (Pasal 29 dan 32, Konvensi Jenewa IV).
- Indonesia gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan kebiasaan dan perjanjian seperti menurut Konvensi Jenewa untuk melindungi anak-anak sipil dari kekerasan seksual dan melakukan tindakan-tindakan untuk menyelidiki, mengajukan ke pengadilan dan menghukum para pelaku perseorangan pelanggaran berat (Pasal 146, Konvensi Jenewa IV).
- Setelah bulan September 1990, Indonesia gagal memenuhi kewajibannya menurut Konvensi Hak Anak untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual (Pasal 34).
- Setelah bulan September 1990, Indonesia gagal memenuhi kewajibannya menurut Konvensi Hak Anak untuk membantu pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial anak-anak korban kekerasan seksual (Pasal 39).

*Pemindahan anak-anak ke Indonesia*

439. Komisi menemukan bahwa:

41. Anak-anak Timor-Leste banyak dipindahkan dari keluarga mereka dan dari tanah air mereka ke Indonesia sepanjang masa pendudukan.
42. Pemandahan anak-anak ke Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, mulai penculikan oleh prajurit secara perorangan sampai program pendidikan yang dibiayai pemerintah.
43. Walaupun tingkat pemaksaan yang dilakukan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga dalam menghasilkan pemindahan anak berbeda-beda, hampir selalu ada unsur paksaan dan kadang-kadang, penggunaan kekerasan secara terbuka.
44. Pada tahun-tahun awal pendudukan, prajurit-prajurit reguler adalah pelaku utama pemindahan anak-anak Timor-Leste. Seperti dalam kasus TBO anak-anak (yang sebagian dibawa ke Indonesia oleh prajurit yang mereka layani pada akhir masa tugas mereka), anak-anak yang dibawa ke Indonesia banyak diperlakukan sebagai barang milik yang bisa dipindah paksa, dikemas dalam kotak dan diharuskan untuk melakukan kerja kasar untuk keluarga di mana mereka tinggal.
45. Lembaga-lembaga, termasuk rumah sakit dan Panti Asuhan Seroja melancarkan pemindahan anak-anak oleh prajurit tentara Indonesia. Meskipun petugas-petugasnya secara pribadi menyatakan kepada Komisi bahwa mereka mengkhawatirkan prosesnya, tidak ada bukti bahwa lembaga-lembaga ini menolak ambil bagian.
46. Lembaga-lembaga keagamaan juga terlibat secara langsung dalam pemindahan anak keluar Timor-Leste. Meskipun Komisi mengakui bahwa pemindahan-pemindahan ini dianggap sebagai kegiatan amal oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan, tetapi jelas bahwa anak-anak tersebut serta orang tua mereka tidak diberi cukup informasi.
47. Upaya-upaya untuk mengatur praktek ini baru dilakukan pada awal dasawarsa 1980-an tetapi Komisi mempunyai sedikit bukti bahwa peraturan diikuti atau bahwa ada pengawasan mengenai pelaksanaannya. Bila orang tua dari anak dimintai persetujuan, mereka kebanyakan tidak diberi informasi yang lengkap atau bahkan dibohongi. Lebih jauh, ada kasus-kasus "persetujuan" paksa yang diberikan di bawah ancaman kekerasan.
48. Anak-anak Timor-Leste yang dibawa ke Indonesia pada usia muda mengalami kehilangan identitas budaya mereka, yang menimbulkan penderitaan besar pada anak-anak dan keluarga mereka. Dalam banyak kasus, hal ini merupakan akibat dari kebijakan lembaga keagamaan yang terlibat, keputusan orang yang dipercaya untuk menjaga anak-anak itu, atau semata-mata akibat dari tercerabutnya anak-anak itu dari akar budaya mereka karena jarak yang jauh dari tanah asal mereka.
49. Komisi tidak pernah mendapatkan keterangan tentang adanya upaya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak Timor-Leste oleh orang-orang dari kebangsaan, bahasa, atau agama yang sama. Sebaliknya, Komisi menemukan banyak kasus dalam mana dilakukan upaya terang-terangan untuk mengubah agama anak-anak atau cara-cara lain untuk menjadikan mereka lebih Indonesia.
50. Tidak ada bukti yang cukup untuk menentukan apakah pemindahan besar-besaran anak-anak Timor-Leste merupakan kebijakan resmi pemerintah Indonesia atau kebijakan militer Indonesia. Akan tetapi ada bukti cukup yang jelas tentang keterlibatan pejabat tinggi dalam beberapa kasus, termasuk keterlibatan Presiden Soeharto dan keluarganya.
51. Pemerintah Indonesia tidak benar-benar mengupayakan pengaturan praktek-praktek pemindahan anak-anak dengan melembagakan kebijakan adopsi di bawah tanggung jawab badan yang berwenang sesuai hukum yang berlaku.
52. Hanya ada sedikit bukti bahwa pemerintah Indonesia melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajibannya sesuai hukum internasional mengenai pemeliharaan anak-anak Timor-Leste oleh orang-orang yang bukan anggota keluarga mereka atau di lembaga-lembaga, pemindahan mereka ke Indonesia atau kondisi mereka ditempatkan.
53. Menurunnya jumlah anak-anak yang diculik setelah tahun 1981 tampaknya berkaitan dengan perubahan situasi militer dan normalisasi pendudukan dan bukan karena efektivitas tindakan-tindakan yang dijalankan oleh pihak berwenang Indonesia.

54. Komisi menemukan bahwa program-program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Tenaga Kerja yang mengirimkan anak-anak Timor-Leste ke Indonesia untuk belajar atau bekerja dilandasi oleh motivasi politik dan keamanan. Motivasi ini mencakup menumbuhkan komitmen pada integrasi dengan Indonesia dan mengeluarkan calon pembuat kerusuhan dari Timor-Leste.
  55. Bahkan jika pemindahan tersebut dilandasi sebagian oleh pertimbangan kemanusiaan atau jika ada persetujuan orang tua, tidak banyak upaya dilakukan untuk menjamin anak-anak bisa menghubungi keluarga mereka atau untuk menjamin agar anak-anak mempunyai kebebasan memilih tetap tinggal di Indonesia atau pulang ke Timor-Leste. Komisi menerima banyak laporan mengenai anak-anak yang dipindahkan dan tidak pernah bertemu keluarga mereka lagi, serta orang-orang yang dipindahkan sewaktu masih kecil dan kembali setelah dewasa tidak bisa menemukan keluarga bahkan distrik asal mereka. Kesaksian-kesaksian yang diberikan kepada Komisi mengungkapkan bahwa orang tua yang berusaha menelusuri keberadaan anak mereka sering dihalang-halangi oleh pejabat Indonesia.
440. Komisi yakin bahwa:



- Penculikan anak-anak Timor-Leste oleh anggota tentara merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia (KUHP Bab XVIII tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang), serta melalaikan kewajiban Kekuasaan Pendudukan untuk menghormati hak keluarga dan untuk tidak mengintimidasi orang sipil (Pasal 27 dan 23 Konvensi Jenewa IV).
- Pemisahan seorang anak dari identitas, budaya, etnisitas, agama atau bahasanya merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa IV karena hal ini merupakan perlakuan tidak berperikemanusiaan atau menyebabkan penderitaan besar bagi anak-anak.
- Pemaksaan budaya asing adalah pelanggaran hukum hak asasi manusia yang mewajibkan pemerintah Indonesia untuk menghargai hak anak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama.
- Kegagalan pemerintah Indonesia untuk menjamin agar status pribadi anak-anak tidak diubah oleh para prajuritnya atau lembaga-lembaganya merupakan pelanggaran kewajibannya menurut Konvensi Jenewa IV (Pasal 50).
- Kegagalan Indonesia untuk menjamin diberikannya pendidikan, sebanyak mungkin, oleh orang-orang yang berasal dari kebangsaan, bahasa dan agama yang sama merupakan pelanggaran Konvensi Jenewa IV (Pasal 50).
- Kegagalan Indonesia untuk mengatur dengan memadai praktek pemindahan anak-anak merupakan pelanggaran terhadap kewajibannya menurut Pasal 21 Konvensi Jenewa IV.
- Kegagalan Indonesia untuk mencegah pemindahan secara tidak sah anak-anak Timor-Leste keluar merupakan satu pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa IV (Pasal 11) dan kegagalannya untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak merupakan satu pelanggaran terhadap kewajibannya menurut Pasal 29.
- Indonesia tidak melakukan tindakan yang memadai sebagai Kekuasaan Pendudukan untuk memenuhi kewajibannya kepada anak-anak Timor-Leste sesuai Konvensi Jenewa IV untuk mengungsikan anak-anak dari wilayah konflik (Pasal 17), mengambil segala langkah yang diperlukan untuk menjamin anggota-anggota dari keluarga yang sama tidak terpisah (Pasal 49), menjamin anak-anak dipersatukan kembali dengan keluarga mereka atau ditempatkan pada keluarga atau teman, atau menjamin anak-anak tersebut diidentifikasi dan keluarga mereka didaftar (Pasal 50). Tidak ada upaya untuk menjamin bahwa penempatan anak-anak di lembaga adalah tindakan yang terakhir. Kegagalan untuk mempertemukan keluarga yang terpisah setelah tahun 1990, merupakan satu pelanggaran terhadap Konvensi Hak Anak.
- Memaksa para pelajar dari Timor-Leste untuk bersumpah menerima integrasi dengan Indonesia melanggar Pasal 45 Peraturan Tambahan Konvensi Den Haag IV yang melarang membuat penduduk suatu wilayah pendudukan untuk menyatakan sumpah kesetiaan kepada Kekuasaan Pendudukan.
- Tindakan Indonesia memaksa semua orang di bawah usia 18 tahun untuk bekerja, atau memaksa penduduk sipil dari wilayah pendudukan untuk bekerja di luar wilayah pendudukan adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum (Pasal 51, Konvensi Jenewa IV).

---

<sup>1</sup> *International Convention Concerning the Laws and Customs of War on Land* [Konvensi Internasional Mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat], dibuka untuk penandatanganan pada 18 Oktober 1907 (mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1910), Pasal 23 (H) dari Peraturan Tambahan Konvensi Den Haag IV; lihat pula *[Fourth] Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* [Konvensi Jenewa (Keempat) Yang Berkaitan dengan Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang], dibuka

---

untuk penandatanganan pada tanggal 12 Agustus 1949, UNTS 75, halaman 287 (mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 1950). Pasal 51 (Bagian III Wilayah Pendudukan) dari Konvensi Jenewa IV.

<sup>2</sup> *Konvensi Jenewa IV*, 1949, Pasal 147.

<sup>3</sup> *Konvensi Jenewa IV*, 1949, Pasal 17.

<sup>4</sup> *Konvensi Jenewa IV*, 1949, Pasal 49.

<sup>5</sup> *Konvensi Jenewa IV*, 1949, Pasal 24 dan 50.

<sup>6</sup> *Konvensi Jenewa IV*, 1949, Pasal 50.

<sup>7</sup> *Konvensi Jenewa IV*, 1949, Pasal 50.

<sup>8</sup> *Konvensi Jenewa IV*, 1949, Pasal 50.

<sup>9</sup> *Convention on the Rights of the Child* [Konvensi Hak Anak], dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 20 November 1989, UNTS 1577, halaman 3 (mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990), Pasal 3(1).

<sup>10</sup> *Konvensi Hak Anak 1989*, Pasal 19, 34, dan 36.

<sup>11</sup> *Konvensi Hak Anak 1989*, Pasal 27.

<sup>12</sup> *Konvensi Hak Anak 1989*, Pasal 21.

<sup>13</sup> *Konvensi Hak Anak 1989*, Pasal 11 dan 35.

<sup>14</sup> *Konvensi Hak Anak 1989*, Pasal 20.

<sup>15</sup> *Konvensi Hak Anak 1989*, Pasal 39.

<sup>16</sup> *Konvensi Hak Anak 1989*, Pasal 38(2) dan (3).

<sup>17</sup> *Konvensi Hak Anak 1989*, Pasal 38(3).

<sup>18</sup> *Konvensi Hak Anak 1989*, Pasal 32; lihat juga *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* [Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya], dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 19 Desember 1966, UNTS 993, halaman 3 (berlaku mulai tanggal 3 Januari 1976), Pasal 10(3).

<sup>19</sup> Lihat misalnya CAVR, Profil Komunitas Lalawa, Iliomar, Lautém, 29 Mei 2003; Alawa Kraik, Baguia, Baucau, 6 Oktober 2003.

<sup>20</sup> Belchior Francisco Bento Alves Pereira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.

<sup>21</sup> Wawancara CAVR dengan Bonifacio dos Reis, Hatulia, Ermera, 13 Agustus 2003.

<sup>22</sup> Pernyataan HRVD 05646.

<sup>23</sup> Wawancara CAVR dengan Francisco Soares, Laleia, Manatuto, 26 Juni 2003; wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 5 Mei 2004.

<sup>24</sup> ABRI, "Petunjuk Tehnis tentang Kegiatan Babinsa," *Juknis/06/IV/1982* (Korem 164, Wira Dharma, Seksi Intelijen, Williem da Costa [Kepala Seksi Intelijen]), terjemahkan bahasa Inggris ada dalam Budiardjo dan Liem, *The War Against East Timor*, Zed Books, London, 1984, halaman 226-227.

<sup>25</sup> ABRI, "Tentang Perlawanan Rakyat Terlatih" [Dokumen Rahasia Instruksi Operasi], *No: INSOP/03/II/1982*.

<sup>26</sup> Pernyataan HRVD 09081.

<sup>27</sup> Wawancara CAVR dengan António da Costa, Dili, 4 Januari 2004.

<sup>28</sup> Pernyataan HRVD 08366.

<sup>29</sup> Pernyataan HRVD 03819; 03879.

- 
- <sup>30</sup> Wawancara CAVR dengan Marcos Loina da Costa, Laleia, Manatuto, 24 Juni 2003.
- <sup>31</sup> Wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 5 Mei 2004.
- <sup>32</sup> Wawancara CAVR dengan Alfredo Alves, Dili, 5 Maret 2004.
- <sup>33</sup> Wawancara CAVR dengan Francisco da Silva Guterres, Dili, 4 Juni 2004.
- <sup>34</sup> Wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 5 Mei 2003.
- <sup>35</sup> ABRI, "Tentang Perlawanan Rakyat Terlatih," No: *INSOP/03/II/1982*, halaman 7.
- <sup>36</sup> Geoffrey Robinson, "People's War: Militias in East Timor and Indonesia," *South East Asia Research*, Vol 9, No. 3, 2001, halaman 292; Doug Kammen, Gerry van Klinken, *Masters of Terror*; Eurico Guterres, *Melintas Badai Politik Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, halaman 41-42.
- <sup>37</sup> Wawancara CAVR dengan Pastor Elisio Locateli, Fatumaca, Baucau, 8 April 2003.
- <sup>38</sup> Wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 5 Mei 2004.
- <sup>39</sup> ABRI, "Tentang Perlawan Rakyat Terlatih," No: *INSOP 03/II/1982*, halaman 7.
- <sup>40</sup> ABRI, Prosedur Tetap (Protap) mengenai Intelijen, No. 01/IV/1982 (Komandan A. Sahala Rajagukguk), Dili. Diterjemahkan dalam Budiardjo dan Liem, *The War Against East Timor*, halaman 227.
- <sup>41</sup> ABRI, *Juknis/06/IV/1982*.
- <sup>42</sup> Wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 5 Mei 2003.
- <sup>43</sup> Wawancara CAVR dengan José Pinto, Viqueque, 18 Juli 2003.
- <sup>44</sup> Wawancara CAVR dengan Domingos Maria Bada, Turisca, Same, Manufahi, 14 Oktober 2003.
- <sup>45</sup> Pernyataan HRVD 02207; lihat juga pernyataan HRVD 02146; 02048.
- <sup>46</sup> Wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 5 Mei 2003.
- <sup>47</sup> Wawancara CAVR dengan Oscar Ramos Ximenes, Laleia, Manatuto, 24 Juni 2003.
- <sup>48</sup> Wawancara CAVR dengan Gil Parada Belo Martins, Lacluta, Viqueque, 15 Juli 2003.
- <sup>49</sup> Eurico Guterres, *Melintas Badai Politik Indonesia*, 2002, halaman 41-42.
- <sup>50</sup> Wawancara CAVR dengan Agostinho Soares, Ermera, 13 Agustus, 2003.
- <sup>51</sup> CAVR "Edisi 53: Laporan Khusus mengenai Audiensi Publik di Ataúro, Dili," *Dalan Ba Dame* (Jalan Menuju Perdamaian), Radio Timor-Leste (Dili), 5 Desember 2003.
- <sup>52</sup> ABRI, "Prinops No 2/Kilat-I Kolakops Tim-Tim Lampiran F," halaman 5.
- <sup>53</sup> Wawancara CAVR dengan Domingos Maria Bada, Same, Manufahi, 14 Oktober 2003.
- <sup>54</sup> Wawancara CAVR dengan José Pinto, Viqueque, 18 Juli 2003.
- <sup>55</sup> Wawancara CAVR dengan Domingos Maria Bada, Same, Manufahi, 14 Oktober 2003.
- <sup>56</sup> Belchior Francisco Bento Alves Pereira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
- <sup>57</sup> Wawancara CAVR dengan Marcos Loina da Costa, Cairui, Laleia, Manatuto, 24 Juni 2003 dan wawancara CAVR dengan Agostinho Soares, Ermera, 13 Agustus 2003.
- <sup>58</sup> Wawancara CAVR dengan Marcos Loina da Costa, Laleia, Manatuto, 24 Juni 2003.
- <sup>59</sup> Pernyataan HRVD 03101.
- <sup>60</sup> Wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 5 Mei 2004.
- <sup>61</sup> Wawancara CAVR dengan Francisco da Silva Guterres, Dili, 4 Juni 2004.

- 
- <sup>62</sup> Pernyataan HRVD 04876.
- <sup>63</sup> Pernyataan HRVD 02048.
- <sup>64</sup> Pernyataan HRVD 06054.
- <sup>65</sup> Wawancara CAVR dengan Eduardo Casimiro, Dili, 6 Agustus 2003.
- <sup>66</sup> Alfredo Alves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik , Dili, 29-30 Maret 2004.
- <sup>67</sup> Pernyataan HRVD 04435.
- <sup>68</sup> Pernyataan HRVD 07801.
- <sup>69</sup> Wawancara dengan Domingos Maria Bada, Same, Manufahi, 14 Oktober 2003.
- <sup>70</sup> Sertifikat ini disimpan dalam Arsip CAVR.
- <sup>71</sup> Wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 5 Mei 2004.
- <sup>72</sup> ABRI, *Juknis 06/IV/1982*, dalam Budiardjo dan Liem, halaman 226-227.
- <sup>73</sup> Wawancara CAVR dengan Eduardo Casimiro, Dili, 6 Agustus 2003.
- <sup>74</sup> Wawancara CAVR dengan Osório Florindo, Dili, 31 Mei 2003.
- <sup>75</sup> CAVR, Profil Komunitas Pairara, Moro, Lautém, 28 Maret 2003; Vatuvovo, Liquiça, Liquiça 26 Juni 2003; Vemasse Tasi, Vemasse, Baucau, 28 Maret 2003; Aisirimou, Aileu, Aileu, 27 Maret 2003; Ossu Desima, Ossu, Viqueque, 20 Maret 2003; Tim Peneliti CAVR, *Kronologi Lospalos*; wawancara CAVR dengan Leonel Guterres, Quelicai, Baucau, 8 April 2003 dan 24 April 2003; wawancara CAVR dengan José Pinto, Viqueque, 18 Juli 2003.
- <sup>76</sup> Profil Komunitas Parlamento, Moro, Lautém, 6 Maret 2003; Profil Komunitas Selo Malere, Aileu, Aileu, 8 Mei 2003.
- <sup>77</sup> Wawancara CAVR dengan Francisco da Conceição Guterres, Toculul, Railaco, Ermera, 17 Juni 2003.
- <sup>78</sup> Wawancara CAVR dengan Osório Florindo, Dili, 31 Mei 2003.
- <sup>79</sup> Wawancara CAVR dengan Helio Freitas, Dili, 19 Mei 2003.
- <sup>80</sup> UNICEF, *East Timorese Children Involved in Armed Conflict, Case Studies Report: October 2000-February 2001*, UNICEF East Timor, Dili, halaman 63.
- <sup>81</sup> D. Jimenez, "Timor se convierte en un inmenso campo de refugiados" ["Timor menjadi satu kamp pengungsi yang sangat besar"], *El Mundo* (Spanyol), 10 September 1999, dikutip dalam Coalition to Stop the Use of Child Soldier, *Child Soldiers Global Report 2001* [Laporan Seluruh Dunia Mengenai Tentara Anak], London, Juni 2001.
- <sup>82</sup> UNICEF, halaman 70.
- <sup>83</sup> UNICEF, halaman 70.
- <sup>84</sup> UNICEF, halaman 78.
- <sup>85</sup> Yayasan HAK, *Terror, Violence and Intimidation – ABRI and the Pro-Integration Militia in East Timor: Report on the Human Rights Situation in East Timor for the period January to March 1999*, Dili, April 1999, halaman 3.
- <sup>86</sup> Geoffrey Robinson, *East Timor 1999: Crimes Against Humanity* , Laporan yang dibuat atas permintaan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Juli 2003, halaman 98.
- <sup>87</sup> Yayasan HAK, halaman 3.
- <sup>88</sup> CAVR, Profil Komunitas Lebos, Lolotoe, Bobonaro, 9 September 2003.

- 
- <sup>89</sup> UNICEF, halaman 75-84.
- <sup>90</sup> Rofino Mesak, pernyataan diberikan pada 18 September 2003, Oecusse, Nomor Pernyataan Basisdata PRK CAVR.
- <sup>91</sup> UNICEF, halaman 61.
- <sup>92</sup> Mundus de Jesus, pernyataan diberikan pada 9 Juni 2003, Caikasa, Maubara, Liquiça, Basisdata PRK CAVR Nomor Pernyataan.
- <sup>93</sup> UNICEF, halaman 64-65.
- <sup>94</sup> Pernyataan HRVD 02947.
- <sup>95</sup> UNICEF, halaman 70.
- <sup>96</sup> Pernyataan HRVD 01351.
- <sup>97</sup> United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), *Human Rghts Situation in East Timor*, (Dokumen PBB: UN Doc. E/CN.4/S-4/CRP), UNHCHR, 17 September 1999, halaman 56.
- <sup>98</sup> UNICEF, halaman 10-11.
- <sup>99</sup> UNICEF, halaman 69.
- <sup>100</sup> UNICEF; Pernyataan HRVD 03513; 05859.
- <sup>101</sup> Pernyataan HRVD 03513.
- <sup>102</sup> UNICEF, halaman 62.
- <sup>103</sup> UNICEF, halaman 65.
- <sup>104</sup> Sarah Niner (penyunting), *Resistir é Vencer! (To Resist is to Win): The Autobiography of Xanana Gusmão*, Aurora Books, Richmond, Victoria, 2000, halaman 107; Xanana Gusmão, *Resistir é Vencer!*, dokumen tidak diterbitkan.
- <sup>105</sup> Wawancara CAVR dengan Caetano de Sousa Guterres, Dili, 22 Mei 2004.
- <sup>106</sup> Wawancara CAVR dengan Panglima Falintil, Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak (José Maria de Vasconcelos), Markas Besar F-FDTL, Caicoli, Dili, 14 Juni 2004.
- <sup>107</sup> Wawancara CAVR dengan Ricardo da Costa Ribeiro, Dili, 13 Mei 2004.
- <sup>108</sup> Wawancara CAVR dengan Francisco Amaral, Dili, 5 Juni 2004.
- <sup>109</sup> Wawancara CAVR dengan Ricardo da Costa Ribeiro, Dili, 13 Mei 2004.
- <sup>110</sup> Naldo Gil da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
- <sup>111</sup> Aquilina Imaculada, *Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin*, Submisi kepada CAVR, CD No. 16.
- <sup>112</sup> Mateus da Costa, *Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin*, Submisi kepada CAVR, CD No 5.
- <sup>113</sup> Wawancara CAVR dengan Francisco da Silva Guterres, Dili, 4 Juni 2004.
- <sup>114</sup> Wawancara CAVR dengan Francisco da Silva Guterres, Dili, 4 Juni 2004.
- <sup>115</sup> Wawancara CAVR dengan João Sarmento, Dilli, 5 Juni 2004.
- <sup>116</sup> Gregório Saldanha, *Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin*, Submisi kepada CAVR, CD No. 25.
- <sup>117</sup> Naldo Gil da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
- <sup>118</sup> Aquilina Imaculada, *Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin*, Submisi kepada CAVR, CD No. 16.
- <sup>119</sup> Wawancara CAVR dengan Rosalina José da Costa, Atauro, Dili, 30 November 2003.

- 
- <sup>120</sup> Naldo Gil da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
- <sup>121</sup> Eduardo de Deus Barreto, *Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rei Metin*, Submisi kepada CAVR, CD No. 13.
- <sup>122</sup> Aquilina Imaculada, *Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin*, Submisi kepada CAVR, CD No. 16.
- <sup>123</sup> Constâncio Pinto dan Mathew Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle*, South End Press, 1997, halaman 118-119.
- <sup>124</sup> João da Silva (João Becora), kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, 29-30 Maret 2004.
- <sup>125</sup> A Paz e Possivel em Timor-Leste [Perdamaian Bisa Terjadi di Timor-Leste] (satu organisasi solidaritas Portugis), *Casualties of the November 12, 1991 Massacre at Santa Cruz Cemetery in Dili, East Timor: 271 Killed* [Korban Pembantaian 12 November 1991 di Pekuburan Santa Cruz di Dili, Timor-Leste: 271 Mati Dibunuh], Februari 1992, Dili dan Lisbon, <<http://www.etan.org/timor/KILLED.htm>> pada 30 Maret 2005.
- <sup>126</sup> Wawancara CAVR dengan Horacio de Almeida, Dili, 1 Juni 2004.
- <sup>127</sup> Alexandrino da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
- <sup>128</sup> Xanana Gusmão, pidato pada Simposium tentang Rekonsiliasi, Toleransi, Hak Asasi Manusia dan Pemilihan Umum, Dewan Nasional Perlawanan Timor (CNRT), Dili, 12 Februari 2001, halaman 3, dikutip dalam UNICEF, halaman 8.
- <sup>129</sup> UNICEF, halaman 18.
- <sup>130</sup> Wawancara CAVR dengan Eli Foho Rai Boot (Cornelio Gama, L-7), Laga, Baucau, 9 April 2003.
- <sup>131</sup> Wawancara CAVR dengan Faustino Cardoso Gomes, Dili, tanggal tidak tercatat.
- <sup>132</sup> Wawancara CAVR dengan Manuel Alves Pereira Moreira, Baucau, April 2003.
- <sup>133</sup> Wawancara CAVR dengan Joaquim Simão, Laleia, Manatuto, 24 Juni 2003.
- <sup>134</sup> Pernyataan HRVD 02160.
- <sup>135</sup> Wawancara CAVR dengan Felix do Rosario, Alas, Manufahi, 3 Juni 2003.
- <sup>136</sup> Constâncio Pinto and Matthew Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle*, 1977, halaman 50-54.
- <sup>137</sup> Pernyataan HRVD 07244.
- <sup>138</sup> UNICEF, halaman 27.
- <sup>139</sup> UNICEF, halaman 24.
- <sup>140</sup> UNICEF, halaman 37-38.
- <sup>141</sup> UNICEF, halaman 25.
- <sup>142</sup> Wawancara CAVR dengan Naldo Gil da Costa, Dili, 11 November 2003.
- <sup>143</sup> UNICEF, halaman 46.
- <sup>144</sup> Wawancara CAVR dengan Julio José Exposto Gago, Hatolia, Ermera, 13 Agustus 2003.
- <sup>145</sup> UNICEF, halaman 33.
- <sup>146</sup> Wawancara CAVR dengan Joaquim Simão, Laleia, Manatuto, 24 Juni 2003.
- <sup>147</sup> UNICEF, halaman 38.
- <sup>148</sup> UNICEF, halaman 37.

- 
- <sup>149</sup> Wawancara CAVR dengan Felix do Rosário, Alas, Manufahi, 3 Juni 2003.
- <sup>150</sup> Pernyataan HRVD 01475.
- <sup>151</sup> CAVR, Konflik Antar Partai, *Kumpulan Ringkasan Kasus*, 2003.
- <sup>152</sup> Wawancara CAVR dengan Felix do Rosário, Alas, Manufahi, 3 Juni 2003.
- <sup>153</sup> UNICEF, halaman 39.
- <sup>154</sup> Niner (penyunting), *Resistir é Vencer*, halaman 86.
- <sup>155</sup> Maeni Calado, “Saya Mengenal Clandestina dari Kawan-kawan Pribumi: Profil Annas Nasution,” *Talitakum*, 12 Februari 2002, halaman 25-26.
- <sup>156</sup> Pernyataan HRVD 07671.
- <sup>157</sup> Pernyataan HRVD 05615.
- <sup>158</sup> Pernyataan HRVD 05433.
- <sup>159</sup> Pernyataan HRVD 01469.
- <sup>160</sup> Pernyataan HRVD 07813.
- <sup>161</sup> Pernyataan HRVD 00572.
- <sup>162</sup> Pernyataan HRVD 04093.
- <sup>163</sup> Pernyataan HRVD 02363.
- <sup>164</sup> Pernyataan HRVD 07586.
- <sup>165</sup> Isabel dos Santos Neves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
- <sup>166</sup> Pernyataan HRVD 05679.
- <sup>167</sup> Pernyataan HRVD 02094.
- <sup>168</sup> Wawancara CAVR dengan Adelino Araújo, Hatu Bulico, Ainaro, 29 Mei 2003.
- <sup>169</sup> CAVR, Profil Komunitas Mehara, Tutuala, Lautém, 10 September 2002.
- <sup>170</sup> Pernyataan HRVD 03921.
- <sup>171</sup> Wawancara CAVR dengan Rosalina José da Costa, Ataúro Vila, Dili, 30 November 2003.
- <sup>172</sup> Pernyataan HRVD 07701.
- <sup>173</sup> Pernyataan HRVD 03686.
- <sup>174</sup> Wawancara CAVR dengan Joana Pereira, Dili, 10 Juni 2003; Joana Pereira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, Dili, 28-29 Juli 2003.
- <sup>175</sup> Aida Maria dos Anjos, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
- <sup>176</sup> Wawancara CAVR dengan Adalgisa Ximenes, Dili, 26 November 2003.
- <sup>177</sup> Pernyataan HRVD 04789.
- <sup>178</sup> Pernyataan HRVD 09038.
- <sup>179</sup> Human Rights Watch, *World Report 1990: Indonesia and East Timor*, <<http://www.hrw.org/reports/1990/WR90/ASIA.BOU-05.htm>>.
- <sup>180</sup> Pernyataan HRVD 03212.

- 
- <sup>181</sup> Alexandrino da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
- <sup>182</sup> Sidney Jones (Direktur Eksekutif Asia Watch), kesaksian di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat, 21 Februari 1992, <<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1992/02/21/0002.html>>.
- <sup>183</sup> Pernyataan HRVD 01690.
- <sup>184</sup> Robinson, *East Timor 1999: Crimes Against Humanity*, 2003, halaman 197-198.
- <sup>185</sup> Pernyataan HRVD 06278.
- <sup>186</sup> Pernyataan HRVD 05854.
- <sup>187</sup> Pernyataan HRVD 03212.
- <sup>188</sup> Pernyataan HRVD 04355.
- <sup>189</sup> Pernyataan HRVD 07008.
- <sup>190</sup> Pernyataan HRVD 05062.
- <sup>191</sup> CAVR, Konflik Antar-Partai: Kasus 10, *Kumpulan Ringkasan Kasus*, 2003.
- <sup>192</sup> Pernyataan HRVD 09045; lihat pula Pernyataan HRVD 09081.
- <sup>193</sup> Constantinho Ornai, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, 29-30 Maret 2004.
- <sup>194</sup> Pernyataan HRVD 06546.
- <sup>195</sup> Pernyataan HRVD 02056.
- <sup>196</sup> Pernyataan HRVD 04845.
- <sup>197</sup> Pernyataan HRVD 06541.
- <sup>198</sup> Constantinho Ornai, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
- <sup>199</sup> Wawancara CAVR dengan José de Jesus dos Santos, Dili, 28 Juni 2004.
- <sup>200</sup> Pernyataan HRVD 03501.
- <sup>201</sup> Pernyataan HRVD 05640.
- <sup>202</sup> Pernyataan HRVD 00406.
- <sup>203</sup> Pernyataan HRVD 03828.
- <sup>204</sup> Pernyataan HRVD 03887.
- <sup>205</sup> Pernyataan HRVD 03501.
- <sup>206</sup> Pernyataan HRVD 02101-01.
- <sup>207</sup> Wawancara CAVR dengan Sebastião da Cunha, Sau, Manatuto, 12 Mei 2004.
- <sup>208</sup> Profil Komunitas, Leuru (Lospalos, Lautém), 27 Januari 2004.
- <sup>209</sup> Wawancara CAVR dengan Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004.
- <sup>210</sup> Wawancara CAVR dengan Jerónimo da Costa Amaral, Viqueque, 10 Maret 2004.
- <sup>211</sup> Pernyataan HRVD 08108.
- <sup>212</sup> Peace is Possible in Timor-Leste, 1992, < <http://www.etan.org/timor/KILLED.htm>>, pada 30 Maret 2005.



- 
- <sup>213</sup> Yayasan Hak, *From the road to Dili to the shootings in Baucau* [Dari jalan ke Dili sampai penembakan di Baucau], 1 Juli 1998. [East Timor International Support Centre, ETISC] <<http://www.etan.org/et/1998/july/01road.htm>>, pada 31 Maret 2005.
- <sup>214</sup> Raimundo Sarmento, kesaksian pada Audiensi Subdistrik Laclubar CAVR, Manatuto, 2 Oktober 2003.
- <sup>215</sup> Pernyataan HRVD 03684.
- <sup>216</sup> Pernyataan HRVD 02285; 04060.
- <sup>217</sup> *Deputy General Prosecutor for Serious Crimes v Eurico Guterres et al.*, paragraf 51-58.
- <sup>218</sup> *Prosecutor of the UN Transitional Authority in East Timor v Simão Lopes et al.*
- <sup>219</sup> Robinson, 2003, halaman 228.
- <sup>220</sup> Robinson, 2003, halaman 245-247
- <sup>221</sup> Robinson, 2003, halaman 231.
- <sup>222</sup> Wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 21 September 2004.
- <sup>223</sup> Wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 21 September 2004.
- <sup>224</sup> Wawancara CAVR dengan Maria Santina Tilman Alves, Ermera, 10 Oktober 2003.
- <sup>225</sup> Wawancara CAVR dengan Filomeno Pedro Cabral Fernandes, Dili, 5 Mei 2004.
- <sup>226</sup> Pernyataan HRVD 06639.
- <sup>227</sup> Pernyataan HRVD 04915.
- <sup>228</sup> Pernyataan HRVD 07784; 04915.
- <sup>229</sup> Pernyataan HRVD 05783.
- <sup>230</sup> Pernyataan HRVD 05120.
- <sup>231</sup> Pernyataan HRVD 07840; 06639.
- <sup>232</sup> United Nations, *Contemporary Forms of Slavery: Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like Practices during Armed Conflict*, (E/CN.4/Sub.2/1998/13), Laporan Akhir disampaikan Gay J. McDougal, Pelapor Khusus, New York: United Nations, 1998, halaman 7-8.
- <sup>233</sup> Wawancara CAVR dengan Eufrasia de Jesus Soares, Ermera, Ermera, 22 Desember 2003.
- <sup>234</sup> Pernyataan HRVD 03334.
- <sup>235</sup> Alfredo Alves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, 29-30 Maret 2004.
- <sup>236</sup> Wawancara CAVR dengan DM, Luca, Viqueque, 1 Juni 2003.
- <sup>237</sup> Wawancara CAVR dengan FM, Beobe, Viqueque, 31 Mei 2003.
- <sup>238</sup> Pernyataan HRVD 07209.
- <sup>239</sup> Pernyataan HRVD 01022.
- <sup>240</sup> Pernyataan HRVD 04080.
- <sup>241</sup> Mário Viegas Carrascalão, “Kekerasan terhadap Perempuan dan Keluarga Berencana” yang terjadi di Timor Leste selama pendudukan Indonesia, tahun 1982-1992,” Submisi kepada CAVR, 28 April 2003.
- <sup>242</sup> Pernyataan HRVD 07196.
- <sup>243</sup> Pernyataan HRVD 02321.
- <sup>244</sup> Wawancara CAVR dengan LM, Bibileo, Lalarek Mutin, Viqueque, 24 Maret 2004.

- 
- <sup>245</sup> Pernyataan HRVD 05775.
- <sup>246</sup> CAVR, Perempuan: Kasus 4, *Kumpulan Ringkasan Kasus*, Januari 2004.
- <sup>247</sup> CAVR, Perempuan: Kasus 5, *Kumpulan Ringkasan Kasus*, Januari 2004.
- <sup>248</sup> Pernyataan HRVD 05777.
- <sup>249</sup> Pernyataan HRVD 04198.
- <sup>250</sup> [Nama disembunyikan], *Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin*, Submisi kepada CAVR, CD No 3.
- <sup>251</sup> Pernyataan 04482.
- <sup>252</sup> Fokupers, *Kekerasan Berbasis Gender 1999*, Submisi kepada CAVR, Juli 2004, Pernyataan HRVD No. 99COV004.
- <sup>253</sup> Fokupers, *Kekerasan Berbasis Gender 1999*, Submisi kepada CAVR, Juli 2004, Pernyataan HRVD No. 99COV010.
- <sup>254</sup> Pernyataan HRVD 08980.
- <sup>255</sup> Fokupers, *Kekerasan Berbasis Gender 1999*, Submisi kepada CAVR, Juli 2004, Pernyataan HRVD 99AIL001.
- <sup>256</sup> Fokupers, *Kekerasan Berbasis Gender Based 1999*, Submisi kepada CAVR, Juli 2004, Pernyataan HRVD 99AIN007.
- <sup>257</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Evaluation and Policy Analysis Unit, *Evaluation on UNHCR's repatriation and reintegration programme in East Timor, 1999-2003* [Penilaian mengenai program pemulangan dan reintegrasi UNHCR di Timor-Leste, 1999-2003], 24 Februari 2004, halaman 59.
- <sup>258</sup> Wawancara CAVR dengan Palang Merah Internasional/Cruz Vermelha de Timor-Leste, Dili, 7 April 2004.
- <sup>259</sup> Wawancara CAVR dengan Mário Carrascalão, Dili, 12 September 2003.
- <sup>260</sup> Helene van Klinken, *East Timorese Children in Java: Submission II*, Submisi kepada CAVR, 2002, halaman 4.
- <sup>261</sup> UNHCR, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004; lihat pula Office Of The High Commissioner For Human Rights (OHCHR), *Quarterly Reports of Fields Offices*, Jenewa, 3 Juni 2003.
- <sup>262</sup> Wawancara CAVR dengan Manuel Cárceres, UNHCR, Dili, 28 Maret 2005.
- <sup>263</sup> Wawancara CAVR dengan Valderio de Araújo, tempat tidak tercatat, 22 Oktober 2003.
- <sup>264</sup> Wawancara dengan [nama disembunyikan], Dili, 25 Agustus 2003.
- <sup>265</sup> Petrus Kanisius Alegria, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
- <sup>266</sup> Ibid.
- <sup>267</sup> Alfredo Alves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 28-29 Maret 2004.
- <sup>268</sup> Wawancara CAVR dengan Alexander dos Santos, Ermera, 10 September 2003; wawancara CAVR dengan Manuel Martins, Ponilala (Ermera), 10 September 2003.
- <sup>269</sup> Wawancara CAVR dengan Yuliana, Jakarta, 15 Januari 2004.
- <sup>270</sup> Yuliana, kesaksian pada lokakarya CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 15 Juli 2004.
- <sup>271</sup> Wawancara CAVR dengan Maria Legge Mesquita, Dare, Dili, 14 April 2004.

- 
- <sup>272</sup> Wawancara CAVR dengan QN, Ermera, 13 Agustus 2003 dan 1 April 2004.
- <sup>273</sup> Wawancara CAVR dengan Domingos de Deus Maia, Same, Manufahi 20 April 2004.
- <sup>274</sup> Wawancara CAVR dengan Aidia, Bobonaro, Bobonaro, 11 Mei 2004; lihat juga wawancara CAVR dengan Alexander dos Santos, Ermera, 10 September 2003.
- <sup>275</sup> Helene van Klinken, *Submisi II*, 2002, halaman 4.
- <sup>276</sup> Petrus Kanisius Alegria, kesaksian pada Audiensi Publik CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
- <sup>277</sup> Petrus Kanisius Alegria, kesaksian pada Audiensi Publik CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
- <sup>278</sup> Wawancara CAVR dengan Petrus Kanisius Alegria, Dili, 16 Juni 2003.
- <sup>279</sup> Helene van Klinken, *Children and Conflict*, Submisi kepada CAVR, November 2003, halaman 23.
- <sup>280</sup> Wawancara CAVR dengan Petrus Kanisius Alegria, Dili, 16 Juni 2003.
- <sup>281</sup> Wawancara CAVR dengan Mário Carrascalão, Dili, 12 September 2003.
- <sup>282</sup> Wawancara CAVR dengan Mário Carrascalão, Dili, 12 September 2003.
- <sup>283</sup> Wawancara CAVR dengan Abel dos Santos, Dili, 7 April 2003.
- <sup>284</sup> CAVR, *Kumpulan Ringkasan Kasus*, 2003.
- <sup>285</sup> Helene van Klinken, *East Timor Children in South Sulawesi*, Submisi kepada CAVR, Maret 2002, halaman 2.
- <sup>286</sup> Wawancara CAVR dengan Abidin Arianto, Baucau, 9 April 2003.
- <sup>287</sup> Simon Elegant, "Timor's Lost Boys," *TIME Asia Magazine*, 23 Desember 2002.
- <sup>288</sup> Wawancara dengan Najib Abu Yasser, Radio Voice of Human Rights, Jakarta, April 2002, dalam Helene van Klinken, *Submisi II*, 2002, halaman 1.
- <sup>289</sup> Wawancara CAVR dengan Leonel Guterres, Quelicai, Baucau, 8 April 2003.
- <sup>290</sup> Wawancara CAVR dengan Syamshul Bahri, tempat tidak tercatat, 9 April 2003.
- <sup>291</sup> George Aditjondro, "Yayasan-yayasan Soeharto...", 31 Januari 1998, halaman 134.
- <sup>292</sup> Asia Watch, *Deception and Harassment of East Timorese Workers* [Penipuan dan Pelecehan Pekerja Timor-Leste], 19 Mei 1992, halaman 2.
- <sup>293</sup> Wawancara CAVR dengan João da Costa, Baucau, Baucau, 23 April 2003.
- <sup>294</sup> Wawancara CAVR dengan João da Costa, Baucau, Baucau, 23 April 2003.
- <sup>295</sup> Wawancara CAVR dengan Maria Margarida Babo (Garida), Dili, tanggal tidak tercatat.
- <sup>296</sup> Wawancara CAVR dengan Maria Margarida Babo (Garida), Dili, tanggal tidak tercatat; lihat juga Guilherme dos Reis Fernandes, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
- <sup>297</sup> Wawancara CAVR dengan Pendeta Agostinho de Vasconcelos, Komisaris Nasional CAVR, Dili, 7 Agustus 2003.
- <sup>298</sup> Helene van Klinken, *East Timorese Children in Central Java, Post 1999: Submission III*, Submisi kepada CAVR, Juli 2001, halaman 9.
- <sup>299</sup> *East Timorese Children on Other Islands*, rapat antara UNICEF Indonesia, UNICEF East Timor, UNTAET Social Services, IRC, JRS, dan UNHCR, Dili, 2 November 2000.
- <sup>300</sup> *Ibid.*

- 
- <sup>301</sup> Arist Merdeka Sirait, Komisi Nasional Perlindungan Anak, dalam Helene van Klinken, *Separated Children Post August 1999*, Submisi kepada CAVR, 2002, halaman 1.
- <sup>302</sup> Jesuit Refugee Service, “The Lost of East Timorese Children [sic],” *Terms of Reference, Family Reunification Visit of the Parents to the Children in South Kalimantan*, Atambua (rancangan 22/01/01), halaman 2.
- <sup>303</sup> Natercia M.J.O. Soares (Ketua Umum Yayasan HATI), “Pendidikan Anak Asrama dan Tanggungjawab Orangtua,” *Kompas*, 5 Oktober 2001, <http://www.hati.or.id/kompas140901.html> pada 30 Maret 2005.
- <sup>304</sup> *Ibid.*
- <sup>305</sup> Helene van Klinken, *Separated Children Post-August 1999*, Submisi kepada CAVR, 2002, halaman 3.
- <sup>306</sup> Jesuit Refugee Service, halaman 2.
- <sup>307</sup> Wawancara CAVR dengan Zacarias Pereira, Tibar, Liquiça, 5 Mei 2004.
- <sup>308</sup> Dateline, “*East Timor’s Stolen Children*,” SBS (Australia), 4 September 2002.
- <sup>309</sup> Wawancara CAVR dengan Mário Carrascalão, Dili, 12 September 2003.
- <sup>310</sup> Wawancara CAVR dengan Mário Carrascalão, Dili, 12 September 2003.
- <sup>311</sup> Wawancara CAVR dengan [nama disembunyikan], Bandung, Jawa Barat, 28 dan 31 Januari 2004.
- <sup>312</sup> Wawancara CAVR dengan Maria Floriana da Conceição, Bandung, Jawa Barat, 31 Januari 2004.
- <sup>313</sup> Wawancara CAVR dengan Petrus Kanisius Alegria, Dili, 16 Juni 2003.
- <sup>314</sup> Wawancara CAVR dengan Domingos de Deus Maia, Dili, 20 April 2004.
- <sup>315</sup> Wawancara CAVR dengan Sudirman, Dili, 25 April 2003.
- <sup>316</sup> Wawancara CAVR dengan Alfredo Alves, Dili, 5 Maret 2004.